



PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jl. Sulawesi No.01 Telp. (0551) 21072-21859 Fax : (0551) 21859 T A R A K A N
Email : bawas@tarakankota.go.id Website <http://inspektorat.tarakankota.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Tarakan Untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah ini.



Tarakan, 26 Maret 2024

INSPEKTUR,

ABD. AZIS HASAN, A.P,M.H
Pembina Utama Muda
NIP.19750212 199501 1 001



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdullillahirrobbil`alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Tarakan Tahun 2023 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 memuat capaian kinerja yang terdiri dari profil daerah, perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 yang memuat data dan informasi yang akan digunakan oleh kepala daerah sebagai bahan untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan sebagai alat deteksi dini

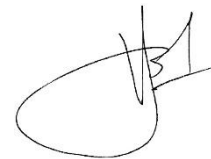
permasalahan dalam melaksanakan kebijakan. Keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi bahan yang sangat berharga dalam perumusan kebijakan Pemerintah dan pembangunan daerah tahun berikutnya.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, sehingga terwujudnya *“Kota Tarakan Sebagai Kota Maju Dan Sejahtera Melalui Smart City”*.

Billahi taufik wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tarakan, Maret 2024

Wali Kota Tarakan



dr. H. Khairul, M.Kes

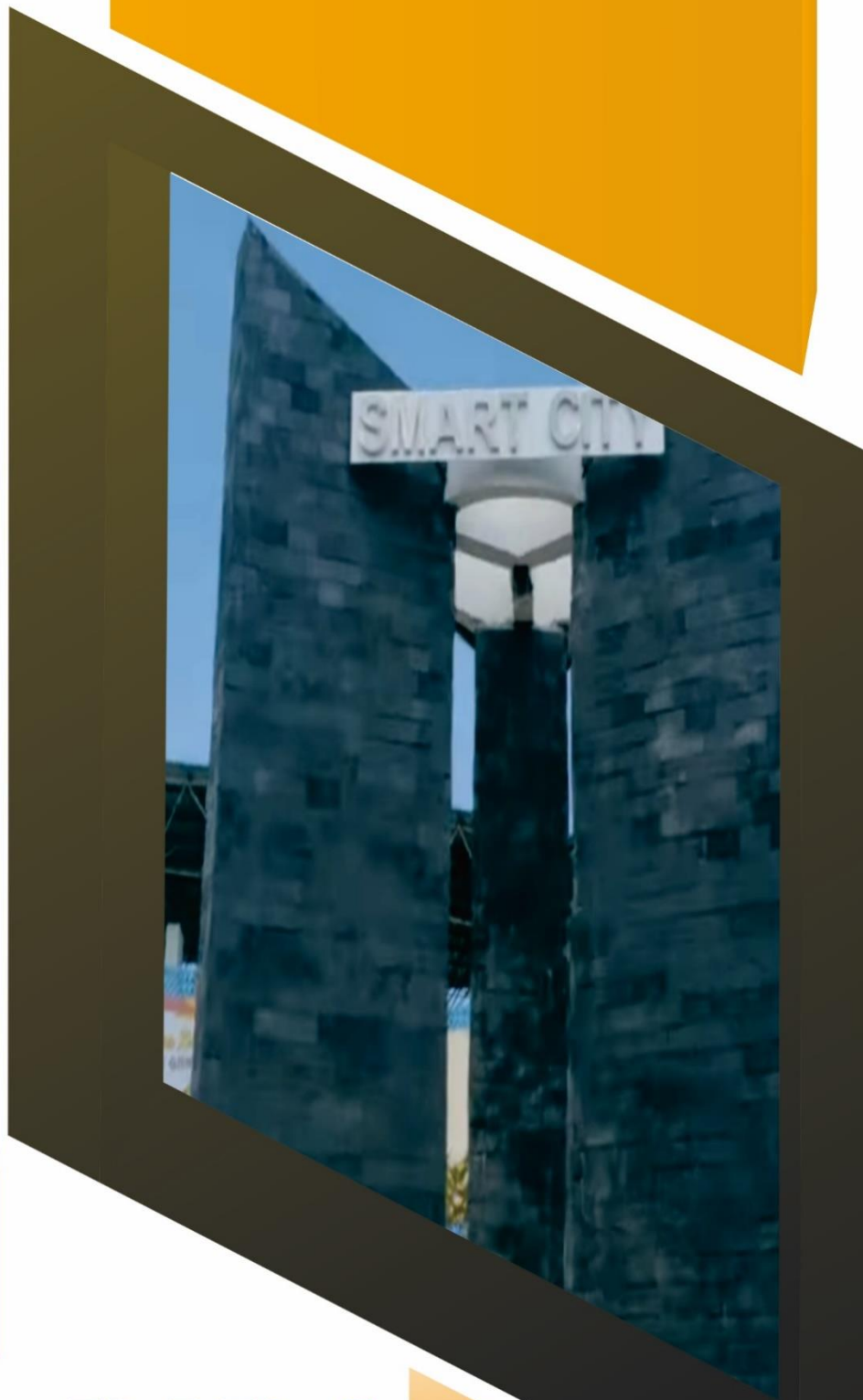
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum	I-1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I-15
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-128
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
2.1 Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-2
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	II-3
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	II-43
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-57
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-60
2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	II-61
2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Perjanjian Kinerja	II-67
2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	II-71
2.3.4 Pengukuran capaian Kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan dokumen RPJMD 2019-2024	II-188
2.3.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.	II-192
2.3.6 Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.	II-196
BAB III CAPAIAN KINERJA URUSAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota	III-2
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi	III-5
3.3 Permasalahan Dan Kendala	III-5
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	III-5
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4.1 Urusan Pendidikan	IV-1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-2

4.1.3	Realisasi	IV-2
4.1.4	Alokasi Anggaran	IV-11
4.1.5	Dukungan Personil	IV-15
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	IV-16
4.2	Urusan Kesehatan	IV-18
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-18
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-19
4.2.3	Realisasi	IV-19
4.2.4	Alokasi Anggaran	IV-26
4.2.5	Dukungan Personil	IV-29
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	IV-30
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	IV-31
4.3.1	Pelayanan Dasar	IV-32
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-32
4.3.3	Realisasi	IV-33
4.3.4	Alokasi Anggaran	IV-35
4.3.5	Dukungan Personil	IV-36
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	IV-37
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	IV-38
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-38
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-39
4.4.3	Realisasi	IV-40
4.4.4	Alokasi Anggaran	IV-41
4.4.5	Dukungan Personil	IV-41
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	IV-42
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-43
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-43
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-44
4.5.3	Realisasi	IV-45
4.5.4	Alokasi Anggaran	IV-49
4.5.5	Dukungan Personil	IV-53
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	IV-53
4.6	Urusan Sosial	IV-54
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-54
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-56
4.6.3	Realisasi	IV-56



4.6.4	Alokasi Anggaran	IV-57
4.6.5	Dukungan Personil	IV-58
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	IV-59
4.7	Program Dan Kegiatan	IV-59
BAB V PENUTUP		V-1



BAB 1

PENDAHULUAN



I. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan dijelaskan secara umum bahwa Kota Tarakan terletak di Pulau Tarakan dan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Mengingat perkembangan Kota Tarakan yang cukup pesat, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 Kota Tarakan ditetapkan menjadi Kota Administratif yang meliputi 2 (dua) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Tarakan Barat dan Kecamatan Tarakan Timur, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai sarana dalam pembinaan wilayah dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Administratif Tarakan saat ini tumbuh dan berkembang sebagai kota perdagangan dan industri bagi Kalimantan Timur bagian utara serta menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu Kota Administratif Tarakan secara geografis mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Perkembangan Kota Administratif Tarakan tersebut, ternyata mempunyai dampak positif dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat di berbagai bidang. Disamping sektor perdagangan dan

industri, Pemerintah Kota Administratif Tarakan telah berhasil menggali dan mengolah potensi wilayah lainnya di bidang transportasi, jasa, pertanian dan perikanan.

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II baru sejalan dengan kebutuhan pembangunan pemerintahan di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Selanjutnya, pengaturan pusat pemerintahan, perdagangan, industri, dan lain-lain ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

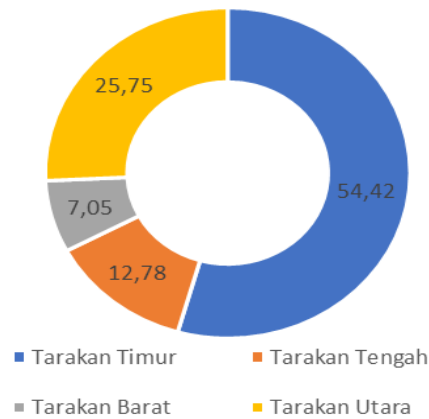
Dalam rangka pembinaan wilayah mengingat luasnya wilayah dan perkembangan penduduk yang cukup pesat, maka kecamatan-kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ditata dan ditetapkan dari 2 (dua) kecamatan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Timur.

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan, Kota Administratif Tarakan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dihapus. Dengan demikian, Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan wilayahnya berkurang seluas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan. Peresmiannya dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri pada 15 Desember 1997, yang sekaligus menjadi hari jadi Kota Tarakan. Lalu, dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, status Tarakan ditingkatkan menjadi Kota sampai saat ini.

B. Data Geografis Wilayah Kota Tarakan

Kota Tarakan secara astronomis terletak pada 3°14'30" Lintang Utara - 3°26'37" Lintang Utara dan 117°30'50" Bujur Timur - 117°40'12" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Tarakan memiliki batas-batas:

- Utara - Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung;
- Selatan - Kabupaten Bulungan;
- Barat - Kabupaten Bulungan;
- Timur - Laut Sulawesi.



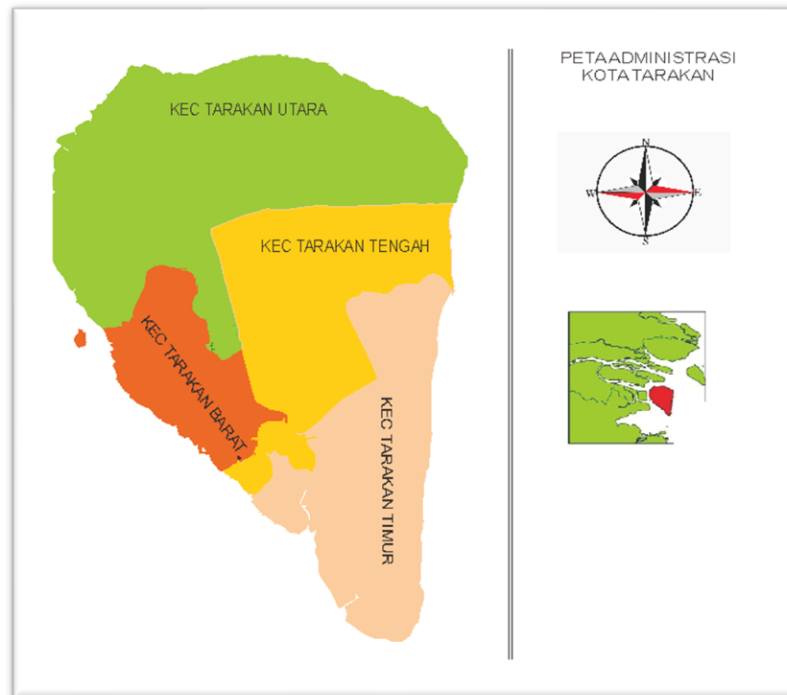
Kota Tarakan merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 12 - 28 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kota Tarakan adalah 657,33 km² dengan daratan seluas 250,80 km² dan lautan seluas 406,53 km².

Akhir tahun 2023, wilayah administrasi Kota Tarakan terdiri dari 4 Kecamatan, dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Tarakan Timur (58,01 km²), Tarakan Tengah (55,54 km²), Tarakan Barat (27,89 km²), dan Tarakan Utara (109,36 km²). Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kota Tarakan di masing-masing kecamatan, yaitu: Tarakan Timur (12,00 m), Tarakan Tengah (15,00 m), Tarakan Barat (28,00 m), dan Tarakan Utara (17,00 m).

Ibukota Masing-masing kecamatan di Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Tarakan Timur: Kampung Empat.
2. Tarakan Tengah: Pamusian.
3. Tarakan Barat: Karang Balik.

4. Tarakan Utara: Juata Laut.



Gambar I. 1
Peta Adminitratif Kota Tarakan

Kota Tarakan berada di sebuah pulau kecil yang memiliki posisi strategis dimana selama ini berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah utara Kalimantan dan pintu gerbang utama bagi Provinsi Kalimantan Utara sekaligus menjadi pusat transit perdagangan antara Indonesia-Malaysia-Filipina. Selain itu, karena letaknya yang strategis ini pula, Kota Tarakan menjadi salah satu bagian dari Kota Segitiga Pertumbuhan yang selama ini dirintis dalam konteks BIMP-EAGA bersama dengan Tawau (Malaysia) dan Tawitawi. Segitiga pertumbuhan tersebut diharapkan menjadi *kutub* pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekitar khususnya Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung.

C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Penduduk Kota Tarakan tahun 2023 sebanyak 249.960 jiwa yang terdiri atas 129.365 jiwa penduduk laki-laki dan 120.595 jiwa penduduk perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107% (artinya, tiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki). Selanjutnya data penduduk Kota Tarakan per kecamatan di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I. 1
Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelurahan	L	P	Jumlah Keseluruhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tarakan Barat	Karang Anyar	16.154	15.294	31.448
		Karang Rejo	4.157	3.826	7.983
		Karang Anyar Pantai	11.515	10.566	22.081
		Karang Balik	4.399	4.201	8.600
		Karang Harapan	6.779	6.603	13.382
		JUMLAH	43.004	40.490	83.494
2	Tarakan Tengah	Kampung I Skip	6.894	6.340	13.234
		Pamusian	7.638	7.426	15.064
		Sebengkong	8.576	8.075	16.651
		Selumit	3.497	3.301	6.798
		Selumit Pantai	9.733	8.668	18.401
		JUMLAH	36.338	33.810	70.148
3	Tarakan Timur	Lingkass Ujung	6.385	5.851	12.236
		Gunung Lingkas	4.635	4.483	9.118
		Kampung Empat	2.752	2.657	5.409
		Kampung Enam	3.742	3.565	7.307
		Mamburungan	5.900	5.411	11.311
		Pantai Amal	5.901	5.348	11.249
		Mamburungan Timur	2.273	2.079	4.352
		JUMLAH	31.588	29.394	60.982
4	Tarakan Utara	Juata Laut	8.436	7.782	16.218
		Juata Permai	6.054	5.578	11.632
		Juata Kerikil	3.945	3.541	7.486
		JUMLAH	18.435	16.901	35.336
TOTAL KESELURUHAN			129.365	120.595	249.960

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, 2024

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Klp Umur	Tarakan Barat		Tarakan Tengah		Tarakan Timur		Tarakan Utara		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0-4	3582	3.393	2950	2.788	2.997	2.772	1589	1.456	21.527
5-9	4020	3.867	3343	3.144	3.173	2.962	1761	1.634	23.904
10-14	4267	4.032	3524	3.293	3.278	2.968	1848	1.825	25.035
15-19	3401	3.265	2844	2.524	2.542	2.362	1605	1.456	19.999
20-24	3950	3.548	3293	3.054	2.858	2.848	1796	1.608	22.955
25-29	3566	3.479	3037	2.753	2.545	2.506	1540	1.438	20.864
30-34	3300	3.217	2855	2.593	2.480	2.308	1429	1.243	19.425
35-39	3382	3.219	2733	2.593	2.374	2.296	1312	1.374	19.283
40-44	3564	3.366	2914	2.726	2.538	2.331	1465	1.482	20.386
45-49	2870	2.535	2399	2.273	1.988	1.833	1308	1.158	16.364
50-54	2411	2.171	2150	1.888	1.817	1.549	1120	964	14.070
55-59	1678	1.600	1567	1.425	1.156	982	737	566	9.711
60-64	1256	1.192	1112	1.130	771	722	442	323	6.948
65-69	873	772	789	755	531	443	268	189	4.620
70-74	523	446	478	447	306	272	122	86	2.680
75+	361	388	350	424	234	240	93	99	2.189
Total	43.004	40.490	36.338	33.810	31.588	29.394	18.435	16.901	249.960

D. Jumlah Kecamatan Dan Desa/ Kelurahan

Kota Tarakan terdiri dari 2 (dua) pulau yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau dengan luas wilayah daratan seluas $\pm 250,80 \text{ Km}^2$. Secara administratif pemerintahan, wilayah Kota Tarakan terbagi ke dalam 4 Kecamatan yaitu Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara, serta 20 Kelurahan. Secara administratif, Kota Tarakan terdiri dari 4 kecamatan dan 20 kelurahan dengan 20 Rukun Warga (RW) dan 447 Rukun Tetangga (RT) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel I. 3
Pembagian Wilayah Administrasi
Kota Tarakan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Daratan (Km ²)	Luas Laut (Km ²)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tarakan Timur	1. Kelurahan Pantai Amal 2. Mamburungan 3. Mamburungan Timur 4. Kampung Enam 5. Kampung Empat 6. Lingkas 7. Gunung Lingkas	58,01	299,69	54,42
2	Tarakan Tengah	1. Sebengkok 2. Pamusian 3. Kampung Satu 4. Selumit 5. Selumit Pantai	55,54	28,46	12,78
3	Tarakan Barat	1. Karang Anyar 2. Karang Anyar Pantai 3. Karang Harapan 4. Karang Rejo 5. Karang Balik	27,89	18,46	7,05
4	Tarakan Utara	1. Juata Kerikil 2. Juata Permai 3. Juata Laut	109,36	59,92	25,75
Total		20	250,80	406,53	100

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2024

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Tarakan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka Susunan Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah kota Tarakan sebanyak 2818 orang. Jumlah Perangkat daerah dan pegawai pemerintah Kota Tarakan dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel I. 4
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Dinas/Instansi Pemerintahan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Dinas / Instansi Pemerintahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekretariat Daerah	61	53	114
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	24	16	40
3	Inspektorat	15	17	32
4	Dinas Pendidikan (termasuk PPPK 58 org)	343	665	1008
5	Dinas Kesehatan (termasuk PPPK 6 org)	52	212	264
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54	21	75
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	28	14	42

No	Dinas / Instansi Pemerintahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	11	13	24
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	15	25
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	27	19	46
11	Dinas Perikanan	17	14	31
12	Dinas Lingkungan Hidup	52	18	70
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	18	29
14	Dinas Perhubungan	47	5	52
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	20	9	29
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23	18	41
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	18	32
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	26	26	52
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	26	12	38
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	28	15	43
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	17	18	35
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	51	34	85
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22	24	46
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	8	22
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19	6	25
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	106	5	111
27	Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	27	51	78
28	Kecamatan Tarakan Timur	57	39	96
29	Kecamatan Tarakan Barat	31	45	76
30	Kecamatan Tarakan Tengah	39	31	70
31	Kecamatan Tarakan Utara	26	25	51
Total		1298	1484	2782

Sumber: Bagian Organisasi dan BKPSDM, 2024

F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pada tahun anggaran 2023 target pendapatan daerah sebesar Rp 1.192.056.140.729,00,- dan terealisasi sebesar Rp 1.161.985.502.483,67,- atau 97,48 persen. Sementara belana daerah target di tahun 2023 sebesar Rp 1.335.543.237.827,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.265.548.012.658,37 atau 94,76 persen

Perincian lebih lanjut terhadap anggaran dan realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel I. 5
Realisasi Anggaran Pendapatan
Kota Tarakan Tahun 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Capaian (%)	REALISASI 2022	Naik /Turun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.1.1	PENDAPATAN					
5.1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	90.911.161.903,00	86.655.176.586,72	95,32	74.225.687.913,98	16,75
5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	21.476.389.000,00	12.900.274.298,00	60,07	11.782.248.604,00	9,49
5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.203.957.872,00	10.314.517.461,15	63,65	11.674.895.911,44	-11,65
5.1.1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	58.364.727.301,00	65.123.122.830,76	111,58	45.171.168.592,41	44,17
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	186.956.236.076,00	174.993.091.176,63	93,60	142.854.001.021,83	22,50
5.1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER					
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
5.1.1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	113.268.524.011,00	113.268.524.011,00	100,00	109.040.101.813,00	3,88
5.1.1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	159.618.591.753,00	160.311.500.604,00	100,43	168.688.513.437,00	-4,97
5.1.1.2.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	438.920.698.000,00	438.566.142.648,00	99,92	420.765.642.777,00	4,23
5.1.1.2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	122.470.612.000,00	114.682.789.310,04	93,64	130.914.246.431,00	-12,40
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	834.278.425.764,00	826.828.956.573,04	99,11	829.408.504.458,00	-0,31
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
5.1.1.2.5	Dana Insentif Daerah	17.658.565.000,00	23.343.638.000,00	132,19	15.199.717.000,00	53,58



KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Capaian (%)	REALISASI 2022	Naik /Turun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	17.658.565.000,00	23.343.638.000,00	132,19	15.199.717.000,00	53,58
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
5.1.1.2.6	Pendapatan Bagi Hasil	94.654.187.135,00	78.987.935.132,00	83,45	60.880.607.390,00	29,74
5.1.1.2.7	Bantuan Keuangan	55.053.926.754,00	54.419.478.140,00	98,85	44.370.500.164,00	22,65
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	149.708.113.889,00	133.407.413.272,00	89,11	105.251.107.554,00	26,75
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.001.645.104.653,00	983.580.007.845,04	98,20	949.859.329.012,00	3,55
5.1.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.513.000.000,00	-14,60
5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	454.800.000,00	412.403.462,00	90,68	196.970.180,00	109,37
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.454.800.000,00	3.412.403.462,00	98,77	3.709.970.180,00	-8,02
	JUMLAH PENDAPATAN	1.192.056.140.729,00	1.161.985.502.483,67	97,48	1.096.423.300.213,83	5,98
5.1.2	BELANJA					
5.1.2.1	BELANJA OPERASI					
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	425.930.243.788,00	398.818.594.574,00	93,63	393.493.532.742,00	1,35
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	351.018.975.992,00	325.512.726.206,81	92,73	290.512.269.697,73	12,05
5.1.2.1.3	Belanja Hibah	136.532.661.472,00	141.685.138.625,04	103,77	103.350.896.815,00	37,09
5.1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2.965.990.000,00	2.724.179.010,00	91,85	2.698.683.282,00	0,94



KODE	URAIAN		ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Capaian (%)	REALISASI 2022	Naik /Turun (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah Belanja Operasi	916.447.871.252,00	868.740.638.415,85	94,79	790.055.382.536,73	9,96
5.1.2.2		BELANJA MODAL					
5.1.2.2.1		Belanja Modal Tanah	10.851.455.982,00	6.911.585.555,00	63,69	17.696.124.410,00	-60,94
5.1.2.2.2		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.342.377.016,00	17.801.793.264,00	87,51	21.710.281.361,00	-18,00
5.1.2.2.3		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	227.346.326.066,00	226.664.480.433,52	99,70	130.819.677.660,94	73,26
5.1.2.2.4		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	143.311.290.651,00	139.194.648.564,00	97,13	127.848.419.209,56	8,87
5.1.2.2.5		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.048.916.860,00	4.281.600.495,00	38,75	6.153.261.974,00	-30,42
5.1.2.2.6		Belanja Modal Aset Lainnya	1.195.000.000,00	1.185.910.000,00	99,24	232.554.000,00	409,95
		Jumlah Belanja Modal	414.095.366.575,00	396.040.018.311,52	95,64	304.460.318.615,50	30,08
5.1.2.3		BELANJA TIDAK TERDUGA					
		Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	767.355.931,00	15,35	4.119.634.005,00	-81,37
		Jumlah Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	767.355.931,00	15,35	4.119.634.005,00	-81,37
		JUMLAH BELANJA	1.335.543.237.827,00	1.265.548.012.658,37	94,76	1.098.635.335.157,23	15,19
5.1.2.4		TRANSFER					
		Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Jumlah Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	



KODE	URAIAN		ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Capaian (%)	REALISASI 2022	Naik /Turun (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.335.543.237.827,00	1.265.548.012.658,37	94,76	1.098.635.335.157,23	15,19
		SURPLUS / DEFISIT	(143.487.097.098,00)	(103.562.510.174,70)	72,18	(2.212.034.943,40)	4581,78
5.1.3	PEMBIAYAAN						
5.1.3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH						
		Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	146.487.097.098,00	146.487.097.097,94	100,00	154.698.876.041,34	-5,31
		Koreksi SILPA	0,00	(3.150.288,00)	0,00	0,00	
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	146.487.097.098,00	146.483.946.809,94	100,00	154.698.876.041,34	-5,31
5.1.3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH						
		Penyertaan Modal Pemerintah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	5.999.744.000,00	-50,00
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	5.999.744.000,00	-50,00
	PEMBIAYAAN NETTO		143.487.097.098,00	143.483.946.809,94	100,00	148.699.132.041,34	-3,51
5.1.4	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	39.921.436.635,24	0,00	146.487.097.097,94	-72,75

Sumber: BPKPAD Kota Tarakan tahun 2024

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

1. Urusan Pendidikan

- a) Kuantitas SDM Kota Tarakan merupakan potensi yang besar dalam pembangunan, walaupun laju pertumbuhan penduduk rata-rata cukup tinggi, namun demikian kuantitas SDM yang besar ini tidak dibarengi dengan kualitas SDM, sehingga dapat menjadikan beban dan masalah dalam pembangunan. Kota Tarakan hampir tidak memiliki sumber daya alam, sehingga sumber daya manusialah yang merupakan modal bagi kemajuan Kota Tarakan, namun demikian kualitas sumber daya manusia Kota Tarakan sebagian besar belum mampu untuk bersaing secara global dikarenakan kualitas SDM ini rata-rata hanya sampai dengan kelas 1 SMA.
- b) Belum optimalnya aksesibilitas dan kesempatan memperoleh pendidikan oleh sebagian masyarakat karena faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja. Kualitas lulusan pendidikan belum merata dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (dunia kerja). Hal ini dikarenakan fasilitas, sumber dan media pembelajaran khususnya untuk jenjang pendidikan menengah belum tersedia secara merata, juga ketersediaan pendidik yang mengajar pada bidang studi tertentu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan. Lulusan pendidikan menengah cenderung memilih bekerja dari pada menciptakan pekerjaan. Selain itu, pendidikan non formal yang berfungsi sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan

hidup dan kompetensi kejuruan belum optimal diakses secara luas oleh masyarakat.

- c. Rendahnya Daya Saing Sumber Daya manusia (SDM) Kota Tarakan berhubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kota Tarakan berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan terkait kualitas SDM yang akan berdampak pada peningkatan daya saing masyarakat Kota Tarakan

2. Urusan Kesehatan

- a) Sementara itu, untuk permasalahan kesehatan, kondisi di Kota Tarakan belum berada dalam kondisi yang ideal, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas derajat dan pelayanan kesehatan di masyarakat, walaupun umur harapan hidup di Kota Tarakan sudah cukup baik dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih terdapat Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 sebesar 63 orang per 100.000 kelahiran hidup, yang menunjukkan masih adanya kasus kematian pada ibu melahirkan.
- b) Kualitas pelayanan yang belum merata juga mejadi persoalan yang akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat yang perlu terus ditingkatkan. Melihat hal-hal tersebut diatas maka pelayanan perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang terkait pendidikan dan kesehatan menjadi penting mengingat kerentanan sosial juga dapat muncul sebagai akibat dari minimnya perhatian terhadap kedua hal tersebut.
- c) Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi rendahnya daya saing SDM Kota Tarakan adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan

mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Perkembangan Angka harapan hidup di Kota Tarakan walaupun nilainya sudah baik dan diatas nilai Provinsi Kalimantan Utara. Permasalahan turunan yang juga dapat mempengaruhi rendahnya daya saing SDM Kota Tarakan adalah pendapatan per kapita.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Belum terpenuhi dan meratanya infrastruktur yang berkualitas merupakan masalah pokok yang dihadapi pada aspek infrastruktur.
- a) Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Kota Tarakan mengalami penurunan dari tahun ke tahun
- b) Penyediaan fasilitas pengurangan sampah kota masih rendah.
- c) Ketersediaan air bersih masih kurang.
- d) Belum optimalnya pengendalian tata ruang, hal ini terjadi karena perubahan pola dan struktur tata ruang pada dokumen Revisi RTRW yang tersedia serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a) Belum semua rumah tangga terlayani air minum.
- b) Penataan pemukiman belum optimal. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertata dan tersentuh program penataan lingkungan.
- c) Masih terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), besarnya biaya rumah layak huni sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat.
- d) Masih kurangnya Taman Bermain Ramah Anak di Kota Tarakan

5. Urusan Pelayanan Kebencanaan

- a) Belum optimalnya pelayanan kebencanaan merupakan masalah yang dihadapi pada pelayanan kebencanaan. Kebencanaan ini sangat perlu diperhatikan, karena Kota Tarakan merupakan pulau yang tentunya termasuk kategori rawan bencana yang tentunya disebabkan oleh berbagai situasi dan keadaan, baik itu faktor alam maupun faktor non alam. Kurangnya SDM, sarana prasarana, informasi kebencanaan, koordinasi dan kapasitas kelembagaan lintas sektoral.
- b) Masih adanya lahan kritis, sehingga sering terjadi tanah longsor.
- c) Masih rendahnya jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani sesuai waktu tanggap (response time rate), beberapa kendala yang dihadapi oleh Satgas PMK Kota Tarakan untuk waktu tanggap adalah kondisi jalan menuju lokasi kejadian kebakaran, kemacetan, listrik yang belum padam dan SDM.

6. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

- a) Belum maksimalnya pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban kota merupakan masalah pokok yang terjadi di Kota Tarakan.
- b) Permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Tarakan antara lain Belum optimalnya penegakan Perda, belum memadainya sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan, masih banyaknya sengketa lahan antar warga, perselisihan hubungan industrial, Keagamaan dan demonstrasi, dan kurang optimalnya penanganan bencana daerah, yang diakibatkan

kurangnya SDM, sarana prasarana, informasi kebencanaan, koordinasi dan kapasitas kelembagaan lintas sektoral.

7. Urusan Sosial

- a) Belum optimalnya Penanganan Pelayanan
- b) Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat Kota Tarakan. Bahwa masalah pokok pada urusan sosial adalah masih rendahnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial.

8. Urusan Tenaga Kerja

- a) Belum optimalnya penempatan pencari kerja yang mendaftar.
- b) Masih rendahnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.
- c) Masih rendahnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
- d) Masih kurangnya media informasi ketenagakerjaan.
- e) Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan.
- f) Belum optimalnya link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha.

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan.
- b) Masih rendahnya proporsi perempuan yang duduk di DPRD Kota Tarakan.
- c) Belum optimalnya pencegahan dan penanganan KDRT.
- d) Belum optimalnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender.

10. Urusan Pangan

- a) Ketersediaan pangan pertumbuhannya menurun.
- b) Belum optimalnya implementasi keragaman pangan dan gizi.
- c) Belum optimalnya pengelolaan distribusi pangan.
- d) Luas lahan pertanian yang terbatas dan cenderung semakin berkurang, sangat berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah penduduk sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian.

11. Urusan Pertanahan

- a) Masih banyaknya tanah masyarakat yang belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah/disertifikatkan dan masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat.
- b) Masih adanya konflik/sengketa kepemilikan lahan.
- c) Pengawasan, pemanfaatan dan penatagunaan tanah/lahan pembangunan milik pemerintah belum optimal.

12. Urusan Lingkungan Hidup

- a) Belum tersusunnya Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.
- c) Kualitas lingkungan hidup rendah, karena masih adanya sungai yang tercemar yaitu sungai karang anyar dan sungai Sebengkok.
- d) Masih lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
- e) Masih terbatasnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

13. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

- a) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan, hal ini ditandai dengan masih rendahnya penduduk dengan kepemilikan

Akta Pencatatan Sipil

- b) Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan sebagai akibat dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk.
- c) Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan kependudukan.

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

- a) Masih banyak masyarakat yang belum diberdayakan baik secara kapasitas, ekonomi dan sosial.
- b) Kurangnya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- c) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan secara langsung.
- d) Belum optimalnya pembayaran Insentif RT/RW, kader PKK, posyandu, Guru mengaji/Sekolah minggu, Dasa Wisma, dan kader-kader lainnya.

15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Masih tingginya Pasangan Usia subur yang belum menggunakan alat kontrasepsi.
- b) Jumlah kelahiran yang masih tinggi.

16. Urusan Perhubungan

- a) Prasarana dan sarana transportasi darat yang kurang maksimal, faktor penyebab masalahnya adalah (a) Kondisi dan Jumlah fasilitas dan Perlengkapan jalan yang masih kurang memadai; (b) Masih terjadi kerusakan fasilitas perlengkapan jalan

(rambu, marka, guardrill, dan lain-lain); (c) Kurang optimalnya sarana perhubungan, perlu dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan; (d) Sarana Uji/Perlengkapan yang kurang; (e) pelayanan PKB belum optimal; (e) Pelayanan terminal belum optimal.

- b) Menurunnya kapasitas jalan, faktor penyebab masalahnya adalah : (a) Banyaknya kepemilikan kendaraan masyarakat, kepatuhan masyarakat, rambu jalan, V/C Ratio: Volume kendaraan per kapasitas Jalan terutama derajat kejenuhan di 25 ruas jalan; (b) Ketersediaan area parkir yang belum memadai.
- c) Belum Maksimalnya pelayanan transportasi umum.
- d) Masih banyak sarana angkutan umum yang tidak laik jalan.
- e) SDM awak angkutan tidak profesional, terutama kelengkapan SIM.
- f) Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang.
- g) Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a) Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi belum memadai.
- b) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi.
- c) Belum terintegrasinya sistem informasi instansi pemerintah (e-government).
- d) Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

18. Urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

- a) Masih rendahnya manajemen pengelolaan koperasi dan UKM,
- b) Masih terdapat koperasi yang tidak aktif. Koperasi yang aktif Tahun 2020 sebesar 60,15%, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021 menjadi 17,50 %
- c) Masih rendahnya peluang UMKM untuk meningkatkan skala usaha melalui peningkatan asset dan omzet.
- d) Belum optimalnya pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif, Usaha mikro dan kecil.

19. Urusan Penanaman Modal

- a) Iklim investasi masih kurang kondusif.
- b) Belum optimalnya pemetaan potensi dan peluang investasi.
- c) Kurangnya promosi potensi Kota Tarakan kepada calon investor.

20. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a) Belum optimalnya pembinaan atlet olahraga prestasi.
- b) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.

21. Urusan Statistik

- a) Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
- b) Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.
- c) Belum tersedianya database yang berisi data dan informasi yang valid dan up to date.

22. Urusan Kebudayaan

- a) Masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya.

- b) Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya tradisional.

23. Urusan Perpustakaan

- a) Minat baca masyarakat masih kurang.
- b) Kurangnya kualitas layanan perpustakaan, Jumlah pengunjung perpustakaan tidak sampai 50% dari jumlah penduduk.
- c) Terbatasnya jumlah dan jenis koleksi perpustakaan, koleksi buku yang tersedia 44.241 eksemplar.

24. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a) Belum optimalnya produksi perikanan budidaya, jumlah produksi ikan mengalami fluktuasi.
- b) Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman belum optimal.
- c) Belum optimalnya pembinaan kelompok nelayan, baik itu kelompok nelayan tangkap, kelompok pembudidaya, maupun kelompok pengolah ikan.

25. Urusan Pariwisata

- a) Kurangnya dukungan infrastruktur (akses, transportasi, petunjuk mencapai lokasi) yang terintegrasi di lokasi-lokasi wisata.
- b) Kurang terintegrasinya promosi yang dilakukan antar provinsi dan kabupaten yang didukung gambaran berbagai fasilitas yang tersedia dan akses menuju lokasi wisata.
- c) Promosi destinasi dan event yang masih bersifat sektoral.
- d) Pengelola destinasi wisata kurang profesional.
- e) Belum optimalnya pengembangan destinasi dan atraksi wisata.
- f) Belum optimalnya pemasaran pariwisata.
- g) Belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang

berbasis ekonomi kreatif.

26. Urusan Pertanian

- a) Cenderung tidak stabilnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Kondisi 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menurun dari tahun ke tahun sejak tahun 2013- 2017,
- b) Pada umumnya produksi tanaman pangan di Kota Tarakan selama tahun 2015-2019 mengalami penurunan produksi, kecuali buah-buahan dan palawija,
- c) Keterbatasan luas lahan pertanian di wilayah perkotaan dan kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitasi pemasaran produk pertanian.

27. Urusan Perdagangan

- a) Cenderung menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.
- b) Belum tersedianya Kawasan Pergudangan yang representatif.
- c) Pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional dan modern yang belum optimal.
- d) Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap usaha UMKM dalam menghadapi MEA dan CAFTA.
- e) Menurunnya Nilai Ekspor Bersih Perdagangan.
- f) Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur.
- g) Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

28. Urusan Perindustrian

- a) Masih terbatasnya kemampuan permodalan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).
- b) Daya saing produk IKM masih rendah.
- c) Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi pengembangan Industri kecil dan Menengah.
- d) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan Sentra Industri Kecil (SIKIM).

29. Urusan Sekretariat Daerah

- a) Dinamika permasalahan masyarakat yang tinggi menyebabkan dinamika kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang cepat. Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang mengampu kebijakan utama penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk memberikan respon cepat atas dinamika permasalahan masyarakat. Perlunya peningkatan koordinasi untuk menghasilkan kebijakan yang cepat dan responsif ini masih menjadi tantangan tersendiri dimasa yang akan datang untuk Sekretariat Daerah;
- b) Perlunya peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan memastikan bahwa setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan memahami tugas pokok dan fungsinya serta target indikator kinerjanya;
- c) Perlunya peningkatan nilai pencapaian kinerja dengan mengupayakan pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan untuk meningkatkan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d) Selama ini indikator kinerja kunci dianggap bukan sebagai bagian dari kinerja perangkat daerah;

- e) Belum optimalnya langkah kajian dalam proses perumusan rancangan kebijakan;
- f) Adanya perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur pemerintahan daerah yang ditetapkan pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan final;
- g) Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, SP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik;
- h) Masih terdapat ketidaktepatan waktu dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah;
- i) Belum optimalnya perbaikan manajemen layanan publik berbasis reinventing government;
- j) Perlunya sinkronisasi data yang dijadikan dasar penentuan batas daerah, karena ketersediaan data yang menjadi dasar penentuan batas daerah berbeda-beda;
- k) Perlunya monitoring, evaluasi dan pemeliharaan pilar batas yang selama ini sering hilang dan/atau rusak serta diperlukan peta geodetic yang dijadikan arsip digital batas wilayah;

28. Urusan Sekretariat DPRD

- a) Belum adanya dukungan perencanaan kerja di masing-masing alat kelengkapan dewan.
- b) Peran Sekretariat DPRD dalam fasilitasi tugas fungsi DPRD melalui penyelesaian produk hukum daerah, penganggaran dan pengawasan, belum cukup bias berjalan optimal. Tingginya dinamika aktivitas DPRD, dinamika politik dan dinamika

kebijakan Pemerintah Pusat yang berimbas ke daerah, serta ekspektasi masyarakat yang meningkat terhadap kinerja DPRD menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD;

- c) Adanya berbagai kepentingan yang bersifat politis dari masing-masing parpol dalam pembahasan produk hukum daerah;
- d) Target propemperda yang sering tidak tercapai;
- e) Belum optimalnya fungsi fasilitasi legislasi terhadap Perda-Perda yang dihasilkan pada Program Legislasi Daerah melalui pembahasan Panitia Khusus;
- f) Belum tersedianya layanan informasi dan infrastruktur data base admin dalam layanan informasi melalui IT.

31. Urusan Keuangan

- a) Potensi PAD belum terkelola secara maksimal.
- b) Masih tingginya rasio Dana Perimbangan dalam struktur APBD.
- c) Belum optimalnya penatausahaan barang dan aset daerah.
- d) Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan penatausahaan keuangan dan aset di SIPD.

32. Urusan Kepegawaian

- a) Kurangnya kualitas dan kompetensi ASN.
- b) Belum optimalnya disiplin dan kinerja ASN.

33. Urusan Perencanaan

- a) Belum optimalnya pelaksanaan Evaluasi dan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah
- b) Belum optimalnya sinergitas dan keselarasan perencanaan

pembangunan antara daerah, provinsi dan nasional.

- c) Belum optimalnya Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan daerah di daerah.

34. Urusan Penelitian dan Pengembangan

- a) Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta implementasinya dalam pembangunan.
- b) Belum optimalnya inovasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

35. Urusan Inspektorat

- a) Belum optimalnya fungsi pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- b) Belum optimalnya tindaklanjut temuan BPK dan pengaduan masyarakat.
- c) Belum optimalnya hasil Penilaian Mandiri.
- d) Belum maksimalnya pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi.
- e) Belum efektifnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).

36. Unsur Kewilayahan

- a) Masih kurangnya pemahaman pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu ada perubahan pemahaman dan mindset pegawai sebagai pelayan masyarakat;
- b. Masih Perlunya peningkatan koordinasi dan pendampingan antara Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Masih rendahnya responsifitas pegawai dalam memahami perubahan regulasi yang cepat;
- d. Ketersediaan Standart Operating Prosedur (SOP) dan Standar

Pelayanan kegiatan pada unit organisasi perlu dilengkapi untuk penyempurnaan layanan publik;

- e. Kurangnya kapasitas dan kesadaran dalam pengelolaan arsip dan perpustakaan di tingkat perangkat daerah;
- f. Perlunya peningkatan ketertiban administrasi kependudukan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang (alih fungsi lahan), berbagai perizinan untuk tingkat Kelurahan.

37. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a) Perlunya optimalisasi forum koordinasi antara pimpinan di Kota Tarakan dengan stakeholder;
- b. Belum optimalnya sistem integrasi data Kesbangpol yang mampu mendukung pengambilan kebijakan, tata kelola pemerintahan belum berbasis Teknologi Informasi, sehingga perlu peningkatan tata kelola yang berbasis Teknologi Informasi, yang akan meningkatkan profesionalisme aparat dan meningkatnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
- c. kurangnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bela negara dan cinta tanah air;
- d. Belum optimalnya pemahaman masyarakat akan kehidupan demokrasi dan pemahaman tentang HAM sehingga tingkat partisipasi politik tidak maksimal;
- e. Adanya kasus penyalahgunaan Napza dan Miras yang meningkat di Kota Tarakan
- f. Masih kurangnya koordinasi dengan mitra pemerintah daerah (Ormas/LSM, FKUB) dalam rangka ikut memberdayakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat dan menjaga situasi kondisi yang kondusif di Kota Tarakan;
- g. Belum adanya juklak/juknis dari beberapa peraturan/instruksi

dari Pemerintah sehingga belum dapat ditindaklanjuti.

B. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan organisasi di masa depan seperti yang diungkapkan oleh Kotler yang dikutip oleh Nawawi (2000:122) adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Sementara menurut LAN, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Visi berkaitan dengan pandangan masa depan, menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Visi yang efektif antara lain harus memiliki karakteristik mencakup:

- 1) *Imagible* (dapat di bayangkan).
- 2) *Desirable* (menarik).
- 3) *Feasible* (realities dan dapat dicapai).
- 4) *Focused* (jelas).
- 5) *Flexible* (aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan).
- 6) *Communicable* (mudah dipahami).

Visi pembangunan daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 adalah:

***Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju Dan Sejahtera
Melalui Smart City***

Pernyataan visi Kota Tarakan 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut:

Maju : Mengandung pengertian seiring dengan pertambahan waktu, Kota Tarakan harus terus maju dan bertambah baik disemua lini kehidupan. Masyarakat harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek bukan obyek pembangunan. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan. Masyarakat harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai peran, prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Tarakan sebagai karakteristik yang khas dengan kearifan lokalnya.

Sejahtera : Mengandung makna keselamatan seutuhnya. Sejahtera berarti hidup makmur, aman, penuh dengan keselamatan, ketenteraman dan kebahagiaan. Sejahtera, sangat erat maknanya dengan keberhasilan meraih cita-cita. Oleh karena itu, kondisi masyarakat daerah merupakan penentu dari kesejahteraan. Masyarakat yang akan menentukan arah pergerakan bersama, bukan pemerintah. Namun, pemerintah memiliki begitu banyak akses untuk bisa mengelola modal bersama dan jaringan kerja sehingga kedudukannya dalam menciptakan kesejahteraan umum tak bisa digantikan. Disisi lain, masyarakat yang terkelola dengan baik senantiasa akan menghasilkan pemerintahan yang kuat pula.

Smart City : Dimaknai sebagai sebuah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Pengertian *smart city* secara umum dapat dilihat dari cara menyelesaikan masalah

dari tiga aspek utama kota: fisik, sosial dan ekonomi. sebuah kota dapat dikatakan smart bila bisa memecahkan masalah dari ketiga aspek tersebut dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang ada pada kota tersebut secara efisien dan efektif. Ada 6 (enam) indikator utama *smart city* (Boyd Cohen) menuju masyarakat maju dan sejahtera antara lain : *Smart Living* atau hidup yang cerdas, *Smart Governance* atau Pemerintahan yang cerdas, *Smart Economy* atau Ekonomi cerdas, *Smart Mobility* atau Mobilitas cerdas, *Smart Environment* atau Lingkungan cerdas, dan *Smart People* atau Masyarakat cerdas.

Untuk mencapai visi diatas, maka perlu ditentukan beberapa misi, sehingga jelas apa saja yang akan dilakukan dalam jangka menengah yang kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan, tujuan, strategi, program dan kegiatan. Untuk itu perlu diketahui lebih dahulu pengertian dari misi menurut ahli.

Menurut Sapta Nirwandar, Misi merupakan langkah atau kegiatan yang harus dilaksanakan guna merealisasikan tercapainya visi. Arry Akhmad Arman mengatakan bahwa Misi yakni pernyataan-pernyataan yang menjelaskan apa yang sedang dan akan dilakukan atau yang ingin dicapai dalam waktu dekat. Sementara menurut Lembaga Administrasi Negara Misi yakni sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi pada dasarnya hanya bukan usaha formal untuk memperjelas apa yang dikehendaki, namun misi merupakan tahapan aksi yang akan dilaksanakan dari visi yang telah ada, guna mencapai suatu tujuan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka

menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu:

Misi pertama, Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing mengandung arti bahwa Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam membangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

Misi kedua, Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro rakyat mengandung arti bahwa suatu tata pemerintahan terdapat pihak pemangku kepentingan yaitu pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta. Salah satu aspek penting dari tata pemerintahan yaitu pengaturan mengenai penggunaan kewenangan, dimana dalam mengatur kewenangan disertai juga dengan

pengembangan prinsip partisipasi publik dan akuntabilitas publik.

Penerapan prinsip akuntabilitas adalah kewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

Pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik.

Misi ketiga, Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, murah, adil, dan transparan mengandung arti bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jaringan transportasi dan telekomunikasi merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan utilitas perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. '

Misi keempat, Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi

kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas mengandung arti bahwa menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas penting karena secara empirik berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya.

Misi kelima, Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan mengandung arti bahwa sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Prinsip-prinsip

tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk didalamnya mitigasi bencana.

Misi keenam, Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum mengandung arti bahwa pembangunan akhlak dan moral sangat penting, dimana apabila akhlak dan moral dijunjung tinggi maka tatanan kehidupan akan mengarah pada kepastian masa depan yang baik.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah yang dijabarkan merupakan program pembangunan yang sesuai dengan program yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 yang masuk dalam Prioritas utama sesuai dengan Janji Kerja Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel I. 6
Program Pembangunan Daerah berdasarkan
RPJMD Perubahan Tahun 2019 - 2024

No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Dinas Pendidikan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Pengelolaan Pendidikan	2	Rasio siswa per kelas SD
				3	Rasio siswa per kelas SMP
				4	Rasio siswa per rombongan belajar SD
				5	Rasio siswa per rombongan belajar SMP
				6	Rasio siswa per kelas PAUD
				7	Angka Kelulusan SD/MI
				8	Angka Kelulusan SMP/MTs
				9	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
				10	Angka putus sekolah SD/MI
				11	Angka putus sekolah SMP/MTs
				12	Jumlah siswa miskin yang mendapatkan perlengkapan dasar
				13	jumlah siswa yang mendapat KIP
				14	jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa transisi
				15	jumlah Siswa yang mendapat Beasiswa Prestasi Siswa



No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		3	Program Pengembangan Kurikulum	16	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal
		4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17	Rasio siswa per guru PAUD
				18	Rasio siswa per guru SD/MI
				19	Rasio siswa per guru SMP/MTs
		5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	20	Persentase sekolah yang memiliki ijin operasional
		6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	21	Persentase sekolah yang menerapkan bahasa dan sastra daerah
2	Dinas Kesehatan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2	Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM
				3	Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk
				4	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi
				5	Angka Kematian Ibu Melahirkan
				6	Angka Kematian Bayi
				7	Angka Kematian Balita
				8	Pelayanan kesehatan ibu hamil
				9	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan



No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
				10	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
				11	Pelayanan kesehatan balita
				12	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
				13	Pelayanan kesehatan pada usia produktif
				14	Pelayanan kesehatan pada usia lansia
				15	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
				16	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
				17	Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
				18	Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis
				19	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV)
				20	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
				21	Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan
				22	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
		4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	23	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan



No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	24	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2	Volume tampungan air baku (meter ³)
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%)
		4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	4	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang terbangun
		5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik
		6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	6	Persentase Luas Genangan Banjir (%)
		7	Program Penataan Bangunan Gedung	7	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum
		8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	8	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata
		9	Program Penyelenggaraan Jalan	9	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap

No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	10	Persentase pembinaan jasa konstruksi
		11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	11	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
4	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Pengembangan Perumahan	2	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi
		3	Program Kawasan Permukiman	3	Persentase menurunnya kawasan kumuh
		4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	4	Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR
		5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	5	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan
		6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	6	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
		7	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	7	Persentase ganti kerugian dan /atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan
		8	Program Penatagunaan Tanah	8	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti
5	Satpol PP	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi

No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		2	Program Peningkatan	2	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
		3	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan
		4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	4	Prosentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Satpol PP & PMK
				5	Prosentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Satpol PP & PMK
				6	Prosentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan
				7	Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) oleh Satpol PP & PMK
6	BPBD	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Penanggulangan Bencana	2	Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
				3	Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana



No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
				4	Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
7	Dinas Sosial dan PM	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Pemberdayaan Sosial	2	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial
		3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	3	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani
		4	Program Rehabilitasi Sosial	4	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	5	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani
		6	Program Penanganan Bencana	6	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial
		7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	7	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan

No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah
		2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	2	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun
		3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3	Persentase pencari kerja yang kompeten
		4	Program Penempatan Tenaga Kerja	4	Persentase tenaga kerja yang terserap
		5	Program Hubungan Industrial	5	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan
		6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	6	persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi
		7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	7	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis
		8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	8	persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	2	1. Cakupan PUG yang aktif
				3	2. Persentase ARG pada APBD



No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
	Penduduk, dan KB	3	Program Perlindungan Perempuan	4	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani
				5	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
		4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	6	Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak
		5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	7	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak
		6	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	8	Persentase pemenuhan indikator KLA
		7	Program Perlindungan	9	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait
		8	Khusus Anak	10	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani
		9	Program Administrasi	11	Kategori kelurahan
		10	Pemerintahan Desa	12	
		11	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	13	Persentase lembaga masyarakat yang aktif
		12	Program Pengendalian Penduduk	14	Persentase keluarga yang terdata
				15	TFR
				16	Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun



No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		13	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	17	Persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
				18	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (MCPR)
				19	Unmeet need
				20	Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK
		14	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	21	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2	Persentase ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan
		3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3	Peningkatan skor pola pangan harapan
				4	Persentase ketersediaan dan kebutuhan terhadap bahan pangan penyumbang inflasi
		4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	5	Persentase Penanganan daerah rawan pangan
		5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	6	persentase keamanan pangan yang dilaksanakan

No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7	Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)
				8	Produktivitas Hasil Pertanian
		7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9	Persentase peningkatan produksi pertanian
		8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	10	Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		9	Program Perizinan Usaha Pertanian	11	Cakupan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan
		10	Program Penyuluhan Pertanian	12	Rata-rata pendapatan petani miskin per kapita selama setahun (dalam Jutaan)
11	Dinas Lingkungan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup
		3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau



No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	5	Persentase penanganan limbah B3
		6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	6	Persentase usaha dan / atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan
		7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	7	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	8	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
				9	Persentase Perusahaan yang mendapatkan minimal level biru
		9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup
		10	Program Pengelolaan Persampahan	11	Persentase sampah yang dikelola
12	Disduk Capil	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpenuhi
		2	Program Pendaftaran Penduduk	2	Persentase perekaman KTP Elektronik

No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
				3	Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA
		3	Program Pencatatan Sipil	4	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan
		4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan
		5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	6	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan
13	Dinas Perhubungan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2	jumlah titik daerah potensi dan rawan laka
				3	Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan
				4	Titik Kemacetan yang teratasi
				5	Rasio volume kendaraan dibandingkan perkapasitas jalan
		3	Program Pengelolaan Pelayaran	6	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan
14	Dinas Komunikasi Informatika,	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Darah yang Terpenuhi

No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
	Statistika, dan Persandian	2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah
		3	Program Aplikasi Informatika	3	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses
		4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4	Persentase data sektoral yang dipublikasikan
		5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	5	Persentase OPD Pemerintah Daerah yang melaksanakan keamanan informasi
		6	Program Pengembangan Kebudayaan	6	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan
		7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	7	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan
		8	Program Pembinaan Sejarah	8	Persentase data informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat
		9	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	9	Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dandimanfaatkan
		10	Program Pengelolaan Permuseuman	10	Persentase museum yang dikelola
15	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah



No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	2	persentase KSP/ USP yang berizin
		3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	3	Persentase Koperasi aktif dan patuh
		4	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	4	Persentase Koperasi sehat
		5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	5	Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian
		6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	6	Persentase koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi
		7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	7	Persentase pertumbuhan UMKM
		8	Program Pengembangan Umkm	8	Persentase usaha mikro yg naik kelas
		9	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	9	Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan
		10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	10	Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		11	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	11	Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota
		12	Program Pengembangan Ekspor	12	Nilai Ekspor Kota Tarakan (dalam Milyar)

No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		13	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	13	Persentase UTTP Tertera bertanda sah
		14	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	14	Persentase peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan
16	DPMPTSP	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2	Persentase jumlah dokumen kebijakan yang tersusun
		3	Program Promosi Penanaman Modal	3	Persentase kegiatan Promosi Penanaman Modal
		4	Program Pelayanan Penanaman Modal	4	Persentase peningkatan investasi Kota Tarakan
		5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5	Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (dalam milyar rupiah)
		6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola
17	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2	Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan

No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	3	Persentase kapasitas Kepramukaan yang dikembangkan
		4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4	Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik
		5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6	Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan
		7	Program Pemasaran Pariwisata	7	Persentase Terlaksananya pemasaran pariwisata
		8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	8	Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreati
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Pembinaan Perpustakaan	2	Persentase Pengunjung Perpustakaan
		3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	3	Persentase Koleksi Bahan Pustaka yang Dilestarikan
		4	Program Pengelolaan Arsip	4	Persentase pengelolaan Arsip
		5	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	5	Persentase Pengelolaan Kerasipan Sesuai Standar



No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		6	Program Perizinan Penggunaan Arsip	6	Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip
19	Dinas Perikanan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2	Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap
		3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3	Persentase Produksi perikanan budidaya
		4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	4	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan
		5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	5	Persentase pemasaran produk perikanan
20	Setda	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Rekomendasi LHP yang ditindak Lanjuti
				2	Indeks Reformasi dan Birokrasi
				3	Nilai SAKIP
				4	Nilai IKM
				5	Persentase Pelayanan Prokopim
		2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	6	Nilai LPPD
				7	Persentase SPM
				8	Persentase Hibah Bansos yang tersalurkan
				9	Penilaian Kota Peduli HAM dan RANHAM



No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
				10	Persentase realisasi penyusunan Perda
				11	Nilai IHK
				12	Persentase BUMD yang sehat
		3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	13	Persentase Rumah tangga yang teraliri Jaringan Gas Alam
				14	Persentase Rumah tangga yang teraliri Jaringan Air Bersih
				15	Persentase Layanan pengadaan Barang dan Jasa
				16	Persentase Realisasi Pembangunan Daerah
21	Setwan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentasi terlaksananya administrasi Umum Sekretariat DPRD
		2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	2	Persentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD
22	Bappeda Litbang	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu
		3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD

No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
23	BPKAD	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi
		3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3	Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi
		4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4	Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak
24	BKPSDM	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi
		2	Program Kepegawaian Daerah	2	Persentase layanan kepegawaian daerah
		3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat sesuai jabatannya
25	Bappeda Litbang	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi
		2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2	Persentase implementasi rencana kelitbangan
26	Inspektorat	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi

No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal
		3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	3	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana
27	Kesbangpol	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2	Prosentase tingkat kesadaran masyarakat dalam berwawasan nasional, berbangsa dan bernegara
		3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3	Prosentase partai politik yang berperan dalam pembangunan nasional
		4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4	Prosentase ormas yang aktif
		5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	5	Persentase masyarakat yang sadar bahaya narkoba
				6	Persentase tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memahami aliran kepercayaan sesuai ketentuan yang berlaku



No	Perangkat Daerah	Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	7	Persentase Penanganan konflik sosial yang difasilitasi
28	Kecamatan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi
		2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2	Persentase Capaian Kinerja
				3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
		3	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sumber : Bappeda, 2024



D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Tarakan memiliki 425 Kegiatan , 1041 sub kegiatan dengan capaian rata-rata kinerja fisik 97,22 persen dan keuangan 94,68 persen atau sangat tinggi (ST). Rekapitulasi capaian jumlah kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I. 7
Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan
RKPD Perubahan 2023

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dinas Pendidikan	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	142.880.509.627,00	100,00	96,43
	1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.220.921.570,00	100,00	98,32
	1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	346.850.000,00	100,00	98,02
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.999.070,00	100,00	97,81
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.998.220,00	100,00	99,79
	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.499.790,00	90,70	78,02
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.958.200,00	100,00	98,58
	1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	60,00	37,23
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.445.576,00	100,00	94,41
	1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	289.962.550,00	100,00	99,55
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.440.000,00	100,00	97,13
	1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	4.029.870.400,00	100,00	98,96
	1.01. 2.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	200.000.000,00	100,00	99,43
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	400.000.000,00	100,00	99,45
	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.000.596.950,00	100,00	99,51
	1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	157.502.050,00	100,00	99,77
	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	268.760.000,00	100,00	99,42
	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	499.500.000,00	100,00	98,38



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	175.000.000,00	100,00	99,94
	1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	10.000.000,00	-	-
	1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	450.000.000,00	100,00	99,34
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.860.000.000,00	99,57	96,58
	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	67.155.600,00	53,94	43,64
	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	78.160.340,00	100,00	87,66
	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	71.655.000,00	69,61	62,96
	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	38.849.278.192,00	99,85	96,94
	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	57.855.027.160,00	100,00	100,00
	1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	100.000.000,00	100,00	99,32
	1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.528.230.000,00	100,00	99,30
	1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	296.329.000,00	100,00	99,21
	1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	618.216.000,00	100,00	99,48
	1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	2.055.399.000,00	100,00	99,38
	1.01.02.2.02.11	Pembangunan Kantin Sekolah	100.000.000,00	100,00	99,33
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	486.866.000,00	100,00	99,18
	1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	539.220.000,00	100,00	96,15
	1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	274.984.630,00	100,00	96,38
	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.477.825.080,00	97,50	90,70
	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	49.174.800,00	28,52	19,73
	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	286.847.400,00	91,33	66,19
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	38.845.490,00	69,35	56,27
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	22.272.601.400,00	99,45	92,55
	1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	154.603.400,00	100,00	99,32

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	435.584.600,00	100,00	99,32
	1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	100.000.000,00	100,00	100,00
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	232.000.000,00	100,00	100,00
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.891.121.777,00	97,96	97,67
	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	59.921.460,00	59,85	56,53
	1.01.02.2.04.013	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	49.999.640,00	100,00	89,12
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.242.294.616,00	99,44	98,52
	1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200.530.900,00	58,17	47,93
	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	264.988.400,00	100,00	85,83
	1.01.06.2.01.05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	30.000.000,00	-	-
Dinas Kesehatan	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.380.697.669,00	100,00	95,98
	1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.721.438.970,00	99,99	90,54
	1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	119.700.000,00	100,00	99,43
	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.976.620,00	100,00	86,95
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.753.570,00	100,00	91,72
	1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.599.440,00	100,00	99,99
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.505.760,00	77,41	72,08
	1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.578.852,00	100,00	97,68
	1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.000.000,00	70,59	70,59

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	609.220.710,00	100,00	84,62
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	716.400.000,00	99,39	93,31
	1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000,00	100,00	50,85
	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	338.950.400,00	98,79	97,08
	1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.165.400,00	100,00	99,81
	1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.735.352.000,00	99,78	97,67
	1.02.01.2.01.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	16.124.742.822,00	63,79	63,79
	1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	180.000.000,00	100,00	100,00
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.026.758.650,00	99,61	92,25
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	500.000.000,00	90,21	84,59
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.473.425.600,00	89,25	86,94
	1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	40.000.000,00	100,00	87,49
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	298.780.064,00	86,50	84,47
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	70.800.000,00	75,00	73,00
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.200.000,00	62,80	61,19
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	311.559.660,00	71,33	69,50
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	332.600.000,00	88,54	87,97
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	55.448.500,00	79,17	53,59
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	106.094.920,00	86,38	66,10



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34.999.980,00	83,57	53,11
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	293.442.740,00	89,96	68,52
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36.699.900,00	90,87	90,41
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.770.106.700,00	2,01	1,79
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	190.432.200,00	81,31	64,78
	1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	304.283.680,00	11,19	9,92
	1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.100.000,00	-	-
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.765.246.570,00	17,83	17,69
	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	158.707.990,00	58,77	58,54
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.057.885.670,00	84,35	79,89
	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	293.580.820,00	70,40	65,88
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	205.002.100,00	46,82	39,71
	1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	23.956.000,00	100,00	99,77
	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.750.000,00	78,67	78,67
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.238.511.735,00	77,28	63,23
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.418.974.200,00	97,72	97,72
	1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.950.000,00	55,93	55,93
	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	15.000.000,00	-	-

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	96,93	77,74
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.806.961.996,00	45,19	44,28
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	632.591.670,00	99,24	92,13
	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	425.603.690,00	95,05	93,29
	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.500.000,00	1,82	1,82
	1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	24.992.660,00	44,81	44,81
	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	40.506.200,00	37,10	31,31
	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	17.500.000,00	13,71	13,71
	1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	122.198.455,00	55,10	46,93
	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	294.012.060,00	86,50	80,52
	1.02.03.2.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	34.868.000,00	60,17	60,17
	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	796.112.010,00	63,23	61,16
	1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	101.725.580,00	88,84	83,76
	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150.267.590,00	41,31	40,55



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	154.760.170,00	56,06	34,23
	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.726.382.660,00	94,74	94,74
	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	47.900.000,00	74,91	74,91
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	477.595.810,00	75,78	62,05
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.156.338.617,00	100,00	90,92
	1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.907.578.000,00	92,98	89,84
	1.02.01.2.01.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	66.538.354.073,00	95,93	95,93
	1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	2.774.953.500,00	100,00	96,83
	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	200.000.000,00	-	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.608.704.838,00	96,71	93,79
	1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	907.979.274,00	100,00	81,31
	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.700.000,00	100,00	99,43
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.991.300,00	100,00	100,00
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	100,00	99,92
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.240.330,00	99,75	86,54
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.999.999,00	100,00	88,85



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.241.800,00	70,76	64,37
	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	100,00	99,94
	1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	100,00	100,00
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.000.000,00	100,00	84,73
	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.700.000,00	100,00	91,59
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	457.595.960,00	70,84	63,63
	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	25.000.000,00	100,00	99,68
	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.999.930,00	92,41	90,57
	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.870.000,00	100,00	96,16
	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.000.000.000,00	0,11	0,11
	1.03.02.2.01.12	Pembangunan Kanal Banjir	39.597.471.500,00	99,06	98,84
	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.450.000.000,00	98,88	97,25
	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	20.793.706.000,00	100,00	99,78
	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	515.000.000,00	97,09	96,34
	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	4.018.320.000,00	99,59	98,21
	1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	27.977.000.000,00	98,21	97,87
	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	68.498.840,00	43,94	42,12

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	92.398.778.695,00	99,99	99,86
	1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10.153.998.219,00	96,45	96,17
	1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	34.717.009.353,00	100,00	100,00
	1.03.010.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.886.700.000,00	100,00	99,37
	1. 03. 10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	42.472.200,00	100,00	90,44
	1.03.010.2.01.05	Pembangunan Jalan	12.865.515.280,00	99,94	72,61
	1.03.010.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	37.048.875.663,00	99,93	99,82
	1.03.010.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	16.587.619.000,00	99,99	98,80
	1.03.010.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.105.630.200,00	100,00	99,84
	1.03.010.2.01.12	Pembangunan Jembatan	3.576.167.185,00	99,80	99,75
	1.03.011.2.04.3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4.996.880,00	100,00	95,90
	1.03.012.2.01.3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	662.655.400,00	100,00	97,39
	1.03.012.2.03.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	29.999.920,00	52,21	34,89
	1.03.012.2.04.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	49.983.300,00	91,60	83,26
	1.03.012.2.04.4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	19.999.820,00	100,00	66,02
	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.147.595.569,00	99,15	95,91329



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	388.000.000,00	99,57	97,3439
	1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.350.000,00	100,00	99,42857
	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.996.960,00	100,00	99,90092
	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.633.312,00	100,00	100
	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.999.050,00	98,04	90,70679
	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.999.650,00	100,00	77,68561
	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.950.800,00	78,46	72,74991
	1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	100,00	100
	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256.000.000,00	100,00	66,23443
	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	97,00	81,58568
	1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	100,00	99,7444
	1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.990.000,00	100,00	100
	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	86.889.640,00	76,98	53,96459
	1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	40.000.000,00	100,00	99,018
	1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	150.000.000,00	100,00	98,24533
	1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5.000.000,00	100,00	48,9983
	1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	99.998.331,00	85,16	78,65852

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.049.999.850,00	99,99	98,96035
	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	24.976.300,00	97,60	83,56121
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	48.867.711.399,00	98,00	97,83778
	2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	29.972.800,00	99,87	73,19636
	2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	6.515.084.255,00	98,75	89,98997
	2.10.010.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	19.999.800,00	71,94	49,6651
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.979.263.068,00	100,00	94,94
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77.196.000,00	97,99	97,41
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	130.481.140,00	100,00	94,50
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.485.440,00	20,20	20,20
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.284.351,00	100,00	99,87
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.995.930,00	100,00	99,51
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.924.860,00	99,02	93,40
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.994.600,00	99,68	98,45
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	100,00	100,00
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.650.000,00	100,00	86,36
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.171.433.000,00	96,48	92,94



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.700.000,00	97,16	97,16
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	327.744.000,00	85,86	85,60
	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.980.000,00	98,20	98,20
	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	29.979.400,00	26,42	26,42
	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	19.980.120,00	96,87	79,12
	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.996.330,00	100,00	99,99
	1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.980.000,00	100,00	100,00
	1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	103.739.165,00	100,00	91,79
	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15.981.100,00	100,00	91,24
	1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	49.994.336,00	74,43	36,42
	1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	99.995.808,00	100,00	82,26
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.980.000,00	34,11	34,11

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	14.945.514,00	100,00	94,23
	1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3.000.000,00	100,00	100,00
	1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12.804.801,00	100,00	99,98
	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	9.988.440,00	100,00	100,00
	1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	18.697.110,00	100,00	99,71
	1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	21.600.000,00	100,00	76,39
	1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	18.990.000,00	100,00	100,00
	1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	6.000.000,00	100,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.166.312.385,00	98,70	98,70
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	540.816.000,00	100,00	89,95
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.400.000,00	100,00	99,43
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.880,00	100,00	97,95
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.571.243,00	100,00	100,00
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.999.720,00	98,82	86,77
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.950,00	100,00	98,08

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.989.400,00	90,77	77,02
	1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	24.924.500,00	100,00	85,95
	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.847.706,00	100,00	100,00
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	100,00	100,00
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.025.800,00	98,72	43,11
	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	100,00	35,16
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.000.000,00	70,25	61,68
	1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	100,00	99,77
	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000,00	99,20	94,25
	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	179.954.380,00	100,00	98,89
	1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	98.475.000,00	99,39	94,78
	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	19.999.600,00	100,00	95,27
	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	49.999.661,00	100,00	98,07
	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	70.000.000,00	100,00	94,06
	1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	200.000.000,00	100,00	97,57
	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	19.999.840,00	90,00	88,36



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	117.662.380,00	99,09	91,70
	1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	109.999.980,00	99,12	94,59
	1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	19.792.130,00	-	-
	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	16.611.380,00	6,32	2,78
	1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	65.000.000,00	100,00	97,26
	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	74.757.100,00	100,00	88,69
	1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	9.902.729,00	51,99	51,96
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.372.276.787,00	97,02	81,27
	1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.246.000,00	100,00	98,10
	1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.750.000,00	100,00	99,43
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.494.580,00	100,00	83,60
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.213.720,00	96,93	91,92
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.002.860,00	94,47	90,04
	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.997.400,00	96,02	94,54
	1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.337.813,00	100,00	99,45
	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	100,00	100,00
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.400.000,00	100,03	88,54

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.000.000,00	99,40	99,40
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.502.676,00	96,18	88,91
	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	100,00	98,00
	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9.956.880,00	97,38	97,32
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	29.370.000,00	41,78	41,78
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	11.000.000,00	100,00	99,95
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	49.803.900,00	100,00	73,49
	1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	29.979.360,00	27,26	22,62
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.984.220,00	75,12	75,12
	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	14.048.392,00	102,85	88,18
	1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	5.333.000,00	74,84	69,92
	1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	39.549.364,00	99,61	86,38
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	49.999.795,00	100,00	98,77
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	15.499.680,00	87,10	75,49
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	19.987.625,00	95,76	95,26
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	50.000.000,00	88,54	85,34
	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	76.944.340,00	99,28	99,12
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	24.984.770,00	97,26	93,66

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	159.688.370,00	79,64	76,69
	2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	860.000.000,00	70,35	70,02
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	19.999.960,00	80,26	74,84
	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000,00	100,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.502.713.978,00	100,00	91,75
	2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.326.000,00	100,00	85,93
	2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.050.000,00	100,00	99,43
	2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.994.420,00	100,00	78,63
	2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.999.880,00	100,00	99,06
	2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.917.400,00	100,00	98,64
	2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.820.988,00	100,00	99,04
	2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	100,00	100,00
	2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.516.021,00	100,00	60,98
	2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.709.000,00	100,00	92,70



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.784.337,00	100,00	90,96
	2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.153.700,00	100,00	66,97
	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	14.981.730,00	100,00	85,05
	2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000,00	100,00	100,00
	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.987.480,00	100,00	78,87
	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.865.220,00	100,00	86,47
	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.996.980,00	100,00	99,91
	2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.579.040,00	100,00	98,08
	2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.924.220,00	100,00	98,85
	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	34.943.620,00	100,00	88,91
	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	114.994.580,00	100,00	94,19



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	100,00	97,56
	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	74.991.186,00	100,00	89,30
	2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	9.999.063,00	100,00	88,66
	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	100,00	98,66
	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	110.101.740,00	100,00	60,80
	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	85.578.720,00	100,00	99,91
	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	43.796.880,00	100,00	91,41
	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	82.500.000,00	100,00	56,24
	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	100,00	98,64
	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	52.000.000,00	100,00	96,15
	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	192.600.000,00	100,00	96,31
	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	100,00	92,75
	2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	4.000.000,00	100,00	-
	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	40.000.000,00	100,00	100,00

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.000.000,00	100,00	89,33
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	518.442.912,00	100,00	97,26
	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	644.724.880,00	100,00	91,17
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.100.000,00	100,00	100,00
	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	100,00	55,56
	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	62.000.000,00	100,00	100,00
	2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	39.988.101,00	100,00	76,31
	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	100,00	64,68
	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	548.100.000,00	100,00	87,72
	2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.975.272.508,00	100,00	98,16
	2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.948.500,00	100,00	100,00



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.750.000,00	100,00	99,43
	2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.330,00	100,00	75,22
	2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.157.250,00	100,00	87,97
	2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.035.660,00	96,76	79,30
	2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.986.800,00	100,00	100,00
	2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	100,00	100,00
	2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	100,00	92,98
	2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.000.000,00	100,00	68,16
	2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.000.000,00	100,00	95,60
	2.09.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.990.000,00	100,00	64,58
	2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung	10.000.380,00	100,00	100,00
	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	24.999.722,00	100,00	94,38
	2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	24.998.310,00	100,00	96,11
	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4.997.750,00	100,00	100,00
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	59.999.390,00	100,00	95,69
	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	19.978.000,00	96,50	91,95

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	100,00	100,00
	2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000,00	100,00	100,00
	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	16.999.000,00	100,00	99,26
	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.125.753.076,00	99,99	98,59
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	232.118.800,00	100,00	100,00
	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	25.012.500,00	92,80	88,56
	3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	2.500.000,00	80,00	80,00
	3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	105.020.850,00	100,00	99,29
	3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.008.500,00	100,00	100,00
	3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	143.635.730,00	97,33	97,32
	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	928.908.000,00	100,00	99,78
	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5.044.120,00	100,00	97,23
	3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	4.927.565,00	100,00	99,85



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	10.000.000,00	65,60	65,60
	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	243.982.800,00	85,32	76,99
	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4.905.952,00	100,00	99,99
	3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2.540.000,00	100,00	93,31
	3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	2.520.000,00	100,00	100,00
	3.27.06.2.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	2.522.000,00	100,00	93,97
	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	228.208.568,00	99,50	96,52
	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	893.998.600,00	100,00	84,67
Dinas Lingkungan Hidup					
	2.011.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	674.000.175,00	100,00	96,40
	2.011.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.000.000,00	100,00	99,85
	2.011.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.311.504,00	100,00	98,45
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.144.904.932,00	100,00	95,95
	2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.663.593.100,00	99,03	98,57
	2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.550.000,00	100,00	99,43
	2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.898.230,00	100,00	92,65
	2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.522.540,00	100,00	92,12
	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.708.350,00	100,00	92,71

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.755.760,00	100,00	69,03
	2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	83,33	83,33
	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	479.212.348,00	100,00	68,02
	2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.811.750,00	100,00	46,42
	2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.724.269.020,00	98,79	93,91
	2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	100,00	99,44
	2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.380.000,00	100,00	78,63
	2.11.010.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	7.768.340,00	100,00	83,54
	2.11.011.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	149.489.360,00	100,00	95,20
	2.11.011.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.423.223.900,00	100,00	96,38
	2.11.011.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10.000.000,00	100,00	99,88
	2.11.011.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.476.103.262,00	99,49	98,16
	2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	243.126.480,00	99,75	95,81
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.020,00	100,00	88,86

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	72.740.160,00	81,93	76,38
	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	96.982.000,00	100,00	99,10
	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	59.999.520,00	99,50	91,39
	2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	194.019.855,00	99,99	99,59
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.619.985.770,00	99,97	99,50
	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	29.038.130,00	98,86	80,21
	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.813.400,00	100,00	99,44
	2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	84.620.160,00	99,46	94,11
	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	85.378.730,00	99,00	93,34
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.801.278.918,00	99,81	99,76
	2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.766.000,00	97,59	96,78
	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.150.000,00	100,00	99,43
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.996.980,00	100,00	56,61
	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.768.650,00	91,24	91,24
	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.998.900,00	97,54	88,37



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.870,00	100,00	63,82
	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.247.800,00	97,50	89,70
	2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.209.968,00	100,00	95,35
	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	100,00	100,00
	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.936.000,00	96,37	96,37
	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.650.000,00	-	-
	2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	72,00	72,00
	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.645.000,00	69,27	67,54
	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.640.000,00	99,96	99,92
	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	53.456.386,00	100,00	98,40
	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	9.975.000,00	100,00	97,14
	2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	9.488.440,00	97,80	97,80
	2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	9.988.440,00	97,91	97,91
	2.12.02.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	9.999.880,00	-	-
	2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.239.900,00	96,37	95,71
	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4.995.550,00	100,00	72,82



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.602.000,00	78,62	78,26
Dinas Perhubungan	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.614.335.323,00	100,00	92,42
	2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	286.096.000,00	99,04	81,38
	2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.900.000,00	100,00	99,43
	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.590.200,00	100,00	85,82
	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.986.090,00	100,00	95,23
	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.612.900,00	100,00	99,98
	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.283.000,00	100,00	89,69
	2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.097.094,00	100,00	99,86
	2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	100,00	100,00
	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.292.277.645,00	99,93	88,49
	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.638.920,00	100,00	81,13
	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000,00	100,00	99,80
	2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.351.600,00	100,00	98,66
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.342.472.392,00	100,00	97,24
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	702.850.836,00	100,00	94,76



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	59.960.000,00	100,00	86,01
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.240.504,00	100,00	99,80
	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	99.999.400,00	100,00	99,43
	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	5.625.000,00	100,00	100,00
	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	40.000.000,00	50,00	-
	2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	70.000.000,00	100,00	99,91
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.900.000.000,00	100,00	96,65
	2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61.926.000,00	100,00	100,00
	2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	100,00	99,43
	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.870,00	100,00	99,92
	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.999.930,00	100,00	85,14
	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	9.999.940,00	100,00	93,73
	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.858.200,00	100,00	92,81
	2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214.974.027,00	100,00	99,61
	2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	98,61	83,33



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	100,00	94,30
	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.000.000,00	99,88	95,48
	2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	100,00	98,57
	2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	100,00	97,34
	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	888.000.000,00	100,00	97,28
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	50.154.480,00	100,00	97,10
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	29.975.700,00	95,28	92,31
	2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	50.000.000,00	100,00	100,00
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	145.000.000,00	100,00	87,15
	2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	310.000.000,00	98,20	94,36
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	590.000.000,00	98,99	97,24
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	19.999.840,00	41,56	41,40
	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	9.999.680,00	78,25	79,55
	2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	9.999.840,00	84,31	81,10
	2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.999.900,00	89,11	87,03
	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.199.700,00	-	-



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6.800.000,00	84,01	83,82
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.883.658.236,00	100,00	97,79
	2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	142.394.000,00	89,54	86,01
	2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.300.000,00	100,00	99,43
	2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.730,00	100,00	93,39
	2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.999.110,00	100,00	83,19
	2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.999.710,00	88,62	86,21
	2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.005.800,00	100,00	74,10
	2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	75.538.980,00	100,00	90,92
	2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.435.591,00	99,00	97,75
	2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	80,00	80,00
	2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000,00	100,00	95,73
	2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.036.800,00	98,45	88,21
	2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.999.900,00	78,36	76,60
	2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	345.000.000,00	100,00	99,38
	2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	100,00	96,93



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.999.940,00	-	-
	2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.265.220,00	100,00	89,03
	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	9.999.880,00	100,00	67,59
	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	-	-
	2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	49,13	39,18
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	49.999.810,00	91,10	88,92
	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	14.999.840,00	100,00	92,80
	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	110.799.910,00	100,00	97,65
	2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	9.999.770,00	98,90	79,97
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	549.999.890,00	99,97	99,67
	2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	5.000.000,00	99,80	60,00



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	133.459.490,00	99,42	96,43
	3.30.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	9.997.840,00	-	-
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	144.000.000,00	100,00	94,22
	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9.995.210,00	100,00	99,89
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.000.000,00	-	-
	3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.995.000,00	-	-
	3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	29.999.010,00	99,95	43,89
	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	9.999.330,00	76,25	51,64
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	9.998.200,00	99,88	73,75
	3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	999.760,00	-	-
	3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	29.999.880,00	41,74	31,49
	3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	36.000.000,00	50,00	49,18
	3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	11.008.440,00	-	-
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	95.000.000,00	93,61	89,92
	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	10.000.000,00	88,00	88,00



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	14.999.820,00	73,50	35,67
	3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	14.999.940,00	39,00	19,00
Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.024.547.487,00	100,00	97,61
	2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	119.226.000,00	98,72	98,72
	2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.700.000,00	100,00	99,43
	2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.333.510,00	100,00	94,06
	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.000.000,00	98,93	86,94
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.160.000,00	100,00	100,00
	2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	100,00	99,59
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	97,88	63,60
	2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	40.000.000,00	100,00	97,83
	2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.000.000,00	100,00	98,27
	2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.440.101,00	100,00	98,96
	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	100,00	100,00
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.000.000,00	100,00	90,55
	2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.000.000,00	100,00	100,00
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.721.739,00	69,70	66,13

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.500.000,00	69,53	66,73
	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.860.000,00	82,21	79,66
	2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	79,17	49,53
	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	24.987.400,00	89,83	75,51
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	59.000.000,00	100,00	96,17
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	68.480.000,00	100,00	99,27
	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	69.105.000,00	96,35	95,95
	2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	15.000.000,00	94,00	85,89
	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	5.000.000,00	89,00	83,40
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	314.017.000,00	90,93	80,15
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	52.684.000,00	60,73	56,80



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17.250.000,00	86,31	82,42
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.796.920.710,00	100,00	97,35
	2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.719.114.813,00	100,00	94,20
	2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.650.000,00	100,00	99,43
	2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.982.200,00	100,00	76,70
	2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.093.970,00	100,00	87,72
	2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.510.050,00	100,00	76,55
	2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.935.600,00	100,00	78,03
	2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	100,00	81,71
	2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.025.015.821,00	87,85	31,87
	2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.860.000,00	100,00	83,85
	2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.215.830,00	100,00	97,60
	2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.800.000,00	100,00	43,07
	2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.982.480,00	91,86	77,50
	2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	89,94	56,95
	2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	9.999.710,00	100,00	94,76



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	4.990.460,00	100,00	99,97
	2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	9.998.680,00	100,00	99,98
	2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	100,00	100,00
	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	100,00	100,00
	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	770.379.997,00	100,00	98,74
	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	99.994.750,00	100,00	99,81
	2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	49.997.480,00	100,00	99,88
	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.765.000.000,00	100,00	95,52
	2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	5.000.000,00	100,00	100,00
	2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	19.998.230,00	100,00	97,39
	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.650.000.000,00	96,97	96,78
	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	250.000.000,00	100,00	100,00
	2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	200.000.000,00	100,00	98,44
	2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000,00	100,00	100,00



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.619.999.110,00	100,00	97,34
	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	29.958.280,00	100,00	98,09
	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	185.000.000,00	100,00	99,97
	2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	24.989.770,00	100,00	99,72
	2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	9.995.870,00	100,00	99,81
	2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	54.886.730,00	100,00	77,32
	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	24.947.760,00	100,00	99,37
	2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	49.988.240,00	100,00	95,17
	2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	240.000.174,00	100,00	98,61
	2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	25.287.420,00	100,00	95,53
	2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	9.986.294.668,00	100,00	99,89
	2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	160.000.000,00	100,00	99,65
	2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	200.000.000,00	100,00	98,64
	3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	57.000.000,00	100,00	99,02
	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	341.997.890,00	100,00	99,02
	3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.462.091.895,00	100,00	98,29
	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	19.986.270,00	100,00	99,75



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	19.689.300,00	100,00	96,35
	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	404.311.750,00	100,00	96,73
	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	598.624.000,00	100,00	100,00
	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	19.989.600,00	100,00	97,46
	3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	14.998.660,00	100,00	99,97
	3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	274.797.460,00	100,00	98,84
	3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	49.998.115,00	100,00	93,57
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.797.960.550,00	99,58	95,63
	2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.036.000,00	91,79	91,79
	2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.150.000,00	100,00	94,29
	2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.995.620,00	100,00	99,99
	2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.850.000,00	100,00	99,66
	2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.996.920,00	98,16	93,00
	2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.976.555,00	44,58	44,58
	2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.970.800,00	98,62	98,44
	2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.755.830,00	100,00	92,51
	2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	100,00	100,00

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	100,00	96,10
	2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.990.000,00	100,00	90,98
	2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	72,01	72,01
	2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.996.650,00	-	-
	2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.640.000,00	99,25	99,25
	2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	100,00	99,33
	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	19.872.324,00	100,00	98,40
	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.999.440,00	100,00	89,22
	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	14.999.910,00	92,00	88,96
	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.982.200,00	100,00	99,98
	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	20.000.000,00	100,00	100,00
	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	9.995.420,00	100,00	81,01
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	94.973.280,00	91,03	89,41
	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	14.998.820,00	100,00	99,58
	2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	9.987.580,00	83,98	79,46
	2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	9.996.577,00	54,61	48,06

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	5.000.000,00	100,00	100,00
	2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	4.835.440,00	100,00	90,63
	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	24.999.880,00	100,00	98,57
	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	22.495.440,00	100,00	91,47
	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	22.999.900,00	99,56	91,35
	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	29.430.200,00	97,39	97,39
	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	29.983.130,00	98,29	90,95
	2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	14.891.200,00	100,00	99,95
	2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	14.990.935,00	100,00	89,40
	2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	19.996.400,00	100,00	99,69
Dinas Perikanan	3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.081.451.166,00	90,27	90,27
	3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	133.926.000,00	73,91	73,91
	3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.850.000,00	100,00	99,43
	3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.300,00	100,00	90,73
	3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.998.430,00	99,36	89,51
	3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.607.057,00	100,00	75,13



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.988.800,00	33,57	22,13
	3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.709.430,00	100,00	93,43
	3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.289.191,00	100,00	94,40
	3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	93,33	93,33
	3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.162.000,00	62,94	59,94
	3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	313.350,00	100,00	99,89
	3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	14,66	14,66
	3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	73.559.170,00	92,03	80,77
	3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	100,00	99,20
	3.25.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.740.000,00	100,00	92,27
	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	12.254.500,00	98,05	94,23
	3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	49.996.250,00	79,47	78,16
	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.812.539.970,00	99,82	94,64
	3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	2.000.000,00	100,00	50,00
	3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2.000.000,00	100,00	100,00
	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	45.349.080,00	100,00	77,18



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	14.986.844,00	99,32	63,70
	3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.994.640,00	98,64	66,62
	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	605.818.910,00	99,67	98,26
	3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	100,00	96,25
	3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	39.958.800,00	100,00	96,69
	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	7.948.000,00	100,00	24,75
	3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4.990.000,00	84,97	80,96
	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	349.992.056,00	98,27	69,97
	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.294.280,00	41,67	35,20
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.041.902.332,00	100,00	89,76
	2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.326.000,00	83,07	64,83
	2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.100.000,00	100,00	99,43
	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.995.710,00	62,77	62,55



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.285.270,00	98,00	92,55
	2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.998.740,00	100,00	76,51
	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.870.800,00	93,46	86,22
	2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	100,00	85,80
	2.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.089.762,00	100,00	93,26
	2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	100,00	100,00
	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	163.000.000,00	91,14	80,18
	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.300.000,00	19,26	19,26
	2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	100,00	76,64
	2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.646.915,00	57,38	27,05
	2.07.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.944.079,00	45,77	28,78
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	79.999.810,00	87,76	81,98
	2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	99.995.415,00	100,00	99,41
	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	20.492.460,00	96,21	94,56
	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	16.028.730,00	83,32	83,17
	2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	18.277.280,00	95,40	85,42
	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	16.765.800,00	99,73	98,99
	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	21.794.660,00	99,76	95,19

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	4.895.360,00	-	-
	2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	4.987.380,00	-	-
	2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	4.467.460,00	-	-
	2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.650.000,00	100,00	87,96
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	16.999.840,00	98,80	96,86
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.999.900,00	93,56	79,35
	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	42.803.920,00	100,00	90,81
	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	49.419.800,00	100,00	94,16
	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	149.998.900,00	77,44	72,43
	3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.951.580,00	100,00	98,43
	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	13.483.400,00	98,49	92,94

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1.852.000,00	100,00	71,81
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.528.183.049,00	98,78	98,66
	4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	128.436.000,00	90,12	89,72
	4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.750.000,00	100,00	99,96
	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.989.850,00	99,21	94,84
	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	374.572.700,00	98,47	89,15
	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.999.370,00	98,99	93,75
	4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.000.000,00	91,67	91,52
	4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.239.565.630,00	100,00	96,24
	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.740.569.800,00	99,70	98,55
	4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.800.003.972,00	99,37	99,20
	4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	90,74	86,36
	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.815.550.000,00	85,05	81,07
	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	706.016.760,00	100,00	99,84
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.691.720.401,00	98,51	93,02
	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.992.500,00	96,01	95,38
	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	845.705.357,00	100,00	99,93
	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	197.580.000,00	99,92	99,77



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	279.052.848,00	100,00	99,99
	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000,00	83,05	82,99
	4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10.000.000,00	-	-
	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	100,00	100,00
	4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	298.931.309,00	98,00	97,26
	4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	255.616.966,00	98,17	93,36
	4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	47.550.000,00	100,00	99,26
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	59.999.860,00	100,00	86,50
	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	222.299.530,00	97,51	94,99
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	82.984.640,00	98,41	88,62
	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	19.977.620,00	99,74	99,74
	4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5.000.000,00	60,00	60,00
	4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	149.808.000,00	120,83	99,72
	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	339.581.260,00	79,01	75,54
	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	809.511.200,00	101,54	98,56
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	69.999.785,00	71,91	66,84
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	67.212.740,00	93,35	86,21
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	382.490.775,00	96,97	94,17



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.125.999.540,00	98,58	96,88
	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	7.310.464.150,00	100,00	99,11
	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.737.704.850,00	98,87	91,87
	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	228.509.200,00	97,70	93,39
	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	546.978.600,00	86,31	82,34
	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	102.721.800,00	97,32	91,30
	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	945.000.000,00	91,74	85,75
	4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5.000.000,00	100,00	90,40
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	59.999.820,00	93,14	89,87
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	82.893.874,00	107,41	95,07
	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	449.999.910,00	100,13	90,53
	4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	17.799.430,00	85,44	78,38
	4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4.999.920,00	64,00	63,74
	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	19.999.840,00	96,00	94,81
	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	9.999.860,00	94,00	93,08
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5.999.820,00	100,00	100,00
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	23.773.780,00	100,00	81,83
	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	157.425.180,00	98,16	93,01
	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	14.999.780,00	97,92	75,67



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10.049.360,00	64,36	58,62
	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4.999.710,00	88,00	77,67
	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	94.999.720,00	107,02	97,34
Sekretariat DPRD	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.314.742.608,00	100,00	89,29
	4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.316.000,00	96,85	94,62
	4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.050.000,00	100,00	99,43
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.549.470,00	100,00	99,73
	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.360.000,00	100,00	99,89
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.882.520,00	96,11	95,37
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	121.045.900,00	86,41	84,28
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	149.995.600,00	88,81	88,67
	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	268.710.910,00	44,31	44,24
	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.976.800,00	100,00	91,89
	4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.100.000.000,00	100,00	98,04
	4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000,00	96,83	95,24
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	408.000.000,00	100,00	87,18
	4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.529.100,00	100,00	97,68
	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000,00	100,00	100,00

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.491.000,00	100,00	77,17
	4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.401.270,00	94,78	86,41
	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	100,00	97,76
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16.041.680.955,00	99,19	96,63
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	49.500.000,00	90,91	89,39
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.000.000,00	6,67	5,10
	4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	535.300.000,00	98,37	98,32
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	867.727.800,00	100,00	96,79
	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	275.636.000,00	100,00	99,70
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	905.454.800,00	100,00	97,73
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	360.000.000,00	100,00	100,00
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.874.950.000,00	100,00	97,21
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15.937.910.320,00	100,00	99,53
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.063.351.235,00	100,00	96,27
	5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.246.000,00	100,00	96,90
	5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.900.000,00	100,00	99,43
	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	94,40	92,44
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.060.770,00	97,30	95,34

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.229.390,00	98,51	98,49
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.857.800,00	100,00	77,48
	5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.000.000,00	100,00	99,96
	5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	100,00	99,50
	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000,00	100,00	95,41
	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.696.000,00	100,00	97,88
	5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	100,00	100,00
	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.462.000,00	100,00	91,02
	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.600.000,00	100,00	54,44
	5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.924.000,00	93,82	98,93
	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.000.000,00	100,00	99,17
	5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.732.200,00	100,00	98,18
	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	943.850.000,00	99,62	96,22
	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	20.000.000,00	100,00	87,71
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	75.000.000,00	94,93	86,01
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	96,48	96,47



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000,00	97,22	89,17
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	15.000.000,00	100,00	99,70
	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.000.000,00	98,40	96,50
	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000,00	100,00	99,08
	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	90.000.000,00	95,46	91,60
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.368.400,00	99,28	96,31
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2.000.000,00	97,36	96,80
	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.144.550,00	98,22	98,22
	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2.000.000,00	97,36	96,80
	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48.090.540,00	85,82	84,08
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2.000.000,00	97,36	96,80
	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	20.000.000,00	53,09	49,51



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	45.060.000,00	99,54	80,37
	5.05.02.2.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	620.000.000,00	100,00	99,82
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.167.950.821,00	95,83	95,83
	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	959.910.000,00	88,73	87,72
	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31.500.000,00	97,78	97,22
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.988.650,00	100,00	98,51
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.822.449,00	100,00	99,42
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349.997.260,00	100,00	96,39
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	412.414.950,00	85,33	81,40
	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	97.493.150,00	115,39	98,53
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.335.200,00	91,68	85,33
	5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	265.884.228,00	98,12	97,05
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	92,66	92,66
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.600.000.000,00	99,69	99,69
	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.008.200,00	100,00	98,67
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.457.720.000,00	100,00	97,59
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	18,64	18,64
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	203.715.340,00	83,39	82,91
	5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	288.035.000,00	100,00	98,50

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	409.680.000,00	100,00	99,75
	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.970.000,00	100,00	99,20
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	85.292.670,00	75,72	68,42
	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	68.492.670,00	78,08	75,37
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	713.399.800,00	97,77	96,55
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	713.399.800,00	98,72	98,43
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	355.107.960,00	74,12	74,12
	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	175.154.000,00	66,35	66,35
	5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	98.628.880,00	81,65	78,93
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	119.913.800,00	70,86	66,27
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	49.903.000,00	94,78	81,46
	5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	49.999.760,00	70,56	62,64



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	142.835.000,00	97,65	97,65
	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	24.992.400,00	60,30	47,73
	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	161.895.800,00	65,30	54,69
	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	49.982.000,00	86,41	82,64
	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	149.999.860,00	90,38	78,13
	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	99.957.140,00	97,16	86,87
	5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	37.924.980,00	97,39	95,40
	5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	19.999.640,00	87,46	82,06
	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	49.999.420,00	74,24	67,61
	5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	29.999.700,00	92,17	90,11
	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000,00	15,75	15,75

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	252.314.200,00	9,23	9,08
	5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	10.000.000,00	-	-
	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	24.989.400,00	-	-
	5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	29.986.080,00	90,66	86,17
	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	565.428.400,00	90,51	90,33
	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	71.695.000,00	97,34	96,54
	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	649.557.600,00	99,57	98,21
	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	374.957.080,00	90,69	89,50
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	29.210.100,00	94,18	79,63
	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	129.970.000,00	87,04	83,91
	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.060.000,00	100,00	100,00
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	234.006.720,00	78,68	75,18
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	99.999.000,00	90,00	90,00
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	343.994.800,00	92,38	89,88
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	142.949.730,00	68,62	64,17
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	235.558.200,00	97,39	95,80
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	79.699.980,00	52,44	50,08
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	690.589.240,00	91,20	78,02
	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	79.917.380,00	55,48	51,17
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	135.978.170,00	58,71	57,88



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.290.786.017,00	100,00	72,32
	5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.532.762.702,00	100,00	97,94
	5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.150.000,00	100,00	99,43
	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.991.340,00	51,68	33,61
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.866.618,00	97,95	95,49
	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.606.765,00	85,67	75,17
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.676.215,00	88,36	68,14
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.938.200,00	100,00	99,91
	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	76,38	53,37
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.728.000,00	100,00	92,46
	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.098.000,00	87,35	87,35
	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.989.000,00	87,10	72,24
	5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.465.000,00	100,00	70,80
	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	29.892.800,00	94,98	94,73
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	310.911.940,00	89,72	82,35
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	14.962.800,00	100,00	97,98
	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	19.945.600,00	100,00	82,08
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	14.976.800,00	93,38	91,97
	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	33.128.400,00	98,48	87,38

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	563.608.700,00	72,52	71,12
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	188.385.200,00	15,36	13,49
	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.000.000,00	88,60	53,60
	5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	49.683.600,00	65,18	61,49
	5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	50.000.000,00	98,74	90,85
	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	9.990.000,00	98,80	84,18
	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	24.448.800,00	87,63	83,64
	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.356.419.120,00	89,86	86,10
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.921.115.167,00	98,98	98,98
	8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.086.000,00	99,23	82,99
	8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.650.000,00	100,00	99,94
	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.987.220,00	99,51	99,51
	8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.992.200,00	82,89	82,89
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.112.160,00	87,98	87,10
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.688.360,00	72,87	72,87
	8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000,00	81,60	81,60
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.920.960,00	73,94	73,94
	8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	14.931.040,00	100,00	100,00
	8.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	389.700.000,00	100,00	99,44



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.812.148,00	97,15	94,97
	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	100,00	44,44
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.520.000,00	60,21	60,21
	8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	100,00	98,50
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.078.640,00	87,45	87,45
	8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000,00	94,26	94,19
	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.960.000,00	82,91	71,43
	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.340.113.755,00	95,78	95,38
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	51.421.050,00	91,51	89,91
	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.783.924.600,00	99,92	99,88



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24.999.690,00	93,77	85,91
	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	1.394.199.040,00	100,00	94,70
	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	106.480.540,00	63,86	63,78
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	386.443.160,00	92,98	92,33
	8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	39.999.990,00	97,18	83,59
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	79.999.720,00	74,94	72,83



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	19.999.680,00	67,49	67,48
	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	79.334.120,00	78,00	78,00
Inspektorat	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.629.446.825,00	100,00	97,81
	6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.536.000,00	94,39	94,39
	6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.200.000,00	100,00	100,00
	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.054.420,00	100,00	99,76
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.995.000,00	100,00	92,84
	6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.997.200,00	99,83	90,12
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.680,00	100,00	97,14
	6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	175,00	99,95
	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.644.600,00	82,60	77,11
	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.300.000,00	93,02	93,02
	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	100,00	74,18
	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000,00	75,00	70,84
	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	98,24	94,32
	6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.336.500,00	77,22	65,89

Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.980.000,00	100,00	99,01
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	55.420.000,00	100,00	99,91
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	545.700.000,00	93,18	81,82
	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	92.140.000,00	100,00	99,92
	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	345.270.000,00	97,44	90,03
	6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	150.038.990,00	90,80	82,94
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	97.750.000,00	90,96	81,97
	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	40.987.500,00	77,95	69,53
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	177.325.200,00	92,83	86,02
	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	41.310.000,00	100,00	99,85
	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	233.094.600,00	99,37	82,88
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	9.112.660,00	34,02	34,02
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	139.999.660,00	71,73	69,73
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	35.327.190,00	98,56	98,22
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20.230.000,00	50,42	50,42
Kecamatan Tarakan Tengah	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.695.798.917,00	100,00	95,61
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180.816.000,00	98,51	64,59
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.500.000,00	100,00	99,43



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.992.110,00	100,00	99,06
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.994.570,00	99,54	93,11
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.169.760,00	100,00	97,90
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.961.400,00	97,95	95,56
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.566.279,00	100,00	97,50
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.780.000,00	100,00	100,00
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.000.000,00	100,00	82,54
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.794.760,00	82,90	70,17
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.999.986,00	100,00	80,20
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.514.400,00	83,18	80,84
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	100,00	99,65
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.785.300,00	100,00	96,70
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39.999.880,00	100,00	99,85
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000,00	100,00	99,39
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.003.163.200,00	99,82	97,58
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.256.400.000,00	100,00	95,08
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.956.330,00	100,00	99,99



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25.000.000,00	98,40	98,40
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	291.699.840,00	88,05	87,57
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	8,00	8,00
Kecamatan Tarakan Barat	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.242.102.628,00	97,53	97,53
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	153.238.500,00	78,21	78,21
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.300.000,00	100,00	94,29
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.986.380,00	98,60	98,50
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.999.090,00	99,96	90,92
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.180,00	85,02	83,80
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.184.800,00	100,00	79,15
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.710.818,00	100,00	98,32
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.106.370,00	100,00	97,71
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	100,00	100,00
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	257.720.000,00	96,33	96,33
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.000.000,00	100,00	100,00



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.000.000,00	73,99	73,99
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.575.925,00	89,86	88,85
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	100,00	98,00
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.270.000,00	100,00	99,29
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000,00	100,00	99,18
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.379.060,00	100,00	99,73
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000,00	100,00	98,81
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299.980.370,00	91,12	90,94
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.420.000.000,00	95,47	95,47
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.992.660,00	100,00	99,99
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25.000.000,00	100,00	100,00
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	229.999.640,00	99,10	98,78
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	100,00	100,00



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kecamatan Tarakan Timur	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.350.142.335,00	96,95	96,95
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.631.946.644,00	93,50	93,50
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	162.418.500,00	100,00	90,64
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.924.000,00	64,63	64,63
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34.300.000,00	100,00	99,43
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.550.000,00	100,00	99,43
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.989.460,00	100,00	97,75
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.995.290,00	100,00	87,85
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.997.670,00	100,00	99,92
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.400,00	100,00	98,45
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.669.780,00	100,00	99,86
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.981.132,00	100,00	87,10
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.961.360,00	50,41	49,44
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000,00	100,00	100,00
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	100,00	100,00
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.823.280,00	100,00	96,06
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.215.442,00	86,64	86,64
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.937.400,00	100,00	99,99
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.288.000,00	100,00	100,00
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.000.000,00	100,00	100,00



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fiksik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	100,00	51,07
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.773.420,00	87,88	50,07
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.823.400,00	100,00	90,78
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.854.830,00	96,14	96,08
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.931.100,00	100,00	99,12
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	44.998.910,00	100,00	99,34
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000,00	100,00	100,00
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.050.000.000,00	100,00	99,43
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	450.000.000,00	100,00	99,45
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	619.757.570,00	93,59	93,03
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	179.967.960,00	93,73	93,73
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.882.800.000,00	93,68	93,54
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	897.500.000,00	91,87	86,69
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	4.988.440,00	100,00	100,00
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.976.330,00	80,78	80,78



Urusan	Kode	Kegiatan	Biaya Menurut DPA (Rp.)	RealisaSI	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	35.000.000,00	100,00	98,00
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15.000.000,00	100,00	99,98
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras,	299.666.414,00	99,53	98,49
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	193.999.450,00	92,15	92,15
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	100,00	100,00
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	100,00	100,00

Sumber : BPKAD, 2024

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Otonomi yang seluas-luasnya diberikan kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan adalah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menyebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat dan pemerintahan.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun

penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Penerapan SPM oleh Pemerintah Kota Tarakan dipandang perlu agar pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi lebih terukur. Hal ini dikarenakan SPM sudah disertai tolok ukur pencapaian target kinerja yang logis dan riil sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparat Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di daerah.

Dasar hukum penyusunan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun

- 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
 8. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran SPM, maka telah disusun kebijakan pemerintah Kota Tarakan dalam memenuhi SPM. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tarakan untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah, ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kota Tarakan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Tarakan menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri.



Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, serta pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM mengintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah (lima tahunan) RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan jangka pendek (tahunan) RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selain itu, SPM juga diintegrasikan ke dalam dokumen penganggaran (APBD). Pemerintah daerah melaksanakan koordinasi dan melaporkan capaian SPM dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), serta menerapkan SPM sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Target Indikator SPM diintegrasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Target tahunan indikator SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), KUA PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Tabel I. 8
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Tarakan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian		Rumus
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Pendidikan	1.	Pendidikan Dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$
				$\frac{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$
		2.	Pendidikan Kesenjangan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah}} \times 100\%$
		3.	Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun}} \times 100\%$
2.	Kesehatan	1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil}} \times 100\%$
		2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin}} \times 100\%$
		3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir}}{\text{Jumlah bayi baru lahir}} \times 100\%$
		4.	Pelayanan Kesehatan Balita	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$
		5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar}} \times 100\%$

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian		Rumus
(1)	(2)	(3)		(4)
		6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15 – 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15 – 59 tahun}} \times 100\%$
		7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	$\frac{\text{Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 60 tahun keatas}} \times 100\%$
		8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi}} \times 100\%$
		9.	Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Mellitus</i>	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM}} \times 100\%$
		10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ berat}} \times 100\%$
		11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga <i>Tuberkolusis</i>	$\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan layanan TBC sesuai standar}}{\text{Jumlah orang terduga TBC}} \times 100\%$
		12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>HIV</i>)	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV}} \times 100\%$

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian		Rumus
(1)	(2)	(3)		(4)
3.	Pekerjaan Umum	1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	$\frac{\text{Jumlah kumulatif rumah tangga masyarakat yang mendapatkan akses ter hadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota}}{\text{Jumlah total proyeksi ruma h tangga di seluruh kota}} \times 100\%$
		2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di kota}} \times 100\%$
4.	Perumahan Rakyat	1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$
		2.	Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hakatas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$
5.	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$
		2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang harus memperoleh layanan informasi rawan bencana}} \times 100\%$

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian		Rumus
(1)	(2)	(3)		(4)
		3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}} \times 100\%$
		4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang harus memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}} \times 100\%$
		5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap} + \text{jumlah layanan pemadaman dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan perangkat daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$
6.	Sosial	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutu han dasarnya diluar panti}}{\text{populasi penyandang disabilitas terlantar}} \times 100\%$
		2.	Rehabilitasi Sosial Anak terlantar di luar Panti	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti}}{\text{populasi anak terlantar}} \times 100\%$
		3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti	$\frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti}}{\text{populasi lanjut usia terlantar}} \times 100\%$



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian		Rumus
(1)	(2)	(3)		(4)
		4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti	$\frac{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti}}{\text{populasi gelandangan dan pengemis}} \times 100\%$
		5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap & Paska Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah}} \times 100\%$

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2024

Muatan Standar Pelayanan Minimal telah terintegrasi ke dalam Kebijakan Umum Pemerintah Kota Tarakan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan 6 (enam) bidang urusan, baik dalam rencana penerapan maupun capaian SPM. Arah kebijakan tahun 2023 yang menjadi prioritas pembangunan untuk Urusan wajib Pelayanan dasar, khususnya yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi :

1. Bidang Urusan Pendidikan

Arah kebijakan tahun 2023 yang menjadi prioritas dinas pendidikan Kota Tarakan diarahkan pada pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat khususnya yang tidak mampu dan pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Berikut ini tabel arah kebijakan Bidang Urusan Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2023 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel I. 9
Integrasi SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kota Tarakan Tahun 2023

Sasaran Pemerintah Kota Tarakan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Pendidikan Dasar 2. Pendidikan Kesenjangan 3. Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Partisipasi Sekolah	1. Distribusi sumber daya pendidikan 2. Pemberian Stimulus pendidikan 3. Standardisasi Layanan Pendidikan di Semua Fasilitas Pendidikan 4. Perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan informal dan kesetaraan

Sumber : Dinas Pendidikan, 2024

2. Bidang Urusan Kesehatan

Arah kebijakan tahun 2023 yang menjadi prioritas Dinas Kesehatan Kota Tarakan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan obat dan peningkatan sarana dan prasarana dan

pelayanan kesehatan yang terpadu, berkualitas dan berstandar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Berikut ini tabel arah kebijakan Bidang Urusan Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel I. 10
Integrasi SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kota Tarakan Tahun 2023

Sasaran Pemerintah Kota Tarakan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9. Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Mellitus</i> 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga <i>Tuberkulosis</i> 12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>HIV</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat; 2. Mencukupi kebutuhan sarana prasarana Puskesmas sesuai standar; 3. Menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan; 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak; 5. Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak; 6. Meningkatkan perlindungan dari paparan penyakit; 7. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan kesehatan 8. Pemenuhan dan peningkatan kualitas farmasi dan alat Kesehatan 9. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat; 2. Mewujudkan pelayanan kesehatan terjangkau melalui jaminan kesehatan daerah; 3. Meningkatkan partisipasi jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat menuju universal coverage; 4. Peningkatan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan; 5. Peningkatan kualitas ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; 6. Peningkatan kesehatan keluarga dan reproduksi 7. Perbaikan gizi masyarakat; 8. Mengendalikan penyebaran penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kewaspadaan dini

Sasaran Pemerintah Kota Tarakan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
			terhadap kejadian luar biasa (KLB) 9. Peningkatan promosi kesehatan / Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Arah kebijakan tahun 2023 yang menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan diarahkan pada perluasan dan pemerataan jaringan air bersih skala lokal dan regional dan penyediaan sanitasi layak dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum. Berikut ini tabel arah kebijakan bidang urusan pekerjaan umum Kota Tarakan Tahun 2023 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel I. 11
Integrasi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kota Tarakan Tahun 2023

Sasaran Pemerintah Kota Tarakan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya pelayanan air bersih	1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1. Pengintegrasian Program Penanggulangan kemiskinan	1. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 2. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum , 2024

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Arah kebijakan tahun 2023 yang menjadi prioritas dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Tarakan diarahkan pada 1. Penyediaan perumahan layak huni bagi MBR yang belum memiliki tanah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

perumahan rakyat. Berikut ini tabel arah kebijakan Bidang Urusan perumahan rakyat Kota Tarakan Tahun 2023 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel I. 12
Integrasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kota Tarakan Tahun 2023

Sasaran Pemerintah Kota Tarakan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR 2. Menurunnya luas kawasan kumuh	1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana 2. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	1. Pengintegrasian Program Penanggulangan kemiskinan	1. Penyediaan perumahan layak huni bagi MBR yang belum memiliki tanah

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , 2024

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Arah kebijakan tahun 2023 yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan diarahkan pada mengurangi resiko bencana, dan peningkatan pelindungan kepada masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Berikut ini tabel arah kebijakan bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel I. 13
Integrasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023

Sasaran Pemerintah Kota Tarakan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga	1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Pelayanan Informasi	1. Meningkatkan cakupan pemberdayaan pelindungan	1. Meningkatkan jumlah operasi pengendalian keamanan

Sasaran Pemerintah Kota Tarakan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
ketentraman 2. Meningkatnya penanganan bencana yang efektif	Rawan Bencana 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	masyarakat (satlinmas) 2. Meningkatkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara 3. Meningkatkan persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 4. Peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana 5. Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan bencana dan ketanggapdaruratan bencana 6. persentase terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di desa/kelurahan;	lingkungan 2. Meningkatkan jumlah pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum 3. Meningkatkan jumlah operasi penertiban pelanggaran perda/perkada 4. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kebencanaan 5. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 6. Meningkatkan persentase tercukupinya sarana dan prasarana pencegahan, pengendalian kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait;

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja , 2024

6. Bidang Urusan Sosial

Arah kebijakan tahun 2023 yang menjadi prioritas Dinas Sosial Kota Tarakan diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan sosial dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. Berikut ini tabel arah kebijakan Bidang Urusan Sosial Kota Tarakan Tahun 2023 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel I. 14
Integrasi SPM Bidang Urusan Sosial
Kota Tarakan Tahun 2024

Sasaran Pemerintah Kota Tarakan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) di Luar panti 2. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial 3. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti 2. Rehabilitasi Sosial Anak terlantar di luar Panti 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap & Paska Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota	1. Meningkatkan kesejahteraan sosial	1. Memperkuat kelembagaan kesejahteraan sosial

Sumber : Dinas Sosial, 2024



BAB 2

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

II. BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja pemerintah daerah Kota Tarakan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel II. 1
Capaian Kinerja Makro
Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,68	77,53	1,109 ↑
2	Angka Kemiskinan	6,30	6,10	-3,175 ↓
3	Angka Pengangguran	5,76	4,01	-30,382 ↓
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,59	6,90	9,123 ↑
5	Pendapatan Per-Kapita			
	Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu)	109,76*	189,131**	0,723 ↑
	Atas Dasar Harga Konstan (Ribu)	97,27*	96,455**	-0,008 ↓
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,267	0,253	0,052 ↑

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024, diolah.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat di lihat pada tabel berikut ini:

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Tabel II. 2
Capaian Kinerja Kunci Keluaran Tahun 2023

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	116	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	101	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3736	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	322	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada PAUD	222	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	173	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	43	Dinas Pendidikan	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	101	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	31051	Dinas Pendidikan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	6257	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	600	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	569	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1740	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	670	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1180	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	602	Dinas Pendidikan	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	296	Dinas Pendidikan	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	248	Dinas Pendidikan	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	224	Dinas Pendidikan	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	126	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1136	Dinas Pendidikan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	589	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	59	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	24	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	135	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	90	Dinas Pendidikan	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	14	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1054	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1054	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	162	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	148	Dinas Pendidikan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	114	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	59	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	11	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	5		
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	0		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	0		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	0		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	0		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	0		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	0		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0		
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0		
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0		
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0		
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0		
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0		
		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	0		
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0		
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0		
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	0		
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0		
		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0		
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0		
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0		
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0		
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0		
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0		
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0		
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0		
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0		
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0		
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0		
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0		
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0		
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0		
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0		
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0		
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	0		
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0		
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0		
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0		
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0		
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0		
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	0		
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	0		
		Panjang jalan yang dibangun	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Panjang jembatan yang dibangun	0		
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0		
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0		
		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	0		
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0		
		Panjang jalan yang dipelihara	0		
		Panjang jembatan yang dipelihara	0		
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	0		
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0		
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	0		
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0		
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0		
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	0		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0		
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0		
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha	0		

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0		
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0		
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0		
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0		
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0		
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
		Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0		
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0		
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0		
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0		
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0		
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	0		
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0		
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0		
		Jumlah rumah di kab/kota	0		
		Jumlah unit PK RTLH	0		
		Jumlah rumah tidak layak huni	0		
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0		
		Rasio rumah dan KK	0		
		Jumlah rumah pembangunan baru	0		
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0		
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0		
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	0		
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0		
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0		
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0		
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	0		
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	0		
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0		
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	0		
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	0		
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	0		
		Tersedianya sarana prasarana minimal	0		
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0		
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	89,23		

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0		
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0		
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	1,09		
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,78		
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	10,23		
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	1,04		
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0		
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0		
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	0		
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100		
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	0		

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0		
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0		
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0		
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	0		
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	0		
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0		
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0		
6	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	0		
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0		
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	0		
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	0		
		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	0		
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0		
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0		
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0		
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia	0		
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0		
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	0		
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0		
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0		
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0		
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	0		
7	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	0		
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0		
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0		
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0		
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	0		
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0		
		Persentase LPK yang terakreditasi	0		
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	0		
		Jumlah penganggur yang dilatih	0		
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	0		
		Persentase penyerapan lulusan	0		
		Lulusan bersertifikat kompetensi	0		
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0		
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0		
		Data tingkat produktivitas total	0		
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	0		
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0		
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	0		
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	0		
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	0		
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0		
		Jumlah mogok kerja	0		
		Jumlah penutupan perusahaan	0		
		Jumlah perselisihan kepentingan	0		
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		
		Jumlah perselisihan PHK	0		
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0		
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0		

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0		
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0		
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	0		
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	0		
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	0		
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0		
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0		
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0		
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	0		
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0		
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0		
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0		

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0		
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0		
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0		
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	0		
		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	0		
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0		
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0		
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	0		
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0		
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0		

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	0		
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0		
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0		
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0		
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0		
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	0		
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	0		
9	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	0		
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	0		
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0		
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	0		
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tertanganinya kerawanan pangan	0		
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0		
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	0		
10	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0		
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0		
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0		
		Dokumen Izin membuka tanah	0		
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0		
11	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	0		
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	0		
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	0		
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	0		
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	0		

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0		
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0		
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0		
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	0		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	0		
		Penerbitan akta perceraian	0		
		Penerbitan akta kematian	0		
		Penyajian data kependudukan	0		
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0		
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0		
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0		
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0		
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	0		
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	0		
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	0		
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	0		
		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	0		
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0		
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	0		
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	0		

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0		
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	0		
15	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	69		
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	61		
		Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0		
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	112		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	0		
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	0		
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	0		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0		
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0		
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0		
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0		
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0		
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	0		
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	0		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	0		
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0		
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	0		
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	0		
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	0		
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	0		
17	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0		
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0		
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0		
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0		
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0		
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0		
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0		
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0		
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0		
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0		
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	12		
		Kegiatan pameran penanaman modal	0		
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0		
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	0		
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	0		
		Laporan realisasi penanaman modal	0		
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	0		
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	0		
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	0		
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0		
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0		

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	0		
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0		
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	0		
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0		
20	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	0		
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0		
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0		
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0		
		Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0		
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	0		
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	0		
21	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	0		

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0		
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0		
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0		
22	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	0		
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	0		
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	0		
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0		
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0		
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0		
		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0		
		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0		
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0		
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0		
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0		
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0		
		Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	0		
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	0		
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0		
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	0		
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0		

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0		
23	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0		
		Persentase kermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0		
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0		
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0		
		Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	0		
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0		
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0		
24	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	0		
		persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	0		
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0		
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0		
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0		

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0		
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0		
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0		
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0		
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0		
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0		
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0		
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0		
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	0		
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	0		
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	0		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	0		
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0		
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0		
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0		
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0		
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0		
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0		
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0		
27	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	0		
		Prasarana pertanian yang digunakan	0		
		Penerbitan izin usaha pertanian	0		
		Persentase prasarana yang digunakan	0		
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0		
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0		



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0		
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0		
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0		
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0		
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0		
	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0		
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	0		
		Persentase penerbitan TDG	0		
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0		
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0		
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0		
		Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0		
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0		
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0		
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	0		

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0		
30	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0		
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	0		
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0		
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0		
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	0		
31	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0		
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0		
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0		

Sumber : Website : elppd.kemedagri.go.id, Kota Tarakan 2024

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel II. 3
Indikator Kinerja Kunci Hasil Tahun 2023

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	47,293	Dinas Pendidikan	Sesuai
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	87,109	Dinas Pendidikan	Sesuai
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	80,603	Dinas Pendidikan	Sesuai
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	7,091	Dinas Pendidikan	Sesuai
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2,704	Dinas Kesehatan	Gunakan data penduduk dari Disdukcapil untuk data jml Penduduk
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,000	Dinas Kesehatan	Sesuai
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	97,540	Dinas Kesehatan	Sesuai
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,375	Dinas Kesehatan	Sesuai

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,206	Dinas Kesehatan	Data jml bayi menggunakan data real bukan estimasi pada pusat kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,000	Dinas Kesehatan	Data jml balita menggunakan data real bukan estimasi pada pusat kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86,111	Dinas Kesehatan	Data jumlah anak usia dini disesuaikan dgn data dari Disdukcapil
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	79,603	Dinas Kesehatan	Data bukan berbentuk estimasi melainkan data real dari disdukcapil yang berkaitan dengan jumlah penduduk
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,053	Dinas Kesehatan	Data bukan berbentuk estimasi melainkan data real dari disdukcapil yang berkaitan

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					dengan jumlah penduduk
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	46,310	Dinas Kesehatan	Sesuai
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70,630	Dinas Kesehatan	Sesuai
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	78,231	Dinas Kesehatan	Sesuai
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	112,524	Dinas Kesehatan	Sesuai
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,000	Dinas Kesehatan	Sesuai
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	78,474	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	sesuai
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	76,255	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	sesuai
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TDI Khusus Surat Keterangan di Ttd Kepala Daerah, Nilai 0/1 bukan 0/0

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	98,770	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,123	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perhitungan disesuaikan dengan rumus yang telah ditentukan
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	69,570	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	39,763	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	99,384	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah proyek belum dilampirkan
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Sesuai
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dikareakan tidak terdapat kreteria rumah yang harus direalokasi

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	45,146	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Sesuai
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,965	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Sesuai
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	24,248	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Sesuai
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sesuai
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sesuai
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	89,230	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	89,637	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sesuai

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,450	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sesuai
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100,000		data dukung belum lengkap
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,000		Data dukung belum lengkap
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	86,667	Dinas Perindustrian dan Tenagakerja	Belum di Upload
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,935	Dinas Perindustrian dan Tenagakerja	Sesuai
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	38,284	Dinas Perindustrian dan Tenagakerja	Sesuai
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	67,273	Dinas Perindustrian dan Tenagakerja	Sesuai
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	33,355	Dinas Perindustrian dan Tenagakerja	Sesuai



No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	30,511	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sesuai
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	blm di upload
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	81,410	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	blm di Upload
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,572	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sesuai
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Sesuai
		Persenase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Sesuai

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Sesuai
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Belum ada Eviden
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	100,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Sesuai
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	33,333	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Blum ada Eviden
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	69,610	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	80,038	Dinas Lingkungan Hidup	Rincian total vol sampah yg ditangani belum di lampirkan
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	8,333	Dinas Lingkungan Hidup	eviden belum Upload
12	Administrasi Kependudukan	Perekaman KTP elektronik	97,167	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	53,252	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai
		Kepemilikan akta kelahiran	96,269	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	sesuai
		Persentase pengentasan desa tertinggal	0,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TDI Khusus Surat Keterangan ttd Sekretaris Daerah
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	0,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	TDI Khusus Surat Keterangan ttd Sekretaris Daerah
		TFR (Angka Kelahiran Total)	2,280	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Sesuai
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66,654	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Belum di Upload
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,590	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Belum di Upload
		Rasio konektivitas kabupaten/kota	2,100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Belum di Upload
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,270	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Belum di Upload

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sesuai
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	94,815	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sesuai
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	68,527	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	dasar jumlah masyarakat dan jumlah penduduk
15	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	0,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Tidak ada Eviden dan Belum Upload
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	0,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
16	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	143,431	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai
17	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,063	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Lampirkan data Disdukcapil terkait jumlah penduduk usia 16-30 tahun

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	18,654	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Lampirkan data kependudukan dari disdukcapil dan perbaiki hitungan sesuai rumus
		Peningkatan prestasi olahraga	12,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	belum ada eviden
18	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	sesuai
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sesuai
19	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	sesuai
20	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	90,541	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Sesuai
21	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	70,930	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Mengikuti data Nasional
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	66,150	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai
22	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	69,130	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)			
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	5,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai
	Urusan Pilihan				
23	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	103,585	Dinas Perikanan	Nilai belum sesuai masih konfirmasi
24	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	20,466	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Sesuai
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	22,416	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Sesuai
		Tingkat hunian akomodasi	33,535	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Sesuai
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3,326	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Sesuai
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	20,733	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jml PAD sektor Pariwisata tidak sesuai dengan

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					dokumen yg terlampir
25	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	420,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sesuai
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	-8,696	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sesuai
26	Kehutanan			Tidak ada dinas kehutanan	TDI Khusus
27	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0,000		Bukan menjadi Urusan Pemerintah Daerah (Surat pernyataan harus ditandatangani oleh Kepala Daerah)
28	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Belum ada Eviden
		Persentase kinerja realisasi pupuk	0,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Belum ada Eviden
		Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	belum ada Eviden

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	-64,897	Dinas Perindustrian dan TenagaKerja	Belum Upload
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	1,000	Dinas Perindustrian dan TenagaKerja	Tidak ada Eviden
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	92,259	Dinas Perindustrian dan TenagaKerja	belum di Upload
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,000	Dinas Perindustrian dan TenagaKerja	tidak ada Eviden
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0,000	Dinas Perindustrian dan TenagaKerja	tbelum di Upload
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	37,390	Dinas Perindustrian dan TenagaKerja	belum di Upload
30	Transmigrasi				Bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah

Sumber : Website : elppd.kemedagri.go.id, Kota Tarakan 2024

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II. 4
Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	17,547	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Sesuai
		Rasio PAD	15,060	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sesuai
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,000	Inspektorat	Sesuai
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,000	Inspektorat	Sesuai
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	57,235	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sesuai
		Opini Laporan Keuangan	-	-	
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	-	-	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	80,379		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	65,000		

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	144,284		
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	71,981	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	Sesuai
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	77,433	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	Sesuai
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,908	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	keterangan jenis sertifikat sama semua dan NIP PNS masih ada yang salah
4	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	8,905	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	8,861	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		Manajemen Aset	-	-	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,634	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kineja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	100,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sesuai
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sesuai

Sumber : Website : elppd.kemedagri.go.id, Kota Tarakan 2024

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Tarakan. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tarakan tahun 2023. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tarakan. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Tarakan, dan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud dilakukan analisis deskriptif dengan klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 5
Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	90,01 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90 %	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017

Tingkat Realisasi Positif yaitu dengan Membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk/jelek dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel II. 6
Target Kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Targert Capaian Kinerja Program				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 2024
			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi I : Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing							
Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,83	77,48	78,03	78,58	79,13	79,13
Sasaran 1, Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	73,97	74,29	74,4	74,51	74,62	74,62
Sasaran 2, Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	2. Harapan Lama sekolah	14,02	13,93	14,01	14,09	14,17	14,17
	3. Rata-Rata Lama Sekolah	9,97	9,97	9,98	9,99	10,00	10,00
Sasaran 3, Meningkatnya daya beli masyarakat	4. Pengeluaran Perkapita Masyarakat	Rp1.713.021	Rp 1.800.000	Rp1.900.000	Rp2.000.000	Rp2.100.000	Rp2.100.000
Misi II : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat							
Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	53,91	58,00	59,00	60,00	61,00	61,00
Sasaran 4, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	5. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	6. Nilai SAKIP	62,67/B	64,00/B	66,00/B	70,01/BB	72,00/BB	72,00/BB



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Targert Capaian Kinerja Program				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 2024
			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran 5, Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	7. Indeks Profesionalitas ASN	49,28	55	60	65	70	70
Sasaran 6, Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,91	84,50	84,75	85	85,25	85,25
Misi III : Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.							
Tujuan 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78,00	79,00	79,50	80,00	81,50	81,50
Sasaran 7, Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	9. Persentase Ruang Terbuka Hijau	50,40%	52,96%	55,51%	58,07%	60,63%	60,63%
Sasaran 8, Meningkatnya pelayanan air bersih	10. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air Minum	74,05%	74,38%	92,34%	95,62%	95,96%	95,96%
Sasaran 9, Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	11. Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	72,63%	72,75%	72,87%	72,99%	73,11%	73,11%



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Targert Capaian Kinerja Program				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 2024
			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran 9, Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	12. Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	16,67%	57,58%	72,73%	87,88%	100,00%	100,00%
	13. Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	21,12%	45,00%	58,75%	82,50%	100,00%	100,00%
	14. Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	60,21%	60,65%	64,14%	65,63%	65,94%	65,94%
	15. Persentase pembinaan jasa konstruksi	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	16. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82,49%	86,01%	89,54%	93,94%	98,35%	98,35%
	17. Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	0,57	1,29	1,27	1,25	1,23	1,23
	18. Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Sasaran 10, Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	19. Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Sasaran 11, Menurunnya luas kawasan kumuh	20. Persentase luas kawasan kumuh	38,34%	30,47%	22,61%	14,74%	6,87%	6,87%



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Targert Capaian Kinerja Program				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 2024
			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi IV : Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas							
Tujuan 4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Gini Rasio	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28
Sasaran 12, Menurunnya kemiskinan	21. Angka Kemiskinan	6,24	5,70	5,55	5,40	5,25	5,25
Sasaran 13, Menurunnya pengangguran,	22. Tingkat Pengangguran Terbuka	5,84	5,79	5,74	5,69	5,64	5,64
Sasaran 14, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	23. Laju pertumbuhan ekonomi	-0,78	5,65	5,93	6,23	6,53	6,53
Sasaran 15, Terkendalinya Inflasi daerah	24. Tingkat Inflasi	1,2	3,70	3,50	3,20	3,00	3,00
Misi V : Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreativitas dan inovatif berdasarkan ilmu pengetahuan							
Tujuan 5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,80	68,83	69,28	69,74	70,19	70,19
Sasaran 16,	25. Indeks Kualitas Air	45.56	45.66	45.76	45.86	45.96	45.96



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Targert Capaian Kinerja Program				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 2024
			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menurunnya pencemaran lingkungan	26. Indeks Kualitas Udara	93.42	91.44	91.55	91.66	91.77	91.77
	27. Indeks Tutupan La han	49.46	51.06	52.76	54.46	56.16	56.16
	28. Persentase sampah yang dikelola	90,77%	98,00%	99,00%	99,00%	98,00%	98,00%
Sasaran 17, Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif	29. Persentase Luas genangan banjir	0,23%	0,23%	0,12%	0,11%	0,10%	0,10%
	30. Persentase pelayanan Kebencanaan	n.a	100%	100%	100%	100%	100%
	31. Persentase pelayanan bencana kebakaran	92%	100%	100%	100%	100%	100%
Misi VI : Meningkatkan Pembangunan Akhlak Dan Moral Sesuai Kearifan Lokal Serta Mewujudkan Kepastian Hukum							
Tujuan 6. Meningkatkan kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat	32. Indeks Toleransi	5,34	5,30	5,35	5,40	5,45	5,45
Sasaran 18, Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	33. Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda diolah, 2024



2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Perjanjian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Penetapan Kinerja Kota Tarakan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 7
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
I	Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Poin	78,58	77,53	98,66
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,51	74,24	99,64
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,09	14,21	100,85
		3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,99	10,36	103,70
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	4	Pengeluaran Perkapita Masyarakat	Rupiah	Rp2.000.000	Rp1.733.250	86,66
II	Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		Poin	60,00	71,99	119,98
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	5	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100
		6	Nilai SAKIP	Predikat	70,01	64,53	92,17
5	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	7	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	65,00	61,19	94,14
6	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85,00	86,74	102,05
III	Tujuan 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		Poin	80	79,96	



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
7	Meningkatnya ruang terbuka hijau	9	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	58,07	58,24	100,29
8	Meningkatnya pelayanan air bersih	10	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	Persen	95,62	98,99	103,52
9	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	11	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	72,99	75,48	103,41
10	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	12	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	Persen	87,88	86,54	98,48
		13	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	Persen	82,50	100	121,21
		14	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	Persen	65,63	68,37	104,17
		15	Persentase pembinaan jasa konstruksi	Persen	80,00	85,00	106,25
		16	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	93,94	90,55	96,39
		17	Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	Rasio	1,25	1,19	95,20
		18	Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	Persen	60,00	58,00	96,67
11	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	19	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	Persen	80,00	97,61	122,01



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
12	Menurunnya luas kawasan kumuh	20	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	17,64	17,43	101,19
IV	Tujuan 4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Gini Rasio		0,3	0,290	0,253	
13	Menurunnya kemiskinan	21	Angka Kemiskinan	Persen	5,40	6,1	87,04
14	Menurunnya pengangguran	22	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,69	4,01	129,53
15	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	23	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	6,23	6,10	97,91
16	Terkendalnya inflasi daerah	24	Tingkat Inflasi	Persen	3,20	2,46	123,13
V	Tujuan 5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,74	69,61	
17	Menurunnya pencemaran lingkungan	25	Indeks Kualitas Air	Poin	55,02	54,44	98,95
		26	Indeks Kualitas Udara	Poin	91,66	93,14	101,61
		27	Indeks Tutupan Lahan	Poin	54,46	52,1	95,67
		28	Persentase sampah yang dikelola	Persen	99,00	97,66	98,65
18	Meningkatnya penanganan bencana yang efektif	29	Persentase Luas genangan banjir	Persen	0,11	0,1106	99,45
		30	Persentase pelayanan Kebencanaan	Persen	100,00	100,00	100,00
		31	Persentase pelayanan bencana kebakaran	Persen	100,00	100,00	100,00



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
VI	Tujuan 6. Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat	Indeks Kota Toleran		Poin	5,40		
19	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	32	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	Persen	100,00	100,00	100,00
Rata - rata capaian indikator kinerja							101,93
Kriteria Penilaian						Sangat Tinggi	

Sumber: Bappeda diolah, 2024

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Hasil pengukuran kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II. 8
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi			Keterangan
					2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Poin	76,23	76,68	77,53	Naik
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,04	74,06	74,24	Naik
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,03	14,04	14,21	Naik
		3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,98	10,08	10,36	Naik
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	4	Pengeluaran Perkapita Masyarakat	Rupiah	Rp1.725.412	Rp1.652.721	Rp1.733.250	Naik
II	Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		Poin	54,49	58,26	71,99	Naik
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	5	Opini BPK	WTP	WTP	WTP*	WTP**	Tetap
		6	Nilai SAKIP	Nilai/Predikat	63,41/B	65,13/B	64,53	Turun
5	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	7	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	49,36	52,12	61,19	Naik
6	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85,5	86,81	86,74	Turun

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi			Keterangan
					2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III	Tujuan 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		Poin	n/a	0	79,96	Naik
7	Meningkatnya ruang terbuka hijau	9	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	52,96	55,56	58,24	Naik
8	Meningkatnya pelayanan air bersih	10	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	Persen	94,87	92,89	98,99	Naik
9	Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan	11	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	75,1	74,17	75,48	Naik
		12	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	Persen	60,6	110,61	86,54	Turun
		13	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	Persen	63,5	59,01	100	Naik
		14	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	Persen	65,97	67,385	68,37	Naik
		15	Persentase pembinaan jasa konstruksi	Persen	22,79	24,28	85,00	Naik
		16	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	85,66	89,54	90,55	Naik
		17	Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	Rasio	1,3	1,22	1,19	Turun



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi			Keterangan
					2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		18	Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	Persen	n/a	29	58,00	Naik
10	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	19	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	Persen	51,35	66,52	97,61	Naik
11	Menurunnya luas kawasan kumuh	20	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	34,41	31,77	17,43	Turun
IV	Tujuan 4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Gini Rasio		Poin	0,261	0,26	0,253	Turun
12	Menurunnya kemiskinan	21	Angka Kemiskinan	Persen	6,71	6,3	6,1	Turun
13	Menurunnya pengangguran	22	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,94	5,76	4,01	Turun
14	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	23	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	3,95	5,59	6,10	Naik
15	Terkendalnya inflasi daerah	24	Tingkat Inflasi	Persen	2,83	3,98	2,46	Turun
V	Tujuan 5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Poin	73,15	68,38	69,61	Naik
16	Menurunnya pencemaran lingkungan	25	Indeks Kualitas Air	Poin	63,33	53,33	54,44	Naik
		26	Indeks Kualitas Udara	Poin	Poin	93,24	93,14	Turun
		27	Indeks Tutupan Lahan	Poin	52,79	52,81	52,1	Turun



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi			Keterangan
					2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		28	Persentase sampah yang dikelola	Persen	92,51	95,14	97,66	Naik
17	Meningkatnya penanganan bencana yang efektif	29	Persentase Luas genangan banjir	Persen	0,156	0,116	0,1106	Turun
		30	Persentase pelayanan Kebencanaan	Persen	90,17	100	100,00	Tetap
		31	Persentase pelayanan bencana kebakaran	Persen	91	100	100,00	Tetap
VI	Tujuan 6. Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat	Indeks Kota Toleran		Poin	5,687	n/a	n/a	n/a
18	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	32	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	Persen	100	100	100,00	Tetap

Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Proses pembangunan yang dilakukan oleh setiap negara hendaknya mencakup seluruh aspek, termasuk pembangunan manusia. Pembangunan manusia penting untuk dilakukan demi mencapai kemakmuran penduduk suatu negara. Indikator keberhasilan suatu negara dalam proses pembangunan manusia dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM digunakan untuk klasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. BPS merilis panduan mengenai pengelompokan status pencapaian IPM. Ada 4 kelompok:

- Sangat tinggi, skor IPM di atas 80
- Tinggi, skor IPM antara 70 dan 80
- Sedang, skor IPM antara 60 dan 70
- Rendah, skor IPM di bawah 60

Perlambatan pertumbuhan IPM sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Formula Perhitungan Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS:

$$IPM = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3)$$

Keterangan:

X₁ = Indeks Harapan Hidup

X₂ = Indeks Pendidikan

X_3 = Indeks Standar Hidup Layak

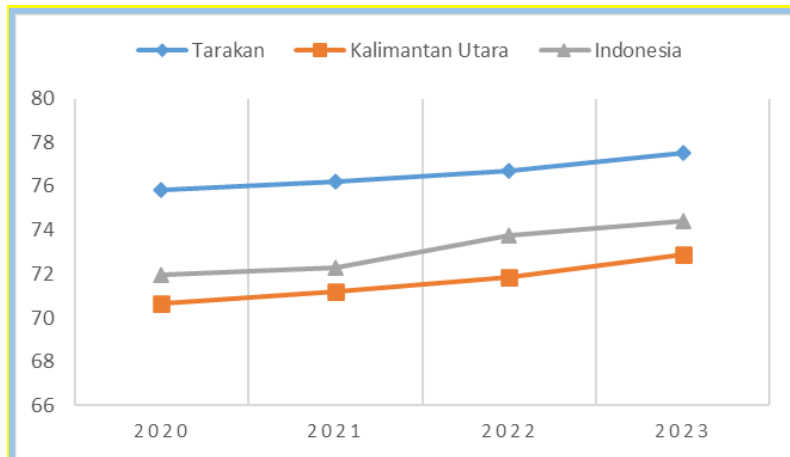
Dimana $X_2 = \frac{2}{3}$ [Indeks Melek Huruf] + $\frac{1}{3}$ [Indeks Rata-rata Lama Sekolah]

Tabel II. 9
Indeks Pembangunan Manusia Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Kota dan Provinsi	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tarakan	Poin	75,83	76,23	76,68	77,53	78,58	98,66
Kalimantan Utara		70,63	71,19	71,83	72,88	-	-
Indonesia		71,94	72,29	73,77	74,39	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2024

Dari tabel di atas, diketahui bahwa realisasi tingkat IPM Kota Tarakan tahun 2023 sebesar 78,58, meningkat 1,05 dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 76,68, namun tidak mencapai target yang ditentukan pada RPJMD dengan tingkat capaian kinerja adalah 98,66 persen. Peningkatan nilai IPM dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, angka harapan hidup, pendidikan dan tingkat buta huruf. Untuk realisasi pencapaian Usia Harapan Hidup meningkat 0,18 tahun, namun belum memenuhi target yang ditetapkan, Harapan Lama Sekolah meningkat 0,17 tahun, Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,28 tahun dan Pengeluaran Perkapita Masyarakat meningkat Rp 80.529, namun belum mencapai target yang ditetapkan. 2 indikator penyumbang peningkatan IPM dalam hal ini tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan masyarakat belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa program kesehatan dan program peningkatan perekonomian masyarakat belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi OPD Dinas kesehatan dan dinas perdagangan, dinas pertanian dan tanaman pangan, dinas perikanan, dan dinas perindustrian dan tenaga kerja. untuk melihat data realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar II. 1
Realisasi Indeks Pembangunan Manusia 2020-2023

Sasaran 1, Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Dalam hal ini berdasarkan serangkaian *Age Specific Rate* atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu.

Sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator usia harapan hidup menunjukkan rata-rata harapan lama hidup manusia (umur) yang dihitung sejak lahir. Pengukuran pencapaian indikator ini berdasarkan pada data BPS tahun 2024. Formula Perhitungan Capaian Indikator Usia harapan hidup merupakan Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS:

$$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah di umur a ditahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah ditahun t

P_i^t = Jumlah penduduk usia i ditahun t

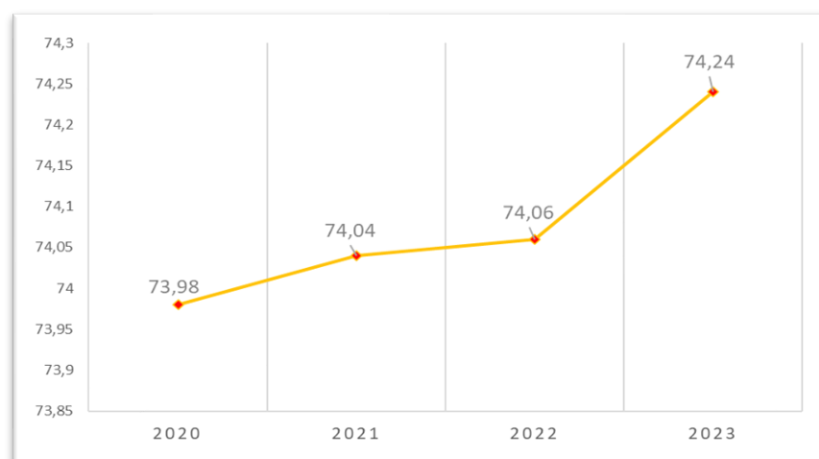
i = Usia ($a, a + 1, \dots, n$)

Tabel II. 10
Usia Harapan Hidup Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Kota dan Provinsi	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%) 2023
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Usia Harapan Hidup	Tahun	73,97	74,04	74,06	74,24	74,51	99,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Capaian kinerja untuk usia harapan hidup tidak mencapai target yakni 99,64 persen dari target yang ditentukan dalam RPJMD perubahan, tidak tercapainya target usia harapan hidup dikarenakan ada beberapa program peningkatan kesehatan masyarakat yang realisasinya kurang dari 80 persen seperti Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Untuk melihat data realisasi usia harapan hidup Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar II. 2
Realisasi Usia Harapan Hidup 2020-2023

Angka Harapan Hidup tahun 2022 sebesar 74.06 tahun, meningkat pada tahun 2023 sebesar 74,24 tahun atau meningkat sebesar 0,18 tahun. Hal ini dikarenakan adanya program-program yang mendukung peningkatan capaian indikator Angka Harapan Hidup yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan dan RSUKT. Program-program yang mendukung antara lain adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dimana tingkat capaian program ini sebesar 82,79 persen yang termasuk kategori tinggi, namun masih ada beberapa kegiatan yang Capaiannya sangat rendah seperti Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria. Untuk lebih jelasnya besarnya dukungan anggaran terhadap sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 11
Program pendukung dari Indikator Usia Harapan Hidup

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	29.781.164.410	22.028.612.126	73,97
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	830.980.010	507.860.750	61,12
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	406.753.340	199.118.180	48,95
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.251.878.470	1.967.841.540	87,39
5	Program Pengendalian Penduduk	313.676.403	264.670.927	84,38
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1.879.367.792	1.744.352.565	92,82

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat meskipun serapan anggaran tidak mencapai 100 persen ternyata efektifitasnya cukup tinggi khususnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Faktor pendukung keberhasilan capain kinerja tersebut di antaranya, yaitu (1) Ketersediaan serta kemudahan bagi perempuan dalam menjangkau akses pelayanan kesehatan pendidikan dan pekerjaan di Kota Tarakan. (2) Rendahnya angka putus sekolah bagi anak perempuan di Kota Tarakan (3) Banyaknya kegiatan pendampingan dan peningkatan kompetensi pada UMKM yang sebagian besar pelakunya adalah Perempuan di Kota Tarakan.

Faktor penghambat capain kinerja di antaranya, yaitu (1) angka kesakitan dan mengalami keluhan kesehatan pada kelompok penduduk perempuan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kelompok penduduk laki-laki. (2) Ketimpangan pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan. (3) Ketimpangan kompetensi perempuan dan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak salah satu jenis kelamin sehingga memberikan peluang yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Sasaran 2, Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan

2. Harapan Lama sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas. karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Realisasi angka harapan lama sekolah tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,17 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2022

menjadi 14,21 tahun. Ini berarti anak-anak Kota Tarakan yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma II. Formula Perhitungan Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS:

$$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah di umur a ditahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah ditahun t

P_i^t = Jumlah penduduk usia i ditahun t

i = Usia ($a, a + 1, \dots, n$)

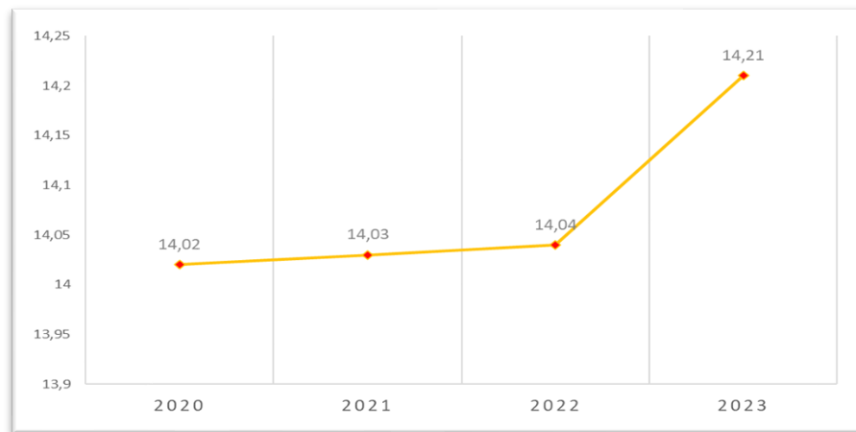
Adapun untuk melihat data realisasi angka harapan lama sekolah dari tahun 2020-2023, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :

Tabel II. 12
Harapan Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Harapan Lama sekolah	Tahun	14,02	14,03	14,04	14,21	14,09	100,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2024

Program-program pendidikan telah berjalan dengan baik dikarenakan pelaksanaannya dengan metode pengajaran luring (tatap muka). Adapun untuk melihat data realisasi harapan lama sekolah Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar II. 3
Realisasi Harapan Lama Sekolah 2020-2023

Dilihat serapan anggaran program yang berdampak langsung terhadap angka terhadap kinerja harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah yakni program pengelolaan pendidikan memang sangat tinggi dengan realisasi keuangan mencapai 95,62 persen dan fisik sebesar 99,67 persen. Artinya dinas pendidikan sudah mampu melaksanakan program pengelolaan pendidikan tersebut secara keuangan maupun secara fisik dengan baik meskipun ada beberapa kegiatan yang capaiannya dibawah 60 persen yaitu kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang dikarenakan adanya sharing dari OPD teknis lainnya, sehingga output yang dicapai hanya 10 Sekolah dari yang ditargetkan 32 sekolah. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang juga lebih dikarenakan adanya sharing dari OPD teknis lainnya, sehingga output yang dicapai hanya 37 Sekolah dari yang ditargetkan 71 sekolah.

Faktor Keberhasilan tercapainya kinerja Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan formal terhadap anak-anak usia sekolah.



Suasana Pembelajaran Siswa Siswi Paket

2. Terpenuhi Sarana Prasarana Kelas, Penambahan Ruang Kelas, dll.
3. Meningkatnya peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melalui Paket A.B dan C dan keaksaraan fungsional pada masyarakat dan membuka pelatihan keahlian untuk
4. masyarakat di SKB.
5. Terselenggaranya program literasi dalam upaya peningkatan budaya baca.
6. Meningkatnya aktivitas peserta didik di bidang pendidikan.
7. Peningkatan anggaran pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar.

Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (8 standar)

Kendala/Hambatan yang terjadi dalam meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah tersebut, kendala dan hambatannya antara lain :

1. Angka kemiskinan meningkat, sehingga mempengaruhi angka harapan lama Sekolah
2. Koordinasi terhadap perangkat daerah terkait penduduk yang belum menamatkan sekolahnya belum maksimal.
3. Menurunnya minat anak usia sekolah dalam menempuh pendidikannya di Pendidikan formal

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Kegunaan indikator ini untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Interpretasi dari tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Formula Perhitungan Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS:

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} \text{Lama Sekolah penduduk ke } i - 1$$

Keterangan

P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas

Lama sekolah penduduk ke-i =

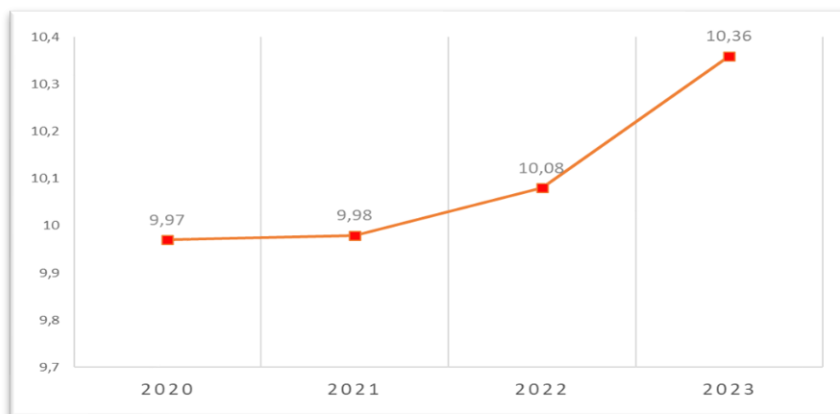
- Tidak pernah sekolah = 0
- Masih sekolah di SD sampai dengan SI = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
- Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1
- Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
- Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

Tabel II. 13
Rata-rata Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,97	9,98	10,08	10,36	9,99	103,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2024

Sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2023 realisasi angka rata-rata lama sekolah kota Tarakan menunjukkan tren yang naik tiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,1 tahun. Capaian kinerja untuk angka rata-rata lama sekolah mencapai target yakni 103,70 persen dari target yang ditetapkan dalam RPJMD perubahan. Adapun untuk melihat data realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar II. 4
Realisasi rata-rata lama sekolah 2020-2023

Rata-rata lama sekolah tahun 2022 sebesar 10,08 tahun, meningkat pada tahun 2023 sebesar 10,36 tahun atau meningkat sebesar 0,28 tahun. Dilihat serapan anggaran program yang berdampak langsung terhadap angka terhadap kinerja rata rata lama sekolah yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan yakni program pengelolaan pendidikan sangat tinggi yaitu realisasi keuangan mencapai 97,52 persen dan fisik sebesar 99,67 persen. Artinya dinas pendidikan sudah mampu melaksanakan program pengelolaan pendidikan tersebut secara keuangan maupun secara fisik dengan baik meskipun ada beberapa kegiatan yang capaiannya dibawah 60 persen yaitu Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang dikarenakan adanya sharing dari OPD teknis lainnya, sehingga output yang dicapai hanya 3149 Peserta Didik dari yang ditargetkan 11039 Peserta Didik. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan yang hanya diikuti oleh 30 Peserta Didik dari yang ditargetkan 50 Peserta Didik.



Penyerahan secara Simbolis Beasiswa Transisi untuk Anak-Anak Tidak Mampu Jenjang SD/MI dan SMP/MTs, di serahkan langsung oleh Wali Kota Tarakan bapak dr. KHairul, M.Kes dan didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan bapak Tamrin Toha,ST,M.Sc.

Faktor Keberhasilan tercapainya kinerja Meningkatnya pencapaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah antara lain :

1. Dengan mengalokasikan dana BOSDA untuk seluruh siswa SD/MI dan SMP/MTs baik negeri maupun swasta sebagai pendamping dana BOS yang bersumber dan dana APBN, dengan harapan semua penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun dapat bersekolah dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menekan angka putus sekolah baik di tingkat SD/MI maupun SMP/MTs.
2. Pemberian beasiswa Rangking Kelas, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Siswa Miskin 1.000 siswa.
3. Meningkatnya kesehatan masyarakat terutama anak-anak usia sekolah.
4. Meningkatnya mutu pendidikan didasarkan dengan ada sekolah yang sudah berstandar nasional dan yang lain menuju standar nasional.
5. Terpenuhinya usulan renovasi gedung sekolah lain dan ruang lainnya.
6. Terpenuhinya usulan sarana prasarana pendidikan berupa alat peraga, media pendidikan dan buku

Kendala/Hambatan yang dihadapr dalam meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah :

1. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor pembiayaan, faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak
2. Dana APBD di reconfusing termasuk anggaran pendidikan

Untuk lebih jelasnya besarnya dukungan anggaran terhadap sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 14
Program pendukung dari Sasaran Strategis
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	144.262.569.985	140.682.926.384	97,52
2	Program Pengembangan Kurikulum	200.530.900	96.118.850	47,93
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	264.988.400	227.451.674	85,83
4	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	30.000.000	-	-
5	Program Pembinaan Perpustakaan	204.821.394	188.673.940	92,12
6	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	29.819.597	22.122.580	74,19

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan antara lain adalah :

Sementara penyebab internal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dan masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
4. Telah dilaksanakannya setiap semester rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

5. Optimalnya penyebaran informasi melalui whatsapp terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- a) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Kota Tarakan.
- b) Adanya smergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - a. Penguatan Pelaku Pendidikan, dengan melakukan pemberdayaan melalui peningkatan kompetensi. kinerja. dan apresiasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya pemberdayaan dilakukan dengan melakukan kemitraan dan penguatan peran orang tua, dan pelibatan masyarakat dalam aktivitas pendidikan dan kebudayaan, untuk Kota Tarakan sudah kita aksanakan dengan pelibatan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan mendapatkan respon yang positif di masyarakat.
 - b. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, peningkatan akses adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan tersedianya akses tersebut, maka kualitas pendidikan pun terus ditingkatkan dengan penyempurnaan kurikulum dan sistem penilaian pendidikan. Untuk mendukung anak-anak kita yang kurang mampu sebagai wujud meningkatkan akses pendidikan adalah pelaksanaan Program Indonesia Pintar dari Kemdikbud dan Beasiswa Prestasi bagi Siswa Berprestasi dan Beasiswa tidak mampu bagi siswa tidak mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan melalui Dinas Pendidikan.
 - c. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, diwujudkan dengan peningkatan kompetensi,

peningkatan kinerja, pemberian tunjangan atau insentif bagi guru non-PNS, dan peningkatan kualifikasi pendidikan.

Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas, terutama tenaga teknis yang membidangi suatu kegiatan.
2. Sulitnya mendapatkan ketersediaan data penduduk untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. d. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Sasaran 3, Meningkatnya daya beli masyarakat

4. Pengeluaran Perkapita Masyarakat

Sasaran meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator meningkatnya daya beli masyarakat. Target pengeluaran perkapita Rp 1.900.000 /bln. Dalam kondisi normal sebenarnya target ini cukup realistis, mengingat UMR Kota Tarakan sebesar Rp. 3.761.896,71 atau masih jauh dibawah UMR. Dengan catatan komponen yang digunakan untuk perhitungan pendapatan perkapita masih menggunakan metode yang sama pada tahun sebelumnya dengan asumsi semua sektor menjalankan peraturan yang ada. Formula Perhitungan Capaian Indikator pengeluaran perkapita masyarakat merupakan Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS :

$$GDP \text{ perkapita} = \frac{GDP \text{ Tahun } x}{Jumlah \text{ Penduduk Tahun } x}$$

$$GNP \text{ perkapita} = \frac{GNP \text{ Tahun } x}{Jumlah \text{ Penduduk Tahun } x}$$

Keterangan

- Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu

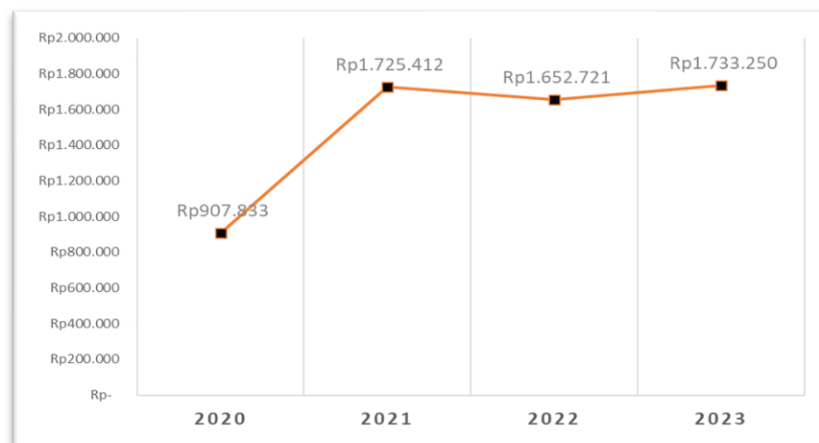
- *Gross National Product* atau GNP adalah estimasi nilai total barang dan jasa dari hasil.

Tabel II. 15
Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota Tarakan
Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkapita Masyarakat	Rupiah	907.833	1.725.412	1.652.721	1.733.250	2.000.000	86,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi kenaikan pengeluaran per kapita masyarakat kota Tarakan dari Rp 1.652.721 pada tahun 2022 menjadi Rp 1.733.250 pada tahun 2023. Adapun untuk melihat data realisasi pengeluaran perkapita masyarakat Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar II. 5
Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota Tarakan 2020-2023

Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dari 5,59 persen pada tahun 2022 menjadi 6,10 persen pada tahun 2023 atau naik sebesar 0,51 persen dan terjadinya penurunan dari sisi pengangguran terbuka dari 5,76 persen pada tahun 2022 menjadi 4,01 persen pada tahun 2023 atau turun sebesar -1,75 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,10 persen dan pengangguran terbuka turun -1,75 persen tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan sekaligus terjadi peningkatan

pengeluaran perkapita masyarakat. Selain itu terjadinya penurunan angka kemiskinan sebesar -0,2 persen di tahun 2023.

Dilihat dari sisi tingkat inflasi terjadi penurunan dari 3,93 persen pada tahun 2022 menjadi 2,46 persen pada tahun 2023 yang artinya secara umum terjadi penurunan harga yang cukup signifikan sehingga pengeluaran pendapatan perkapita masyarakat terjadi peningkatan. Demikian pula apabila dilihat dari sisi angka kemiskinan yang menurun dari 6,71 persen pada tahun 2021 menjadi 6,30 persen pada tahun 2022.

Dilihat dari kenaikan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran serta penurunan angka inflasi dan penurunan angka kemiskinan terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan sekaligus meningkatkan pengeluaran perkapita masyarakat, namun peningkatan tersebut tidak signifikan karena belum mencapai angka yang telah ditargetkan. Hal ini dapat saja dikarenakan faktor-faktor lain seperti meningkatnya suku bunga bank yang berdampak pada perubahan pada perilaku masyarakat yang lebih memilih menyimpan uangnya di bank daripada membelanjakannya untuk konsumsi.

Untuk lebih jelasnya besarnya dukungan anggaran terhadap sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 16
Program pendukung dari Sasaran Strategis
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	948.088.101	744.155.271	78,49
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	19.265.160	8.248.860	42,82
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	9.999.880	6.758.420	67,59
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	40.000.000	13.712.340	34,28

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	49.999.810	44.459.170	88,92
5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	14.999.840	13.919.880	92,80
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	675.799.570	667.380.170	98,75
7	Program Pengembangan UMKM	133.459.490	128.692.012	96,43
8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	948.088.101	744.155.271	78,49

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

Dilihat dari dukungan program dan anggaran sebenarnya sudah cukup kuat mengingat semua program strategis yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan masyarakat sudah terealisasi diatas 70 persen, namun belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan

Indeks Reformasi Birokrasi

Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kota Tarakan antara lain mendorong pelayanan publik yang semakin terbuka, cepat, dan mudah melalui pengembangan berbagai sistem informasi pelayanan publik bagi masyarakat, termasuk pelayanan perijinan satu pintu. Selain itu juga dengan membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) dengan kekuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik antara lain melalui media teknologi informasi.

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro rakyat mengandung arti bahwa suatu tata pemerintahan terdapat pihak pemangku



kepentingan yaitu pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta. Salah satu aspek penting dari tata pemerintahan yaitu pengaturan mengenai penggunaan kewenangan, dimana dalam mengatur kewenangan disertai juga dengan pengembangan prinsip partisipasi publik dan akuntabilitas publik. Penerapan prinsip akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik. *Formula Perhitungan Capaian Indikator indeks reformasi merupakan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Tarakan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.*

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tarakan tahun 2023 adalah 71,99 dengan kategori “BB”.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	60,85
B	RB Tematik	20	11,14
C	Indeks RB	120	71,99

Tabel II. 17
Data perbandingan capaian tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	53,91	55,47	58,26	71,99	60	119,98

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2024

Dari data diatas mengalami peningkatan dari 58,26 persen pada 2022 menjadi 71,99 persen tahun 2023. Terjadi peningkatan indeks reformasi birokrasi pada tahun 2023 cukup signifikan dan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kinerja organisasi yang terus coba ditingkatkan dengan leading sektor inspektorat dengan programnya adalah program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang realisasi keuangan mencapai sebesar 83,37 persen namun outputnya mencapai 30 Kegiatan dari target 1 kegiatan.

Sasaran 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

5. Opini BPK

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sudah merupakan suatu keharusan, berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan tujuan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan opini publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan yang telah disusun oleh pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan laporan hasil audit BPK atas Pemerintah Kota Tarakan pada tahun 2023, Kota Tarakan meraih Opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, sehingga target dari indikator kinerja untuk Opini BPK telah tercapai 100%. *Formula Perhitungan Capaian Indikator Opini BPK merupakan Hasil Evaluasi / Opini BPK Sesuai dengan amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan*

Keuangan Negara dan Daerah, Berikut ini tabel hasil audit BPK 3 tahun terakhir :

Tabel II. 18
Data perbandingan capaian tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP**	WTP	100

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024

Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dicapai dengan komitmen Walikota Tarakan sampai dengan pelaksana teknis, adanya konsistensi tindak lanjut yang berkelanjutan serta berbagai upaya yang dilakukan antara lain pembenahan aset, dan pembinaan sistem pertanggungjawaban keuangan kota Tarakan. Berikutnya Program Penyelenggaraan Pengawasan yang realisasinya mencapai 93,99 persen dengan kegiatan berupa Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Pendampingan dan Asistensi, dan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang realisasinya mencapai 100 persen. Hal ini yang menyebabkan semua administrasi pemerintahan dan keuangan, baik dari pelaksanaan realisasi keuangan maupun SPJ keuangan serta penataan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan BPK, sehingga pemerintah kota Tarakan masih mampu mempertahankan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

6. Nilai SAKIP

Selama enam tahun, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring dengan perkembangan dinamika yang ada di pemerintahan, Kementerian PANRB memodernkan pedoman evaluasi AKIP

melalui Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan efektif digunakan pada 2022. Pada Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 telah diatur mengenai alur evaluasi AKIP yang mencakup lima langkah, yakni perumusan tujuan evaluasi, penentuan ruang lingkup, perancangan desain evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, serta pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Pada poin perumusan tujuan evaluasi, secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Meskipun Pemerintah Kota Tarakan telah berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan belum optimal, dan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tarakan mengalami penurunan. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tarakan tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **64,53** dengan predikat “**B**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Baik**”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Formula Perhitungan Capaian Indikator SAKIP merupakan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang SAKIP Sesuai amanat Perpres N0 29 Thun 2014 Tentang SAKIP ; PermenPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja serta tata cara review terhadap laporan kinerja

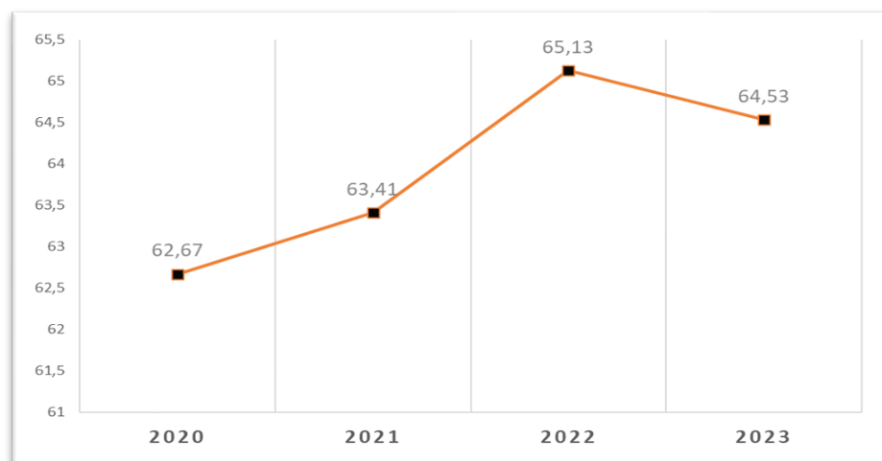
Tabel II. 19
Nilai/Predikat AKIP Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
AKIP	Predikat	62,67 /B	63,41 /B	65,13 /B	64,53 /B	70,01	92,17

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2024

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan melalui Inspektorat dalam mendorong peningkatan nilai /predikat AKIP Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2023, antara lain menjadikan indikator nilai/predikat AKIP sebagai salah satu kegiatan strategis daerah, dimana seluruh Perangkat Daerah mendapat rencana aksi yang harus diselesaikan dan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023. Terjadi peningkatan pada tahun 2023 ini tidak terlepas peran Walikota Tarakan melalui OPD teknik terkait khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Sekertaris Daerah, dan Inspektorat, namun terdapat beberapa permasalahan teknis, SDM, dan administrasi serta sistem kerja pelaporan yang harus lebih ditingkatkan. Seperti halnya kemampaun mengantisipasi dan mengikuti sistem pelaporan yang sesuai dengan yang distandarkan baik dari sisi kelengkapan dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan dan output pelaporan.



Gambar II. 6
Grafik Nilai/Predikat AKIP Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Untuk Sekretariat Daerah sudah mengimplementasikan program

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan anggaran Rp 15.522.081.440,00 dengan realisasi sebesar 94,87 persen dan Program Perekonomian Dan Pembangunan dengan anggaran Rp 957.940.004,00 dengan realisasi sebesar 99,59 persen. Hal ini didukung pula oleh Inspektorat yang telah melaksanakan kegiatan Pendampingan dan Asistensi realisasi keuangannya yang mencapai 79,33 persen dengan output sebanyak 30 OPD dari 30 OPD yang ada di Pemerintahan Kota Tarakan dengan harapan dapat meningkatkan nilai SAKIP, namun ternyata terjadi penurunan nilai SAKIP yang cukup signifikan dikarenakan adanya perubahan pada sistem penilaian, perubahan metode penyusunan LAKIP, adanya perubahan metode dan sistem perencanaan.

Untuk lebih jelasnya besarnya dukungan anggaran terhadap sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 20
Program pendukung dari Sasaran Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.196.878.280	3.495.859.373	42,65
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.143.167.860	1.739.563.873	81,17
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.042.693.220	1.590.787.977	77,88
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.504.631.690	1.290.351.000	85,76
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	479.074.110	380.052.726	79,33
6	Program Perekonomian Dan Pembangunan	957.940.004	870.975.069	90,92
7	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	29.972.800	21.939.000	73,20
8	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	6.515.084.255	5.862.922.425	89,99
9	Program Penatagunaan Tanah	19.999.800	9.932.920	49,67

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.093.850.000	1.042.641.670	95,32
11	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	262.603.490	244.704.049	93,18
12	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	685.060.000	665.004.893	97,07
13	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	39.999.360	24.344.550	60,86
14	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	24.999.600	14.403.000	57,61
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.821.448.622	32.696.121.714	96,67
16	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	15.522.081.440	14.726.020.669	94,87
17	Program Perekonomian Dan Pembangunan	957.940.004	870.975.069	90,92
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.813.682.133	23.293.797.605	93,87
19	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	20.221.678.920	20.044.838.227	99,13

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan aparat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Permasalahan pokok yang masih dihadapi saat ini adalah terfokus pada masalah peningkatan sumberdaya manusia yang dirasakan masih belum memadai.dihadapkan dengan permasalahan sumber pendapatan yang perlu ditingkatkan.

Rencana strategis dalam menyelesaikan masalah masalah ketidaktercapaian kinerja yaitu :

- a) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang terlatih;
- b) Mengoptimalkan inovasi-inovasi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah;
- c) Mengkaji tentang regulasi pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah dalam merespon secara cepat perubahan peraturan perundangan;
- d) Mengefektifkan koordinasi internal di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan maupun koordinasi eksternal dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan, maupun pihak- pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan;
- e) Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan;
- f) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan bagi keberhasilan capaian kinerja.

Sasaran 5. Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien

7. Indikator Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Target Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 sebesar 65,00 persen, dengan realisasi 53,36 persen, besaran ini menunjukkan bahwa Indeks Profesionalitas ASN belum mencapai target. Berikut capaian Indeks Profesionalitas ASN Kota Tarakan :

Tabel II. 21
Indeks Profesionalitas ASN Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Na	49,36	52,12	61,19	65,00	94,14

Badan Kepegawaian Negara, 2024

Penyebab indikator ini belum mencapai target dikarenakan beberapa hal yaitu :

- 1) Adanya perubahan nomenklatur hasil analisis jabatan yang menyebabkan sertifikat yang sudah dimiliki ASN tidak bisa diperhitungkan.
- 2) Tidak terpenuhi jumlah ASN yang mengikuti Diklatpim.
- 3) Kurangnya keikutsertaan diklat teknis bagi ASN.
- 4) Tidak terdokumentasinya DIKLAT-DIKLAT online yang diikuti oleh ASN Pemkot Tarakan.

Disisi lain pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



Untuk BKPSDM sudah mengimplementasikan sub kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan pencapaian kegiatan mencapai 89,41% dari target 85 ASN yang mengikuti kopetensi hanya 76 ASN. Hal ini

disebabkan beerapa ASN belum memenuhi syarat untuk mengikuti kopetensi. Yang kedua sun kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan anggaran 1.356.419.120,00 dengan pencapaian kegiatan sebesar 71,2 persen. Kedua hal tersebut diatas yang menyebabkan terjadinya peningkatan Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2023 yakni sebesar 7,83 persen. Untuk lebih jelasnya besarnya dukungan anggaran terhadap sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 22
Program pendukung dari Sasaran Terwujudnya
Birokrasi Yang Efektif dan Efisien

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Kepegawaian Daerah	1.319.934.640	894.581.422	67,77
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.356.419.120	1.167.895.552	86,10

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, 2024

Beberapa upaya dilakukan oleh untuk meningkatkan prosentase terhadap rogram diatas adalah sebagai berikut :

- Membentuk *person in charge* (penanggungjawab) untuk perangkat daerah di Tingkat kota dan perangkat daerah.
- Membuat skema koordinasi coaching atau pendampingan yaitu penanggungjawab Tingkat kota melayani penanggungjawab perangkat daerah, dan penanggungjawab perangkat daerah melayani seluruh pegawai ASN di lingkup unitnya masing-masing.
- Memberikan sosialisasi di forum pertemuan kepala perangkat daerah.
- Memberikan bimbingan teknis untuk penanggungjawab Tingkat kota dan perangkat daerah.

- e) Melakukan monitoring, evaluasi dalam bentuk focus group discussion yang melibatkan tim pengelola kinerja perangkat daerah serta penanggungjawab tingkat kota dan perangkat daerah
- f) Secara aktif memberikan informasi terkait progress implementasi.



Beberapa tantangan dan hambatan dalam menjaga disiplin kerja PNS:

- a) Faktor Internal
 - a. Tidak ada kesadaran akan pentingnya disiplin kerja
 - b. Tidak adanya rasa tanggung jawab dalam pekerjaan
 - c. Kurangnya motivasi dalam bekerja
 - d. Sikap malas dan tidak produktif
 - e. Kurangnya keterampilan dan kompetensi dalam pekerjaan
- b) Faktor Eksternal
 - a. Lingkungan kerja yang tidak kondusif
 - b. Tekanan dan tuntutan yang tinggi dari masyarakat

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja kedepan akan dilakukan strategi sebagai berikut;

- a) Mengoptimalkan pelayanan kepegawaian melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi
- b) Memperbaharui server untuk aplikasi SIMPEG di BKPSDM
- c) Melakukan sosialisasi dan pengawasan tentang aturan-aturan yang baru berkaitan dengan disiplin ASN
- d) Melakukan monitoring, evaluasi dalam bentuk focus group discussion yang melibatkan tim pengelola kinerja perangkat daerah serta penanggung jawab Tingkat kota dan perangkat daerah.

- e) Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dengan membuat surat terkait penyampaian usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada fitur penghargaan sehingga Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah dimudahkan untuk menyampaikan usulan; penerbitan SKGB melalui fitur KGB, serta pengendalian pembayaran TPP melalui fitur SIMPEG TPP dengan perhitungan otomatisasi pada aspek kehadiran dan produktifitas.
- f) Meningkatkan pengembangan kompetensi dengan melakukan uji kompetensi dan menerapkan sistem merit di kota Tarakan.
- g) Mengoptimalkan pelaksanaan kediklatan untuk meningkatkan IP ASN Kota Tarakan
- h) Mengoptimalkan perencanaan kinerja tahunan agar sesuai dengan Rencana Strategis sehingga target kinerja bisa tercapai dan tepat sasaran;
- i) Memperbanyak pelaksanaan diklat-diklat teknis guna meningkatkan sumber daya aparatur yang professional dan kompeten di lingkungan kerjanya;
- j) Meningkatkan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan;
- k) Meningkatkan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait agar penyelenggaraan kegiatan bisa berjalan sesuai dengan target;
- l) Meningkatkan optimalisasi manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan agar secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
- m) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas sebagai pendukung keberhasilan kinerja;
- n) Membuat progress maupun pencatatan rencana target dan keberhasilan pencapaian kinerja, hal ini disebabkan karena tim pelaksanaan kegiatan

selama ini belum optimal membuat pencatatan maupun pengikhtisaran terhadap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga pencapaian kinerja tidak dapat tercermin dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

Sasaran 6. Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas

8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat adalah respon masyarakat terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual setelah masyarakat merasakan dampaknya. Salah satu tolok ukur penilaian kualitas layanan adalah dengan mendengarkan atau mengumpulkan persepsi dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan suatu kota.

Formula Perhitungan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah :

$$SKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter}}{\text{Total Parameter Yang Terisi}} \times \text{Bobot}$$

$$\text{Bobot} = 1 / \text{Jumlah Parameter}$$

$$= (1/9)$$

$$= 0,111$$

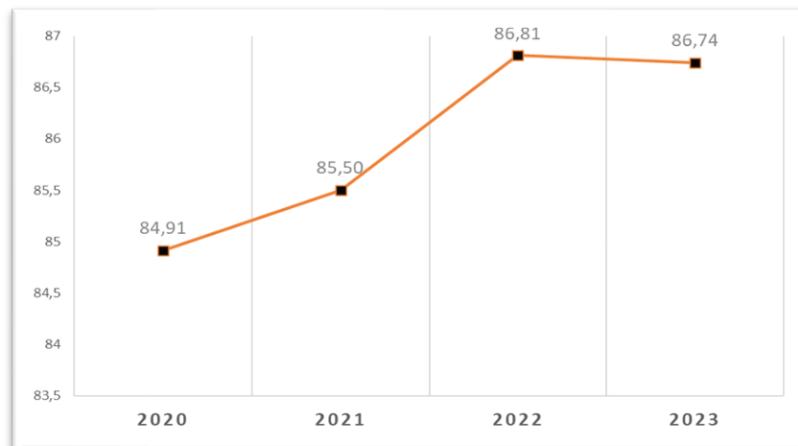
$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel II. 23
Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kota Tarakan Semester II Tahun 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Pelayanan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kesesuaian Persyaratan	3,436	Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,456	Baik
3	Kecepatan Pelayanan	3,478	Baik
4	Kesesuaian/Kewajaran Biaya	3,585	Sangat Baik
5	Kesesuaian Pelayanan	3,478	Baik
6	Kompetensi Petugas	3,529	Baik

7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,535	Sangat Baik
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,387	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,675	Sangat Baik
Nilai Skm Tertimbang		3,47	
Nilai Konversi Skm Unit Pelayanan Publik		86,78	
Mutu Pelayanan		B	
Kinerja Unit Pelayanan		Baik	

Terkait dengan Sasaran Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kota Tarakan pada tahun 2023 mempunyai target sebesar 85,00 poin,



Gambar II. 7
Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Tarakan
Tahun 2020-2023

Hal ini sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023. Berikut ini disajikan gambar realisasi indeks kepuasan masyarakat kota Tarakan 4 tahun terakhir.

Tabel II. 24
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Tarakan
Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,91	85,50	86,81	86,74	82,59	105,02

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tarakan, 2024

Berdasarkan dengan data realisasi diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai nilai capaian sebesar 102,02 persen yang berarti tingkat layanan yang diberikan Pemerintah Kota Tarakan sangat memuaskan masyarakat Kota Tarakan.



Untuk lebih jelasnya besarnya dukungan anggaran terhadap sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 25
Program pendukung dari Sasaran Terwujudnya Birokrasi
Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1018130180,00	990199000,00	97,26
2	Program Aplikasi Informatika	1045000000,00	992629048,00	94,99
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	24.984.770	23400000,00	93,66
4	Program Pendaftaran Penduduk	92.908.146	81350000,00	87,56
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.837.450	29735375,00	82,97
6	Program Pengelolaan Arsip	129.908.550	122161064,00	94,04
7	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	29.882.135	28285600,00	94,66
8	Program Perizinan Penggunaan Arsip	19.996.400	19934000,00	99,69
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.049.563.080	3909620047,00	96,54
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.510.359.430	3364419761,00	95,84



No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.597.556.480	3426530790,00	95,25
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.547.467.960	1414201770,00	91,39
13	Program Pengembangan Kebudayaan	2.619.999.110	2550201950,00	97,34
14	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	214.958.280	214336480,00	99,71
15	Program Pembinaan Sejarah	24.989.770	24920000,00	99,72
16	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	139.818.600	124777968,00	89,24
17	Program Pengelolaan Permuseuman	10.611.582.262	10592765056,00	99,82
18	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.810.370.457	4664765520,00	96,97
19	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000	150000000,00	100,00
20	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	334988850	334461390	99,84
21	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	264981730	262742700	99,16
22	Program Perlindungan Perempuan	54852700	44391280	80,93
23	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	29500240	29193550	98,96
24	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	149938200	139385480	92,96
25	Program Perlindungan Khusus Anak	109991186	101115675	91,93

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024



Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja diatas adalah:

- a) Tantangan di era digital yang mana masyarakat lebih senang menggunakan gadget dan belum beragamnya aktivitas masyarakat di perpustakaan sehingga Perpustakaan belum menjadi pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis TI;
- b) Belum adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik dalam pelaksanaan program pengembangan perpustakaan dan budaya baca masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa;
- c) Belum terwujudnya layanan perpustakaan digital yang terintegrasi;
- d) Belum tersedianya regulasi berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota Kota Tarakan terkait Penyelenggaraan Kearsipan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Kepala ANRI terkait pengelolaan sistem kearsipan berikut manajemen kearsipan baku yang menjadi pedoman teknis serta payung hukum pada tatanan Pemerintah Kota Tarakan sehingga tingkat pemahaman maupun kesadaran Perangkat Daerah selaku Unit Kearsipan masih rendah dalam menerapkan sistem pengelolaan kearsipan baku pada masing-masing lingkungan kerjanya;
- e) Masih minimnya ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait sistem pengelolaan kearsipan secara baku yang dimiliki oleh PD selaku Unit Kearsipan sehingga pengelolaan kearsipan yang dilaksanakan oleh PD masih belum sempurna dan sesuai dengan

- ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait pengelolaan kearsipan;
- f) Masih rendahnya tingkat kesadaran pengelola kearsipan pada Perangkat Daerah terhadap pentingnya keikutsertaan yang bersangkutan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan sebagai bentuk peningkatan kemampuan, keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan sistem kearsipan serta belum diterapkan sistem punishment atau sanksi bagi SDM Pengelola Kearsipan yang tidak atau belum bersedia mengikuti kegiatan BIMTEK dimaksud.
 - g) Perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Bimtek
 - h) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
 - i) Belum adanya regulasi Tingkat daerah tentang pengaturan khusus secara komprehensif objek pemajuan kebudayaan dan pengelolaan cagar budaya.
 - j) Sarana - prasarana penunjang peningkatan pemajuan kebudayaan dan pengelolaan cagar budaya belum memadai.
 - k) Kurangnya SDM yang berminat untuk mendukung pengembangan pemajuan kebudayaan daerah dan cagar budaya
 - l) Penurunan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legeslatif Kota Tarakan;
 - m) Sistem perpolitikan pada partai yang belum mendukung perempuan berkarir di politik
 - n) Efek negatif dari stigma perempuan berkarir di politik masih besarnya stigma masyarakat bahwa KDRT atau permasalahan dalam keluarga adalah aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, sehingga menyebabkan orang-orang yang mengalami kekerasan tersebut tidak berani melapor kepada lembaga-lembaga layanan pengaduan tersebut.

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

- a) Sinergitas Pemerintah dan media telah dibangun maksimal untuk mewujudkan pemberitaan yang berimbang dan bertanggungjawab sehingga penerapan layanan informasi melalui media dapat membantu masyarakat untuk memahami informasi kegiatan pembangunan daerah.
- b) Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Kota yang optimal sehingga layanan informasi dan dokumentasi dapat dilaksanakan dengan baik
- c) Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik dan berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja
- d) Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan
- e) Adanya proses evaluasi dan penilaian kinerja terhadap pencapaian tujuan organisasi.



Rencana strategis dalam menyelesaikan masalah masalah ketidaktercapaian kinerja yaitu :

- a) Melakukan optimalisasi layanan OPD di berbagai kegiatan;
- b) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan antar OPD
- c) Penguatan Sumber Daya Manusia

Tujuan 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Sasaran 7, Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau

9. Persentase Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan Menteri ini mengatur tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pelaksanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana. RTH terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Penyediaan RTH dilakukan oleh pemerintah daerah untuk RTH publik dan masyarakat untuk RTH privat.

Tujuan pembentukan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman segar, indah, bersih, dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan. (2) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan.

Ruang Terbuka Hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30 persen dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007). Pengalokasian 30% RTH ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten/kota. Proporsi tersebut bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Untuk mempercepat pencapaian luasan Ruang Terbuka Hijau, Wali Kota Tarakan juga telah menargetkan penambahan luas RTH sebesar 75 Ha dalam kurun waktu 5 tahun atau 15 Ha setiap tahunnya. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup menargetkan pencapaian RTH seluas total 74,2465 Ha setiap tahunnya. Berikut data target pencapaian selama 5 tahun

Tabel II. 26
Rencana Target Pencapaian Ruang Terbuka Hijau

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Penambahan	-	74,2465	74,2465	74,2465	74,2465
Target Luas RTH (Ha)	1.463	1.537,317	1.611,563	1.685.810	1.760,056
Target Luas RTH (%) terhadap target RTH ideal 2.902.9 Ha	50,40	52.96	55,52	58.07	60,63

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2024

Dari peninjauan Lapangan ini diperoleh data Luasan Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut :

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)		
		2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Taman Kota	115,965	19,409	19,544
2	Rim ba Kota	1016	1016,08	1016,08
3	Jalur Hijau di jalan	1,5068	1,5068	1,5068
4	Tempat Pemakaman Umum	42,92	42,92	42,92
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	269,083	440,942	518,676
6	Kawasan Perlindungan Setempat	91,9892	92,0092	92,0092
Luas Total		1.537,46	1.612,87	1.690,74

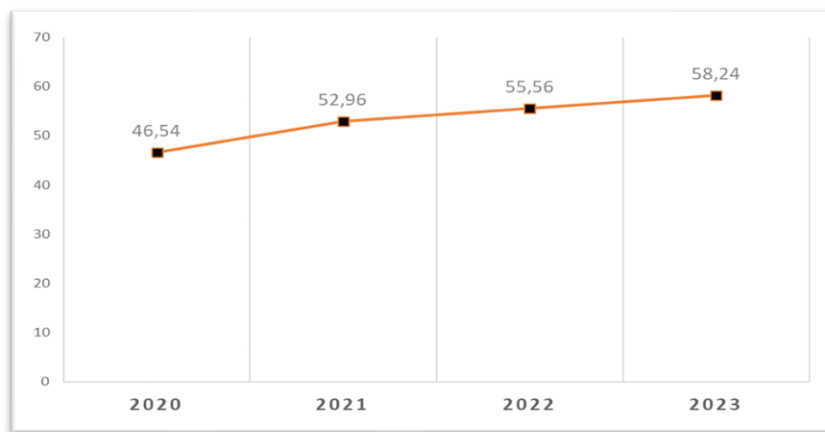
Adapun untuk melihat data realisasi ruang terbuka hijau dari tahun 2020-2023, disajikan pada tabel sebagai berikut ini :

Tabel II. 27
Persentase Ruang Terbuka Hijau Kota Tarakan
Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ruang Terbuka Hijau	Persen	46,54	52,96	55,56	58,24	58,07	100,29

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2024

Adapun untuk melihat data realisasi persentase ruang terbuka hijau Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar II. 8
Realisasi Ruang Terbuka Hijau Kota Tarakan 2020-2023

Target pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah sebesar 58,07 persen dengan realisasi sebesar 58,24 persen yang berarti memenuhi target pemerintah kota Tarakan dengan capaian kinerja 100,29 persen. Hal ini didukung oleh sub Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja mencapai 100 persen yakni luas RTH yang dikelola sebesar 1685,81 Ha. Untuk lebih jelasnya besarnya dukungan anggaran terhadap sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 28
Program pendukung dari Sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	76.944.340,00	76.264.980,00	99,12
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.619.985.770,00	2.606.804.185,00	99,50

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2024

Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM masih menjadi permasalahan dalam pengawasan lingkungan hidup, dimana jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) tidak sebanding dengan total izin yang diterbitkan. Dengan banyaknya izin usaha/kegiatan yang harus diawasi

maka ke depannya diperlukan penambahan PPLH dan peningkatan kompetensi PPLH melalui diklat-diklat khusus pengembangan PPLH.

Taman Bermain Ramah Anak yang Terbangun di Tahun 2023



Kelurahan Mamburungan Timur



Kelurahan Pantai Amal

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam meminimalisir pelanggaran izin lingkungan hidup adalah ego kedaerahan, keterbatasan dana, dan sumber daya yang dimanfaatkan. Kasus pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti hanya mampu menerapkan sanksi administratif dan tidak sampai ke pengadilan. Oleh karena itu diperlukan penguatan Lembaga lingkungan hidup melalui Kerjasama yang terpadu oleh berbagai instansi terkait untuk penegakan lingkungan hidup.

Sasaran 8, Meningkatnya pelayanan air bersih

10. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum

Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu prasyarat utama untuk pembangunan yang berkualitas. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang merupakan kebutuhan dasar hidup manusia menjadi penting terutama untuk mengatasi terjadinya krisis air bersih. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan menjadikan cakupan pelayanan air bersih sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum. Masyarakat Kota Tarakan dapat mengakses air bersih, dengan asumsi kebutuhan air masyarakat adalah 140 liter/orang/hari dan 1 (satu) sambungan rumah (SR) sama dengan 6 Jiwa.

Formula Perhitungan Capaian Indikator Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga terlayani air minum (jiwa)}}{\text{Jumlah rumah tangga se – Kota Tarakan (jiwa)}} \times 100$$

Data jumlah penduduk di Kota Tarakan tahun 2023 berdasarkan data dari Perusda Air Minum Tirta Alam Tarakan adalah sebanyak 249.960 jiwa penduduk Kota Tarakan yang terlayani air bersih sebanyak 220.166 jiwa atau 98,99 persen. Selanjutnya terkait cakupan pelayanan air bersih dinner per kecamatan yang ada di Kota Tarakan dapat dilihat pada label dibawah ini:

Tabel II. 29
Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kota Tarakan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota Tarakan		Pelayanan Air Sumbungan Rumah (SR)		Bersih PDAM Persentase (%)	
		KK	Jiwa	KK/ Unit	Jiwa	KK	Jiwa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tarakan Barat	27.204	83.494	18.818	94.090	69,17%	112,69%
2	Tarakan Tengah	23.531	70.148	14.171	70.855	60,22%	101,01%
3	Tarakan Timur	19.402	60.982	9.013	45.065	46,45%	73,90%
4	Tarakan Utara	11.323	35.336	7.375	36.875	65,13%	104,36%
Total		81.460	249.960	49.377	246.885	60,62%	98,77%

Sumber: Perusda Air Minum Tirta Alam Tarakan, 2024

Mobilisasi penduduk yang cukup tinggi menyebabkan target jumlah penduduk yang akan dilayani terus mengalami peningkatan yang tidak sejalan dengan peningkatan anggaran operasional dan SDM pengelolanya. Permasalahan air bersih kota yang krusial adalah ketersediaan air baku. Sumber cadangan air baku yang ditampung pada embung diperoleh melalui sistem tadah hujan. Apabila tidak turun hujan selama 2 minggu maka cadangan air baku akan mengering. Dalam kondisi normal kapasitas produksi pada umumnya mencapai ± 400 liter/detik, sedangkan dalam kondisi krisis kapasitas produksi turun hingga 175 liter/detik. Hal ini menyebabkan menurunnya cakupan pelayanan air bersih hingga 42%

FOTO KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM



Target pemenuhan Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air Minum Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah sebesar 95,62 persen dengan realisasi sebesar 98,99 persen yang berarti memenuhi target pemerintah kota Tarakan dengan capaian kinerja 103,52 persen. Adapun untuk melihat data realisasi persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :

Tabel II. 30
Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air Minum
Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air Minum	Persen	85,52	86,80	92,89	98,77	95,62	103,52

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, 2024

Hal ini didukung dengan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan anggaran sebesar Rp. 45.779.396.848,00 dan terealisasi sebesar 97,39 persen dengan output adalah Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya dengan daya tampung sebesar 1.023.090 m³, Pembangunan Unit Air Baku dengan daya tampung sebesar 1.033.090 m³, Pembangunan Kanal Banjir dengan sepanjang 1.778 meter, dan Rehabilitasi Kanal Banjir sepanjang 437,4 meter. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dianggarkan sebesar Rp. 23.889.282.900,00 dan terealisasi sebesar 99,41 persen dengan output adalah Jumlah pengadaan Sambungan

Rumah sebanyak 3.093 SR. Untuk lebih jelasnya besarnya dukungan anggaran terhadap sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 31
Program pendukung dari Sasaran Meningkatnya
Pelayanan Air Bersih

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	42.597.471.500,00	39.140.778.753,00	91,89
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.450.000.000,00	2.382.671.316,00	97,25

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, 2024

Faktor pendukung keberhasilan program pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) adalah terlaksana dan cukup efektifnya kegiatan optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kampung I/Skip. Disamping itu, proses pengadaan dan pemasangan jaringan distribusi air minum dalam bentuk jaringan perpipaan berlangsung lancar.

Sasaran 9. Meningkatnya Sarana Prasarana Perkotaan

11. Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pengolahan air limbah Domestik (*Sewage Treatment Plant*) adalah suatu proses menghilangkan kontaminan dari air limbah, air limbah rumah tangga, industri, dan perkantoran. Tujuan utamanya adalah menghilangkan pencemaran dari air limbah dan memprosesnya menjadi air yang aman untuk dibuang ke saluran pembuangan di lingkungan atau dikembalikan ke siklus air bersih.

Formula Perhitungan Capaian Indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik}}{\text{Jumlah rumah se – Kota Tarakan}} \times 100$$

Pengolahan air limbah Domestik sangat penting dalam melindungi ekosistem air dan mencegah penyebaran penyakit terkait air. Jumlah rumah tangga yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II. 32
Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh
Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	n.a	74,31	74,17	75,48	72,99	103,41

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, 2024

Target pemenuhan Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah sebesar 72,99 persen dengan realisasi sebesar 75,48 persen yang berarti memenuhi target pemerintah kota Tarakan dengan capaian kinerja 103,41 persen. Hal ini didukung oleh Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang capaian kinerjanya sebesar 98,86 persen, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja sebesar 100 persen dan program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan capaian kinerja sebesar 100.

Kendala menurunnya realisasi indikator persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik adalah sebagai berikut:

- Kondisi permasalahan sub sektor air limbah domestik apabila ditinjau secara teknis IPLT masih kurang maksimal dan masih terdapat perilaku

buang air besar sembarangan (BABS) di perkotaan dan adanya cubluk/jamban tidak layak.

- b) Apabila ditinjau secara non teknis disebabkan terbatasnya APBD Kota, peran institusi terkait belum maksimal, kurangnya peran serta masyarakat dan swasta, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak air limbah untuk kehidupan baik secara langsung maupun melalui media massa.
- c) Kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah permukiman pesisir untuk hidup bersih dan sehat dengan pengelolaan air limbah rumah tangga masih minim.
- d) Kenaikan jumlah penduduk di Kota Tarakan tidak diimbangi dengan ketersediaan pengelolaan air limbah domestik, sehingga masih terdapat beberapa masyarakat yang belum terlayani.

**FOTO KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR
LIMBAH TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN**



Strategi atau langkah untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan komitmen pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan, salah satunya melalui pembangunan/penyediaan IPAL dan tangki septik komunal sesuai dengan standar yang berlaku.

- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan untuk hidup bersih dan sehat dengan pengelolaan air limbah rumah tangga.

12. Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum

Fasilitas umum adalah sarana yang telah disediakan untuk kepentingan umum atau bersama. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan sehingga harus dipelihara dengan baik. Jalan Lingkungan adalah jalan yang berada di lingkungan perumahan, atau jalan servis untuk lingkungan perumahan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil. Untuk kawasan perumahan didesain oleh Developer saat membuat tata ruang, sehingga status tanahnya milik Negara yang disediakan sebagai prasarana untuk umum. Pembangunan jalan, perbaikan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh warga sekitar lingkungan dan / atau oleh siapa saja.

Formula Perhitungan Capaian Indikator Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung tahun ini dan tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah bangunan gedung}} \times 100$$

Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat dan peningkatan jumlah penduduk, Kota Tarakan membutuhkan infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat mendukung aktivitas penduduknya. Penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum terus diselenggarakan sebagai upaya peningkatan pelayanan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Tarakan. Pada tahun 2023, Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang melakukan kegiatan pembangunan gedung dan pemeliharaan Gedung, yang mana apabila diakumulasikan dengan jumlah

bangunan gedung tahun sebelumnya terdapat 170 bangunan.

Sementara total bangunan gedung yang akan dibangun maupun dipelihara yang berada dibawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan target Revisi Renstra DPUPR 2019-2024 adalah sebanyak 66 bangunan.

Adapun untuk melihat data realisasi persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :

Tabel II. 33
Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum
Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	Persen	n.a	60,60	110,61	86,54	87,88	98,48

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, 2024

Target pemenuhan Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah sebesar 87,88 persen dengan realisasi sebesar 86,54 persen yang berarti tidak memenuhi target pemerintah kota Tarakan dengan capaian kinerja 98,48 persen. Hal ini dikarenakan program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan program penatagunaan tanah masih mendapat beberapa permasalahan terkait dokumen kepemilikan lahan, dokumen RTRW dan lain-lain.

**FOTO KEGIATAN KETERSEDIAAN BANGUNAN PEMERINTAH DAN
FASILITAS UMUM**



Pembangunan Guest House Kodim progress 0%



Pembangunan Guest House Kodim progress 100%

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program penataan bangunan gedung diantaranya adalah pemeliharaan beberapa bangunan gedung perkantoran, penambahan bangunan gedung, kegiatan pokok pikiran (pokir) Dewan, maupun kegiatan multiyears diantaranya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga, pembangunan Gedung Kesenian dan TCC, dan pembangunan guest house Kodim.

Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia (SDM) Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan dari Dinas/Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan proyek jalan lingkungan sehingga berpengaruh pada kualitas pekerjaan yang belum maksimal sesuai yang diharapkan.
2. Terjadinya kelangkaan bahan baku (kayu dan batu) di luar prediksi untuk kegiatan pada pertengahan tahun 2023 sehingga kegiatan ulinisasi tidak dapat terlaksana sesuai waktu yang ditetapkan.
3. Ada 1 (satu) kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan berpindah ke OPD

- lain (DPUPR) disebabkan karena berubah prioritas Dana RT menjadi Peningkatan Drainase Lingkungan
4. Terdapat 3 (tiga) kegiatan peningkatan Jalan Lingkungan yang setelah di survei lokasinya ternyata tidak sesuai dengan usulan awal, sehingga kegiatan tersebut dibatalkan.
 5. Terbatasnya Penyedia Jasa yang melayani pekerjaan Ready Mix (Campuran beton siap pakai) sehingga memerlukan waktu yang lama (antri) untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

13. Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata

Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.

Formula Perhitungan Capaian Indikator Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang terbangun}}{\text{Jumlah kawasan bangunan}} \times 100$$

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat Kota Tarakan khususnya terkait pelayanan dalam bidang pariwisata, maka perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan sarana dan prasarana berupa Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Amal Kota Tarakan.

Tabel II. 34
Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	Persen	n.a	63,50	59,01	100	82,50	121,21

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, 2024

Target Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah sebesar 82,50 persen dengan realisasi sebesar 100,00 persen yang berarti memenuhi target pemerintah kota Tarakan dengan capaian kinerja 121,21 persen. Program Penataan Bangunan Gedung dengan capaian kinerja mencapai 99,60 persen dan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dengan capaian kinerja mencapai 100 persen.

FOTO-FOTO KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PANTAI AMAL TAHAP III KOTA TARAKAN



14. Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap

Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Penilaian terhadap kondisi pelayanan jalan didasarkan kepada tingkat kemantapannya, yang dibagi

menjadi 3 kategori, yaitu: (1) kondisi pelayanan mantap adalah jalan dengan kondisi baik dan sedang, (2) Jalan dengan kondisi pelayanan tidak mantap adalah ruas-ruas jalan yang dalam keadaan sehari-hari masih berfungsi melayani lalu lintas, tetapi tidak dapat diperhitungkan umur rencananya, serta tidak mengikuti standar tertentu. Termasuk ke dalam kondisi pelayanan tidak mantap adalah jalan dengan kondisi rusak ringan, dan (3) jalan dengan kondisi pelayanan kritis adalah ruas-ruas jalan sudah tidak dapat lagi berfungsi melayani lalu lintas dan keadaan putus. Termasuk ke dalam kondisi pelayanan kritis adalah jalan dengan kondisi rusak berat.

Formula Perhitungan Capaian Indikator Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang}}{\text{Jumlah panjang jalan se – Kota Tarakan}} \times 100$$

Dirinci menurut kondisi jalan, 45,47 persen dalam kondisi baik; 20,49 persen dalam kondisi sedang; 20,25 persen dalam kondisi rusak; dan 13,78 persen dalam kondisi rusak berat. Sepanjang tahun 2023 pemerintah kota Tarakan telah melaksanakan pekerjaan jalan dimana panjang jalan yang direkonstruksi /direhabilitasi sepanjang 1,949 km, panjang jalan yang dipelihara sepanjang 0,732 km, panjang jembatan yang dibangun sepanjang 55 km, dan panjang jembatan yang diganti/dilebarkan sepanjang 12 km yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum

Tabel II. 35
Panjang Jalan dgn Kondisi Mantap Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target RPJMD	Capaian (%)
-------------------	--------	-----------	--------------	-------------

		2020	2021	2022	2023	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Panjang Jalan dgn Kondisi Mantap	Persen	70,08	65,97	67,39	68,37	65,63	104,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, 2024

Target Panjang Jalan dgn Kondisi Mantap Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah sebesar 65,63 persen dengan realisasi sebesar 68,37 persen yang berarti memenuhi target pemerintah kota Tarakan dengan capaian kinerja 104,17 persen. Hal ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Jalan dengan capain kinerja sebesar 99,94 persen, Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan capaian kinerja 100 persen dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

**FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN TAHUN 2023**



Pengaspalan Jalan Sei Sembakung



Pembangunan Jembatan Swasembada



Pengaspalan Jalan Hang Tuah

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mensukseskan tercapainya sasaran ini adalah program peningkatan jalan dan jembatan dan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Sub kegiatan yang dilakukan

pada tahun 2023 adalah Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, dan Pembangunan Jembatan.

15. Persentase pembinaan jasa konstruksi

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Kota Tarakan sebanyak 3 orang, Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih Kota Tarakan sebanyak 122 orang, Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli Kota Tarakan sebanyak 122 orang. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kota Tarakan yang aktif dengan data termutakhir, Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi Kota Tarakan yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama.

Formula Perhitungan Capaian Indikator Persentase pembinaan jasa konstruksi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah jasa konstruksi yang dilaksanakan pembinaan}}{\text{Jumlah jasa konstruksi keseluruhan}} \times 100$$

Pembinaan jasa konstruksi adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan jasa konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi. Bentuk pembinaan jasa konstruksi dapat berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

Tabel II. 36
Pembinaan Jasa Konstruksi Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pembinaan jasa konstruksi	Persen	n.a	22,79	24,28	85,00	80,00	106,25

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, 2024

Target Pembinaan Jasa Konstruksi Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah sebesar 80,00 persen dengan realisasi sebesar 85,00 persen yang berarti memenuhi target pemerintah kota Tarakan dengan capaian kinerja 106,25 persen. Program pendukung dalam indikator Pembinaan jasa konstruksi adalah Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan capaian kinerja 100 persen.

FOTO KEGIATAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI



Rakortek Bina Jasa Konstruksi seluruh wilayah kerja Prov Kaltara



Rapat Pemetaan Kebutuhan Pelatihan Sertifikasi TA Konstruksi

Faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan pada Seksi Jasa Konstruksi adalah adanya kerjasama dan dukungan dari Balai Pengembangan Jasa Konstruksi dan Dinas PUPR-PERKIM Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, adanya surat edaran dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi perihal permohonan penghentian penertiban izin usaha jasa konstruksi (IUJK). Berdasarkan surat tersebut, diinformasikan bahwa penerbitan IUJK dihentikan dan digantikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Dengan meningkatnya capaian dalam indikator Persentase pembinaan jasa konstruksi pada tahun 2023, maka berpengaruh pula pada meningkatnya sumber daya manusia dalam bidang

jasa konstruksi di Kota Tarakan.

16. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terdiri atas:

- KKPR untuk kegiatan berusaha;
- KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
- KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengubah beberapa nomenklatur yang ada di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dahulu bernama Izin Lokasi, adalah salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pengurusan KKPR wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha dalam rangka memperoleh perizinan berusaha.

Formula Perhitungan Capaian Indikator Persentase pembinaan jasa konstruksi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya}}{\text{Jumlah luas Kota Tarakan}} \times 100$$

Tabel II. 37
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	n.a	85,66	89,54	90,55	93,94	96,39

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, 2024

Target Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah sebesar 93,94 persen dengan realisasi sebesar 90,55 persen yang

berarti memenuhi target pemerintah kota Tarakan dengan capaian kinerja 96,39 persen. Program pendukung dalam indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang adalah program penyelenggaraan penataan ruang dengan capaian kinerja mencapai sebesar 96,39 persen dikarenakan kesesuaian pemanfaatan ruang berbenturan dengan ketentuan RTRW yang telah ditetapkan.

Faktor penghambat tidak tercapainya target yang telah ditetapkan diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Adanya perubahan dan penyesuaian peruntukan kawasan/zona pada Peraturan Zonasi (PZ) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 2. Adanya indikasi ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran dalam pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan.

FOTO-FOTO KEGIATAN SEKSI PENATAAN RUANG



Kegiatan Sosialisasi dan Asistensi dengan tim KemenATR/BPN dan TKPRD

Langkah atau strategi untuk mencapai target pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut: 1. Percepatan proses penyelesaian penyusunan dan penetapan RDTR untuk 4 Wilayah Perencanaan di Kota Tarakan. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang. 3. Melaksanakan penilaian Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

17. Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan

Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung arus atau volume lalu lintas yang ideal dalam satuan waktu tertentu, dinyatakan dalam jumlah kendaraan yang melewati potongan jalan tertentu dalam satu jam (kendaraan/jam). Untuk mengetahui Rasio Jumlah kendaraan dibandingkn perkapasitas jalan pada tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$$

Tabel II. 38
Data Kendaraan Bermotor Yang Telah Diregistrasi Sat Lantas
Tarakan Tahun 2023

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan (unit)
1	Mobil Penumpang	12.233
2	Bus	96
3	Mobil Barang	6.803
4	Sepeda Motor	179.348
5	Kendaraan Khusus	289
TOTAL		198.769

Dari hasil perhitungan dapat diketahui dengan jumlah panjang jalan 236.558 km dibandingkan dengan jumlah kendraan sebanyak 198.769 unit dengan hasil perbandingan 1,19 hal tersebut menunjukkan kapasitas jalan masih mampu menampung kendaran yang ada. Pada saat arus rendah, kecepatan lalu lintas kendaraan bebas tidak ada gangguan dari kendaraan

lain, semakin banyak kendaraan yang melewati ruas jalan, kecepatan akan semakin turun pada waktu tertentu

Tabel II. 39
Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	Rasio	0,57	1,30	1,22	1,19	1,25	95,20

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Target Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan pada tahun 2023 adalah sebesar 1,25 persen dengan realisasi sebesar 1,19 persen atau dengan capaian 95,20 persen hal ini dikarenakan penambahan jumlah kendaraan yang disebabkan pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat lebih besar proporsinya dibandingkan dengan perkembangan pembangunan jalan.

18. Persentase Pemeliharaan Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Formula Perhitungan Capaian Indikator Persentase Pemeliharaan Pelabuhan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Perbaikan Pelabuhan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Perbaikan Pelabuhan yang Seharusnya}} \times 100$$

Pemeliharaan dan perawatan adalah merupakan suatu konsekuensi dari pengadaan aktifitas fisik dari prasarana dan sarana dalam rangka

mempertahankan kondisi fasilitas dan peralatan pada siap guna dan laik operasi. Aktifitas pemeliharaan ini merupakan keterpaduan dari beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dari sejak perencanaan dan perancangan fasilitas dan peralatan pelabuhan.



Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, peraturan ini untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di Pelabuhan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan

Tabel II. 40
Persentase Pemeliharaan Pelabuhan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	Persen	n.a	N/A	29,00	58,00	60,00	96,67

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Target Persentase Pemeliharaan Pelabuhan pada tahun 2023 adalah sebesar 60,00 persen dengan realisasi sebesar 58,00 persen atau dengan capaian 96,67 persen. Program yang mendukung indikator tersebut adalah Program Pengelolaan Pelayaran dengan capaian kinerja sebesar 99,91

persen, yang berarti ketidak tercapaian target diatas disebabkan oleh harga material pemeliharaan.

Dalam rangka pencapaian kinerja sasara pertama yang diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut diatas, ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tarakan pada Tahun 2023 antara Lain :

- a) Upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas pada persimpangan •
Pengendalian dengan simpang prioritas;
 - Pengendalian dengan simpang ber APILL;
 - Pengendalian dengan simpang ber APILL yang dilengkapi dengan aturan belok kiri langsung
- b) Penyediaan dan perbaikan fasilitas perlengkapan jalan
 - Rambu Lalu Lintas
 - Marka Jalan
 - APILL

Berbagai upaya Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas tersebut belum mampu secara signifikan mengatasi/menurunkan rasio jumlah kendaraan perkapasitas jalan. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi buruknya kinerja persimpangan jalan :

- a) Tingginya peningkatan jumlah kendaraan; Pertumbuhan kendaraan kota Tarakan cukup tinggi dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan pembangunan infra struktur jalan, lalu lintas di Kota Tarakan di dominasi oleh pengguna kendaraan pribadi, tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak diikuti dengna pertumbuhan pembangunan infrastruktur/kapasitas jalan dan persimpangan tertentu saja akan mempengaruhi kinerja jalan dan persimpangan tersebut. Hingga pada suatu kondisi tetentu nantinya kapasitas jalan dan persimpangan tidak akan mampu lagi menampung volume lalu lintas kendaraan yang menyebabkan menurunnya kinerja persimpangan jalan
- b) Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan Perlengkapan jalan merupakan

kebutuhan primer untuk suatu jalan dapat dioperasikan, tanpa adanya fasilitas perlengkapan jalan maka tentu saja akan menimbulkan berbagai macam permasalahan lalu lintas tersendiri. Pada kondisi eksisting di Kota Tarakan banyak ditemukan kondisi jalan dan persimpangan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut tentu saja dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan dan menyebabkan timbulnya gangguan lalu lintas pada persimpangan jalan sehingga kinerja persimpangan jalan dapat menurun.

c) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam bertertib berlalu lintas

Kurangnya penegakan hukum Dalam hal ini Satlantas Polres Tarakan memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan kegiatan penegakan hukum berlalu lintas. Diperlukan upaya penindakan dan penegakan hukum lalu lintas secara berkelanjutan dengan kerjasama dari pada stekholder yang terkait agar dapat lebih efektif dan efisien.

d) Kinerja angkutan umum

Tingkat penggunaan kendaraan pribadi Kota Tarakan cukup tinggi, hal tersebut terjadi bukan karena tidak ada sebab. Kurang optimalnya kinerja angkutan umum dinilai menjadi salah satu penyebab masyarakat kota Tarakan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan angkutan umum. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan pribadi akan menyebabkan bertambahnya volume lalu lintas. Volume lalu lintas kendaraan terus bertambah, dan tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas jalan ataupun persimpangan, hal tersebut tentu saja menyebabkan menurunnya kinerja persimpangan.

e) Pengumpulan data lalu lintas

Data sebagai salah satu modal awal dalam melakukan upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas dirasakan masih sangat kurang dan belum akurat, sehingga upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang

diharapkan dapat memberikan solusi dalam permasalahan lalu lintas kurang optimal. Sehingga disini diperlukan survey/pengumpulan data lalu lintas yang berkelanjutan guna memperoleh data lalu lintas yang akurat untuk melakukan perencanaan/upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang tepat.

Untuk lebih jelasnya besarnya dukungan anggaran terhadap sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 41
Program pendukung dari Sasaran Meningkatnya
Sarana Prasarana Perkotaan

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	515.000.000,00	496.171.000,00	96,34
2	Program Penataan Bangunan Gedung	102.621.275.754,00	102.066.995.702,00	99,46
3	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	34.717.009.353,00	34.717.009.353,00	100,00
4	Program Penyelenggaraan Jalan	76.112.979.528,00	72.293.324.914,00	94,98
5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	4.996.880,00	4.792.000,00	95,90
6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	762.638.440,00	710.650.589,00	93,18
7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.301.148.132,00	11.902.134.478,00	96,76
8	Program Pengelolaan Pelayaran	70.000.000,00	69.937.000,00	99,91

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

Sasaran 10. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR

19. Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah dikenal dengan istilah MBR. MBR memiliki kriteria tersendiri. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Berdasarkan Peraturan Kementerian PUPR yang sesuai dengan Kepmen Kimpraswil N0. 403/KPTS/M/2002 dan Permenpera No. 22/Permen/M/2008, untuk menciptakan rumah layak huni, haruslah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain :

- a) Faktor Kesehatan
- b) Faktor Keamanan Bangunan
- c) Faktor Keindahan dan Kenyamanan

Formula Perhitungan Capaian Indikator Persentase Pemeliharaan Pelabuhan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi} + \text{Jumlah RTLH yang direhab} + \text{Jumlah Rumah DP 0\% yang terbangun}}{\text{Total Rumah Tidak Layak Huni}} \times 100$$

Pada tahun 2023 total Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi ditambah Jumlah RTLH yang direhab sebanyak 1767 unit. Sementara Jumlah Rumah DP 0% yang terbangun sebanyak 279 unit. Dengan Total Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 2300 unit. Berikut capaian persentasi Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 42
Rumah untuk MBR yang Terbangun dan Terenovasi
Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	Persen	n.a	51,35	66,52	97,61	80,00	122,01

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan, 2024



Target Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi pada tahun 2023 adalah sebesar 80,00 persen dengan realisasi sebesar 97,61 persen atau dengan capaian 122,01 persen. Program Pengembangan Perumahan

dengan Capaian Kinerja Sebesar 84,24 Persen dan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh capaian kinerja sebesar 99,99 persen. Untuk lebih jelasnya besarnya dukungan anggaran terhadap sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 1
Program pendukung dari Sasaran Meningkatnya Ketersediaan
Rumah Layak Huni Untuk MBR

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Perumahan	126.889.640,00	86.496.840,00	68,17
2	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.049.999.850,00	1.039.083.557,00	98,96

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan, 2024

Beberapa akibat faktor Pendukung dan Permasalahan baik eksternal maupun internal antara lain sebagai berikut:

Faktor Eksternal

- b) Peran Kementerian PUPR sebagai mitra dalam memberikan dukungan data dan informasi dalam rangka penanganan RTLH di daerah meliputi dukungan rehabilitasi RTLH yaitu APBN sebanyak 285 unit, APBN II 43 unit dan APBN III 21 unit RTLH yang direhabilitasi, sehingga membantu pencapaian target penanganan Sasaran strategis DPRKPP.
- c) Pembangunan rumah DP 0% yang dilakukan Pengembang Perumahan di

Kota Tarakan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tarakan didukung pihak Perbankan tahun 2023 tercapai dengan jumlah rumah terbangun sebesar 279 unit.

- d) Kesadaran dan kesediaan warga yang makin meningkat untuk memiliki rumah layak huni sehingga kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah

Faktor Internal

- a) Tersedianya Basis Data Rumah Tidak Layak huni (RTLH) yang memuat informasi mengenai data spasial/peta rumah yang tidak memenuhi kriteria layak huni, dapat digunakan sebagai acuan dalam berbagai program peningkatan kualitas permukiman layak huni di kota Tarakan.



Permasalahan

Masalah yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan berkaitan dengan penyediaan rumah layak huni adalah:

- a) Alokasi anggaran yang masih kurang untuk menuntaskan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan cepat.
b) Masih kurangnya kesadaran para penghuni Rusunawa untuk turut

memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang disediakan Rusunawa sehingga banyak kondisi kamar hunian rusunawa yang rusak berat.

- c) Kurangnya Sumber Daya Manusia pengelola administrasi UPTD Rusunawa dan Rusus.
- d) Kurangnya alokasi anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana Rusunawa.

Sasaran 11, Menurunnya luas kawasan kumuh

20. Persentase luas kawasan kumuh

Sebagian besar penghuni permukiman kumuh memiliki tingkat pendapatan yang rendah yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh di suatu wilayah. Terjadinya permukiman kumuh juga disebabkan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah ini sangat erat juga hubungannya dengan rendahnya tingkat pendapatan dan menjadi pembatas terhadap peningkatan kualitas diri.

Penanganan terhadap permukiman kawasan kumuh dilakukan melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan 7 indikator penentuan kawasan kumuh antara lain:

- a) Bangunan Gedung
- b) Pembangunan Drainase Lingkungan
- c) Peningkatan Jalan Lingkungan
- d) Penyediaan air minum
- e) Pengelolaan air limbah atau sanitasi
- f) Pengelolaan persampahan
- g) Proteksi

Beberapa cara menanggulangi permukiman kumuh penduduk ini seperti memberikan penyuluhan akan dampak yang terjadi jika tinggal di permukiman kumuh, memberikan penyuluhan ini agar masyarakat sadar

akan bahayanya tunggal di permukiman kumuh. Selain itu adalah pemerintah memberikan pembangunan sarana dan prasarana seperti rumah susun sederhana sewa dengan fasilitas dasar permukiman yang memadai seperti air minum, sanitasi, peningkatan kualitas lingkungan yang baik.

Pada tahun 2022 luas kawasan kumuh seluas 68,95 Ha menurun jika dibandingkan luas kawasan kumuh pada tahun 2023 yakni seluas 41,31 Ha. Untuk tingkat capaian luas kawasan kumuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 43
Luas kawasan kumuh Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Ha	n.a	49,17	31,77	17,43	17,64	101,19

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan, 2024

Target Luas kawasan kumuh Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah sebesar 17,64 Ha dengan realisasi sebesar 17,43 Ha yang berarti memenuhi target pemerintah kota Tarakan dengan capaian kinerja 101,19 persen. Program yang mendukung indikator tersebut adalah Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan capaian kinerja 98,00 persen, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan capaian kinerja 96,67 persen, dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan capaian kinerja 100,00 persen. Untuk lebih jelasnya besarnya dukungan anggaran terhadap sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 44
Program pendukung dari Sasaran Menurunnya
Luas Kawasan Kumuh

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Kawasan Permukiman	254.998.331,00	228.475.124,00	89,60
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	48.892.687.699,00	47.831.953.537,00	97,83

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan, 2024

Faktor Pendukung dan Permasalahan

Faktor Eksternal

1. Dukungan dan Kerjasama yang baik dengan KOTAKU yang telah mendampingi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dalam pengumpulan data survey, pengolahan sampai pelaporan terkait penanganan permukiman kumuh. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah salah satu dari sejumlah upaya untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh. Program Kota Tanpa Kumuh merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya
2. Dukungan dan komitmen Kepala Daerah yang cukup besar untuk mengurangi kawasan kumuh sebagai program prioritas dalam misi Kepala daerah Kota Tarakan

Faktor Internal

1. Dukungan dana APBD cukup besar untuk penanganan kumuh dengan 7 aspek penanganan yang diharapkan bisa terintegrasi dan menciptakan Kawasan permukiman yang bebas kumuh.
2. Sumber Daya manusia DPRKPP yang berkualitas



Permasalahan

Namun ada beberapa hal yang harus dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dalam upaya melaksanakan program penurunan kawasan pemukiman kumuh yaitu :

1. Belum intensifnya sosialisasi kepada warga yang tinggal di daerah kumuh terkait dampak kumuh pada lingkungan pemukiman sehingga tidak semua warga yang tinggal di daerah kumuh dapat berperan aktif dalam mengurangi tingkat kekumuhan.
2. Belum terintegrasinya Rencana Aksi yang disusun dalam penanganan kawasan kumuh dengan rencana aksi pelaksanaan program-program perangkat daerah yang terkait dengan penanganan pengurangan kumuh.
3. Spot lokasi kumuh yang terpecah dalam 1 kelurahan sehingga menyulitkan untuk penanganan terintegrasi.
4. Tumbuhnya titik kumuh baru dengan berbagai macam sebab.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang terjangkau di Kota Tarakan, Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan melaksanakan program penyediaan perumahan, antara lain :

1. Pengembangan sistem perumahan publik berbasis Rumah Susun.

Rusunawa adalah rumah susun sederhana sewa yaitu bangunan bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan tempat hunian yang memiliki wc dan dapur yang menyatu dengan cara



membayar sewa tiap bulannya kepada pengelolanya. Dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, pasal 1 angka 1 menyatakan ; Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikelola UPTD RUSUNAWA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan disamping diperuntukkan untuk warga yang membutuhkan tempat tinggal dengan harga terjangkau, juga diperuntukkan bagi para mahasiswa, pelajar, santri dan pekerja termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri.

2. Penyediaan Rumah Khusus (Rusus)

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus

(Rusus) menyebutkan bahwa yang dimaksud Rumah Khusus (Rusus) adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Memang tidak dijelaskan secara eksplisit arti kebutuhan khusus, tetapi jika dilihat dari peruntukannya, maka penerima manfaat Penyediaan Rusus tersebut adalah masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menghuni Rusus. Beberapa diantaranya adalah untuk masyarakat nelayan yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai, masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil dan daerah tertinggal dan masyarakat korban bencana seperti kebakaran, banjir dan lain-lain. Namun bila tidak ada yang berminat maka akan dibuka untuk umum. Rusus di Kota Tarakan berlokasi di Kelurahan Pamusian Jalan Rusunawa Boom Panjang berdekatan dengan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dengan bangunan tipe 36, dimana terbangun sebanyak 87 unit dan telah dihibahkan dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kota Tarakan pada tanggal 19 September 2019. Selain di Pamusian, Pemkot Tarakan di Tahun 2021 juga membangun Rusus di daerah Juata Permai dengan 100 unit Rusus. Rusus-rusus ini akan difungsikan dengan tarif sewa. Untuk Rusus di Kelurahan Pamusian Tarif sewanya adalah Rp. 800.000,- per bulan.

Tujuan 4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Gini Rasio

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Tabel II. 45
Patokan Nilai Koefisien Gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 - 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
>0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

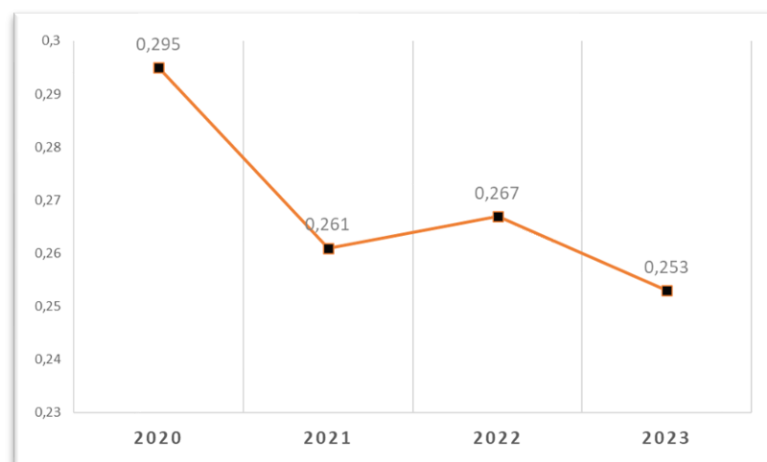
Tercatat pada tahun 2023 rasio gini Kota Tarakan adalah 0,253 poin naik dari tahun sebelumnya sebesar 0,04. Perubahan angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk yang digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. Untuk Kota Tarakan gini rasio masuk dalam tingkat ketimpangan rendah. Adapun untuk melihat data realisasi Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan dari tahun 2020-2023, disajikan pada tabel sebagai berikut ini :

Tabel II. 46
Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gini Rasio	Poin	0,295	0,261	0,267	0,253	0,29	114,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2024

Pada periode 2020-2023, distribusi pengeluaran penduduk di Kota Tarakan dapat dikatakan stabil, dikarenakan sangat kecil mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Adapun untuk melihat data realisasi gini rasio Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar II. 9

Indeks Gini / Gini Rasio Kota Tarakan

Sasaran 12. Menurunnya kemiskinan

21. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global maupun nasional sehingga masih menjadi perhatian banyak pihak. Untuk keperluan perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan maka diperlukan sejumlah indikator yang menunjukkan status dan perkembangan penduduk miskin di Indonesia. Indikator-indikator tersebut antara lain jumlah dan persentase penduduk miskin serta berbagai karakteristik kemiskinan lainnya yang terbanding antar waktu dan antar wilayah

Perhitungan angka kemiskinan menurut BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat diategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel II. 47
Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2020-2023

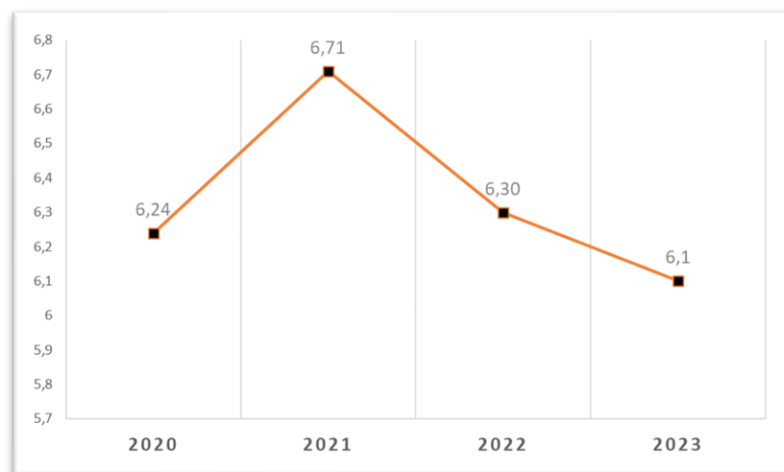
Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Angka Kemiskinan	Persen	6,24	6,71	6,30	6,1	5,40	87,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2024

Jumlah penduduk miskin di Kota Tarakan pada Tahun 2023 sebanyak

16.490 jiwa (6,10 persen). Pada tahun 2022 penduduk miskin berjumlah 16.750 jiwa (6,30 persen), yang berarti jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 260 jiwa atau menurun 0,20 poin persen. Hal ini dikarenakan meskipun secara kuantitatif pertumbuhan ekonomi cukup tinggi yaitu 6,1 persen namun disisi lain batas garis kemiskinan meningkat sementara sebagian besar penduduk Kota Tarakan berada sedikit diatas dari garis kemiskinan

Adapun untuk melihat data realisasi angka kemiskinan Kota Tarakan dari tahun 2020-2023, disajikan pada gambar sebagai berikut ini



Gambar II. 10
Realisasi Angka Kemiskinan Kota Tarakan 2020-2023

Dari target tahun 2023 sebesar 5,40 persen terealisasi 6,10 persen dengan capaian sebesar 87,04 persen. Pada periode 2019-2020, persentase penduduk miskin meningkat sebesar 0,24 persen. Kenaikan kembali terjadi pada tahun 2021 menjadi 6,71 persen dan pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 6,30. Berikut data kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 48
Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kemiskinan	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Indikator Kemiskinan	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin Kota Tarakan	%	6,24	6,71	6,30	6,10
Jumlah Penduduk Miskin Kota Tarakan (dlm Ribuan)	Ribu Jiwa	17,33	17,57	16,75	16,49
Garis Kemiskinan Kota Tarakan (Rp / Kap / Bulan)	Rp	696.585	711.268	773.446	819.621
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Satuan	0,77	1,01	0,73	0,79
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Satuan	0,15	0,23	0,13	0,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2024

Garis kemiskinan Kota Tarakan setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Untuk lebih jelasnya besarnya dukungan anggaran terhadap sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 49
Program pendukung dari Sasaran Menurunnya kemiskinan

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemberdayaan Sosial	9.956.880,00	9.690.000,00	97,32
2	Program Rehabilitasi Sosial	189.068.236,00	124.424.900,00	65,81
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	85.487.100,00	80.123.230,00	93,73
4	Program Penanganan Bencana	50.000.000,00	42.669.000,00	85,34

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

Sasaran 13. Menurunnya pengangguran

22. Tingkat Pengangguran Terbuka

pengangguran merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Pengguran ini tercipta sebagai akibat Besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, Masyarakat atau warga

negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah, Adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia, . Tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang, dan Harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja serta terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK)

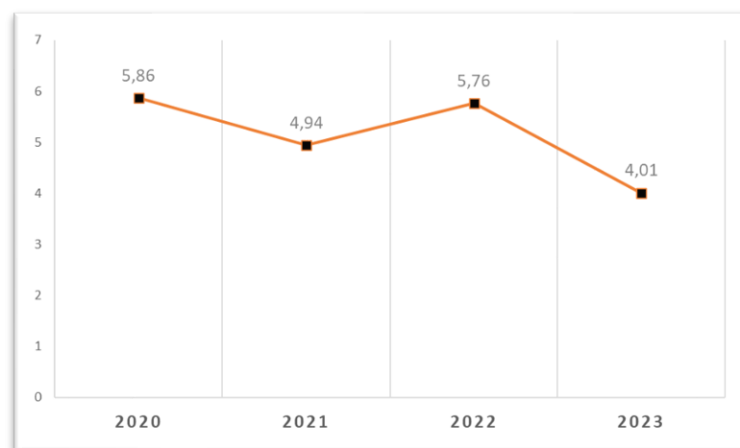
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel II. 50
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tarakan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (%)				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,86	4,94	5,76	4,01	5,69	129,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2024

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 5,69 persen dengan realisasi 4,01 persen, tingkat capaian 129,53 persen. Hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022, yang disebabkan oleh banyaknya lapangan kerja yang terbuka di Kota Tarakan dan peran aktif pemerintah Kota Tarakan. Adapun untuk melihat data realisasi Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar II. 11
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Tarakan 2020-2023

Beberapa aspek yang menjadi sebab menurunnya angka pengangguran di Kota Tarakan pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Peningkatan lowongan kerja yang disediakan.
2. Terjadinya seimbangan peningkatan sumber daya ekonomi.
3. Terjadi peningkatan pada Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Tarakan.

Untuk lebih jelasnya besarnya dukungan anggaran terhadap sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 51
Program pendukung dari Sasaran Menurunnya Pengangguran

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	199.418.700,00	155.169.563,00	77,81
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	179.995.225,00	164.982.625,00	91,66
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	112.359.130,00	89.754.080,00	79,88
4	Program Hubungan Industrial	107.803.660,00	93.421.960,00	86,66

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

Sasaran 14. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah

23. Laju pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah situasi yang menggambarkan produk domestik bruto per kapita suatu negara yang mengalami peningkatan. Para ekonom mengungkapkan secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan pada perubahan-perubahan

yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan data produk domestik bruto (PDB). Produk domestik bruto adalah total nilai pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Tabel II. 52
Laju Pertumbuhan PDRB Tarakan Atas
Dasar Harga Konstan 2020-2023

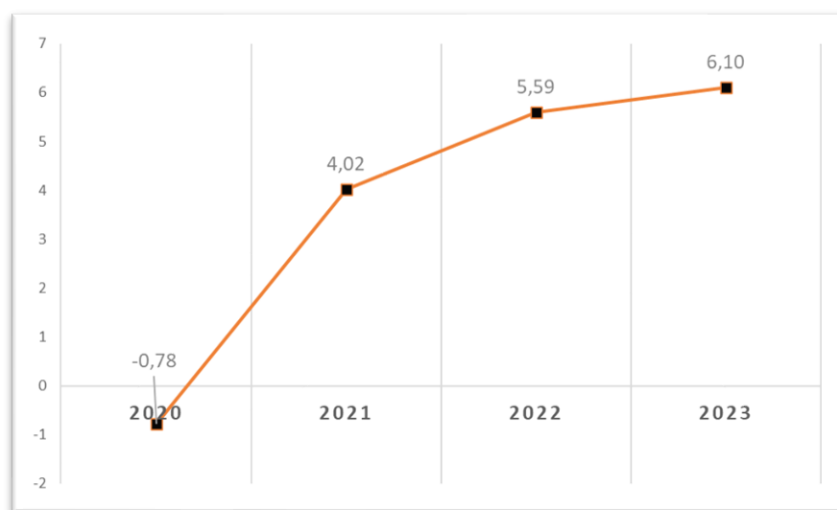
Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (%)				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	-0,78	4,02	5,59	6,10	6,23	97,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2024

Besaran PDRB suatu daerah dapat menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi dari suatu daerah, baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Perekonomian Kota Tarakan yang salah satunya diukur dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), selama periode 2020-2023 menunjukkan perkembangan yang meningkat. PDRB Kota Tarakan sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi dan harga komoditi dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan konstruksi yang masih tetap menjadi sektor andalan karena memberikan kontribusi paling besar bagi perekonomian Kota Tarakan. Kontribusi PDRB ADHB oleh sektor

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan konstruksi. Tidak tercapainya target pertumbuhan PDRB Kota Tarakan juga dikarenakan program pemulihan ekonomi belum sepenuhnya optimal dan efektif dilaksanakan, mengingat program tersebut masih memerlukan dukungan yang kuat baik dari pemerintah Kota Tarakan maupun pemerintah pusat.

Adapun untuk melihat data realisasi laju pertumbuhan ekonomi Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar II. 12
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan 2020-2023

Perekonomian Kota Tarakan Triwulan II-2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 12,86 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 6,35 triliun.

Tabel II. 53
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tarakan Triwulanan Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (c-to-c)

Kategori/Lapangan Usaha	2022	2023
	Triwulan IV	Triwulan II
(1)	(2)	(3)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,95	7.17
B. Pertambangan dan Penggalian	2,98	-0.07
C. Industri Pengolahan	4,12	3.84

Kategori/Lapangan Usaha	2022	2023
	Triwulan IV	Triwulan II
(1)	(2)	(3)
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7,42	15.77
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,3	3.90
F. Konstruksi	-3,26	7.66
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,63	6.71
H. Transportasi dan Pergudangan	10,02	6.61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,95	8.30
J. Informasi dan Komunikasi	8,3	6.33
K. Jasa Keuangan	9,41	13.64
L. Real Estate	5,79	3.05
M. Jasa Perusahaan	6,94	4.00
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,38	3.18
O. Jasa Pendidikan	7,24	6.22
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,82	1.83
Q. Jasa Lainnya	9,66	7.80
Produk Domestik Regional Bruto	5,59	6.10

Sumber : Statistik Pembangunan Kota Tarakan, 2024

Dilihat dari distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha pada tahun 2023, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan distribusi tertinggi pada PDRB ADHB di Kota Tarakan yaitu sebesar 24,34 persen. Tiga distribusi tertinggi lainnya pada PDRB ADHB tahun 2023 di Kota Tarakan adalah konstruksi (14,91 persen); transportasi dan pergudangan (14,06 persen); dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (8.30 persen).

Laju pertumbuhan PDRB ADHB 2010 di Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah 6,10 persen. Laju pertumbuhan tertinggi bila dilihat menurut lapangan usaha di Kota Tarakan tahun 2023 adalah Pengadaan Listrik dan Gas (15.77 persen), diikuti oleh Jasa Keuangan (13.64 persen) serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,63 persen).

Tabel II. 54
Program pendukung dari Sasaran Meningkatnya
Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.878.790.720,00	1.768.948.544,00	94,15
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	741.108.274,00	707.721.506,00	95,50
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12.938.000,00	6.007.000,00	46,43
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	396.286.336,00	261.197.498,00	65,91
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.360.371.876,00	1.344.515.670,00	98,83
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.072.543.730,00	1.066.637.180,00	99,45
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	9.833.517,00	9.825.592,00	99,92
8	Program Perizinan Usaha Pertanian	7.582.000,00	7.260.000,00	95,75
9	Program Penyuluhan Pertanian	1.122.207.168,00	977.220.341,00	87,08
10	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	199.418.700,00	155.169.563,00	77,81
11	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	3.951.580,00	3.889.580,00	98,43
12	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	15.335.400,00	13.861.838,00	90,39
13	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	9.997.840,00	-	0,00
14	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	163.990.210,00	145.659.300,00	88,82
15	Program Pengembangan Ekspor	77.008.320,00	27.152.657,00	35,26
16	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	105.000.000,00	94.226.860,00	89,74

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	29.999.760,00	8.200.000,00	27,33
18	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.900.765.355,00	1.871.070.920,00	98,44
19	Program Pemasaran Pariwisata	1.002.935.750,00	989.697.000,00	98,68
20	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	359.783.835,00	352.857.005,00	98,07
21	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	24.987.400,00	18.868.621,00	75,51
22	Program Pelayanan Penanaman Modal	211.585.000,00	203.907.780,00	96,37
23	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	371.701.000,00	285.776.880,00	76,88
24	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	17.250.000,00	14.218.000,00	82,42

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

Sasaran 15. Terkendalinya Inflasi daerah

24. Tingkat Inflasi

inflasi adalah kenaikan harga - harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode yang lain. Dan tingkat inflasi berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dimana tingkatan inflasi itu dibagi menjadi tiga, pertama tingkat inflasi rendah yaitu dibawah 2 atau 3 persen. Kedua, tingkat inflasi moderat jika kenaikan harga dapat mencapai 4 sampai 10 persen, dan ketiga adalah tingkat inflasi yang serius, tingkat inflasi serius terjadi jika kenaikan mencapai tingkat puluhan atau ratusan persen dalam setahun.

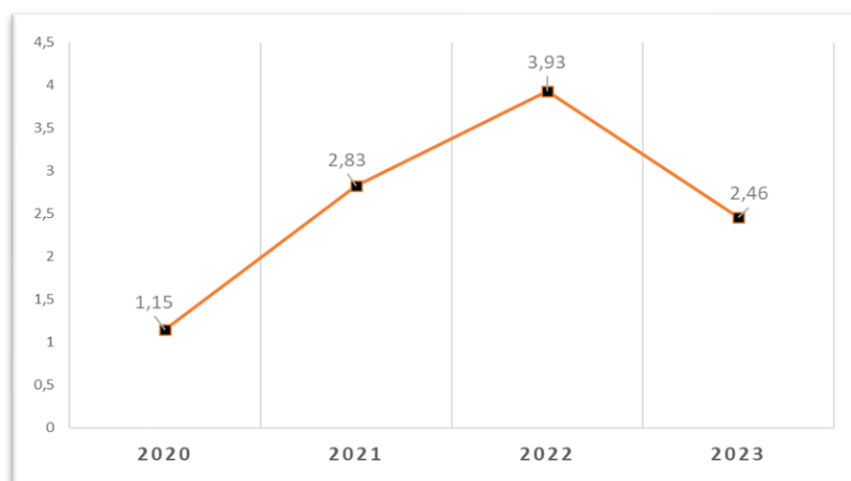
Tabel II. 55
Tingkat Inflasi Kota Tarakan 2020-2023

Indikator	Satuan	Realisasi	Target	Capaian
-----------	--------	-----------	--------	---------

Kinerja		2020	2021	2022	2023	RPJMD Tahun 2023	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Inflasi	Persen	1,15	2,83	3,98	2,46	3,20	123,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2024

Laju Inflasi Kota Tarakan dari Januari hingga Desember 2023 mencapai 32,46 persen dengan capaian kinerja mencapai 123,13 persen. Adapun untuk melihat data realisasi tingkat inflasi Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar II. 13
Tingkat Inflasi Kota Tarakan 2020-2023

Dari gambar diatas apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar 3,93 persen maka tingkat Inflasi di Tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari target yang ditetapkan di Tahun 2023 dalam RPJMD sebesar 3,20 persen. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap barang atau jasa, adanya penurunan terhadap biaya produksi, dan kenaikan permintaan yang diakibatkan adanya pertumbuhan penduduk yang terjadi di kota Tarakan.

Tabel II. 56
Program pendukung dari Sasaran Terkendalnya Inflasi daerah

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	10.000.380,00	10.000.380,00	100,00
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	114.995.172,00	110.032.770,00	95,68
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	39.978.000,00	38.369.814,00	95,98
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	19.999.000,00	19.874.000,00	99,37
5	Program Perekonomian Dan Pembangunan	651.692.474,00	591.505.423,00	90,76

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

Tujuan 5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek utama dalam pembangunan berkelanjutan mengingat tantangan kondisi dan peningkatan dinamika aktifitas serta peningkatan jumlah penduduk ke depan, akan semakin berpotensi terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup. Besarnya nilai IKLH sangat dipengaruhi oleh komponen penyusun yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup disebutkan bahwa kategori indeks kualitas air adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Tabel II. 57

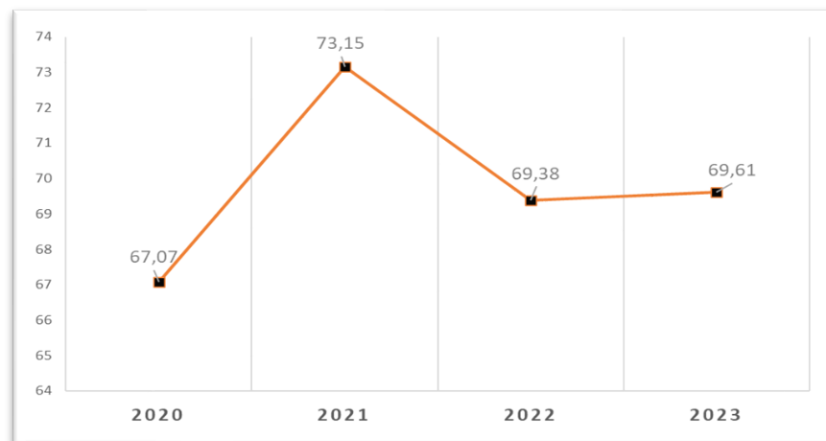
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tarakan 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indeks Kualitas LH	Poin	67,07	73,15	69,38	69,61	69,74	99,81

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2024

Nilai IKLH pada tahun 2022 adalah 69,38 persen, sedangkan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 69,74 (kategori “Sedang”), dengan capaian kinerja di tahun 2023 sebesar 99,81 persen. Pencemaran udara masih bisa dikendalikan dikarenakan sektor transportasi yang tidak terlalu padat dan bertambahnya tutupan vegetasi karena penataan pembangunan, begitupun dengan pencemaran air dal laut. Ketidaktercapaian target indeks kualitas lingkungan hidup ini dikarenakan tidak tercapainya target indeks kualitas air (IKA).

Adapun untuk melihat data realisasi indeks kualitas lingkungan hidup Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar II. 14
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tarakan 2020-2023

Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tersebut dikarenakan adanya Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan yang capaian kinerjanya sebesar 99,97 persen dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang capaian kinerjanya sebesar 100,00 persen.

Tabel II. 58
Tabel Realisasi IKA, IKU, IKL, dan IKLH Kota Tarakan

Parameter	2022	2023
(1)	(2)	(3)
IKA	53,33 (Sedang)	54,44 (Sedang)
IKU	93,24 (Sangat Baik)	93,14 (Sangat Baik)
IKL	52,81 (Sedang)	52,10 (Sedang)
IKLH	69,38 (sedang)	69,61 (Sedang)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2024

Nilai IKLH Kota Tarakan tersebut merupakan angka indikatif yang masih



dapat menjadi perdebatan dikarenakan keterbatasan data ataupun adanya perubahan metode penghitungan, namun IKLH ini dapat menjadi acuan yang memberikan gambaran umum dan membantu dalam proses pengambilan kebijakan

lingkungan. Sebagai regulator dalam pengendalian pencemaran lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengendalian Pencemaran Air dan Udara kepada pelaku usaha /kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Kegiatan ini dihadiri pelaku usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan fasilitasi dan pendampingan program Proklam untuk Masyarakat Kota Tarakan yang telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Sasaran 16. Menurunnya pencemaran lingkungan

25. Indeks Kualitas Air

Ketersediaan air bersih baik kualitas dan kuantitas mutlak menjadi

kebutuhan hidup orang banyak. Sehingga pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilaksanakan secara arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin akan timbul akibat pemanfaatannya. Kualitas air ditunjukkan secara kuantitatif dalam bentuk Indeks kualitas air (IKA) melalui hasil pengujian dan analisis kegiatan pemantauan kualitas air sungai.

Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup disebutkan bahwa kategori indeks kualitas air adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan pada tahun 2023 melakukan kegiatan pemantauan kualitas air sungai dan air sumber PDAM di 9 (Sembilan) Lokasi (dua kali pengambilan sampel) yang masing-masing mewakili wilayah administrasi kota Tarakan. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap 23 parameter uji. Dan untuk perhitungan indeks pencemaran digunakan (delapan) parameter yakni pH, TSS, BOD, COD, DO, T-P, NO₃-N dan Fecal Coli.



Kampung Bugis

Indeks Kualitas Air Kota Tarakan 4 tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 yaitu 63,33. Pada tahun 2022 nilai Indeks Kualitas Air mengalami penurunan 53,33 (kategori “Sedang”). Kondisi ini dipengaruhi oleh buangan air limbah dari berbagai aktivitas

usaha dan/atau kegiatan yang bersumber dari *point source* (sumber tetap : industri, rumah sakit, hotel) maupun *non point source* (sumber tidak tetap : pertanian, peternakan).

Tabel II. 59
Indeks Kualitas Air Kota Tarakan 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indeks Kualitas Air	Poin	45,56	63,33	53,33	54,44	55,02	98,95

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2024

Terjadi peningkatan indeks kualitas air di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, namun belum mencapai target yang ditetapkan, dikarenakan Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas air sungai, terjadinya sedimentasi akibat penebangan hutan disekitar DAS.

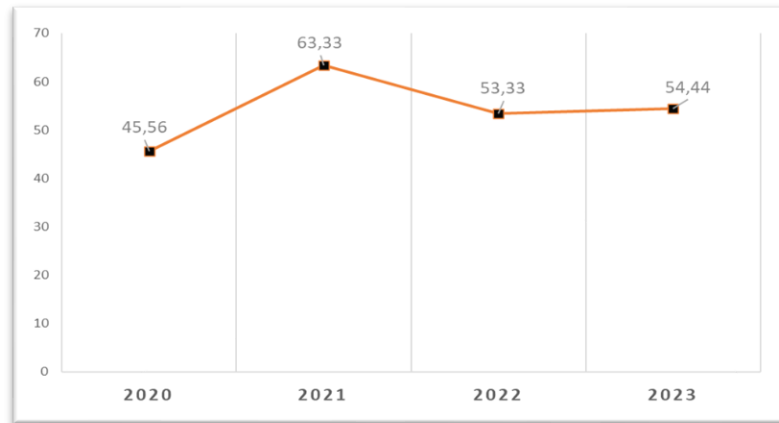
Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas air dalam menopang kualitas lingkungan hidup antara lain :

- 1) Pemberian izin dilakukan secara ketat serta tetap dilaksanakan pemantauan terhadap pelaku usaha yang sudah beroperasi yang membuang limbah ke laut.

2) Sosialisasi dan pembinaan secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air.

3) Kegiatan bersih parit yang dilakukan secara rutin.

Adapun untuk melihat data realisasi indeks kualitas air Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar II. 15
Indeks Kualitas Air Kota Tarakan 2020-2023

Pencapaian Indeks Kualitas Air tersebut dikarenakan adanya Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan yang tingkat capaian kinerjanya mencapai 98,86 persen. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang tingkat capaian kinerjanya mencapai 98,39 persen dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang tingkat capaian kinerjanya mencapai 92,09 persen.



Indeks Kualitas Air tidak mencapai target yang diharapkan, di sebabkan beberapa faktor, yaitu :

- a) Beberapa parameter hasil uji kualitas air sungai melebihi baku mutu (pH, Fecal Coliform, TSS, DO) ;
- b) Tipe sungai di kota Tarakan secara morfologi memiliki lebar 2 s/d 4 meter dan cukup dangkal. Sungai juga bertipe musiman yang sangat tergantung pada aliran air hujan sehingga mempengaruhi beban pencemaran aliran air yang masuk ke sungai.
- c) Aliran air yang masuk ke drainase masih belum terpisah antara saluran air limbah dan saluran air drainase sehingga mempengaruhi mutu air sungai.
- d) Belum terkelolanya limbah cair dan limbah padat dengan baik dan benar dari kegiatan yang berasal dari aktifitas domestik / rumah tangga, pertanian, perkebunan dan peternakan;
- e) Kondisi alami batuan Kota Tarakan yang tersusun oleh batuan yang banyak mengandung unsur besi (Fe) dan Alumunium (Al) yang apabila mengalami pelapukan batuan akan menghasilkan tanah yang bersifat asam sehingga dapat mempengaruhi kualitas air sungai (pH rendah atau bersifat asam).

Tabel II. 60
Indeks Pencemaran Air Sungai Kota Tarakan Tahun 2023

No	Titik Pemantauan	PI rata-rata	Status Mutu Air
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hulu Semunti	3.727	Ringan
2	Water Intake PDAM Juwata	5,073	Sedang
3	Hulu Persemaian	4,236	Ringan
4	Water Intake Persemaian	4,228	Ringan
5	Hulu Kampung Bugis	5,437	Sedang
6	Sungai Pamusian	5,537	Sedang
7	Sungai Karungan	3,831	Ringan
8	Sungai Kampung Satu	2,989	Ringan
9	Water Intake PDAM Kampung Satu	5.079	Sedang

Sumber: UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup DLH, 2023

Kegiatan Pemantauan Kualitas Air di IPAL PT. IDEC AWI



26. Indeks Kualitas Udara

Dalam upaya menjaga mutu udara ambien agar dapat memberikan daya dukung bagi makhluk hidup secara optimal, maka dilakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Kualitas udara ambien ditunjukkan secara kuantitatif dalam bentuk Indeks kualitas udara (IKU) melalui hasil pengujian dan analisis kegiatan pemantauan udara ambien dengan metode Passive Sampler. Metode Passive Sampler merupakan salah satu metode sederhana yang digunakan untuk pengukuran kualitas udara ambien dengan menggunakan parameter ukur SO₂ dan NO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan pada tahun 2023 melakukan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien di 4 (empat) titik yaitu Gedung Gabungan Dinas yang mewakili kondisi kawasan komersil/perkantoran yang tidak berpengaruh langsung transportasi, Perumahan Pemkot yang mewakili pemukiman, PT. Intraca Wood yang mewakili daerah/kawasan industri dan Simpang 4 THM yang mewakili daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat). Pengambilan sampel udara ambien

dilakukan 2 kali dalam setahun untuk mewakili musim kemarau dan musim penghujan. Pemaparan sampel passive sampler selama 14 (empat belas) hari, selain itu dilakukan pengamatan lapangan tentang kondisi tiang, cuaca dan lokasi pemantauan.

Formula Perhitungan Capaian Indikator Indeks kualitas udara (IKU) adalah sebagai berikut :

$$I_{eu} = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$$

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup disebutkan bahwa kategori indeks kualitas udara adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Pengambilan Sampel Udara Ambien di Simpang Empat THM



Kualitas udara ambient Kota Tarakan yang dapat digambarkan dari nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kondisi status mutunya masuk kategori sangat baik meskipun nilai Indeks Pencemar Udara mengalami

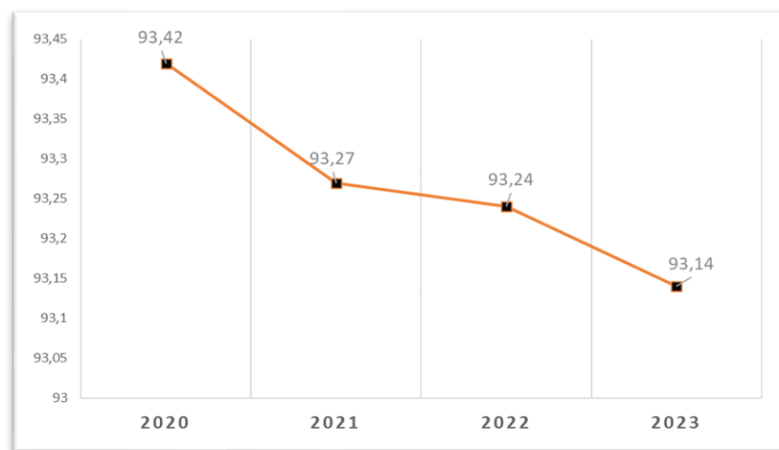
fluktuatif. Nilai IKU Kota Tarakan tahun 2022 sebesar 93,24 (kategori “Sangat Baik”), dibandingkan dengan IKU tahun 2023 sebesar 93,14 (kategori “Sangat Baik”) , maka nilai IKU tahun 2023 mengalami penurunan nilai tersebut masih dalam klasifikasi kondisi sangat baik, karena dipengaruhi oleh upaya pengendalian pencemaran udara diantaranya melalui pentaatan pemenuhan baku mutu emisi, peningkatan RTH.

Tabel II. 61
Indeks Kualitas Udara Kota Tarakan 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indeks Kualitas Udara	Poin	93,42	93,27	93,24	93,14	91,66	101,61

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2024

Adapun untuk melihat data realisasi indeks kualitas udara Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar II. 16
Indeks Kualitas Udara Kota Tarakan 2020-2023

Pencapaian Indeks Kualitas Udara tersebut dikarenakan adanya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) oleh dinas perhubungan dengan tingkat capaian kinerja mencapai 99,84 persen. Program Kawasan Permukiman oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan tingkat capaian kinerja mencapai 94,18 persen.

Tabel II. 62
Titik Pantau Kualitas Udara (*Passive Sampler*) Kota Tarakan

No	Kode /Peruntukan	Nama Lokasi	Koordinat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transportasi	Simpang 4 THM	N 03'18' 33.8' E 117° 35'01.4'
2	Industri	PT Intraca Wood Juata	N 03° 21'36.6' E 17°32 43.7'
3	Pemukiman	Perumahan Pemkot Kampung	N 03' 18' 40.7' E 117°36' 26.21"
4	Perkantoran	Gedung Gadis	N 03' 18' 36' E 117° 35' 46.4'

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2024

Faktor penyebab tingginya angka Indeks Kualitas Udara di Kota Tarakan, dipengaruhi beberapa faktor yaitu :

1. Adanya sinergisitas dengan OPD terkait dalam pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor untuk pengendalian pencemaran udara;
2. Adanya sinergisitas dengan OPD lain dalam pelaksanaan program Car Free Day yang bertujuan untuk pengurangan emisi gas karbon dari kendaraan bermotor (transportasi);
3. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan oleh pelaku usaha/stakeholder sebagai bentuk komitmen terhadap pengendalian pencemaran udara;
4. Pembentukan Kampung Iklim-Kampung Iklim di beberapa kelurahan yang bertujuan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam adaptasi mitigasi perubahan iklim;
5. Kegiatan Penanaman pohon & rehabilitasi yang dilakukan dari berbagai pihak seperti Instansi, dunia usaha, komunitas, sekolah, Perguruan Tinggi, TNI, Polri dll untuk penyerapan/pengurangan emisi karbon dan pemulihan lahan kritis;
6. Pengendalian Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla) untuk mencegah pencemaran udara dan kerusakan lahan;
7. Pengelolaan sampah dan pengurangan penggunaan pupuk kimia untuk pengendalian emisi gas rumah kaca (sinergisitas dengan OPD

terkait).



Meskipun kondisi kualitas udara di Kota Tarakan masih terbilang sangat baik, Dinas Lingkungan Kota Tarakan terus melakukan upaya pendekatan melalui kegiatan sosialisasi untuk terus menjaga kualitas udara kota. Di tahun 2023 telah

diselenggarakan sosialisasi Transformasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca ke Rencana Pembangunan Rendah Karbon. Dokumen kaji ulang RAD-GRK merupakan titik awal suatu provinsi untuk melakukan transformasi menjadi RPRK-D. Pembangunan Rendah Karbon merupakan platform pengembangan baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan social melalui aktivitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan instensitas emisi GRK yang rendah serta mengurangi penggunaan sumber daya alam.

27. Indeks Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan penampakan biofisik permukaan bumi. Indeks tutupan lahan mengacu pada klasifikasi penutup lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010 penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Kualitas tutupan lahan ditunjukkan secara kuantitatif dalam bentuk indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) melalui hasil perbandingan antara luas tutupan vegetasi hutan dengan luas wilayah administrasinya

Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup disebutkan bahwa kategori indeks kualitas udara adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Tabel II. 63.
Data Lahan Kota Tarakan Tahun 2023

Kota/ Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)	Luas Hutan (Ha)	Luas Belukar Dalam kawasan (Ha)	Luas Belukar Pada Fungsi Lindung (Ha)	Kebun Raya (data LIPI)	RTH	RHL (Rehab Hutan dan Lahan)
Kota Tarakan	25.097.77	5 508.27	2 933.69	120.86	369.97	541.52	301.10

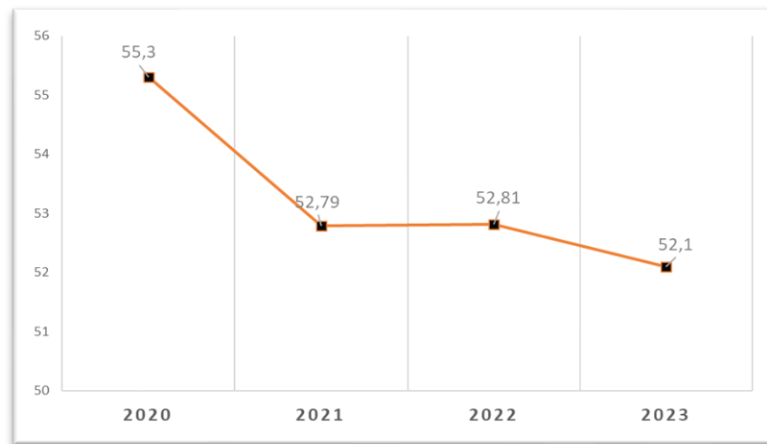
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2020-2023 mengalami fluktuatif. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya alih fungsi lahan untuk infrastruktur. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Tarakan tahun 2023 sebesar 52,10 (kategori “Sedang”)

Tabel II. 64
Indeks Tutupan Lahan Kota Tarakan 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indeks Tutupan Lahan	Poin	55,3	52,79	52,81	52,10	54,46	104,53

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2024

Adapun untuk melihat data realisasi indeks tutupan lahan Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar II. 17
Indeks Tutupan Lahan Kota Tarakan 2020-2023

Pencapaian Indeks Tutupan Lahan tersebut dikarenakan adanya Program Penatagunaan Tanah oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan capaian kinerja mencapai 71,94 persen.



Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan pada tahun 2023 melakukan peningkatan kualitas tutupan lahan dengan melakukan penanaman atau penghijauan melalui kegiatan rehabilitasi

hutan dan lahan. DLH juga mengadakan bibit tanaman penghijauan yang kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk ditanami di wilayah gersang baik di pesisir pantai, hilir sungai, lahan TPU dan juga lingkungan pemukiman.

Penurunan realisasi angka IKTL dipengaruhi oleh deforestasi sampai kebakaran hutan. Tutupan lahan tidak bisa dalam waktu singkat diperbaiki, mengingat proses penghijauan dan usaha pemulihan membutuhkan waktu yang lama

Diharapkan indeks kualitas tutupan lahan di tahun-tahun selanjutnya

dapat meningkat melalui berbagai strategi kolaborasi berbagai pihak. DLH akan merangkul kelompok masyarakat dalam kegiatan penanaman dan reboisasi untuk lahan-lahan kritis dan terbuka. Kegiatan ini akan memberikan sumbangsih angka persentase Ruang Terbuka Hijau. DLH juga akan melakukan sosialisasi untuk menjaga kelestarian RTH, himbauan untuk tidak membuka lahan dengan pembakaran lahan. Penyediaan Bibit tanaman juga akan terus diupayakan agar dapat disalurkan ke masyarakat, sekolah dan instansi. Rekomendasi dari Kementerian KLHK dalam rangka mendongkrak angka IKTL sebagai berikut :



- Perlu penambahan alokasi anggaran untuk pengelolaan tutupan hutan dan peningkatan RTH;
- Perlu penambahan personal dan peningkatan kapasitas staff dalam pengendalian tutupan lahan;
- Perlu adanya kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan;
- Perlu membuat perencanaan dan kebijakan dalam menetapkan target IKL yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah;
- Perlu meningkatkan Upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi Bersama Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- Perlu peningkatan peran serta para pemangku kepentingan

28. Persentase Sampah Yang Dikelola

Secara umum sampah dapat diartikan sebagai semua benda yang

sudah tidak digunakan lagi oleh makhluk hidup, sehingga sifatnya menjadi buangan. Jadi benda sisa yang dihasilkan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan semuanya berpotensi dianggap sebagai sampah selama tidak digunakan lagi.

Indikator ini menggambarkan jumlah sampah yang berhasil dikelola Pemerintah Kota Tarakan. Dengan semakin banyaknya jumlah sampah yang terkelola maka dapat menghemat sumber daya alam, menghemat lahan tempat pembuangan akhir dan menambah nilai ekonomis suatu barang. Penanganan sampah tersebut difasilitasi dengan adanya sarana prasarana yang mendukung seperti adanya pengangkutan sampah yang dilakukan setiap hari.

Formula Perhitungan Capaian Indikator Persentase Sampah Yang Dikelola adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah volume sampah yang ditangani}}{\text{Jumlah Volume produksi sampah}} \times 100$$

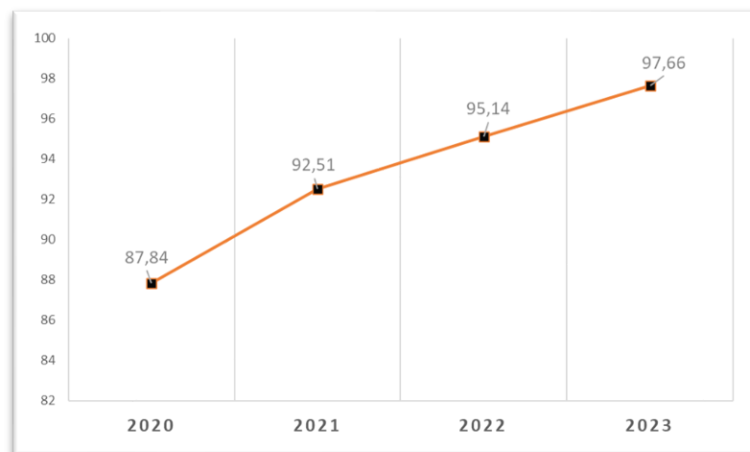
Tabel II. 65
Persentase sampah yang dikelola Kota Tarakan 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sampah yang Dikelola	Persen	87,84	92,51	95,14	97,66	99,00	98,65

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2024

Target yang ditetapkan di Tahun 2023 dalam RPJMD sebesar 99,00 persen sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar 97,66 persen sehingga capaian kinerja di Tahun 2023 sebesar 98,65 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 95,14 persen maka realisasi di Tahun 2023 lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Adapun untuk melihat data realisasi persentase Sampah yang Dikelola Kota Tarakan, disajikan pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar II. 18
Persentase sampah yang dikelola
Kota Tarakan 2020-2023

Pencapaian persentase sampah yang dikelola tersebut dikarenakan adanya Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Dengan Capaian Kinerja Mencapai 100,00 Persen Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Program Pengelolaan Persampahan oleh dinas lingkungan hidup dengan capaian kinerja mencapai 99,75 persen.



Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan terus mengkampanyekan pembatasan timbulan sampah diantaranya dengan menekan penggunaan plastik secara berlebihan diantaranya dengan cara :

- a) Membawa kantong belanja sendiri. Membawa kantong belanja sendiri saat belanja atau bepergian adalah cara yang paling mudah untuk berkontribusi mengurangi sampah pribadi.
- b) Membawa botol minum atau tumbler. Selain bentuk peduli terhadap lingkungan, membawa botol minum sendiri juga bisa menghemat pengeluaran

- c) Tidak menggunakan sedotan plastic. Sedotan plasti memang terlihat remeh, tapi bayangkan jika ribuan orang ikut berpikir seremeh ini. Tentulah sangat berdampak bagi lingkungan. Sedotan plastic bisa diganti dengan sedotan bambu atau kertas yang ramah lingkungan.
- d) Hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastic. Mengurangi pembelian produk dalam kemasan sachet. Jika memungkinkan, pilih produk yang dikemas dalam botol kaca atau daun
- e) Pemanfaatan kembali sampah

Tabel II. 66
Program pendukung dari Sasaran Menurunnya
Pencemaran Lingkungan

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	243.126.480,00	232.946.498,00	95,81
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	473.741.555,00	444.140.890,00	93,75
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	29.038.130,00	23.291.120,00	80,21
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	19.813.400,00	19.703.400,00	99,44
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	84.620.160,00	79.637.495,00	94,11
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	85.378.730,00	79.693.555,00	93,34
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	7.768.340,00	6.489.340,00	83,54

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

Untuk meminimalisir agar kualitas air sungai tidak tercemar,

dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha dalam pengendalian pembuangan air limbah ke sungai. Dinas Lingkungan Hidup berwenang memberikan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah untuk pembuangan air limbah ke badan air permukaan.

Dinas Lingkungan Hidup akan semakin memberikan penekanan dalam pengendalian pencemaran air berupa : (1). Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar. Pembangunan sarpras IPAL harus terpisah antara saluran air limbah dan saluran air drainase melalui OPD terkait; (2). Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk Masyarakat; (3). Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi pengendalian pencemaran air kepada masyarakat & dunia usaha; (4). Meningkatkan pengawasan dan penguatan perijinan terhadap dunia usaha; (5). Peningkatan kegiatan aksi bersih Sungai atau program kali bersih (Prokasih) untuk memulihkan kualitas air Sungai.

Meskipun kondisi kualitas udara di Kota Tarakan masih terbilang sangat baik, Dinas Lingkungan Kota Tarakan terus melakukan upaya pendekatan melalui kegiatan sosialisasi untuk terus menjaga kualitas udara kota. Di tahun 2023 telah diselenggarakan sosialisasi Transformasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca ke Rencana Pembangunan Rendah Karbon. Dokumen kaji ulang RAD-GRK merupakan titik awal suatu provinsi untuk melakukan transformasi menjadi RPRK-D. Pembangunan Rendah Karbon merupakan platform pengembangan baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan social melalui aktivitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan intensitas emisi GRK yang rendah serta mengurangi penggunaan sumber daya alam.

Penurunan realisasi angka IKTL dipengaruhi oleh deforestasi sampai kebakaran hutan. Tutupan lahan tidak bisa dalam waktu singkat diperbaiki, mengingat proses penghijauan dan usaha pemulihan

membutuhkan waktu yang lama.

Aktivitas Pemilahan Sampah di TPS3R Taka Bahari Jaya, Mamburungan



Untuk mendorong perbaikan kegiatan pengurangan sampah diperlukan upaya diantaranya : (1). Menghubungkan system TPS-3R hingga ke Tingkat Rumah tangga; (2). Penguatan keterampilan dan pengetahuan para operator TPS3R dan bank sampah, tidak sekedar memberikan bantuan fasilitas

atau peralatan; (3). Pengelolaan sampah rumah tangga didominasi oleh Perempuan. Hal ini karena konstruksi budaya yang menempatkan sampah rumah tangga sebagai urusan Perempuan. Oleh karenanya perlu direkrut tenaga laki-laki; (4). Menggabungkan TPS3R dengan bank sampah sehingga tidak ada rasa kompetisi antara kedua program dan keduanya dapat bersamasama menumbuhkan bisnis sampah yang sehat; (5). Mengintegrasikan bank sampah dengan sektor informal yaitu pengepul kecil hingga besar sebagai para pemain dalam bisnis daur ulang.

Sasaran 17. Meningkatnya penanganan bencana yang efektif

29. Persentase Luas Genangan Banjir

Banjir adalah peristiwa aliran atau genangan air di suatu wilayah yang terjadi akibat meluapnya air dari saluran yang ada melebihi kapasitas pembuangan air disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung sehingga menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi.

Banjir merupakan suatu masalah yang banyak ditemui di berbagai wilayah, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada dasarnya banjir itu disebabkan oleh luapan aliran air yang terjadi pada saluran atau sungai. Dalam banyak konsep, wilayah banjir atau genangan air adalah wilayah yang aliran air sungainya mengalir melampaui kapasitas tampung sungai

dan dengan demikian aliran air sungai tersebut akan melewati tebing sungai dan menggenangi daerah di sekitarnya.

Formula Perhitungan Capaian Indikator Persentase Luas Genangan Banjir adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{luas rawan genangan} - \text{luas genangan yang tertangani}}{\text{luas Kota Tarakan}} \times 100$$

Genangan memiliki luasan area yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan banjir. Genangan mungkin hanya terkonsentrasi pada beberapa bagian saja. Namun, untuk banjir dapat terjadi dalam area yang cukup luas. Pada hal ini biasanya banjir akan menyebabkan dampak yang cukup buruk terutama dampak banjir terhadap ekonomi suatu daerah.

Tabel II. 67
Luas Genangan Banjir Kota Tarakan 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Luas Genangan Banjir	Persen	0,182	0,156	0,116	0,1106	0,1100	99,64

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, 2024

Target yang ditetapkan di Tahun 2023 dalam RPJMD sebesar 0,11 persen sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar 0,1106 persen sehingga capaian kinerja di Tahun 2023 sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 0,116 persen maka realisasi di Tahun 2023 lebih baik dari tahun sebelumnya dengan berkurangnya luasan genangan di Kota Tarakan. Hal ini dikarenakan pemerintah kota Tarakan rutin dalam Memperbaiki sistem drainase, Pembersihan saluran air dari sampah, dan Pembenahan sistem pembuangan sampah.

Pencapaian Persentase Luas Genangan Banjir tersebut dikarenakan adanya program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang capaian realisasi 96,99 persen.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi sehingga belum dapat mencapai target sempurna disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: (1). Daerah tangkapan air berkurang; (2). Normalisasi dan peningkatan saluran belum optimal; dan (3). Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih kurang.

Langkah atau strategi untuk mencapai target adalah meningkatkan kondisi infrastruktur sungai/kali/saluran pembuang sebagai sistem pengendalian banjir pada daerah tangkapan air guna penanggulangan daya rusak air akibat kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi dan memisahkan konsentrasi aliran banjir.

30. Persentase pelayanan Kebencanaan

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Jenis pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana daerah kabupaten/kota meliputi: Pertama, pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat penyusunan kajian risiko bencana dan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana. Kedua, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Ketiga, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian,

pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Tabel II. 68
Persentase Pelayanan Kebencanaan Kota Tarakan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase pelayanan Kebencanaan	Persen	n.a	90,17	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Target yang ditetapkan pada Tahun 2023 dalam 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen. Program yang mendukung pelayanan Kebencanaan adalah Program Penanggulangan Bencana yang capaian kinerjanya mencapai 95,98 persen, yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah .dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran yang capaian kinerjanya mencapai 81,63 persen.

31. Persentase pelayanan bencana kebakaran

Layanan yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Layanan Informasi Rawan Bencana, Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Hal ini yang harus kita lakukan agar setiap terjadi bencana kita bisa menimalisir korban serta dampak bencana.

Tabel II. 69
Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Tarakan 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase pelayanan bencana kebakaran	Persen	100	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan, 2024

Pencapaian pelayanan kebencanaan kebakaran tersebut dikarenakan

adanya Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran yang capaian kinerjanya mencapai 81,63 persen.



Kegiatan Pemadam Kebakaran Rumah

keberhasilan capaian kinerja tersebut masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran yaitu :

- Luasnya wilayah manajemen kebakaran yang harus dijangkau dengan Waktu tanggap sesuai dengan SOP dan SPM yang telah diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang

berlaku yang meliputi Luas wilayah Kecamatan Kota Tarakan

- Kurangnya jumlah Anggota Damkar
- Kendaraan Oprasional Kebakaran yang telah tua.
- Kurangnya Prasarana pendukung dalam operasi darurat non kebakaran

Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut :

- Perlunya penambahan UPT/Posko.
- Mengirimkan anggota Satpol PP/damkar untuk mengikuti diklat dan pelatihan dalam meningkatkan SDM dan profesionalisme tugas yang lebih baik
- Penambahan Unit kendaran pemadam kebakaran yang baru.
- Pengadaan sarana Prasana Pendukung operasi darurat non kebakaran



Kegiatan Operasi Darurat Non Kebakaran (Evakuasi Tawon)

Untuk lebih jelasnya besarnya dukungan anggaran terhadap sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 70
Program pendukung dari Sasaran Meningkatnya
Penanganan Kebencanaan yang Efektif

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penanggulangan Bencana	1.127.154.180,00	1.035.796.781,00	91,89
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	147.005.865,00	113.987.163,00	77,54
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	31.995.320.000,00	31.327.967.172,00	97,91

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

Tujuan 6. Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat

Indeks Toleransi

Skala dengan rentang nilai 1-7, yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas buruk ke baik. Artinya, 1 merupakan score untuk situasi paling buruk pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran, sedangkan 7 adalah score untuk situasi paling baik pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran. Djohan Effendi menjelaskan jika toleransi adalah sebuah sikap seseorang dalam menghargai segala bentuk perbedaan yang ada. Perbedaan tersebut bisa berupa perbedaan perilaku, agama hingga budaya. Secara umum toleransi adalah sebuah perilaku manusia untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Baik itu antar individu maupun antar kelompok. Adanya sikap ini dalam diri seseorang bisa memberikan rasa damai, aman, tentram, nyaman. Indeks toleransi kota Tarakan terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 71
Indeks Toleransi Kota Tarakan 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indeks Toleransi		n/a	5,687	4,737	n/a	5,4	n/a

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2024

Pencapaian Indeks Toleransi tersebut dikarenakan adanya program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan capaian kinerja sebesar 95,62 persen.

Sasaran 18, Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota

32. Persentase pelanggaran K3 yang tertangani

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah: *“overtredingen”* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Adapun persentase pelanggaran K3 yang tertangani kota Tarakan terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 72
Persentase pelanggaran K3 yang tertangani
Kota Tarakan 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPJMD Tahun 2023	Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pelanggaran K3 yg tertangani	persen	100	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan, 2024

Pencapaian Persentase pelanggaran K3 yang tertangani tersebut dikarenakan adanya Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Yang Capaian Kinerjanya Mencapai 95,62 Persen Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Yang Capaian Kinerjanya Mencapai 97,44 Persen Dan , Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang capaian kinerjanya mencapai 75,46 persen yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk lebih jelasnya besarnya dukungan anggaran terhadap sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 73
Program pendukung dari Sasaran Sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Kota

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	329.646.259,00	243.970.095,00	74,01
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	29.956.330,00	29.556.000,00	98,66
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	29.992.660,00	29.992.000,00	100,00
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	39.976.330,00	38.320.000,00	95,86
5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	19.988.440,00	19.984.990,00	99,98
6	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	8.808.924.290,00	8.795.090.150,00	99,84
7	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.391.534.805,00	1.324.455.481,00	95,18
8	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	179.333.520,00	133.639.840,00	74,52
9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.039.688.330,00	1.739.586.260,00	85,29
10	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	426.443.150,00	390.221.319,00	91,51
11	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.500.679.580,00	1.388.159.300,00	92,50
12	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	296.699.840,00	255.842.020,00	86,23

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	234.999.640,00	232.199.200,00	98,81
14	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	304.666.414,00	300.132.387,00	98,51
15	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	208.999.450,00	193.766.920,00	92,71

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

Dalam menunjang tercapainya/keberhasilan peningkatan secara maksimal perlu dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan Partai Politik.
- Pembinaan kepada Pengurus Partai Politik dan tenaga administrasi yang berkompeten dalam hal pelaporan keuangan untuk memperbaiki hal hal yang menjadi catatan pihak auditor, baik auditor inspektorat maupun auditor Badan pemeriksa Keuangan.
- Mendorong Pengurus partai politik untuk lebih akuntabel dan tertib dalam pelaporan keuangan.
- Mengupayakan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik lebih tepat sasaran dan lebih transparan dengan terus melakukan pembinaan administrasi keuangan dalam kelembagaan partai politik.
- Mengkaji dan mengusulkan kegiatan baru dan Anggaran yang memadai untuk penyuluhan dan Sosialisasi peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
- Melakukan Koordinasi dan konsultasi ke pemerintah kabupaten dan kota yang sudah melaksanakan kegiatan berskala nasional seperti Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk selajutnya bisa dijadikan contoh dan dilaksanakan di kota Tarakan.
- Meningkatkan Peran Forum, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan



serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan dan berpartisipasi aktif menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa



2.3.4 Pengukuran capaian Kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan dokumen RPJMD 2019-2024

Tabel II. 74
Perbandingan data capaian Kinerja Kota Tarakan Tahun 2021 - 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian Target RPJMD (2024)
					2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Poin	76,23	76,68	77,53	78,58	kurang
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,04	74,06	74,24	74,51	kurang
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,03	14,04	14,21	14,09	Melampaui
		3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,98	10,08	10,36	9,99	Melampaui
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	4	Pengeluaran Perkapita Masyarakat	Rupiah	Rp1.725.412	Rp1.652.721	Rp1.733.250	Rp2.000.000	kurang
II	Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		Poin	54,49	58,26	n/a	60	n/a
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	5	Opini BPK	WTP	WTP	WTP*	WTP**	WTP	target
		6	Nilai SAKIP	Nilai/ Predikat	63,41/B	65,13/B	64,53	70,01/BB	kurang
5	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	7	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	49,36	52,12	61,19	65	kurang
6	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85,5	86,81	86,74	85	Melampaui



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian Target RPJMD (2024)
					2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
III	Tujuan 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		Poin	n/a	0	79,96	80	kurang
7	Meningkatnya ruang terbuka hijau	9	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	52,96	55,56	58,24	58,07	Melampaui
8	Meningkatnya pelayanan air bersih	10	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	Persen	94,87	92,89	98,99	95,62	Melampaui
9	Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan	11	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	75,1	74,17	75,48	72,99	Melampaui
		12	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	Persen	60,6	110,61	86,54	87,88	kurang
		13	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	Persen	63,5	59,01	100	82,5	Melampaui
		14	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	Persen	65,97	67,385	68,37	65,63	Melampaui
		15	Persentase pembinaan jasa konstruksi	Persen	22,79	24,28	85,00	20	Melampaui
		16	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	85,66	89,54	90,55	93,94	kurang
		17	Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	Rasio	1,3	1,22	1,19	1,25	Melampaui
		18	Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	Persen	n/a	29	58,00	100	kurang



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian Target RPJMD (2024)
					2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	19	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	Persen	51,35	66,52	97,61	80	Melampaui
11	Menurunnya luas kawasan kumuh	20	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	34,41	31,77	17,43	14,74	Melampaui
IV	Tujuan 4. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Gini Rasio		Poin	0,261	0,26	0,253	0,29	Melampaui
12	Menurunnya kemiskinan	21	Angka Kemiskinan	Persen	6,71	6,3	6,1	5,4	kurang
13	Menurunnya pengangguran	22	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,94	5,76	4,01	5,69	Melampaui
14	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	23	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	3,95	5,59	6,10	6,23	kurang
15	Terkendalnya inflasi daerah	24	Tingkat Inflasi	Persen	2,83	3,98	2,46	3,2	kurang
V	Tujuan 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Poin	73,15	68,38	69,61	69,74	kurang
16	Menurunnya pencemaran lingkungan	25	Indeks Kualitas Air	Poin	63,33	53,33	54,44	45,86	Melampaui
		26	Indeks Kualitas Udara	Poin	Poin	93,24	93,14	91,66	Melampaui
		27	Indeks Tutupan Lahan	Poin	52,79	52,81	52,1	54,46	kurang
		28	Persentase sampah yang dikelola	Persen	92,51	95,14	97,66	99	kurang
17	Meningkatnya penanganan bencana yang efektif	29	Persentase Luas genangan banjir	Persen	0,156	0,116	0,1106	0,11	Melampaui
		30	Persentase pelayanan Kebencanaan	Persen	90,17	100	100,00	100	Melampaui



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian Target RPJMD (2024)
					2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		31	Persentase pelayanan bencana kebakaran	Persen	91	100	100,00	100	Melampaui
VI	Tujuan 6. Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat	Indeks Kota Toleran		Poin	5,687	n/a	n/a	5,4	n/a
18	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	32	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	Persen	100	100	100,00	100	Melampaui

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, 2024

2.3.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tingkat efisiensi anggaran dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja anggaran. Semakin kinerja sasarnya tercapai dan penganggarnya masih bersisa dapat dikatakan telah berhasil melakukan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan penghitungan, maka akan diketahui efisien atau tidaknya penggunaan anggaran terhadap pencapaian target sasaran yang sudah ditetapkan. Dalam memberikan penilaian tingkat efisiensi dapat menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Skala Pengukuran Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja

No	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Anggaran	Kategori
1	100 % s.d. diatas 100 %	< 100	Efisien
2	< 100 %	< 100	Tidak efisien

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai efisiensi capaian kerja adalah sebagai berikut :



Tabel II. 75
Efisiensi Kinerja Kota Tarakan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	74,51	74,24	99,64	35.463.820.425	26.712.456.088	75,32	0
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	2	Harapan Lama Sekolah	14,09	14,21	100,85	144.262.569.985	140.682.926.384	97,52	3.579.643.601
	3	Rata-rata Lama Sekolah	9,99	10,36	103,70	730.160.291	534.367.044	73,18	195.793.247
Meningkatnya daya beli masyarakat	4	Pengeluaran Perkapita Masyarakat	Rp 2.000.000	Rp 1.733.250	86,66	1.891.611.851	1.627.326.123	86,03	0
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	5	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	23.995.954.469	17.253.482.525	71,90	6.742.471.944
	6	Nilai SAKIP	70,01	64,53	92,17	95.336.831.119	91.631.753.284	96,11	0
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	7	Indeks Profesionalitas ASN	65,00	61,19	94,14	2.676.353.760	2.062.476.974	77,06	0
Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	86,74	102,05	2.696.930.110	2.683.069.165	99,49	13.860.945
Meningkatnya ruang terbuka hijau	9	Persentase Ruang Terbuka Hijau	58,07	58,24	100,29	45.047.471.500	41.523.450.069	92,18	3.524.021.431
Meningkatnya pelayanan air bersih	10	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	95,62	98,99	103,52	227.105.048.087	222.261.015.036	97,87	4.844.033.051
Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	11	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	72,99	75,48	103,41	137.338.285.107	136.784.005.055	99,60	554.280.052



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	12	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	87,88	86,54	98,48	76.112.979.528	72.293.324.914	94,98	0
	13	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	82,50	100	121,21	4.996.880	4.792.000	95,90	204.880
	14	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	65,63	68,37	104,17	762.638.440	710.650.589	93,18	51.987.851
	15	Persentase pembinaan jasa konstruksi	80,00	85,00	106,25	65.585.000	57.197.500	87,21	8.387.500
	16	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	93,94	90,55	96,39	12.235.563.132	11.844.936.978	96,81	0
	17	Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	1,25	1,19	95,20	70.000.000	69.937.000	99,91	0
	18	Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	60,00	58,00	96,67	1.176.889.490	1.125.580.397	95,64	0
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	19	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	80,00	97,61	122,01	49.147.686.030	48.060.428.661	97,79	1.087.257.369
Menurunnya luas kawasan kumuh	20	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	17,64	17,43	101,19	334.512.216	256.907.130	76,80	77.605.086



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Menurunnya kemiskinan	21	Angka Kemiskinan	5,40	6,1	87,04	599.576.715	503.328.228	83,95	0
Menurunnya pengangguran	22	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,69	4,01	129,53	11.491.940.541	10.666.636.395	92,82	825.304.146
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	23	Laju pertumbuhan ekonomi	6,23	6,10	97,91	1.142.912.556	1.049.252.033	91,81	0
Terkendalinya inflasi daerah	24	Tingkat Inflasi	3,20	2,46	123,13	716.868.035	677.087.388	94,45	39.780.647
Menurunnya pencemaran lingkungan	25	Indeks Kualitas Air	55,02	54,44	98,95	29.038.130	23.291.120	80,21	0
	26	Indeks Kualitas Udara	91,66	93,14	101,61	19.813.400	19.703.400	99,44	110.000
	27	Indeks Tutupan Lahan	54,46	52,1	95,67	177.767.230	165.820.390	93,28	0
	28	Persentase sampah yang dikelola	99,00	97,66	98,65	3.058.816.522	2.972.948.130	97,19	0
Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif	29	Persentase Luas genangan banjir	0,11	0,1106	99,45	31.995.320.000	31.327.967.172	97,91	0
	30	Persentase pelayanan Kebencanaan	100,00	100,00	100,00	686.136.461	652.023.632	95,03	34.112.829
	31	Persentase pelayanan bencana kebakaran	100,00	100,00	100,00	147.005.865	113.987.163	77,54	33.018.702
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	32	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	100,00	100,00	100,00	15.841.529.038	15.114.915.962	95,41	726.613.076
Total									23.091.707.577

Sumber : OPD, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 32 indikator sasaran kinerja terdapat 18 indikator kinerja yang penggunaan anggarannya efisien dan 14 indikator kinerja yang penggunaan anggarannya tidak efisien. Dari 18 indikator kinerja yang efisien dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 23.091.707.577,- atau terbilang (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus tujuh Ribu lima Ratus tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

2.3.6 Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Dalam mendukung pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari dilaksanakan program prioritas. Oleh Karena itu, Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemkot Tarakan kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam memenuhi tujuan dan sasaran strategis Kota Tarakan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel II. 76
Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Tarakan Tahun 2023 yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah					Capaian Kinerja		Realisasi	
					DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
Misi I : Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing								
Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia								
Sasaran 1, Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat								
ST.1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat								
AK.1 Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan								
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.220.184.250,00	3.788.658.213,00	94,90	89,77
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.266.968.100,00	18.003.209.933,80	73,31	71,25
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	294.012.060,00	236.743.979,00	86,50	80,52
AK.2 Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan								
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	34.868.000,00	20.980.000,00	60,17	60,17
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	796.112.010,00	486.880.750,00	63,23	61,16
AK.3 Pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman								



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah					Capaian Kinerja		Realisasi	
					DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman				
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	101.725.580,00	85.210.260,00	88,84	83,76
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150.267.590,00	60.928.150,00	41,31	40,55
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	154.760.170,00	52.979.770,00	56,06	34,23
				AK.4 Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat				
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.726.382.660,00	1.635.600.000,00	94,74	94,74
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.900.000,00	35.880.000,00	74,91	74,91
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	477.595.810,00	296.361.540,00	75,78	62,05
				AK.5 Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana				
				Program Pengendalian Penduduk				
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	313.676.403,00	264.670.927,00	100,00	84,38
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)				



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	557.100.000,00	504.059.501,00	100,00	90,48
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	44.000.000,00	39.999.740,00	100,00	90,91
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	71.000.000,00	67.000.000,00	100,00	94,37
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.207.267.792,00	1.133.293.324,00	100,00	93,87
Sasaran 2, Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan									
ST.2 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat secara merata									
AK.6 Pemerataan Sarana dan Prasarna pendidikan serta Peningkatan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Khususnya yang Tidak Mampu									
					Program Pengelolaan Pendidikan				
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	49.117.478.532,00	47.714.488.198,00	99,74	97,14
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	87.979.565.960,00	85.961.960.606,00	99,74	97,71
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.813.309.777,00	4.718.834.628,00	98,35	98,04
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.352.215.716,00	2.287.642.952,00	98,45	97,25
AK.7 Optimalisasi Pendidikan Dasar									
					Program Pengembangan Kurikulum				
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200.530.900,00	96.118.850,00	58,17	47,93
					Program Pengendalian Perizinan Pendidikan				
AK.8 Pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas									



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah					Capaian Kinerja		Realisasi	
					DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan				
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	264.988.400,00	227.451.674,00	100,00	85,83
				Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra				
				Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	-	-	-
				AK.9 Pengembangan Minat Baca Masyarakat				
				Program Pembinaan Perpustakaan				
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	109.972.100,00	99.855.740,00	92,25	90,80
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.849.294,00	88.818.200,00	98,73	93,64
				Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno				
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	19.984.157,00	12.740.260,00	69,29	63,75
				Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.835.440,00	9.382.320,00	100,00	95,39
				Sasaran 3, Meningkatnya daya beli masyarakat				
				ST.3 Pemberdayaan ekonomi mikro masyarakat				
				AK.10 Peningkatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat				
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)				
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	948.088.101,00	744.155.271,00	100,00	78,49
				AK.11 Peningkatan Kesempatan dan Kemudahan Usaha Mikro				



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
					Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.265.220,00	8.248.860,00	100,00	89,03
					Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.999.940,00	-	-	-
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi				
					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.999.880,00	6.758.420,00	100,00	67,59
					Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi				
					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	13.712.340,00	42,99	34,28
					Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian				
					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.999.810,00	44.459.170,00	91,10	88,92
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi				
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.999.840,00	13.919.880,00	100,00	92,80
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)				



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	675.799.570,00	667.380.170,00	99,95	98,75
					Program Pengembangan Umkm				
					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	133.459.490,00	128.692.012,00	99,42	96,43
Misi II : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat									
	Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan								
	Sasaran 4, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan								
		ST.4 Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah							
		AK.12 Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMD dan Keuangan dan Pengendalian Internal Pemerintah							
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	437.862.740,00	358.766.894,00	90,23	81,94
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	549.539.760,00	391.379.884,00	77,85	71,22
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.209.475.780,00	1.958.256.664,00	89,61	88,63
					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.000.000.000,00	787.455.931,00	15,75	15,75
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				
					Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.143.167.860,00	1.739.563.873,00	82,33	81,17
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.042.693.220,00	1.590.787.977,00	83,97	77,88
					Program Penyelenggaraan Pengawasan				



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	218.312.700,00	181.038.500,00	90,03	82,93
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.286.318.990,00	1.109.312.500,00	94,66	86,24
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				
					Pendampingan dan Asistensi	204.669.510,00	145.616.989,00	72,58	71,15
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	274.404.600,00	234.435.737,00	99,46	85,43
					AK.13 Peningkatan Kualitas Pengadaan barang dan Jasa				
					Program Perekonomian Dan Pembangunan				
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	35.999.520,00	34.270.109,00	96,11	95,20
					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	615.692.954,00	557.235.314,00	99,71	90,51
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	110.048.790,00	102.248.577,00	102,26	92,91
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	196.198.740,00	177.221.069,00	98,36	90,33
					AK.14 Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan				
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				
					Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.972.800,00	21939000	99,87	73,19636
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan				
					Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.515.084.255,00	5862922425	98,75	89,98997
					Program Penatagunaan Tanah				
					Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	19.999.800,00	9932920	71,94	49,6651
					AK.15 Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan Kelitbangan Daerah				



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000,00	13.375.592,00	97,22	89,17
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000,00	14.954.490,00	100,00	99,70
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.063.850.000,00	1.014.311.588,00	99,23	95,34
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	50.090.540,00	42.371.226,00	86,28	84,59
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	160.000.000,00	151.278.073,00	97,25	94,55
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	52.512.950,00	51.054.750,00	98,65	97,22
					Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah				
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	620.000.000,00	618.888.875,00	100,00	99,82
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	65.060.000,00	46.116.018,00	85,26	70,88
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	39.999.360,00	24.344.550,00	61,42	60,86
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				
					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.999.600,00	14.403.000,00	58,49	57,61
					AK.16 Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah				



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.750.000,00	43.732.000,00	100,00	99,96
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	810.000.000,00	765.971.658,00	94,58	94,56
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.656.619.049,00	16.421.173.317,00	98,71	98,59
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.599.697.350,00	5.396.031.214,00	99,67	96,36
					Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	602.098.275,00	576.576.802,00	98,23	95,76
					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.298.900.460,00	1.203.748.183,00	97,88	92,67
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.402.330.705,00	1.397.597.951,00	99,76	99,66
					Penataan Organisasi	390.261.650,00	359.522.087,00	97,71	92,12
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.800.003.972,00	2.777.564.000,00	99,37	99,20
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.217.787.161,00	3.754.204.502,00	92,96	89,01
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat				
					Administrasi Tata Pemerintahan	519.703.300,00	464.924.145,00	93,13	89,46
					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	878.209.600,00	757.592.666,00	90,56	86,27
					Fasilitasi Kerja Sama Daerah	950.000.000,00	814.873.390,00	91,78	85,78
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	13.174.168.540,00	12.688.630.468,00	99,47	96,31
					Program Perekonomian Dan Pembangunan				
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	35.999.520,00	34.270.109,00	96,11	95,20
					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	615.692.954,00	557.235.314,00	99,71	90,51
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	110.048.790,00	102.248.577,00	102,26	92,91
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	196.198.740,00	177.221.069,00	98,36	90,33



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.050.000,00	14.964.000,00	100,00	99,43
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.386.058.608,00	4.812.853.616,00	99,96	89,36
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	883.521.200,00	679.985.267,00	78,67	76,96
					Layanan Administrasi DPRD	535.300.000,00	526.303.500,00	98,37	98,32
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.181.180.955,00	15.549.861.548,00	98,65	96,10
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.892.270,00	223.229.419,00	96,81	88,97
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.100.000.000,00	1.078.400.000,00	100,00	98,04
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.679.100,00	408.200.255,00	99,98	88,42
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd				
					Fasilitasi Tugas DPRD	15.937.910.320,00	15.862.618.249,00	100,00	99,53
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	867.727.800,00	839.894.552,00	100,00	96,79
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	275.636.000,00	274.797.206,00	100,00	99,70
					Peningkatan Kapasitas DPRD	1.265.454.800,00	1.244.920.720,00	100,00	98,38
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.874.950.000,00	1.822.607.500,00	100,00	97,21
					Sasaran 5, Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien				
					ST.4 Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah				
					AK.17 Peningkatan Profesionalisme ASN				
					Program Kepegawaian Daerah				
					Mutasi dan Promosi ASN	611.713.900,00	443.586.581,00	74,44	72,52
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	375.713.140,00	315.381.333,00	91,09	83,94



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Pengembangan Kompetensi ASN	188.385.200,00	25.418.000,00	15,36	13,49
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	144.122.400,00	110.195.508,00	84,58	76,46
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.356.419.120,00	1.167.895.552,00	89,86	86,10
Sasaran 6, Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas									
					ST.4 Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah				
					AK.18 Peningkatan Kualitas Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi				
					Program Informasi Dan Komunikasi Publik				
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.018.130.180,00	990.199.000,00	99,86	97,26
					Program Aplikasi Informatika				
					Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.045.000.000,00	992.629.048,00	98,90	94,99
					Program Administrasi Pemerintahan Desa				
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	24.984.770,00	23.400.000,00	97,26	93,66
					Program Pendaftaran Penduduk				
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk	53.456.386,00	52.600.000,00	100,00	98,40
					Penataan Pendaftaran Penduduk	9.975.000,00	9.690.000,00	100,00	97,14
					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	29.476.760,00	19.060.000,00	64,66	64,66
					Program Pencatatan Sipil				
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.602.000,00	15.340.000,00	78,62	78,26



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.235.450,00	14.395.375,00	97,49	88,67
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan				
					Program Pengelolaan Arsip				
					Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	70.495.220,00	66.229.100,00	99,86	93,95
					Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	59.413.330,00	55.931.964,00	97,85	94,14
					Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip				
					Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	14.891.200,00	14.883.100,00	100,00	99,95
					Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	14.990.935,00	13.402.500,00	100,00	89,40
					Program Perizinan Penggunaan Arsip				
					Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	19.996.400,00	19.934.000,00	100,00	99,69
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.793.163.080,00	1.764.228.547,00	99,90	98,39
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.256.400.000,00	2.145.391.500,00	100,00	95,08
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.090.359.430,00	1.054.121.401,00	97,56	96,68



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.420.000.000,00	2.310.298.360,00	95,47	95,47
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.714.756.480,00	1.665.302.040,00	97,68	97,12
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.882.800.000,00	1.761.228.750,00	93,68	93,54
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	649.967.960,00	636.181.770,00	98,26	97,88
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	897.500.000,00	778.020.000,00	91,87	86,69
					AK.19 Pengembangan seni budaya dan olah raga, pemuda dan kewanitaan				
					Program Pengembangan Kebudayaan				
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.619.999.110,00	2.550.201.950,00	100,00	97,34
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional				
					Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	214.958.280,00	214.336.480,00	100,00	99,71
					Program Pembinaan Sejarah				
					Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.989.770,00	24.920.000,00	100,00	99,72
					Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya				
					Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	64.882.600,00	52.414.088,00	100,00	80,78
					Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	74.936.000,00	72.363.880,00	100,00	96,57
					Program Pengelolaan Permuseuman				
					Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	10.611.582.262,00	10.592.765.056,00	100,00	99,82



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	770.379.997,00	760.710.000,00	100,00	98,74
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.819.997.480,00	1.740.936.000,00	100,00	95,66
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	450.000.000,00	446.884.720,00	100,00	99,31
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.669.998.230,00	1.616.427.160,00	97,01	96,79
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.994.750,00	99.807.640,00	100,00	99,81
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	100,00
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	34.988.850,00	34.461.390,00	100,00	98,49
					Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan				
					Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	14.981.730,00	12.742.700,00	100,00	85,05



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	100,00
					Program Perlindungan Perempuan				
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39.987.480,00	31.537.880,00	100,00	78,87
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.865.220,00	12.853.400,00	100,00	86,47
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga				
					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.996.980,00	9.988.000,00	100,00	99,91
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.579.040,00	9.395.550,00	100,00	98,08
					Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.924.220,00	9.810.000,00	100,00	98,85
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak				
					Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)				
					Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	149.938.200,00	139.385.480,00	100,00	92,96
					Program Perlindungan Khusus Anak				



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	109.991.186,00	101.115.675,00	100,00	91,93
Misi III : Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.									
Tujuan 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas									
Sasaran 7, Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau									
					ST.5 Peningkatan Ruang Terbuka Hijau				
					AK.20 Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka Kota				
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.944.340,00	76.264.980,00	99,28	99,12
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.619.985.770,00	2.606.804.185,00	99,97	99,50
Sasaran 8, Meningkatnya pelayanan air bersih									
					ST.6 Pemerataan pemenuhan air bersih masyarakat				
					AK.21 Perluasan dan Pemerataan Jaringan Air Bersih Skala Lokal dan Regional				
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				
					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.597.471.500,00	39.140.778.753,00	92,09	91,89
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.450.000.000,00	2.382.671.316,00	98,88	97,25
Sasaran 9, Meningkatnya sarana prasarana perkotaan									



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah					Capaian Kinerja		Realisasi	
					DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
				ST.7 Peningkatan sarana prasarana perkotaan				
				AK.22 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sarana prasarana perkotaan				
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah				
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	515.000.000,00	496.171.000,00	97,09	96,34
				Program Penataan Bangunan Gedung				
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	102.621.275.754,00	102.066.995.702,00	99,60	99,46
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya				
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	34.717.009.353,00	34.717.009.353,00	100,00	100,00
				Program Penyelenggaraan Jalan				
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	76.112.979.528,00	72.293.324.914,00	99,94	94,98
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi				
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4.996.880,00	4.792.000,00	100,00	95,90
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	662.655.400,00	645.363.429,00	100,00	97,39
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	29.999.920,00	10.467.842,00	52,21	34,89
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	69.983.120,00	54.819.318,00	94,00	78,33



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.625.000,00	5.625.000,00	100,00	100,00
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	59.960.000,00	51.572.500,00	100,00	86,01
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.239.904,00	149.573.400,00	100,00	99,56
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	-	50,00	-
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.045.323.228,00	11.695.363.578,00	100,00	97,09
					Program Pengelolaan Pelayaran				
					Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	70.000.000,00	69.937.000,00	100,00	99,91
					Sasaran 10, Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR				
					ST. 8 Pengembangan Permukiman dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh				
					AK. 23 Pengembangan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)				
					Program Pengembangan Perumahan				
					Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	86.889.640,00	46889640	76,98	53,96459
					Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	40.000.000,00	39607200	100,00	99,018
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh				
					Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.049.999.850,00	1039083557	99,99	98,96035



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah					Capaian Kinerja		Realisasi	
					DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
				Sasaran 11, Menurunnya luas kawasan kumuh				
				ST. 8 Pengembangan Permukiman dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh				
				AK.24 Peningkatan prasarana, sarana, utilitas umum kawasan permukiman kumuh				
				Program Kawasan Permukiman				
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.000.000,00	2449915	100,00	48,9983
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	150.000.000,00	147368000	100,00	98,24533
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	99.998.331,00	78657209	85,16	78,65852
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)				
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	48.892.687.699,00	47831953537	98,00	97,83049
Misi IV : Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas								
				Tujuan 4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah				
				Sasaran 12, Menurunnya kemiskinan				
				ST.9 Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin				
				AK.25 Perbaikan layanan dasar masyarakat miskin yang tepat sasaran				
				Program Pemberdayaan Sosial				
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	9.956.880,00	9.690.000,00	97,38	97,32
				Program Rehabilitasi Sosial				



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	149.518.872,00	90.262.900,00	71,69	60,37
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	39.549.364,00	34.162.000,00	99,61	86,38
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial				
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	85.487.100,00	80.123.230,00	96,67	93,73
					Program Penanganan Bencana				
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	50.000.000,00	42.669.000,00	88,54	85,34
					Sasaran 13, Menurunnya pengangguran,				
					ST.10 Peningkatan kualitas sumberdaya dan penyerapan tenaga kerja local				
					AK.26 Perencanaan tenaga kerja				
					Program Perencanaan Tenaga Kerja				
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	199.418.700,00	155.169.563,00	83,03	77,81
					AK.27 Peningkatan kualitas tenaga kerja				
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja				
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	179.995.225,00	164.982.625,00	94,56	91,66
					AK. 28 Perluasan Kesempatan Kerja				
					Program Penempatan Tenaga Kerja				
					Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	71.564.270,00	64.917.480,00	93,94	90,71
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	21.794.660,00	20.746.600,00	99,76	95,19



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	14.350.200,00	-	-	-
					Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.650.000,00	4.090.000,00	100,00	87,96
					Program Hubungan Industrial				
					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.999.840,00	16.465.600,00	98,80	96,86
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	90.803.820,00	76.956.360,00	96,59	84,75
					Sasaran 14, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah				
					ST.11 Penguatan potensi unggulan ekonomi local				
					AK.29 Pengembangan dan Pembangunan pertanian dalam arti luas				
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
					Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.816.539.970,00	1.718.323.833,00	99,82	94,59
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	62.250.750,00	50.624.711,00	83,12	81,32
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
					Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	60.335.924,00	44.549.600,00	99,83	73,84
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	680.772.350,00	663.171.906,00	99,67	97,41
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	12.938.000,00	6.007.000,00	94,20	46,43
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	349.992.056,00	244.900.931,00	98,27	69,97
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	46.294.280,00	16.296.567,00	41,67	35,20
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				
					Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.357.871.876,00	1.342.015.670,00	99,99	98,83
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	25.012.500,00	22.150.000,00	92,80	88,56
					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00	80,00
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	110.029.350,00	109.279.600,00	100,00	99,32
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
					Pembangunan Prasarana Pertanian	928.908.000,00	926.854.000,00	100,00	99,78



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Pengembangan Prasarana Pertanian	143.635.730,00	139.783.180,00	97,33	97,32
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.905.952,00	4.905.592,00	100,00	99,99
					Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	4.927.565,00	4.920.000,00	100,00	99,85
					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	253.982.800,00	194.412.960,00	84,55	76,55
					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	5.044.120,00	4.904.500,00	100,00	97,23
					Program Perizinan Usaha Pertanian				
					Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	2.522.000,00	2.370.000,00	100,00	93,97
					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.060.000,00	4.890.000,00	100,00	96,64
					Program Penyuluhan Pertanian				
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.122.207.168,00	977.220.341,00	99,90	87,08
					AK.30 Pembangunan dan Pengembangan Sektor Industri				
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri				
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	199.418.700,00	155.169.563,00	83,03	77,81
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri				



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.951.580,00	3.889.580,00	100,00	98,43
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				
					Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	15.335.400,00	13.861.838,00	98,67	90,39
					AK.31 Peningkatan perdagangan barang dan jasa berbasis sumber daya local				
					Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan				
					Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	9.997.840,00	-	-	-
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				
					Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	153.995.210,00	145.659.300,00	100,00	94,59
					Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	9.995.000,00	-	-	-
					Program Pengembangan Ekspor				
					Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	77.008.320,00	27.152.657,00	39,63	35,26
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen				
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	105.000.000,00	94.226.860,00	93,07	89,74



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri				
					Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	29.999.760,00	8.200.000,00	56,25	27,33
					AK.32 Peningkatan pengelolaan potensi dan destinasi wisata				
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	19.689.300,00	18.970.000,00	100,00	96,35
					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	57.000.000,00	56.441.700,00	100,00	99,02
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.824.076.055,00	1.795.659.220,00	100,00	98,44
					Program Pemasaran Pariwisata				
					Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.002.935.750,00	989.697.000,00	100,00	98,68
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	309.785.720,00	306.073.800,00	100,00	98,80
					Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	49.998.115,00	46.783.205,00	100,00	93,57
					AK.33 Peningkatan Kemudahan Investasi				
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
					Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	24.987.400,00	18.868.621,00	89,83	75,51
					Program Promosi Penanaman Modal				
					Program Pelayanan Penanaman Modal				



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	211.585.000,00	203.907.780,00	98,38	96,37
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	371.701.000,00	285.776.880,00	86,63	76,88
					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				
					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.250.000,00	14.218.000,00	86,31	82,42
					Sasaran 15, Terkendalinya Inflasi daerah				
					ST.12 Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang				
					AK.34 Pengendalian Inflasi				
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan				
					Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.380,00	10.000.380,00	100,00	100,00
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	64.997.140,00	62.412.016,00	100,00	96,02
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	49.998.032,00	47.620.754,00	100,00	95,25



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
					Program Penanganan Kerawanan Pangan				
					Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	19.978.000,00	18.369.814,00	96,50	91,95
					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00
					Program Pengawasan Keamanan Pangan				
					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	19.999.000,00	19.874.000,00	100,00	99,37
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				
					Program Perekonomian Dan Pembangunan				
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	35.999.520,00	34.270.109,00	96,11	95,20
					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	615.692.954,00	557.235.314,00	99,71	90,51
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	110.048.790,00	102.248.577,00	102,26	92,91
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	196.198.740,00	177.221.069,00	98,36	90,33
Misi V : Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreativitas dan inovatif berdasarkan ilmu pengetahuan									
Tujuan 5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup									
Sasaran 16, Menurunnya pencemaran lingkungan									
ST.13 Pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan									
AK.35 Pengendalian Pencemaran Lingkungan									
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup				
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	243.126.480,00	232.946.498,00	99,75	95,81



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
					Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	194.019.855,00	193.215.036,00	99,99	99,59
					Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	59.999.520,00	54.832.174,00	99,50	91,39
					Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	219.722.180,00	196.093.680,00	94,02	89,25
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)				
					Penyimpanan sementara Limbah B3	29.038.130,00	23.291.120,00	98,86	80,21
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)				
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	19.813.400,00	19.703.400,00	100,00	99,44
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				
					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	84.620.160,00	79.637.495,00	99,46	94,11
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				
					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	85.378.730,00	79.693.555,00	99,00	93,34



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah					Capaian Kinerja		Realisasi	
					DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	7.768.340,00	6.489.340,00	100,00	83,54
				AK.36 Peningkatan Pengelolaan Persampahan				
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional				
				Program Pengelolaan Persampahan				
				Pengelolaan Sampah	3.058.816.522,00	2.972.948.130,00	99,75	97,19
				Sasaran 17, Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif				
				ST.14 Optimalisasi penanganan bencana				
				AK.37 Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana				
				Program Penanggulangan Bencana				
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	254.954.380,00	248.644.897,00	99,76	97,53
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	686.136.461,00	652.023.632,00	99,32	95,03
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	186.063.339,00	135.128.252,00	78,44	72,62
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	15.804.801,00	15.802.722,00	100,00	99,99
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	50.285.550,00	45.131.940,00	100,00	89,75
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	55.925.514,00	28.062.501,00	51,72	50,18
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	24.990.000,00	24.990.000,00	100,00	100,00



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah					Capaian Kinerja		Realisasi	
					DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
				AK.38 Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Banjir				
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase				
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.995.320.000,00	31.327.967.172,00	98,39	97,91
Misi VI : Meningkatkan Pembangunan Akhlak Dan Moral Sesuai Kearifan Lokal Serta Mewujudkan Kepastian Hukum								
				Tujuan 6. Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat				
				Sasaran 18, Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota				
				ST.15 Penguatan kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayah				
				AK.39 Optimalisasi Keamanan, Ketertiban, dan ketentraman Masyarakat				
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	163.675.015,00	128.924.187,00	86,14	78,77
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	165.971.244,00	115.045.908,00	92,30	69,32
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.956.330,00	4.956.000,00	100,00	99,99
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.000.000,00	24.600.000,00	98,40	98,40
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.992.660,00	4.992.000,00	100,00	99,99
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	100,00
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.976.330,00	4.020.000,00	80,78	80,78
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	35.000.000,00	34.300.000,00	100,00	98,00
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.988.440,00	4.988.440,00	100,00	100,00
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.000.000,00	14.996.550,00	100,00	99,98
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.808.924.290,00	8.795.090.150,00	99,90	99,84
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan				
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.391.534.805,00	1.324.455.481,00	95,62	95,18
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	179.333.520,00	133.639.840,00	75,46	74,52
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.039.688.330,00	1.739.586.260,00	85,71	85,29
					AK.40 Peningkatan Toleransi Keagamaan				
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya				
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	426.443.150,00	390.221.319,00	93,37	91,51
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.500.679.580,00	1.388.159.300,00	97,44	92,50
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	296.699.840,00	255.842.020,00	86,70	86,23
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	234.999.640,00	232.199.200,00	99,12	98,81



Misi/Tujuan/Sasaran/Program/kegiatan Pembangunan Daerah						Capaian Kinerja		Realisasi	
						DPA	Realisasi	Fisik	Keu.
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	304.666.414,00	300.132.387,00	99,53	98,51
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	208.999.450,00	193.766.920,00	92,71	92,71

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Organisasi (OPD) pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II. 77
Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Instansi / SKPD Kota Tarakan	Biaya	Realisasi	Realisasi		Jml	Jml	Jml
		Menurut Dpa	Penyerapan Dana	Fisik	Keu	Prog	Keg	Sub Keg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Dinas Pendidikan	331.831.673.888	322.232.472.468	99,82	97,11	5	12	52
2	Dinas Kesehatan	175.107.082.633	154.195.336.583	90,35	88,06	8	22	69
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	324.201.420.886	314.498.517.509	98,49	97,01	11	18	39
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	63.103.147.716	60.965.418.527	98,17	96,61	8	15	24
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	19.386.784.513	18.165.232.099	98,48	93,70	3	11	31
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.394.040.764	5.006.805.434	96,84	92,82	2	9	30
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6.192.151.492	5.156.598.937	92,74	83,28	8	14	32
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.549.382.076	6.791.273.886	100,00	89,96	9	21	44
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.490.820.661	10.119.106.931	99,55	96,46	10	25	40
10	Dinas Lingkungan Hidup	33.878.406.796	32.692.616.507	99,40	96,50	10	17	32
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.698.033.682	4.596.178.964	98,56	97,83	3	11	23
12	Dinas Perhubungan	25.574.316.904	23.893.634.342	99,90	93,43	3	12	21
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.981.387.107	6.705.604.815	99,44	96,05	5	10	26
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	7.356.884.037	6.976.140.999	97,92	94,82	14	23	43
15	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.609.512.237	6.287.413.218	98,76	95,13	5	10	27
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	32.065.773.743	30.726.312.837	99,44	95,82	12	25	53
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.476.747.001	4.244.354.899	98,64	94,81	6	15	36

No	Instansi / SKPD Kota Tarakan	Biaya	Realisasi	Realisasi		Jml	Jml	Jml
		Menurut Dpa	Penyerapan Dana	Fisik	Keu	Prog	Keg	Sub Keg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Dinas Perikanan	7.601.717.224	6.784.294.911	92,67	89,25	5	13	31
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.093.323.303	6.259.175.627	98,17	88,24	7	16	34
20	Sekretariat Daerah	50.301.470.066	48.293.117.452	98,19	96,01	3	18	57
21	Sekretariat DPRD	45.035.361.053	43.338.635.832	99,05	96,23	2	13	28
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	7.710.272.885	7.387.294.967	99,54	95,81	4	14	35
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	58.004.164.608	50.462.595.936	87,61	87,00	4	12	60
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	18.797.811.617,00	15.947.529.849	97,20	84,84	3	10	27
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.878.769.240,00	15.517.841.114	98,41	97,73	6	11	29
26	Inspektorat	7.372.696.025,00	6.877.766.990	97,73	93,29	3	9	29
27	Kecamatan Tarakan Tengah	14.012.892.732,00	13.271.566.483	99,45	94,71	4	11	23
28	Kecamatan Tarakan Barat	13.831.365.421,00	13.389.461.589	96,97	96,81	4	11	25
29	Kecamatan Tarakan Timur	16.111.041.121,00	15.537.926.405	96,85	96,44	4	10	21
30	Kecamatan Tarakan Utara	8.894.786.396,00	8.237.168.097	93,21	92,61	4	10	20
Jumlah Ang/Realisasi Fisik & Keu Kumulatif SKPD		1.335.543.237.827	1.264.557.394.207	97,22	94,68	175	428	1041

Sumber : 2024

Capaian Pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah menunjukkan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Adapun Capaian Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut::

1. Dinas Pendidikan

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 78
Capaian Program dan kegiatan Dinas Pendidikan

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	187.073.584.603	181.225.975.560	100,00	96,87
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	186.101.431.197	180.279.176.750	100,00	96,87
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	346.850.000	339.996.000	100,00	98,02
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.455.280	122.274.592	98,86	96,69
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.445.576	181.853.218	99,38	93,52
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.402.550	302.675.000	100,00	99,43
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	144.262.569.985	140.682.926.384	99,67	97,52
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	49.117.478.532	47.714.488.198	99,74	97,14
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	87.979.565.960	85.961.960.606	99,74	97,71
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.813.309.777	4.718.834.628	98,35	98,04
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.352.215.716	2.287.642.952	98,45	97,25
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	200.530.900	96.118.850	58,17	47,93
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200.530.900	96.118.850	58,17	47,93
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	264.988.400	227.451.674	100,00	85,83
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	264.988.400	227.451.674	100,00	85,83
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	30.000.000	-	-	-
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	-	-	-
Capaian Program Dan Kegiatan		331.831.673.888	322.232.472.468	99,82	97,11

Sumber : Dinas Pendidikan, 2024

2. Dinas Kesehatan

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 79
Capaian Program dan kegiatan Dinas Kesehatan

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	56.259.082.213	48.435.136.587	89,56	86,09
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.102.136.639	33.378.541.213	100,00	95,09
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.700.000	119.016.000	100,00	99,43
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.835.390	219.129.427	93,29	87,36
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	174.578.852	170.520.900	100,00	97,68
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.342.620.710	1.195.994.815	99,30	89,08
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.144.467.800	3.065.737.385	99,68	97,50
1.02.01.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	16.124.742.822	10.286.196.847	63,79	63,79
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	29.781.164.410	22.028.612.126	76,50	73,97
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.220.184.250	3.788.658.213	94,90	89,77
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.266.968.100	18.003.209.934	73,31	71,25
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	294.012.060	236.743.979	86,50	80,52
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	830.980.010	507.860.750	63,11	61,12
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk	34.868.000	20.980.000	60,17	60,17



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	796.112.010	486.880.750	63,23	61,16
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	406.753.340	199.118.180	58,81	48,95
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	101.725.580	85.210.260	88,84	83,76
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150.267.590	60.928.150	41,31	40,55
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	154.760.170	52.979.770	56,06	34,23
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.251.878.470	1.967.841.540	90,30	87,39
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.726.382.660	1.635.600.000	94,74	94,74
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.900.000	35.880.000	74,91	74,91
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	477.595.810	296.361.540	75,78	62,05
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	82.602.270.690	78.369.721.700	96,22	94,88
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.063.916.617	14.541.394.776	97,42	90,52

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.01.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	66.538.354.073	63.828.326.924	95,93	95,93
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.774.953.500	2.687.045.700	100,00	96,83
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.774.953.500	2.687.045.700	100,00	96,83
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	200.000.000	-	-	-
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	200.000.000	-	-	-
Capaian Program Dan Kegiatan		175.107.082.633	154.195.336.583	90,35	88,06

Sumber : Dinas kesehatan, 2024

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 80
Capaian Program dan kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.631.023.431	10.610.399.710	95,82	91,22
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.700.000	28.536.000	100,00	99,43
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.516.684.112	9.750.238.935	96,99	92,71
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.473.429	193.898.420	88,24	79,64
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.165.890	435.779.422	77,00	71,07



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	49.972.000	100,00	99,94
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.000.000	151.974.933	100,00	84,90
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	42.597.471.500	39.140.778.753	92,09	91,89
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.597.471.500	39.140.778.753	92,09	91,89
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.450.000.000	2.382.671.316	98,88	97,25
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.450.000.000	2.382.671.316	98,88	97,25
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	20.793.706.000	20.747.757.000	100,00	99,78
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	20.793.706.000	20.747.757.000	100,00	99,78
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	515.000.000	496.171.000	97,09	96,34
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	515.000.000	496.171.000	97,09	96,34
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	31.995.320.000	31.327.967.172	98,39	97,91
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.995.320.000	31.327.967.172	98,39	97,91
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	102.621.275.754	102.066.995.702	99,60	99,46
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	102.621.275.754	102.066.995.702	99,60	99,46

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	34.717.009.353	34.717.009.353	100,00	100,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	34.717.009.353	34.717.009.353	100,00	100,00
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	76.112.979.528	72.293.324.914	99,94	94,98
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	76.112.979.528	72.293.324.914	99,94	94,98
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	4.996.880	4.792.000	100,00	95,90
1.03.011.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4.996.880	4.792.000	100,00	95,90
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	762.638.440	710.650.589	97,57	93,18
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	662.655.400	645.363.429	100,00	97,39
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	29.999.920	10.467.842	52,21	34,89
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	69.983.120	54.819.318	94,00	78,33
Capaian Program Dan Kegiatan		324.201.420.886	314.498.517.509	98,49	97,01

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 81
Capaian Program dan kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.213.515.341	5.884.615.124	99,14	94,7067
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.350.000	14.268.000	100,00	99,42857
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.535.595.569	5.314.922.423	99,18	96,01356
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.579.772	82.720.717	93,49	87,46132
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.990.000	300.143.840	99,52	96,82372
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.000.000	172.560.144	100,00	66,62554
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	126.889.640	86.496.840	84,24	68,16698
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	86.889.640	46.889.640	76,98	53,96459
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	40.000.000	39.607.200	100,00	99,018
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	254.998.331	228.475.124	94,18	89,59867
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.000.000	2.449.915	100,00	48,9983
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	150.000.000	147.368.000	100,00	98,24533
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	99.998.331	78.657.209	85,16	78,65852
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.049.999.850	1.039.083.557	99,99	98,96035
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.049.999.850	1.039.083.557	99,99	98,96035
1.04.05	Program Peningkatan	48.892.687.699	47.831.953.537	98,00	97,83049

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)				
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	48.892.687.699	47.831.953.537	98,00	97,83049
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	29.972.800	21.939.000	99,87	73,19636
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.972.800	21.939.000	99,87	73,19636
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	6.515.084.255	5.862.922.425	98,75	89,98997
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.515.084.255	5.862.922.425	98,75	89,98997
2.010.10	Program Penatagunaan Tanah	19.999.800	9.932.920	71,94	49,6651
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	19.999.800	9.932.920	71,94	49,6651
Capaian Program Dan Kegiatan		63.103.147.716	60.965.418.527	98,17	96,61

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2024

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SAT POL PP) dan PMK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 82
Capaian Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.910.132.389	17.807.274.841	98,77	94,17
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.481.140	123.302.300	100,00	94,50
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.056.459.068	12.397.633.171	99,99	94,95
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.685.181	40.998.381	95,20	93,85

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.424.000	301.766.646	86,60	86,36
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.330.083.000	4.943.574.343	96,59	92,75
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	329.646.259	243.970.095	89,24	74,01
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	163.675.015	128.924.187	86,14	78,77
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	165.971.244	115.045.908	92,30	69,32
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	147.005.865	113.987.163	81,63	77,54
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	15.804.801	15.802.722	100,00	99,99
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	50.285.550	45.131.940	100,00	89,75
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	55.925.514	28.062.501	51,72	50,18
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	24.990.000	24.990.000	100,00	100,00
Capaian Program Dan Kegiatan		19.386.784.513	18.165.232.099	98,48	93,70

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2024

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 83
Capaian Program dan kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.266.886.584	3.971.008.653	97,06	93,07
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.400.000	8.352.000	100,00	99,43
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.707.128.385	3.611.767.355	98,89	97,43
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.560.193	66.826.515	97,21	89,63
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.000.000	183.269.942	72,30	63,20
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.772.206	36.270.600	100,00	91,20
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.025.800	64.522.241	98,74	43,88
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	1.127.154.180	1.035.796.781	95,98	91,89
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	254.954.380	248.644.897	99,76	97,53
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	686.136.461	652.023.632	99,32	95,03
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	186.063.339	135.128.252	78,44	72,62
Capaian Program Dan Kegiatan		5.394.040.764	5.006.805.434	96,84	92,82

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 84
Capaian Program dan kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.571.853.895	3.486.275.024	97,99	97,60
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.650.000	6.646.200	100,00	99,94
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.979.201.167	2.939.647.261	98,99	98,67
8.01.01.2.06	Administrasi Umum	63.200.900	49.882.493	79,15	78,93



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perangkat Daerah				
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.038.640	18.085.449	91,43	90,25
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	434.443.188	430.780.904	99,80	99,16
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.320.000	41.232.717	61,84	60,35
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.391.534.805	1.324.455.481	95,62	95,18
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.391.534.805	1.324.455.481	95,62	95,18
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	8.808.924.290	8.795.090.150	99,90	99,84
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.808.924.290	8.795.090.150	99,90	99,84
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.500.679.580	1.388.159.300	97,44	92,50
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.500.679.580	1.388.159.300	97,44	92,50
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	426.443.150	390.221.319	93,37	91,51
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	426.443.150	390.221.319	93,37	91,51

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	179.333.520	133.639.840	75,46	74,52
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	179.333.520	133.639.840	75,46	74,52
Capaian Program Dan Kegiatan		15.878.769.240	15.517.841.114	98,41	97,73

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

8. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 85
Capaian Program dan kegiatan
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.716.021.836	3.060.440.567	97,16	82,36
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.750.000	8.700.000	100,00	99,43
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.426.522.787	2.793.920.966	97,06	81,54
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.708.560	65.975.795	96,25	92,01
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.502.676	66.575.320	96,84	90,58
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.337.813	46.081.000	100,00	99,45
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.200.000	79.187.486	100,03	88,78
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	9.956.880	9.690.000	97,38	97,32
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	9.956.880	9.690.000	97,38	97,32
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	189.068.236	124.424.900	77,53	65,81



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	149.518.872	90.262.900	71,69	60,37
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	39.549.364	34.162.000	99,61	86,38
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	85.487.100	80.123.230	96,67	93,73
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	85.487.100	80.123.230	96,67	93,73
1.06.06	Program Penanganan Bencana	50.000.000	42.669.000	88,54	85,34
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	50.000.000	42.669.000	88,54	85,34
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	76.944.340	76.264.980	99,28	99,12
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.944.340	76.264.980	99,28	99,12
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	24.984.770	23.400.000	97,26	93,66
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	24.984.770	23.400.000	97,26	93,66
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.039.688.330	1.739.586.260	85,71	85,29
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.039.688.330	1.739.586.260	85,71	85,29

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Capaian Program Dan Kegiatan		6.192.151.492	5.156.598.937	92,74	83,28

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2024

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 86
Capaian Program dan kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.798.985.724	3.461.266.438	100,00	91,11
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.050.000	8.004.000	100,00	99,43
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.567.039.978	3.268.968.535	100,00	91,64
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.911.700	41.308.745	100,00	89,97
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.647.037	42.100.900	100,00	86,54
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.820.988	56.274.073	100,00	99,04
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.516.021	44.610.185	100,00	61,52
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	264.981.730	262.742.700	100,00	99,16
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	14.981.730	12.742.700	100,00	85,05



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	100,00	100,00
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	54.852.700	44.391.280	100,00	80,93
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39.987.480	31.537.880	100,00	78,87
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.865.220	12.853.400	100,00	86,47
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	29.500.240	29.193.550	100,00	98,96
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.996.980	9.988.000	100,00	99,91
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.579.040	9.395.550	100,00	98,08
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.924.220	9.810.000	100,00	98,85
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	149.938.200	139.385.480	100,00	92,96
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	149.938.200	139.385.480	100,00	92,96
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	109.991.186	101.115.675	100,00	91,93
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	109.991.186	101.115.675	100,00	91,93

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	313.676.403	264.670.927	100,00	84,38
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	313.676.403	264.670.927	100,00	84,38
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1.879.367.792	1.744.352.565	100,00	92,82
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	557.100.000	504.059.501	100,00	90,48
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	44.000.000	39.999.740	100,00	90,91
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	71.000.000	67.000.000	100,00	94,37
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.207.267.792	1.133.293.324	100,00	93,87
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	948.088.101	744.155.271	100,00	78,49
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	948.088.101	744.155.271	100,00	78,49
Capaian Program Dan Kegiatan		7.549.382.076	6.791.273.886	100,00	89,96

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 87
Capaian Program dan kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.336.741.048	6.202.624.124	100,00	97,88
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.750.000	15.660.000	100,00	99,43
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.052.221.008	5.942.106.747	100,00	98,18
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.180.040	65.423.943	99,64	90,64
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.990.000	109.096.470	100,00	90,17
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.600.000	70.336.964	100,00	93,04
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	10.000.380	10.000.380	100,00	100,00
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.380	10.000.380	100,00	100,00
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	114.995.172	110.032.770	100,00	95,68
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	64.997.140	62.412.016	100,00	96,02
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	49.998.032	47.620.754	100,00	95,25
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	39.978.000	38.369.814	98,25	95,98
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	19.978.000	18.369.814	96,50	91,95
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten/Kota				
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	19.999.000	19.874.000	100,00	99,37
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	19.999.000	19.874.000	100,00	99,37
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.497.913.726	1.477.945.270	99,84	98,67
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.357.871.876	1.342.015.670	99,99	98,83
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	25.012.500	22.150.000	92,80	88,56
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.500.000	2.000.000	80,00	80,00
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	110.029.350	109.279.600	100,00	99,32
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.072.543.730	1.066.637.180	99,64	99,45
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	928.908.000	926.854.000	100,00	99,78
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	143.635.730	139.783.180	97,33	97,32
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	268.860.437	209.143.052	85,40	77,79
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.905.952	4.905.592	100,00	99,99
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	4.927.565	4.920.000	100,00	99,85

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	253.982.800	194.412.960	84,55	76,55
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	5.044.120	4.904.500	100,00	97,23
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	7.582.000	7.260.000	100,00	95,75
3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	2.522.000	2.370.000	100,00	93,97
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.060.000	4.890.000	100,00	96,64
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	1.122.207.168	977.220.341	99,90	87,08
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.122.207.168	977.220.341	99,90	87,08
Capaian Program Dan Kegiatan		10.490.820.661	10.119.106.931	99,55	96,46

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

11. Dinas Lingkungan Hidup

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 88
Capaian Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.256.117.709	26.226.961.894	99,34	96,22
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.550.000	25.404.000	100,00	99,43
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.808.498.032	20.297.264.610	99,41	97,54
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.884.880	136.904.604	100,00	78,73



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.912.460.770	4.610.189.831	98,84	93,85
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.311.679	830.252.925	100,00	97,07
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.412.348	326.945.924	99,96	68,06
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	243.126.480	232.946.498	99,75	95,81
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	243.126.480	232.946.498	99,75	95,81
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	473.741.555	444.140.890	97,16	93,75
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	194.019.855	193.215.036	99,99	99,59
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	59.999.520	54.832.174	99,50	91,39
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	219.722.180	196.093.680	94,02	89,25
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.619.985.770	2.606.804.185	99,97	99,50
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.619.985.770	2.606.804.185	99,97	99,50
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	29.038.130	23.291.120	98,86	80,21
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	29.038.130	23.291.120	98,86	80,21
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	19.813.400	19.703.400	100,00	99,44
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	19.813.400	19.703.400	100,00	99,44



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	84.620.160	79.637.495	99,46	94,11
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.620.160	79.637.495	99,46	94,11
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	85.378.730	79.693.555	99,00	93,34
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.378.730	79.693.555	99,00	93,34
2.011.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	7.768.340	6.489.340	100,00	83,54
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	7.768.340	6.489.340	100,00	83,54
2.011.11	Program Pengelolaan Persampahan	3.058.816.522	2.972.948.130	99,75	97,19
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	3.058.816.522	2.972.948.130	99,75	97,19
	Capaian Program Dan Kegiatan	33.878.406.796	32.692.616.507	99,40	96,50
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.569.288.086	4.485.093.589	98,85	98,16
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.150.000	10.092.000	100,00	99,43
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.851.044.918	3.840.178.511	99,78	99,72
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	548.012.200	487.002.491	93,81	88,87
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.285.000	32.440.400	85,37	84,73
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.209.968	41.200.000	100,00	95,35



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.586.000	74.180.187	94,39	94,39
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	92.908.146	81.350.000	88,79	87,56
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	53.456.386	52.600.000	100,00	98,40
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	9.975.000	9.690.000	100,00	97,14
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	29.476.760	19.060.000	64,66	64,66
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.837.450	29.735.375	87,17	82,97
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.602.000	15.340.000	78,62	78,26
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.235.450	14.395.375	97,49	88,67
	Capaian Program Dan Kegiatan	4.698.033.682	4.596.178.964	98,56	97,83
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.203.168.772	11.921.562.864	99,95	90,29
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.900.000	18.792.000	100,00	99,43
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.900.431.323	6.346.083.624	99,96	91,97
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.472.190	188.283.976	100,00	93,45
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	769.990.520	665.218.370	100,00	86,39
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.097.094	19.070.000	100,00	99,86
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.293.277.645	4.684.114.894	99,93	88,49
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	12.301.148.132	11.902.134.478	99,84	96,76
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.625.000	5.625.000	100,00	100,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	59.960.000	51.572.500	100,00	86,01

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.239.904	149.573.400	100,00	99,56
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	-	50,00	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.045.323.228	11.695.363.578	100,00	97,09
2.015.03	Program Pengelolaan Pelayaran	70.000.000	69.937.000	100,00	99,91
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	70.000.000	69.937.000	100,00	99,91
Capaian Program Dan Kegiatan		25.574.316.904	23.893.634.342	99,90	93,43

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 89
Capaian Program dan kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.569.288.086	4.485.093.589	98,85	98,16
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.150.000	10.092.000	100,00	99,43
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.851.044.918	3.840.178.511	99,78	99,72
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	548.012.200	487.002.491	93,81	88,87
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.285.000	32.440.400	85,37	84,73
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.209.968	41.200.000	100,00	95,35

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.586.000	74.180.187	94,39	94,39
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	92.908.146	81.350.000	88,79	87,56
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	53.456.386	52.600.000	100,00	98,40
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	9.975.000	9.690.000	100,00	97,14
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	29.476.760	19.060.000	64,66	64,66
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.837.450	29.735.375	87,17	82,97
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.602.000	15.340.000	78,62	78,26
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.235.450	14.395.375	97,49	88,67
Capaian Program Dan Kegiatan		4.698.033.682	4.596.178.964	98,56	97,83

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

13. Dinas Perhubungan

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 90
Capaian Program dan kegiatan Dinas Perhubungan

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.203.168.772	11.921.562.864	99,95	90,29
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.900.000	18.792.000	100,00	99,43
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.900.431.323	6.346.083.624	99,96	91,97
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.472.190	188.283.976	100,00	93,45
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	769.990.520	665.218.370	100,00	86,39
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	19.097.094	19.070.000	100,00	99,86

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemerintah Daerah				
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.293.277.645	4.684.114.894	99,93	88,49
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	12.301.148.132	11.902.134.478	99,84	96,76
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.625.000	5.625.000	100,00	100,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	59.960.000	51.572.500	100,00	86,01
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.239.904	149.573.400	100,00	99,56
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	-	50,00	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.045.323.228	11.695.363.578	100,00	97,09
2.015.03	Program Pengelolaan Pelayaran	70.000.000	69.937.000	100,00	99,91
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	70.000.000	69.937.000	100,00	99,91
Capaian Program Dan Kegiatan		25.574.316.904	23.893.634.342	99,90	93,43

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 91
Capaian Program dan kegiatan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.853.257.967	4.684.029.217	99,99	96,51
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000	10.440.000	100,00	99,43
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.961.926.000	3.831.338.157	100,00	96,70
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.857.940	60.985.420	100,00	89,87
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.000.000	234.579.270	99,89	95,75
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	214.974.027	214.126.000	100,00	99,61
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.000.000	332.560.370	99,99	94,21
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.018.130.180	990.199.000	99,86	97,26
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.018.130.180	990.199.000	99,86	97,26
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.045.000.000	992.629.048	98,90	94,99
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.045.000.000	992.629.048	98,90	94,99
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	39.999.360	24.344.550	61,42	60,86
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	39.999.360	24.344.550	61,42	60,86
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	24.999.600	14.403.000	58,49	57,61
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.999.600	14.403.000	58,49	57,61
Capaian Program Dan Kegiatan		6.981.387.107	6.705.604.815	99,44	96,05

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 2024

15. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 92
Capaian Program dan kegiatan Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.976.367.857	5.792.027.830	99,59	96,92
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.300.000	13.224.000	100,00	99,43
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.026.052.236	4.898.007.126	99,70	97,45
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.004.350	90.482.183	98,98	81,51
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.999.900	380.369.550	98,34	97,53
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.974.571	146.330.000	99,49	94,42
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.036.800	263.614.971	99,54	93,80
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	19.265.160	8.248.860	48,09	42,82
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.265.220	8.248.860	100,00	89,03
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.999.940	-	-	0,00
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	9.999.880	6.758.420	100,00	67,59
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	9.999.880	6.758.420	100,00	67,59
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	40.000.000	13.712.340	42,99	34,28

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	13.712.340	42,99	34,28
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	49.999.810	44.459.170	91,10	88,92
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.999.810	44.459.170	91,10	88,92
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	14.999.840	13.919.880	100,00	92,80
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.999.840	13.919.880	100,00	92,80
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	675.799.570	667.380.170	99,95	98,75
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	675.799.570	667.380.170	99,95	98,75
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	133.459.490	128.692.012	99,42	96,43
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	133.459.490	128.692.012	99,42	96,43
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	9.997.840	-	-	0,00
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	9.997.840	-	-	0,00
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	163.990.210	145.659.300	93,91	88,82
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	153.995.210	145.659.300	100,00	94,59

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	9.995.000	-	-	0,00
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	50.996.300	25.703.500	93,33	50,40
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	29.999.010	13.166.000	99,95	43,89
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	999.760	-	-	0,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	19.997.530	12.537.500	88,06	62,70
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	77.008.320	27.152.657	39,63	35,26
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	77.008.320	27.152.657	39,63	35,26
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	105.000.000	94.226.860	93,07	89,74
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	105.000.000	94.226.860	93,07	89,74
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	29.999.760	8.200.000	56,25	27,33
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	29.999.760	8.200.000	56,25	27,33
Capaian Program Dan Kegiatan		7.356.884.037	6.976.140.999	97,92	94,82

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, 2024

16. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel II. 93
Capaian Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.983.988.837	5.764.641.937	99,60	96,33
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.700.000	14.616.000	100,00	99,43
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.143.773.487	5.022.002.204	99,97	97,63
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.493.510	155.969.708	98,87	84,54
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.360.000	70.731.600	80,37	69,78
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.440.101	116.575.000	100,00	98,43
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.221.739	384.747.425	99,88	91,34
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	24.987.400	18.868.621	89,83	75,51
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	24.987.400	18.868.621	89,83	75,51
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	211.585.000	203.907.780	98,38	96,37
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	211.585.000	203.907.780	98,38	96,37
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	371.701.000	285.776.880	86,63	76,88
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	371.701.000	285.776.880	86,63	76,88
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	17.250.000	14.218.000	86,31	82,42

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.250.000	14.218.000	86,31	82,42
Capaian Program Dan Kegiatan		6.609.512.237	6.287.413.218	98,76	95,13

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

17. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 94
Capaian Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.895.581.474	8.856.459.548	98,69	89,50
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.650.000	20.532.000	100,00	99,43
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.516.035.523	8.236.056.644	100,00	96,71
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.521.820	201.978.493	100,00	84,33
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.782.480	45.207.900	92,90	68,72
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.053.591.651	352.684.511	88,18	33,47
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	334.988.850	334.461.390	100,00	99,84
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000	100,00	100,00



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	34.988.850	34.461.390	100,00	98,49
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.810.370.457	4.664.765.520	98,96	96,97
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	770.379.997	760.710.000	100,00	98,74
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.819.997.480	1.740.936.000	100,00	95,66
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	450.000.000	446.884.720	100,00	99,31
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.669.998.230	1.616.427.160	97,01	96,79
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.994.750	99.807.640	100,00	99,81
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	2.619.999.110	2.550.201.950	100,00	97,34
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.619.999.110	2.550.201.950	100,00	97,34
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	214.958.280	214.336.480	100,00	99,71
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	214.958.280	214.336.480	100,00	99,71
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	24.989.770	24.920.000	100,00	99,72
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah	24.989.770	24.920.000	100,00	99,72

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten/Kota				
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	139.818.600	124.777.968	100,00	89,24
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	64.882.600	52.414.088	100,00	80,78
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	74.936.000	72.363.880	100,00	96,57
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	10.611.582.262	10.592.765.056	100,00	99,82
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	10.611.582.262	10.592.765.056	100,00	99,82
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.900.765.355	1.871.070.920	100,00	98,44
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	19.689.300	18.970.000	100,00	96,35
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	57.000.000	56.441.700	100,00	99,02
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.824.076.055	1.795.659.220	100,00	98,44
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	1.002.935.750	989.697.000	100,00	98,68
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.002.935.750	989.697.000	100,00	98,68
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	359.783.835	352.857.005	100,00	98,07
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	309.785.720	306.073.800	100,00	98,80
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	49.998.115	46.783.205	100,00	93,57
Capaian Program Dan Kegiatan		32.065.773.743	30.726.312.837	99,44	95,82

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, 2024

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 95
Capaian Program dan kegiatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.062.318.925	3.863.177.715	98,93	95,10
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.150.000	9.570.000	100,00	94,29
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.839.996.550	3.670.709.983	99,49	95,59
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.789.895	66.004.261	96,56	94,58
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.636.650	33.030.200	60,64	60,45
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.755.830	6.250.000	100,00	92,51
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.990.000	77.613.271	100,00	95,83
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	204.821.394	188.673.940	95,26	92,12
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	109.972.100	99.855.740	92,25	90,80
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.849.294	88.818.200	98,73	93,64
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	29.819.597	22.122.580	79,42	74,19
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	19.984.157	12.740.260	69,29	63,75
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.835.440	9.382.320	100,00	95,39
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	129.908.550	122.161.064	98,94	94,04
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	70.495.220	66.229.100	99,86	93,95
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	59.413.330	55.931.964	97,85	94,14
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	29.882.135	28.285.600	100,00	94,66

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	14.891.200	14.883.100	100,00	99,95
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	14.990.935	13.402.500	100,00	89,40
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	19.996.400	19.934.000	100,00	99,69
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	19.996.400	19.934.000	100,00	99,69
Capaian Program Dan Kegiatan		4.476.747.001	4.244.354.899	98,64	94,81

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

19. Dinas Perikanan

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 96
Capaian Program dan kegiatan Dinas Perikanan

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.572.593.894	4.040.420.363	88,90	88,36
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.850.000	10.788.000	100,00	99,43
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.215.377.166	3.783.126.216	89,75	89,75
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.593.587	37.720.103	73,70	59,31
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.799.170	99.646.100	86,86	79,21
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.998.621	39.600.000	100,00	94,29
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.975.350	69.539.944	63,43	60,48

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.878.790.720	1.768.948.544	99,27	94,15
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.816.539.970	1.718.323.833	99,82	94,59
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.250.750	50.624.711	83,12	81,32
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	741.108.274	707.721.506	99,69	95,50
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	60.335.924	44.549.600	99,83	73,84
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	680.772.350	663.171.906	99,67	97,41
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12.938.000	6.007.000	94,20	46,43
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	12.938.000	6.007.000	94,20	46,43
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	396.286.336	261.197.498	91,66	65,91
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	349.992.056	244.900.931	98,27	69,97
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.294.280	16.296.567	41,67	35,20
Capaian Program Dan Kegiatan		7.601.717.224	6.784.294.911	92,67	89,25

Sumber : Dinas Perikanan, 2024

20. Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 97
Capaian Program dan kegiatan
Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.474.459.608	5.738.095.981	99,02	88,63
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.100.000	16.008.000	100,00	99,43
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.129.228.332	5.479.737.015	99,76	89,40
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.150.520	65.320.464	88,34	81,50
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.590.994	17.136.499	55,93	32,58
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.089.762	26.755.000	100,00	91,97
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.300.000	133.139.003	90,26	79,58
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	179.995.225	164.982.625	94,56	91,66
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	179.995.225	164.982.625	94,56	91,66
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	112.359.130	89.754.080	83,32	79,88
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	71.564.270	64.917.480	93,94	90,71
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	21.794.660	20.746.600	99,76	95,19
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	14.350.200	-	-	0,00
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.650.000	4.090.000	100,00	87,96
2.07.05	Program Hubungan Industrial	107.803.660	93.421.960	96,94	86,66
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.999.840	16.465.600	98,80	96,86

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	90.803.820	76.956.360	96,59	84,75
03.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	199.418.700	155.169.563	83,03	77,81
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	199.418.700	155.169.563	83,03	77,81
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	3.951.580	3.889.580	100,00	98,43
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.951.580	3.889.580	100,00	98,43
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	15.335.400	13.861.838	98,67	90,39
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	15.335.400	13.861.838	98,67	90,39
Capaian Program Dan Kegiatan		7.093.323.303	6.259.175.627	98,17	88,24

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja, 2024

21. Sekretariat Daerah

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 98
Capaian Program dan kegiatan Sekretariat Daerah

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.821.448.622	32.696.121.714	98,10	96,67
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.750.000	43.732.000	100,00	99,96



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	810.000.000	765.971.658	94,58	94,56
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.656.619.049	16.421.173.317	98,71	98,59
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.599.697.350	5.396.031.214	99,67	96,36
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	602.098.275	576.576.802	98,23	95,76
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.298.900.460	1.203.748.183	97,88	92,67
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.402.330.705	1.397.597.951	99,76	99,66
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	390.261.650	359.522.087	97,71	92,12
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.800.003.972	2.777.564.000	99,37	99,20
4.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.217.787.161	3.754.204.502	92,96	89,01
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	15.522.081.440	14.726.020.669	98,28	94,87
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	519.703.300	464.924.145	93,13	89,46
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	878.209.600	757.592.666	90,56	86,27
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	950.000.000	814.873.390	91,78	85,78
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	13.174.168.540	12.688.630.468	99,47	96,31
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	957.940.004	870.975.069	99,59	90,92
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	35.999.520	34.270.109	96,11	95,20
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	615.692.954	557.235.314	99,71	90,51
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	110.048.790	102.248.577	102,26	92,91
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	196.198.740	177.221.069	98,36	90,33
Capaian Program Dan Kegiatan		50.301.470.066	48.293.117.452	98,19	96,01

Sumber : Sekretariat Daerah, 2024

22. Sekretariat DPRD

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 99
Capaian Program dan kegiatan Sekretariat DPRD

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.813.682.133	23.293.797.605	98,28	93,87
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.050.000	14.964.000	100,00	99,43
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.386.058.608	4.812.853.616	99,96	89,36
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	883.521.200	679.985.267	78,67	76,96
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	535.300.000	526.303.500	98,37	98,32
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.181.180.955	15.549.861.548	98,65	96,10
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.892.270	223.229.419	96,81	88,97
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.100.000.000	1.078.400.000	100,00	98,04
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.679.100	408.200.255	99,98	88,42
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	20.221.678.920	20.044.838.227	100,00	99,13
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	15.937.910.320	15.862.618.249	100,00	99,53
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	867.727.800	839.894.552	100,00	96,79
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	275.636.000	274.797.206	100,00	99,70
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.265.454.800	1.244.920.720	100,00	98,38
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.874.950.000	1.822.607.500	100,00	97,21
Capaian Program Dan Kegiatan		45.035.361.053	43.338.635.832	99,05	96,23

Sumber : Sekretariat DPRD, 2024

23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 100
Capaian Program dan kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.668.759.395	5.434.944.355	99,90	95,88
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.900.000	11.832.000	100,00	99,43
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.117.597.235	4.927.244.517	100,00	96,28
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.147.960	177.604.253	99,05	83,72
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.256.200	114.044.660	97,00	95,63
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	19.946.000	100,00	99,73
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.858.000	184.272.925	100,00	98,09
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.093.850.000	1.042.641.670	99,21	95,32
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000	13.375.592	97,22	89,17
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000	14.954.490	100,00	99,70
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.063.850.000	1.014.311.588	99,23	95,34
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	262.603.490	244.704.049	95,43	93,18
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	50.090.540	42.371.226	86,28	84,59
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	160.000.000	151.278.073	97,25	94,55
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	52.512.950	51.054.750	98,65	97,22
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	685.060.000	665.004.893	98,60	97,07

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	620.000.000	618.888.875	100,00	99,82
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	65.060.000	46.116.018	85,26	70,88
Capaian Program Dan Kegiatan		7.710.272.885	7.387.294.967	99,54	95,81

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, 2024

24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 101

Capaian Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.621.425.248	43.636.384.713	95,89	95,65
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.500.000	30.624.000	97,78	97,22
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.127.860.821	38.377.972.001	95,66	95,64
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.024.051.659	913.213.690	94,47	89,18
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	991.400.340	918.275.132	93,30	92,62
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	265.884.228	258.033.330	98,12	97,05
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.180.728.200	3.138.266.560	99,82	98,67
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.196.878.280	3.495.859.373	43,80	42,65
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	437.862.740	358.766.894	90,23	81,94
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	549.539.760	391.379.884	77,85	71,22

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.209.475.780	1.958.256.664	89,61	88,63
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.000.000.000	787.455.931	15,75	15,75
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.143.167.860	1.739.563.873	82,33	81,17
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.143.167.860	1.739.563.873	82,33	81,17
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.042.693.220	1.590.787.977	83,97	77,88
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.042.693.220	1.590.787.977	83,97	77,88
Capaian Program Dan Kegiatan		58.004.164.608	50.462.595.936	87,61	87,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 102
Capaian Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.121.457.857	13.885.052.875	99,89	86,13
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.150.000	17.052.000	100,00	99,43
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.823.548.719	13.629.737.622	100,00	86,14
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.079.138	155.621.943	92,13	85,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.552.000	26.136.842	91,29	73,52
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.128.000	56.504.468	99,09	90,95
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	1.319.934.640	894.581.422	71,85	67,77
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	611.713.900	443.586.581	74,44	72,52

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	375.713.140	315.381.333	91,09	83,94
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	188.385.200	25.418.000	15,36	13,49
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	144.122.400	110.195.508	84,58	76,46
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.356.419.120	1.167.895.552	89,86	86,10
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.356.419.120	1.167.895.552	89,86	86,10
Capaian Program Dan Kegiatan		18.797.811.617	15.947.529.849	97,20	84,84

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, 2024

26. Inspektorat

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 103
Capaian Program dan kegiatan Inspektorat

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.388.990.225	5.207.363.264	99,64	96,63
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.200.000	11.200.000	100,00	100,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.683.982.825	4.579.483.367	99,94	97,77
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.690.900	279.076.392	97,78	87,02
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.816.500	281.677.650	97,03	94,26
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.300.000	55.925.855	99,60	75,27
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.504.631.690	1.290.351.000	93,99	85,76
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	218.312.700	181.038.500	90,03	82,93
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.286.318.990	1.109.312.500	94,66	86,24
6.01.03	Program Perumusan	479.074.110	380.052.726	87,98	79,33

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	204.669.510	145.616.989	72,58	71,15
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	274.404.600	234.435.737	99,46	85,43
Capaian Program Dan Kegiatan		7.372.696.025	6.877.766.990	97,73	93,29

Sumber : Inspektorat, 2024

27. Kecamatan

Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 104
Capaian Program dan kegiatan 4 Kecamatan

Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kecamatan Tarakan Tengah					
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.636.673.482	9.076.548.416	99,63	94,19
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.500.000	24.360.000	100,00	99,43
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.876.614.917	8.431.025.974	99,97	94,98
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.117.840	98.770.248	99,60	95,78
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.299.686	109.399.400	93,83	90,19
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.566.279	55.154.000	100,00	97,50
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.574.760	357.838.794	94,51	78,72
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.049.563.080	3.909.620.047	99,96	96,54
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.793.163.080	1.764.228.547	99,90	98,39
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.256.400.000	2.145.391.500	100,00	95,08



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	29.956.330	29.556.000	98,66	98,66
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.956.330	4.956.000	100,00	99,99
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.000.000	24.600.000	98,40	98,40
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	296.699.840	255.842.020	86,70	86,23
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	296.699.840	255.842.020	86,70	86,23
	Capaian Program Dan Kegiatan	14.012.892.732	13.271.566.483	99,45	94,71
Kecamatan Tarakan Barat					
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.056.013.691	9.762.850.628	97,20	97,08
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.300.000	25.740.000	100,00	94,29
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.395.341.128	9.134.012.932	97,22	97,22
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.169.450	87.565.813	96,13	88,30
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.165.925	109.200.103	94,47	93,20
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.817.188	69.565.000	100,00	98,23
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.220.000	336.766.780	97,27	97,27
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.510.359.430	3.364.419.761	96,12	95,84
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.090.359.430	1.054.121.401	97,56	96,68
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.420.000.000	2.310.298.360	95,47	95,47
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	29.992.660	29.992.000	100,00	100,00



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.992.660	4.992.000	100,00	99,99
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	234.999.640	232.199.200	99,12	98,81
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	234.999.640	232.199.200	99,12	98,81
	Capaian Program Dan Kegiatan	13.831.365.421	13.389.461.589	96,97	96,81
Kecamatan Tarakan Timur					
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.168.841.897	11.772.943.228	97,16	96,75
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.300.000	34.104.000	100,00	99,43
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.512.560.835	11.151.521.407	97,00	96,86
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.965.282	97.039.105	100,00	90,72
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.754.500	70.086.350	100,00	83,68
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.261.280	420.192.366	100,00	97,43
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.597.556.480	3.426.530.790	95,59	95,25
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.714.756.480	1.665.302.040	97,68	97,12
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.882.800.000	1.761.228.750	93,68	93,54
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	39.976.330	38.320.000	97,61	95,86
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.976.330	4.020.000	80,78	80,78



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	35.000.000	34.300.000	100,00	98,00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	304.666.414	300.132.387	99,53	98,51
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	304.666.414	300.132.387	99,53	98,51
	Capaian Program Dan Kegiatan	16.111.041.121	15.537.926.405	96,85	96,44
Kecamatan Tarakan Utara					
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.118.330.546	6.609.214.417	92,91	92,85
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.550.000	18.444.000	100,00	99,43
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.761.870.644	6.284.985.952	92,95	92,95
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.628.810	51.546.938	91,28	91,03
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.628.250	54.254.690	94,70	88,04
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.652.842	199.982.837	91,05	91,04
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.547.467.960	1.414.201.770	94,55	91,39
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	649.967.960	636.181.770	98,26	97,88
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	897.500.000	778.020.000	91,87	86,69
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	19.988.440	19.984.990	100,00	99,98
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.988.440	4.988.440	100,00	100,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.000.000	14.996.550	100,00	99,98
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	208.999.450	193.766.920	92,71	92,71



Kode	Program/Kegiatan	Biaya Dpa	Realisasi Keuangan	Realisasi	
				Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	208.999.450	193.766.920	92,71	92,71
	Capaian Program Dan Kegiatan	8.894.786.396	8.237.168.097	93,21	92,61

Sumber : Kecamatan Kota Tarakan, 2024

BAB III

CAPAIAN KINERJA URUSAN TUGAS PEMBANTUAN



III. BAB III

CAPAIAN KINERJA URUSAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pemberian tugas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Urusan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Maksud diadakan tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah adalah agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah.

Penyelenggaraan atas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Selain itu, Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Tarakan tidak mendapatkan tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota sehingga tidak terdapat pelaksanaan kegiatan

Adapun matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat adalah sebagai berikut.

Tabel III. 2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Tarakan

NO	Kementerian / LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tidak ada										

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, 2024



3.2 Tugas Pembantuan Provinsi

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Tarakan tidak mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga tidak terdapat pelaksanaan kegiatan.

3.3 Permasalahan Dan Kendala

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan pada tahun-tahun sebelumnya tidak dijumpai masalah yang cukup berarti

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada kendala yang berarti. Namun, Dinas Koperasi, UMK dan Perdagangan Kota Tarakan selaku penerima Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tetap harus mengikuti mekanisme proses pelaksanaan hingga proses pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, sehingga kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan dalam hal ini Dinas Koperasi, UMK dan Perdagangan Kota Tarakan dapat memperoleh hasil yang optimal.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN



IV. BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Bidang Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan seluruh tingkatan pemerintahan termasuk pemerintah Kota Tarakan dan merupakan program prioritas. Untuk itu perlu kiranya diberikan ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal, sehingga kualitas pelayanan urusan wajib ini bisa dilaksanakan dengan baik.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan menjadi 2 lingkup penyelenggara baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mengingat banyaknya jenis pelayanan Pendidikan, maka perlu kiranya ditentukan jenis pelayanan dasar urusan Pendidikan pada tingkat Kota Tarakan. Jenis pelayanan dasar urusan Pendidikan yang telah ditentukan sesuai dengan RPJMD Kota Tarakan bisa diketahui pada tabel dibawah ini

Tabel IV. 1
Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	
(1)	(2)	(3)	
1	Pendidikan Dasar	1	<i>Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar</i>
		2	<i>Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD</i>
2	Pendidikan Kesetaraan	3	<i>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan</i>

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	
(1)	(2)	(3)	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	4	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD

Sumber : Dinas Pendidikan 2024, diolah

Dari Tabel diatas khusus untuk urusan wajib pelayanan dasar yang telah ditentukan dan tertuang pada RPJMD Kota Tarakan, terdapat 3 jenis pelayanan dasar dengan 4 indikator sasaran, sehingga diharapkan kualitas Pendidikan masyarakat dapat terus ditingkatkan dan merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kota Tarakan. Dan semua jenis layanan harus mencapai target yang telah ditentukan.

Adapun jenis pelayanan yang ditentukan adan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Indikator Sasaran berupa Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun, Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan Indikator Sasaran berupa Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun dan Angka Partisippasi Sekolah 13-15 Tahun dan Jenid Layanan Pendidikan Kesetaraan dengan Indikator Sasaran berupa Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan adalah 100% (seratus persen).

4.1.3 Realisasi

Sepanjang tahun 2023 dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan, maka realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan dan dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel IV. 2
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan Dasar	1 Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	29.727	25.895	87,109
		2 Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan menengah	14.471	11.664	80,602
2	Pendidikan Kesetaraan	3 Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	9.914	703	7,090
3	Pendidikan Anak Usia Dini	4 Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	9.437	4.463	47,292
Rata Rata Capaian SPM Bidang Pendidikan					55,523

Sumber : Dinas Pendidikan 2024, diolah

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 tahun realisasinya sebesar 87,109 persen. Hal ini dikarenakan dikarenakan mengalami penurunan minat siswa 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan. Ketidacapaian target tersebut atas terjadi akibat banyaknya kelurahan yang tingkat partisipasi anak umur 13 - 15 tahun sangat rendah diantaranya di kelurahan Juata Permai yang Tingkat partisipasi sekolah hanya mencapai 47,02 persen, kelurahan Selumit Pantai Tingkat partisipasi sekolah hanya mencapai

52,13 persen, kelurahan Karang Rejo Tingkat partisipasi sekolah hanya mencapai 55,04 persen, dan keurahan Karang Balik Tingkat partisipasi sekolah hanya mencapai 66,91 persen.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut;

1. Validasi terhadap penerima bantuan memerlukan waktu yang cukup lama dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik;
2. Sekolah terkadang lambat menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran;
3. Adanya revisi anggaran menyebabkan terkendalanya penyaluran bantuan;
4. Pengadaan Perlengkapan Siswa terhambat di karenakan Regulasi yang belum ada
5. Faktor sosial ekonomi menyebabkan masih terjadinya peserta didik putus sekolah karna membantu orang tuanya bekerja mencari nafkah;

Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jenjang SD/MI adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan dan memaksimalkan pemberian bantuan pendidikan melalui APBD;
2. Melakukan koordinasi dan validasi data sampai kepada satuan pendidikan agar penyaluran dan penggunaan dana BOS tepat waktu tepat sasaran dan tepat guna; dan
3. Menerapkan sistem pendataan terpadu melalui pemanfaatan aplikasi dan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antara dinas pendidikan dan sekolah untuk verifikasi data satuan SD/MI.

Berikut ini dapat dilihat pada tabel persentase angka partisipasi siswa 7-12 Tahun per kecamatan:

Tabel IV. 3
Angka Partisipasi Siswa 7 - 12 tahun Kota Tarakan Tahun 2023

No	Kecama tan	Kelurahan	Angka Partisipasi Sekolah			Jumlah Penduduk			Persen
			7 - 12 Tahun			7 - 12 Tahun			
			L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tarakan Barat	Karang Anyar	1.859	1.695	3.554	1.572	1.466	3.038	85,48
		Karang Rejo	553	479	1.032	294	274	568	55,04
		Karang Anyar Pantai	1.373	1.326	2.699	921	914	1.835	67,99
		Karang Balik	487	477	964	323	322	645	66,91
		Karang Harapan	811	774	1.585	1.149	1.011	2.160	136,28
2	Tarakan Tengah	Kampung 1 Skip	801	713	1.514	617	551	1.168	77,15
		Pamusian	851	828	1.679	898	862	1.760	104,82
		Sebengkok	1.012	927	1.939	908	846	1.754	90,46
		Selumit	402	363	765	577	547	1.124	146,93
		Selumit Pantai	1.089	1.071	2.160	562	564	1.126	52,13
3	Tarakan Timur	Lingkas Ujung	700	705	1.405	828	814	1.642	116,87
		Gunung Lingkas	554	523	1.077	416	409	825	76,60
		Kampung Empat	306	304	610	599	577	1.176	192,79
		Kampung Enam	429	376	805	392	367	759	94,29
		Mamburungan	783	653	1.436	739	674	1.413	98,40
		Pantai Amal	840	768	1.608	594	599	1.193	74,19
		Mamburungan Timur	313	285	598	292	244	536	89,63
4	Tarakan Utara	Juata Laut	1.089	1.018	2.107	926	872	1.798	85,33
		Juata Permai	703	671	1.374	314	332	646	47,02
		Juata Kerikil	420	396	816	386	343	729	89,34
Jumlah Seluruhnya			15.375	14.352	29.727	13.307	12.588	25.895	87,11

Sumber : Dinas Pendidikan 2024, diolah

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angka Partisipasi Siswa 13 - 15 tahun realisasinya sebesar 80,602 persen. Hal tersebut dikarenakan pada usia 13-15 tahun banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di Madrasah atau Pesantren yang berada di kota Tarakan maupun di luar kota Tarakan. Ketidacapaian target tersebut atas terjadi akibat banyaknya kelurahan yang tingkat partisipasi anak umur 13 - 15 tahun sangat rendah diantaranya di kelurahan Gunung Lingkas yang Tingkat partisipasi sekolah hanya mencapai 5,159 persen, kelurahan Lingkas Ujung Tingkat partisipasi sekolah hanya mencapai 5,857 persen, kelurahan Karang Anyar Tingkat partisipasi sekolah hanya

mencapai 6,766 persen, kelurahan Kampung 1 Skip Tingkat partisipasi sekolah hanya mencapai 9,218 persen, kelurahan Karang Anyar Pantai Tingkat partisipasi sekolah hanya mencapai 9,992 persen, kelurahan Karang Rejo partisipasi sekolah hanya mencapai 11,247 persen, kelurahan Juata Laut partisipasi sekolah hanya mencapai 8,998 persen, dan kelurahan Juata Permai partisipasi sekolah hanya mencapai 11,888 persen.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut;

1. Validasi terhadap penerima bantuan memerlukan waktu yang cukup lama dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik;
2. Sekolah terkadang lambat menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran;
3. Adanya revisi anggaran menyebabkan terkendalanya penyaluran bantuan;
4. Pengadaan Perlengkapan Siswa terhambat di karenakan Regulasi yang belum ada
5. Faktor sosial ekonomi menyebabkan masih terjadinya peserta didik putus sekolah karna membantu orang tuanya bekerja mencari nafkah;

Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jenjang SMP dan MTs adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan dan memaksimalkan pemberian bantuan pendidikan melalui APBD;
2. Melakukan koordinasi dan validasi data sampai kepada satuan pendidikan agar penyaluran dan penggunaan dana BOS tepat waktu tepat sasaran dan tepat guna; dan

Menerapkan sistem pendataan terpadu melalui pemanfaatan aplikasi dan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antara dinas pendidikan dan sekolah untuk verifikasi data satuan SMP dan MTs.

Berikut ini dapat dilihat pada tabel persentase angka partisipasi

siswa per kecamatan:

Tabel IV. 4
Angka Partisipasi Siswa 13 - 15 tahun Kota Tarakan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelurahan	Angka Partisipasi Sekolah			Jumlah Penduduk			Persen
			13-15 Tahun			13-15 Tahun			
			L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tarakan Barat	Karang Anyar	59	55	114	858	827	1.685	6,766
		Karang Rejo	29	26	55	251	238	489	11,247
		Karang Anyar Pantai	63	59	122	613	608	1.221	9,992
		Karang Balik	488	540	1028	316	347	663	155,053
		Karang Harapan	183	135	318	358	358	716	44,413
2	Tarakan Tengah	Kampung 1 Skip	35	31	66	391	325	716	9,218
		Pamusian	678	833	1511	451	411	862	175,290
		Sebengkok	42	27	69	475	437	912	7,566
		Selumit	461	454	915	204	202	406	225,369
		Selumit Pantai	57	53	110	571	486	1.057	10,407
3	Tarakan Timur	Lingkas Ujung	21	20	41	359	341	700	5,857
		Gunung Lingkas	17	9	26	262	242	504	5,159
		Kampung Empat	550	521	1071	183	157	340	315,000
		Kampung Enam	77	53	130	245	219	464	28,017
		Mamburungan	279	211	490	340	290	630	77,778
		Pantai Amal	46	41	87	313	315	628	13,854
		Mamburungan Timur	66	45	111	147	143	290	38,276
4	Tarakan Utara	Juata Laut	47	41	88	504	474	978	8,998
		Juata Permai	51	34	85	369	346	715	11,888
		Juata Kerikil	56	27	83	249	246	495	16,768
Jumlah Seluruhnya			3305	3215	6520	7459	7012	14471	45,056

Sumber : Dinas Pendidikan 2024, diolah

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angka Partisipasi siswa 7–18 tahun (kesetaraan) realisasinya sebesar 7,090 persen. Hal ini lebih disebabkan semua kelurahan di Kota Tarakan yang seharusnya mengikuti kesetaraan tidak berminat mengingat sebagian besar mereka lebih suka bekerja membantu orang tua untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kelurahan yang pertisipasinya tidak ada yaitu kelurahan Karang Rejo , Karang Balik, Kampung I Skip, dan Pamusian yang rata-rata mereka ikut membantu

orang tuanya sebagai nelayan, selain itu pada kenyataannya masih banyak penduduk dengan kategori prasejahtera.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lokasi tempat tinggal warga belajar saling berjauhan sehingga sulit mendapatkan satu kelompok sebanyak 40 orang warga belajar;
2. Latar belakang sosial ekonomi warga belajar lemah sehingga frekuensi kehadirannya sangat rendah;
3. Warga belajar menjadi pencari nafkah keluarga, mereka hanya belajar kalau waktu mengizinkan;
4. Motivasi belajar rendah. mereka berpendapat tanpa belajar pun mereka sudah mendapatkan uang.
5. PKBM dan SKB belum memiliki gedung sendiri, tetapi masih memanfaatkan Gedung sekolah.
6. Fasilitas belajar kurang memadai.

Berikut ini dapat dilihat pada tabel jumlah angka partisipasi sekolah per kecamatan:

Tabel IV. 5
Angka Partisipasi Siswa 7 - 18 tahun Kota Tarakan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelurahan	Peserta Didi k Kesetaraan									Jumlah Penduduk			Persen
			7 -12 tahun			13-15 tahun			16 -18 tahun			7-18 Tahun			
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	TARAKAN BARAT	Karang Anyar	8	5	13	3	1	4	17	5	22	690	667	1357	2,87
		Karang Rejo		0	0	0	0	0	0	0	0	183	175	358	0,00
		Karang Anyar Pantai	0	0	0	0	3	3	5	3	8	440	451	891	1,23
		Karang Balik		0	0	0	0	0	0	0	0	237	194	431	0,00
		Karang Harapan	0	1	1	4	2	6	31	17	48	297	299	596	9,23
2	TARAKAN TENGAH	Kampung I Skip		0	0	0	0	0	0	0	0	286	250	536	0,00
		Pamusian		0	0	0	0	0	0	0	0	297	285	582	0,00
		Sebengkong	11	6	17	17	13	30	37	21	58	360	362	722	14,54
		Selumit	0	2	2	3	0	3	1	0	1	174	136	310	1,94
		Selumit Pantai		0	0	0	0	0	0	0	0	405	352	757	0,00
3	TARAKAN TIMUR	Lingkas Ujung	25	9	34	30	23	53	46	42	88	282	226	508	34,45
		Gunung		0	0	0	0	0	0	0	0	191	203	394	0,00

No	Kecamatan	Kelurahan	Peserta Didi k Kesetaraan									Jumlah Penduduk			Persen
			7 -12 tahun			13-15 tahun			16 -18 tahun			7-18 Tahun			
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Lingkas													
		Kampung Empat	3	1	4	2	5	7	32	19	51	145	127	272	22,79
		Kampung Enam		0	0	0	0	0	0	0	0	201	186	387	0,00
		Mamburungan	3	5	8	14	7	21	36	15	51	258	232	490	16,33
		Pantai Amal	3	4	7	6	2	8	16	9	25	189	208	397	10,08
		Mamburungan Timur		0	0	0	0	0	0	0	0	85	89	174	0,00
4	TARAKAN UTARA	Juata Laut	1	0	1	3	0	3	15	16	31	372	342	714	4,90
		Juata Permai	0	1	1	7	1	8	5	9	14	310	282	592	3,89
		Juata Kerikil	2	2	4	4	10	14	40	14	54	175	148	323	22,29
Jumlah Seluruhnya			56	36	92	93	67	160	281	170	451	5.139	4775	9.914	7,090

Sumber : Dinas Pendidikan 2023, diolah

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angka Partisipasi Sekolah 5 - 6 tahun realisasinya sebesar 47,292 persen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat anak untuk bersekolah, dimana angka partisipasi siswa disemua kelurahan yang ada tingkat partisipasinya kurang dari 50 persen seperti Karang Anyar, Karang Harapan, Karang Rejo, Selumit, Selumit Pantai, Pantai Amal, Juata Laut, dan Juata Permai.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah satuan PAUD sangat banyak dan sebagian besar dimiliki oleh masyarakat, sehingga bangunan gedung yang dimiliki masih sebagian belum permanen dan tidak sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP);
2. Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD sebagian tidak sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
3. Jumlah satuan PAUD sangat banyak dan sebagian besar dimiliki oleh masyarakat. sehingga pendataan harus dilakukan lebih mendalam agar validitas data penerima bantuan pendidikan dapat terpenuhi dan tepat sasaran;

Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan akses

masyarakat terhadap PAUD

adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pendirian PAUD di berbagai lokasi dalam rangka pemenuhan satu kelurahan satu PAUD sebagai langkah pemerataan dan perluasan akses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan PAUD; dan
2. Menerapkan sistem pendataan terpadu melalui pemanfaatan aplikasi dan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan sekolah untuk verifikasi data satuan PAUD;

Berikut ini dapat dilihat pada tabel persentase angka partisipasi siswa per kecamatan:

Tabel IV. 6
Angka Partisipasi Siswa 5 - 6 tahun Kota Tarakan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelurahan	Angka Partisipasi Sekolah			Jumlah Penduduk			Persen
			5-6 Tahun			5-6 Tahun			
			L	P	Jml	L	P	Jml	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tarakan Barat	Karang Anyar	414	430	844	545	587	1132	74,56
		Karang Anyar Pantai	89	101	190	510	427	937	20,28
		Karang Balik	75	75	150	132	127	259	57,92
		Karang Harapan	43	39	82	248	252	500	16,40
		Karang Rejo	38	36	74	157	154	311	23,79
2	Tarakan Tengah	Kampung Satu Skip	212	158	370	273	224	497	74,45
		Pamusian	261	220	481	248	226	474	101,48
		Sebengkok	138	173	311	310	292	602	51,66
		Selumit	25	22	47	109	111	220	21,36
		Selumit Pantai	84	91	175	360	380	740	23,65
3	Tarakan Timur	Gunung Lingkas	69	70	139	186	148	334	41,62
		Kampung Empat	50	61	111	91	102	193	57,51
		Kampung Enam	59	86	145	111	120	231	62,77
		Lingkas Ujung	99	106	205	237	242	479	42,80
		Mamburungan	102	103	205	252	233	485	42,27
		Mamburungan Timur	89	69	158	104	81	185	85,41
		Pantai Amal	104	89	193	308	216	524	36,83
4	Tarakan Utara	Juata Kerikil	120	106	229	133	143	276	82,97
		Juata Laut	95	77	172	329	298	627	27,43
		Juata Permai	93	89	182	215	216	431	42,23

No	Kecamatan	Kelurahan	Angka Partisipasi Sekolah			Jumlah Penduduk			Persen
			5-6 Tahun			5-6 Tahun			
			L	P	Jml	L	P	Jml	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah Seluruhnya			2259	2201	4463	4858	4579	9437	47,29

Sumber : Dinas Pendidikan 2024, diolah

4.1.4 Alokasi Anggaran

A. Pendidikan Dasar

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pencapaian SPM urusan pendidikan pada jenis pelayanan pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel IV. 7

Alokasi Anggaran pada Jenis Layanan Pendidikan Dasar

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	4.000.000.000	3.987.774.900	99,69%
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	350.000.000	397.805.000	113,66%
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.100.596.950	1.990.819.000	94,77%
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	292.799.100	157.142.000	53,67%
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	559.725.000	267.195.000	47,74%
6	Pengadaan Mebel Sekolah	499.500.000	491.400.000	98,38%
7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	175.000.000	174.900.000	99,94%
8	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	250.000.000	447.045.500	178,82%
9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.860.000.000	1.796.340.000	96,58%
10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	67.166.200	29.308.758	43,64%
11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	53.622.140	68.518.005	127,78%
12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	71.667.600	45.110.680	62,94%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	39.431.877.010	37.662.276.655	95,51%
Jumlah		49.711.954.000	47.515.635.498	95,58
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	86.045.594.812	57.852.909.587	67,24%
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.528.230.000	1.517.536.100	99,30%
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	296.329.000	294.000.000	99,21%
4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	618.216.000	615.000.000	99,48%
5	Pembangunan Laboratorium	2.055.399.000	2.042.736.000	99,38%
6	Pembangunan Kantin Sekolah	100.000.000	99.331.000	99,33%
7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	486.866.000	482.887.000	99,18%
8	Pengadaan Mebel Sekolah	539.220.000	518.440.000	96,15%
9	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	274.984.630	265.020.000	96,38%
10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.477.836.880	1.340.370.000	90,70%
11	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	67.163.350	9.703.000	14,45%
12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	149.967.280	189.860.239	126,60%
13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	49.896.090	21.858.680	43,81%
14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	22.598.935.082	20.612.992.125	91,21%
Jumlah		116.288.638.124	85.862.643.731	73,84

Sumber : Dinas Pendidikan 2024, diolah

Program Program pengeloan pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah menengah pertama merupakan program yang dialokasikan untuk mendukung indikator SPM Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang terlihat realisasi anggarannya capaiannya masing-masing 95,58 persen dan 73,84 persen. Beberapa kegiatan yang capaiannya dibawah 60 persen seperti Rehabilitasi

Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

Langkah Antisipasi yang dapat dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan validasi penenma bantuan melalui sekolah sehingga diharapkan data pokok pendidikan (DAPODIK) sehingga bantuan yang di berikan tepat sasaran;
2. Mengoptimalkan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018.

B. Pendidikan Kesetaraan

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pencapaian SPM urusan pendidikan pada jenis pelayanan pendidikan kesetaraan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel IV. 8
Alokasi Anggaran pada Jenis Layanan
Pendidikan Kesetaraan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal /Kesetaraan	59.921.460	33.876.218	56,53%
2	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	49.999.640	44.559.865	89,12%
3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal /Kesetaraan	2.242.409.972	2.209.206.869	98,52%
Jumlah		2.352.331.072	2.287.642.952	97,25

Sumber : Dinas Pendidikan 2024, diolah

Dilihat dari alokasi anggaran, maka realisasi capaian untuk layanan pendidikan kesetaraan sudah sangat baik dalam artian semua kegiatan yang direncanakan sudah terlaksana dengan capain 97,25 persen.

Namun output yang dihasilkan masih belum maksimal yang dikarenakan motivasi masyarakat mengikuti pendidikan kesetaraan masih sangat rendah karena kondisi ekonomi dan mereka lebih prioritas bekerja membantu perekonomian keluarga.

Langkah Antisipasi yang dapat dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya PKBM di setiap kecamatan atau sekitar 13 PKBM dan 1 SKB di Kota Tarakan,
2. Program Pendidikan Keluarga,
3. Pengembangan Budaya Baca Masyarakat.

C. Pendidikan Anak Usia Dini

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pencapaian SPM urusan pendidikan pada jenis pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel IV. 9
Alokasi Anggaran pada Jenis Layanan
Pendidikan Anak Usia Dini

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	154.603.400	153.552.000	99,32%
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	435.584.600	432.636.000	99,32%
3	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	100.000.000	100.000.000	100,00%
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	232.000.000	232.000.000	100,00%
5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.841.122.000	3.800.646.628	98,95%
Jumlah		4.763.310.000	4.718.834.628	99,07

Sumber : Dinas Pendidikan 2024, diolah

Dilihat dari alokasi anggaran, maka realisasi capaian untuk layanan pendidikan kesetaraan sudah sangat baik dalam artian semua kegiatan yang direncanakan sudah terlaksana dengan capaian 99,07 persen. Namun output yang dihasilkan masih belum maksimal yang

dikarenakan masyarakat belum menyadari pentingnya pendidikan tingkat PAUD atau TK dan mereka menganggap anak usia dini dapat saja atau lebih baik dididik dirumah oleh orang tua.

Langkah Antisipasi yang dapat dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya serta pembenan bantuan peralatan pendidikan;
2. Pemutakhiran data pokok pendidikan dan database lainnya, yang digunakan sebagai acuan dalam menyalurkan bantuan pendidikan;
3. Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk membantu operasional lembaga PAUD. meringankan beban biaya bagi masyarakat dalam mengikuti layanan PAUD yang berkualitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan dan pengembangan PAUD;
4. Mengoptimalkan pemenuhan SPM PAUD berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018.

4.1.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan kedinasan didukung oleh tenaga struktural maupun fungsional dan tentunya dengan tingkat pendidikan yang berbeda- beda dan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV. 10
Dukungan Personil SPM Bidang Pendidikan

Status Kepegawaian	Gol /Ruang	Kepala Dinas	Bidang				UPT SKB	Pengawas / Penilik	Total
			Sek	PAUD & Non Formal	Pend. Dasar	Ketenagaan dan Saprass			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. Aparatur Slpil Negara									
1. Pembina Utama Madya	IVd								
2 Pembina Utama Muda	IV/c								
3 Pembina Tk 1	IV/b							13	13
4 Pembina	IV/a	1	1	1			1	6	10
5 Penata Tk. 1	III/d		2	2	3	4		3	14

Status Kepegawaian	Gol /Ruang	Kepala Dinas	Bidang				UPT SKB	Pengawas / Penilik	Total
			Sek	PAUD & Non Formal	Pend. Dasar	Ketenagaan dan Saprass			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6 Penata	III/c		3		1	1		3	8
7 Penata Muda Tk 1	III/b		1	1	1	1	1		5
8 Penata Muda	III/a		4	2	2	1	1		10
9 Pengatur Tk 1	II/d		2	1	1	1			5
10 Pengatur	II/c								
11. Pengatur Muda Tk 1	II/b		2						2
12 PengaturMuda	II/a								
13 Juru Tk. I	I/d								
14. Juru	I/c								
15. Juru Muda Tk I	I/b								
16 Juru Muda	I/a								
B Tenaga Kontrak			9	1		2			12
Jumlah		1	24	8	8	10	3	25	79

Sumber : Dinas Pendidikan 2024, diolah

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi pada Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 11
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumpulan Data	Data Kualitas Hasil Belajar dan Data Kualilas Lingkungan Belajar tidak dilakukukan disebabkan Tim Penerapan SPM dan OPD pengampu belum sepenuhnya melaksanakan penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Teknis Kementerian masing-masing, sehingga tahapan dalam penerapan SPM belum dilakukan secara maksimal dan kurangnya pemahaman terhadap penerapan SPM.	1. Tim Penerapan SPM Daerah Kota Tarakan agar mengoordinasikan rencana aksi Penerpaan SPM dalam bentuk Peraturan Walikota, mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik, mengoordinasikan pemantuan dan evaluasi SPM daerah kabupaten /kota dan melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada pemakilan masyarakat sebagai penerima manfaat

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Perhitungan Kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satuan PAUD sangat banyak dan sebagian besar dimiliki oleh masyarakat, 2. Validasi terhadap penerima bantuan memerlukan waktu yang cukup lama dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik; 3. Perhitungan Kebutuhan Pelayanan Dasar Minimal yang belum memadai karena tidak didukung oleh pendataan secara jelas, bersifat asumsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sistem pendataan terpadu melalui pemanfaatan aplikasi dan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antara dinas pendidikan dan sekolah untuk verifikasi data satuan PAUD 2. Mengoptimalkan validasi penenma bantuan melalui sekolah sehingga diharapkan data pokok pendidikan (DAPODIK) sehingga bantuan yang di berikan tepat sasaran;
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Rencana pemenuhan SPM pendidikan dan kerangka pendanaan. Data tersebut terdiri dari program, outcome, kegiatan, sub kegiatan, output, sasaran jumlah sasaran pemenuhan, alokasi anggaran, sumber dana, target kinerja program pemenuhan pelayanan dasar pendidikan disesuaikan dengan skala prioritas.	Melaksanakan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran
4.	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurangnya pemahaman tentang SPM Pendidikan Dasar pada jajaran pendidikan; 2. kurangnya komitmen dari guru, kepala sekolah dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya memenuhi SPM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia 2. Komitmen seluruh sekolah dalam menjalankan SPM

Sumber : Dinas Pendidikan 2024, diolah

4.2 Urusan Kesehatan

Secara umum Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan 2019- 2024 yang telah ditetapkan telah dilaksanakan sesuai sasaran dan indikator. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas kesehatan Kota Tarakan sebanyak 3 sasaran.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Mengingat kondisi Kesehatan merupakan hal yang utama dan berdampak pada semua aspek, maka ditetapkan 12 jenis pelayanan dasar Kesehatan dengan 12 Indikator SPM seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel IV. 12
Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM
(1)	(2)	(3)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i>
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan</i>
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i>
4	Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan</i>
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15 – 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i>
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i>
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	<i>Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	<i>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan layanan kesehatan</i>
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolusis	<i>Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan layanan TBC sesuai standar</i>

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM
(1)	(2)	(3)
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan	<i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>

Sumber : Dinas Kesehatan 2024, diolah

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan adalah 100 (seratus persen).

4.2.3 Realisasi

Sepanjang tahun 2023 dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan, maka realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel IV. 13
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capain (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i>	4.877	5.000	97,54
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan</i>	4.800	4.770	99,37
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i>	4.760	4.627	97,21
4	Pelayanan Kesehatan Balita	<i>umlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	10.000	10.000	100,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capain (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	38.743	33.362	86,11
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15 – 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i>	47.762	60.000	79,6
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i>	7.504	7.504	100,00
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	12.238	26.426	46,31
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<i>Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	3.588	5.080	70,63
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	<i>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	345	441	78,23
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuber kulosis	<i>Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan layanan TBC sesuai standar</i>	7601	6755	112,52
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV	<i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>	6578	6578	100,00
Rata Rata Capaian SPM Kesehatan					88,96

Sumber : Dinas Kesehatan 2024, diolah

Rata-rata capaian SPM kesehatan sebesar 88,96 persen, dengan capaian tertinggi adalah Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuber

kulosis sebesar 112.52 persen, hal ini disebabkan Jumlah Penderita TBC yang mendapatkan pelayanan Kesehatan melebihi jumlah orang terduga TBC

Lokasi Puskesmas	Jumlah Penderita TBC yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita TBC	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Karang Rejo	1360	1911	71,17
Juata	759	1289	58,88
Sebengkok	876	1155	75,84
Gunung Lingkas	1179	1348	87,46
Pantai Amal	297	284	104,58
Mamburungan	620	768	80,73
RSU Kota Tarakan	274	0	0
RSAL Ilyas Tarakan	354	0	0
RSUD dr. H. Yusuf SK.	1247	0	0
RS Pertamina Tarakan	159	0	0
RS Carsa	15	0	0
RS Bhayangkara	52	0	0
Lapas Kelas II a Tarakan	409	0	0
Total/Persentase	7601	6755	112,52

Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar 100,00 persen

Lokasi Puskesmas	Jumlah Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas yang mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Karang Rejo	2580	2778	92,87
Mamburungan	620	708	87,57
Gunung Lingkas	1165	1181	98,65
Pantai Amal	124	204	60,78
Sebengkok	2617	2262	115,69
Juata	398	367	108,45
Total	7.504	7.504	100,00

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 100 persen.

Lokasi Puskesmas	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita di Kota Tarakan	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Karang Rejo	3702	2828	130,91
Juata	2225	1914	116,25

Lokasi Puskesmas	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita di Kota Tarakan	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sebengkok	1969	1699	115,89
Gunung Lingkas	919	1997	46,02
Pantai Amal	572	421	135,87
Mamburungan	613	1141	53,72
Total	10.000	10.000	100

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV sebesar 100,00 persen

Fasi lita Pelayanan Kesehatan	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang dilayani sesuai standar	Jumlah orang yang berisiko terinfeksi HIV	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Karang Rejo	2310	2074	111,38
Mamburungan	728	712	102,25
Ounung Lingkas	893	1274	70,09
Juata	858	1188	72,22
Pantai Amal	464	224	207,14
Sebengkok	728	1108	65,70
RSUD dr. H. Yusuf SK.	488	0	0,00
RS Pertamina Tarakan	112	0	0,00
RSAL Ilyas Tarakan	38	0	0,00
PMI	3	0	0,00
KKP	0	0	0,00
RS IJ Kota Tarakan	139	0	0,00
RS Bhayangkara	17	0	0,00
RS Carsa	5	0	0,00
Total / Persentase	6578	6578	100,00

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar 99,37 persen

Lokasi Puskesmas	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan	Jumlah Ibu Bersalin di Kota Tarakan	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Karang Rejo	1.396	1.357	102,87
Juata	792	916	86,46
Sebengkok	790	821	96,22
Gunung Lingkas	983	957	102,72
Pantai Amal	362	204	177,45
Mamburungan	447	545	82,02
Total	4.770	4.800	99,37

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 97,21 persen

Lokasi Puskesmas	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir di Kota Tarakan	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Karang Rejo	1332	1329	100,23
Juata	780	898	86,86
Sebengkok	751	803	93,52
Gunung Lingkas	980	998	98,2
Pantai Ama!	362	198	182,83
Mamburungan	422	534	79,03
Total	4.627	4.760	97,21

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar 97,54 persen

Lokasi Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil Kota Tarakan	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Karang Rejo	1.510	1.414	106,79
Juata	785	955	82,2
Sebengkok	792	855	92,63
Gunung Lingkas	954	998	95,59
Pantai Amal	276	210	131,34
Mamburungan	560	568	98,59
Total	4.877	5.000	97,54

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebesar 86,11 persen

Lokasi Puskesmas	Jumlah Anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Di Kota Tarakan	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Karang Rejo	4677	8474	55,19
Juata	8129	8379	97,02
Sebengkok	5205	5299	98,23
Gunung Lingkas	8071	8790	91,82
Pantai Amal	1333	1577	84,53
Mamburungan	5947	6224	95,55
Total	33.362	38.743	86,11

Pelayanan Orang Usia 15-59 Tahun Yang Mendapatkan Skrining sebesar 79,60 persen

Lokasi Puskesmas	Jumlah Orang Usia 15-59 Tahun Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Orang Usia 15-59 Tahun	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Karang Rejo	14.851	17.089	86,9
Mamburungan	3.977	6.683	59,51
Gunung Lingkas	6.175	12.060	51,2
Pantai Amal	4.313	2.338	184,47
Sebengkong	9.722	10.280	94,57
Juata	8.724	11.550	75,53
Total	47.762	60.000	79,6

Pelayanan Penderita ODGJ yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sebesar 78,23 persen

Lokasi Puskesmas	Jumlah Penderita ODGJ yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Jumlah Penderita ODGJ	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Karang Rejo	82	125	65,6
Juata	41	84	48,81
Sebengkong	75	75	100
Gunung Lingkas	92	88	104,55
Pantai Amal	16	19	84,21
Mamburungan	39	50	78
Total	345	441	78,23

Pelayanan Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sebesar 70,63 persen

Lokasi Puskesmas	Jumlah Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita DM	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Karang Rejo	1005	1460	68,84
Juata	667	953	69,99
Sebengkong	679	885	76,72
Gunung Lingkas	618	1029	60,06
Pantai Amal	249	192	129,69
Mamburungan	370	561	65,95
Total	3.588	5.080	70,63

Pelayanan Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan

Kesehatan sebesar 46,31 persen

Lokasi Puskesmas	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Karang Rejo	2975	7593	39,18
Mamburungan	2815	2919	96,44
Gunung Lingkas	3578	5353	66,84
Pantai Amal	618	996	62,05
Sebengkok	1553	4611	33,68
Juata	699	4954	14,11
Total	12.238	26.426	46,31

Ada beberapa pelayanan SPM kesehatan diatas yang sangat rendah yakni Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar 46,31 persen, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar 70,63 persen, dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar 78,23 persen. Meskipun dinas kesehatan telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi dan pembinaan kesehatan masyarakat, namun masih ada beberapa pelayanan SPM kesehatan tetap saja rendah seperti yang disebutkan diatas pada pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang hanya meminta pelayanan pada saat mereka merasakan tekanan darahnya naik atau tekanan darahnya turun sehingga banyak diantara mereka tidak melakukan pemeriksaan pada saat mereka menganggap kondisinya normal. Untuk pelayanan kesehatan pada usia produktif pada kenyataannya banyak yang melaksanakan pelayanan kesehatan, namun belum memenuhi standar yang ditetapkan dan sebagian pula tidak tercatat.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Untuk mencapai kinerja indikator SPM tersebut, maka diperlukan anggaran dan program kerja bagi dinas ini. Adapun Adapun program-program yang dianggarkan untuk pencapaian indikator kinerja SPM tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 14
Alokasi Anggaran pada Jenis Layanan Kesehatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggran	Realisasi	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	180.000.000	180.000.000	100,00%
2	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.831.537.400	1.869.747.585	102,09%
3	Pengadaan Obat, Vaksin	500.000.000	422.970.075	84,59%
4	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.473.425.600	309.498.399	21,01%
5	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	40.000.000	34.995.400	87,49%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	298.780.064	252.370.250	84,47%
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	70.800.000	51.682.500	73,00%
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.200.000	61310184,8	61,19%
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	311.559.660	216.541.660	69,50%
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	332.600.000	292.580.000	87,97%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	55.448.500	29.717.500	53,59%
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	106.094.920	70.130.280	66,10%
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34.999.980	18.589.000	53,11%
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	293.442.740	201.064.480	68,52%
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36.699.900	33.181.500	90,41%
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.153.412.000	31.650.000	1,47%
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	184.032.200	123.370.000	67,04%



Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggran	Realisasi	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	299.283.680	30.183.400	10,09%
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.765.246.570	489.084.440	17,69%
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	158.707.990	92.910.000	58,54%
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.039.342.670	845.110.200	81,31%
17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	293.580.820	193.398.690	65,88%
18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	250.263.700	81.400.000	32,53%
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	23.956.000	23.900.000	99,77%
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.750.000	2.950.000	78,67%
21	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.238.511.735	783.087.970	63,23%
22	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.418.974.200	12.135.954.209	97,72%
23	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.950.000	1.650.000	55,93%
24	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	77.737.340	77,74%
25	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.784.161.996	800.087.705	44,84%
26	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	632.591.670	582.781.428	92,13%
27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	330.266.240	397.060.372	120,22%
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	24.992.660	11.200.000	44,81%
29	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	40.506.200	12.684.500	31,31%
30	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	17.500.000	2.400.000	13,71%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggran	Realisasi	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	283.262.000	236.742.979	83,58%

Sumber : Dinas Kesehatan 2024, diolah

Dari semua alokasi anggaran dan pencapaian realisasi keuangan maupun realisasi fisik, perlu dilihat daya dorong masing-masing program terhadap pencapaian kinerja Standard Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Besarnya alokasi anggaran yang ditetapkan dianggap akan berpengaruh terhadap capaian SPM kesehatan, namun ada beberapa pelayanan yang capaiannya tinggi namun alokasi dan serapan anggarannya kecil, seperti Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dianggarkan hanya sebesar Rp 2.153.412.000 dan terealisasi hanya Rp 31.650.000 atau sebesar 1,47 persen, namun capaian SPMnya 100 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian pelayanan tidak menggunakan biaya rumah sakit atau puskesmas tapi menggunakan biaya sendiri.

Pada pengalokasian dan realisasi anggaran diatas ada juga yang pengalokasian anggaran kecil dan realisasi anggarannya tinggi namun capaiannya SPM kesehatan rendah, seperti Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi yang dialokasikan sebesar Rp 34.999.980 dan realisasinya sebesar Rp 18.589.000 atau sebesar 53,11 persen yang lebih dikarenakan perkiraan pembiayaan Penderita Hipertensi per-orang terlalu rendah sehingga kemampuan jumlah yang dilayani juga terbatas.

4.2.5 Dukungan Personil

Jumlah tenaga pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 380 orang, terdiri dari 78 orang tenaga PNS, 302 orang tenaga non PNS. Adapun rincian masing-masing ketenagaan yaitu berikut :

Tabel IV. 15
Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Tenaga		Dukungan Personil Pemenuhan SPM		Jumlah
			PNS	Non PNS	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Tenaga Medis		10	18	28
	a	Dokter Spesialis	6	8	14
	b	Dokter Umum	4	9	13
	c	Dokter Gigi	0	1	1
2	Tenaga Paramedis		23	136	159
	a	Perawat S1	2	13	15
	b	Perawat D3	14	87	101
	c	Perawat Gigi	3	1	4
	d	Bidan D4/S1	0	6	6
	e	Bidan D3	4	29	33
3	Tenaga Penunjang Medis		17	45	62
	a	Apoteker	2	5	7
	b	Asisten Apoteker	3	13	16
	c	Psikolog	0	0	0
	d	Analisis Kesehatan	3	7	10
	e	Radiografer	2	3	5
	f	Perekam Medik	1	4	5
	g	Nutrisisionis	1	2	3
	h	Teknik Elektromedik	0	1	1
	i	Fisio terapis	0	2	2
	j	Sanitarian	2	0	2
	k	Kesehatan Masyarakat	3	1	4
	l	Verifikator Medis	0	2	2
	m	CSSD	0	5	5
4	Tenaga Struktural		4	10	14
5	Tenaga Administrasi Umum		17	86	103

Sumber : Dinas Kesehatan 2024, diolah

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi pada Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 16
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumpulan Data	Pengumpulan data SPM dari Puskesmas Kecamatan ke Dinas Kesehatan masih dilakukan secara manual, sehingga untuk akumulasi masih terkendala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan pelaporan SPM bisa difasilitasi dengan menggunakan sistem informasi dengan Dinas kesehatan melakukan verifikasi dan validasi data. 2. Surat Edaran Wali Kota No 130.04/733PEM Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tarakan
		Banyaknya variabel data yang diminta	Sosialisasi variable data
2.	Perhitungan Kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kesulitan dalam menentukan rencana kebutuhan disesuaikan dengan rencana kontigensi 2. Belum disepakati Definisi Operasional setiap variabel data yang diminta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat anggaran untuk penanganan warga terdampak bencana sesuai dengan angka tahun sebelumnya, apabila ada kekurangan akan dipenuhi melalui anggaran BLUD 2. Koordinasi dan menyepakati Definisi Operasional 3. Surat Edaran Wali Kota No 130.04/733PEM Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tarakan

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Terdapat kesulitan dalam menentukan rencana kebutuhan disesuaikan dengan rencana kontigensi	Membuat anggaran untuk penanganan warga terdampak bencana sesuai dengan angka tahun sebelumnya, apabila ada kekurangan akan dipenuhi melalui anggaran BLUD
4.	Pelaksanaan	kunjungan pasien ke Layanan Kesehatan dan terbatasnya kunjungan langsung ke lapangan oleh petugas	Mengoptimalkan kunjungan investigasi kontak terhadap pasien yang memerlukan layanan

Sumber : Dinas Kesehatan 2024, diolah

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas :

- Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten kota;
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota;
- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

4.3.1 Pelayanan Dasar

Pada bidang pekerjaan ditetapkan 2 jenis pelayanan dasar Pekerjaan Umum dengan 2 Indikator SPM seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel IV. 17
Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM
(1)	(2)	(3)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah kumulatif rumah tangga masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2024, diolah

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah 100 (seratus persen).

4.3.3 Realisasi

Sepanjang tahun 2023 dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan, maka realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 18
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capain (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah kumulatif rumah tangga masyarakat yang mendapatkan akses ter hadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	249,96	246,885	98.77
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya	81.460	60.381	74,12
Rata-Rata Capaian SPM Urusan PU					86,445

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2024, diolah

Rata-rata Capaian SPM Pekerjaan Umum adalah 86,445 persen dan yang tertinggi adalah Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebesar 98.77 persen. Hal ini ditunjang oleh program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. Dalam program tersebut dilakukan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dengan target sejumlah 2500 pengadaan Sambungan Rumah (SR) dan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan sebesar 638 liter/detik.

Permasalahan yang dihadapi adalah Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan Peningkatan kualitas layanan air minum untuk masyarakat. Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan isu meningkatnya pelayanan air bersih adalah SPM air baku dan air minum sebab permasalahan air

bersih Kota Tarakan tidak hanya pada jangkauan pelayanan jaringan Sambungan Rumah (SR), tetapi juga pada ketersediaan air baku.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota Tarakan		Pelayanan Air Bersih PDAM			
				Sambungan Rumah (SR)		Persentase (%)	
		KK	Jiwa	KK/Unit	Jiwa	KK	Jiwa
A	Tarakan Barat	27.204	83.494	18.818	94.090	69.17	112.69
B	Tarakan Tengah	23.531	70.148	14.171	70.855	60.22	101.01
C	Tarakan Timur	19.402	60.982	9.013	45.065	46.45	73.90
D	Tarakan Utara	11.323	35.336	7.375	36.875	65.13	104.36
Total	= (A+B+C+D)	81.460	249.960	49.377	246.885	60.62	98.77

Berdasarkan tabel capaian pelayanan pengelolaan air limbah di Kota Tarakan, diketahui bahwa realisasi pada tahun 2023 adalah 74,12 persen dengan capaian 98,75 persen. Angka realisasi tersebut masih relatif jauh untuk mengejar target nasional sebesar 100%. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik disebutkan bahwa Inpres tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyakit bawaan air, menurunkan prevalensi dan mencegah terjadinya stunting, serta mengurangi laju pengambilan air tanah oleh masyarakat.

Pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kota Tarakan terdiri dari 2 macam, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dilakukan dengan mengolah air limbah di lokasi sumber kemudian lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sistem pengolahan lumpur tinja. Sementara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air

permukaan.

Sistem Pelayanan Air Limbah	Jumlah RT (capil 2023)	Jumlah Rumah Tangga yang hams dilayani	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani	Jumlah Rumah Tangga yang belum terlayani
SPALD-S < 25 jiwa/ Ha	53.361	53.361	38.149	15.212
> 25 jiwa/ Ha	27.053	27.053	21.628	5.425
JUMLAH A	80.414	80.414	59.777	20.637
SPALD-T	1.046	1.046	604	442
JUMLAH B	1.046	1.046	604	442
JUMLAH A + B	81.460	81.460	60.381	21.079
CAKUPAN PELAYANAN SANITASI 2023			74,123	

4.3.4 Alokasi Anggaran

Untuk memberikan standar pelayanan minimal mencapai 100 persen perlu dilaksanakan program yang langsung berpengaruh terhadap pencapaian SPM pada tahun 2023.

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Tabel IV. 19
Alokasi Anggaran pada Jenis Layanan
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.450.000.000	2.382.671.316	97,25%

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2024, diolah

Tingginya capaian SPM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan kecukupan alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang sangat tinggi yaitu sebesar 99,41 persen, yang berarti bahwa capaian SPM dikarenakan semua kegiatan yang mendukung SPM ini terlaksana.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Tabel IV. 20
Alokasi Anggaran pada Jenis Layanan Penyediaan Pelayanan
Pengolahan Air Limbah Domestik

Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	515.000.000	496.171.000	96,34%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	4.047.210.000	3.946.278.212	97,51%
	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	26.175.000.000	27.381.688.960	104,61%

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2024, diolah

4.3.5 Dukungan Personil

Untuk mencapai hasil yang diinginkan khususnya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan sumber daya manusia atau personil yang mempunyai kualifikasi pendidikan dan golongan yang sesuai seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel IV. 21
Dukungan Personil SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Bagian/Bidang	Jumlah	L	P	Tingkat Pendidikan					
					SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sekretariat	13	4	9	-	-	2	-	7	4
2	Bina Marga	18	15	3	-	-	3	-	11	4
3	Cipta Karya dan Penataan Ruang	19	14	5	-	-	5	1	13	-
4	Pengairan Sumber Daya Air	18	14	4	-	-	8	-	9	1
5	UPT. Lab UBK	7	7	-	-	-	3	-	4	-
6	Tenaga Honorer	28	22	6	3	2	14	-	9	-
Jumlah		103	76	27	3	2	35	1	53	9

Sumber : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024, diolah

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi pada Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel

dibawah ini

Tabel IV. 22
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumpulan Data	1. Mobilisasi penduduk yang cukup tinggi menyebabkan target jumlah penduduk yang akan dilayani terus mengalami peningkatan yang tidak sejalan dengan peningkatan anggaran operasional dan SDM pengelolanya 2. Kenaikan jumlah penduduk di Kota Tarakan tidak diimbangi dengan ketersediaan pengelolaan air limbah domestik, sehingga masih terdapat beberapa masyarakat yang belum terlayani.	1. Terkait dengan hal ini Dinas Sumber Daya Air akan memperbaiki perencanaan kedepannya untuk dapat merencanakan kebutuhan secara lebih matang 2. koordinasi antar SKPD untuk dapat memaksimalkan melakukan pembangunan SPALD
2.	Perhitungan Kebutuhan	1. Keterbatasan lahan untuk melaksanakan pembangunan SPALD pada kawasan perkotaan. 2. Masih adanya masyarakat yang menolak dilaksanakannya pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Data dukung yang tidak memadai/tersedia	Menggunakan data dukung berdasarkan survei
4	Pelaksanaan	Pompa yang ada tidak mampu mendorong air pada elevasi yang lebih tinggi, sehingga air bersih sulit terdistribusi ke wilayah tersebut. Faktor lainnya yaitu ketidakstabilan daya listrik jika listrik padam selama 1 jam, maka akan menghambat pendistribusian air bersih hingga 4 jam	-

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2024, diolah

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Menurut UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari

permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sementara permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Kawasan permukiman dalam UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. So, perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menerapkan pelayanan dasar sesuai dengan SPM. Berikut jenis-jenis pelayanan dasar pada urusan perumahan rakyat.

Tabel IV. 23
Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM
(1)	(2)	(3)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani
2	Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten /kota	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah an atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni

Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 2024, diolah

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah 100 (seratus persen).

4.4.3 Realisasi

Realisasi dari pelayanan dasar yang dilaksanakan yaitu pada jenis pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota, mampu terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100. Sedangkan untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tidak dapat terealisasi. Hal ini disebabkan, bantuan bagi warga negara korban bencana di Kota Tarakan mendapatkan bantuan berupa sembako ataupun sejumlah uang. Bukan dengan program bantuan penyediaan rumah layak huni.

Tabel IV. 24
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	10	10	100,00
2	Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten /kota	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah an atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	1	1	100,00
Rata-Rata Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat					100,00

Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 2024, diolah

Tercapainya SPM dari Dinas Perumahan Rakyat hingga 100 persen ini lebih dikarenakan pada program dan kegiatan yang ada dan mendukung SPM sudah terencana dengan baik, disertai kecukupan anggaran dan kecukupan personil yang melaksanakan pelayanan.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Dari sisi ketercapaian SPM pada urusan perumahan rakyat telah tercapai, dan realisasi anggrannya pun diatas 90 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 25
Alokasi Anggaran Bidang Perumahan Rakyat

Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	99.999.640	46.889.640	46,89%
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			



Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	40.000.000	39.607.200	99,02%
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	150.000.000	147.368.000	98,25%
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.049.999.850	1.039.083.557	98,96%
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.450.000.000	5.862.922.425	131,75%

Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 2024, diolah

4.4.5 Dukungan Personil

Untuk kelancaran semua kegiatan kedinasan OPD ini diperlukan personil yang handal dan mempunyai kualifikasi pendidikan dan golongan disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Adapun kualifikasi pendidikan dan golongan personil dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel IV. 26
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	Bagian/Bidang	Jumlah	L	P	Tingkat Pendidikan					
					SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sekretariat	13	4	9	-	-	2	-	7	4
2	Bina Marga	18	15	3	-	-	3	-	11	4
3	Cipta Karya dan Penataan Ruang	19	14	5	-	-	5	1	13	-
4	Pengairan Sumber Daya Air	18	14	4	-	-	8	-	9	1
5	UPT. Lab UBK	7	7	-	-	-	3	-	4	-
6	Tenaga Honorer	28	22	6	3	2	14	-	9	-
	Jumlah	103	76	27	3	2	35	1	53	9

Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 2024, diolah

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi pada Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 27
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumpulan Data	Belum tersedianya data primer dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi di Pemerintah Daerah	Perlu adanya dukungan semua stakeholder dalam rencana pembangunan data primer perumahan dan permukiman kota Tarakan
2.	Perhitungan Kebutuhan	Perhitungan Perencanaan kebutuhan perumahan masih berdasarkan data spasial IRK yang dimiliki.	
3.	Perencanaan dan Penganggaran	1. Lamanya proses evaluasi jalan, penataan kegiatan pada SKPD terkait, sehingga memperlambat proses perencanaan 2. Kegiatan yang diikat oleh waktu pelaksanaan 3. Proses perencanaan yang sejalan dengan proses amdal	1. Perlu adanya komitmen dari berbagai stakeholder dan SKPD terkait dengan pembangunan rumah susun 2. Perlu adanya komitmen pemerintah daerah berkaitan dengan kebutuhan dasar warga negara berkaitan dengan perumahan.
4.	Pelaksanaan	Proses pembayaran kepada penyedia tidak sejalan dengan progres dilapangan sehingga menghambat pekerjaan dilapangan dan cashflow penyedia	1. Pengeluaran anggaran harus disesuaikan dengan permohonan /pengajuan dari SKPD dengan telah mempertimbangkan kondisi di lapangan

Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 2024

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penegakan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja merupakan urusan wajib yang terkait pelayanan dasar di daerah, dan telah memiliki Standar Pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal penerapan SPM bidan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dibagi ke dalam 3 (tiga) sub Bidang Urusan yang diatur lebih lanjut melalui :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Bencana Daerah :

- Pelayanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tabel IV. 28
Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM
(1)	(2)	(3)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengaduan yang ditangani

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM
(1)	(2)	(3)
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran alam tingkat waktu tanggap + jumlah layanan pemadaman dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan perangkat daerah

Sumber : Bappeda Kota Tarakan 2024, diolah

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Target Capaian Pencapaian SPM adalah 100 (seratus persen)

4.5.3 Realisasi

Untuk memberikan standar pelayanan minimal mencapai 100 persen perlu dilaksanakan program yang langsung berpengaruh

terhadap pencapaian SPM pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 29
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Yang Harus	Jumlah Yang Terlayani	Capain (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengaduan yang ditangani	821	821	100,00
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	151.159	169.404	89,22
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	151.159	169.404	89,22
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.757	1.757	100,00
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran alam tingkat waktu tanggap + jumlah layanan pemadaman dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan perangkat daerah	35	35	100,00
Rata-Rata Capaian Urusan Kamtibmas					95,68

Sumber : Bappeda Kota Tarakan 2024, diolah

Dari tabel di atas masih ada SPM yang tidak mencapai 100 persen yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang lebih dikarenakan jarak pemukiman penduduk yang belum terjangkau dikarenakan keterbatasan biaya dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang lebih dikarenakan masih ada warga yang tidak bersedia menerima pelayanan ini. Selain itu kedua jenis pelayanan ini tidak didukung alokasi anggaran.

Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencapai 100 persen

No	Bulan	Perda No	Thn	Pelang-garan	No	Bulan	Perda No	Thn	Pelang-garan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Januari	13	2002	28	6	Juni	13	2002	17
		17	2001	15			17	2001	10
		20	2021	6			20	2021	16
		21	2000	1			21	2000	2
2	Februari	13	2002	22	7	Juli	13	2002	16
		17	2001	9			17	2001	13
		20	2021	6			20	2021	24
		21	2000	2			21	2000	1
3	Maret	13	2002	19	8	Agustus	13	2002	61
		17	2001	12			17	2001	13
		20	2021	2			20	2021	0
		21	2000	0			21	2000	0
4	April	13	2002	26	9	September	13	2002	85
		17	2001	14			17	2001	20
		20	2021	2			20	2021	0
		21	2000	0			21	2000	1
5	Mei	13	2002	20	10	Oktober	13	2002	102
		17	2001	17			17	2001	13
		20	2021	5			20	2021	0
		21	2000	0			21	2000	1
6	Juni	13	2002	17	11	November	13	2002	109
		17	2001	10			17	2001	9
		20	2021	16			20	2021	0
		21	2000	2			21	2000	2
7	Juli	13	2002	16	12	Desember	13	2002	82
		17	2001	13			17	2001	9
		20	2021	24			20	2021	5
		21	2000	1			21	2000	0
Total									818

Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana mencapai 89,23 persen

Lokasi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Orang Usia 15-59 Tahun	Capaian (%)
Kota Tarakan	151.159	169.404	89,23

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana mencapai 100 persen

No	Jenis Bencana	Lokasi	Jumlah Korban (Jiwa)	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Longsor	Juata Laut	17	17
		Juata permai	9	9
		Kampung Satu/Skip	36	36
		Sebengkok	13	13
		Gunung Lingkas	22	22
		Pamusian	10	10
		Karang Anyar	40	40
		Karang Balik	10	10
		Juata Kerikil	5	5
		Kampung Enam	13	13
		Kampung Empat	14	14
		Karang Anyar Pantai	6	6
		Karang Harapan	4	4
2	Banjir	Juata kerikil	127	127
		Juata permai	29	29
		Juata Laut	9	9
3	Kebakaran Pemukiman	Pantai Amal	10	10
		Selumit Pantai	858	858
		Karang Anyar	7	7
		Kampung Satu/Skip	11	11
		Karang Anyar Pantai	435	435
		Mamburungan	5	5
		Kampung Satu/Skip	11	11
		Kampung Enam	11	11
		Karang Balik	4	4
		Juata Laut	6	6
		Pamusian	28	28
4	Cuaca ekstrim (Pohon tumbang, Angin Puting Beliung)	Karang Harapan	2	2
		Sebengkok	3	3
5		Kampung Empat	1	1

No	Jenis Bencana	Lokasi	Jumlah Korban (Jiwa)	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pencarian dan Evakuasi orang hilang	Karang Anyar	1	1
JUMLAH			1757	1757

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mencapai 100 persen

No	Bulan	Jumlah Keadian berdasarkan Objek Yang Terbakar			Jumlah Keadian Kebakaran
		Rumah / Bangunan	Lahan / Hutan	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Januari	2	0	0	2
2	Februari	2	1	2	5
3	Maret	0	1	0	1
4	April	4	0	0	4
5	Mei	3	0	0	3
6	Juni	3	0	0	3
7	Juli	2	0	1	3
8	Agustus	6	2	0	8
9	September	2	0	0	2
10	Oktober	1	0	2	3
11	Nopember	0	0	0	0
12	Desember	1	0	0	1
Jumlah		26	4	5	35

4.5.4 Alokasi Anggaran

Program dan kegiatan pendukung SPM pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP dan PMK. Masing-masing program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut.



1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel IV. 30
Alokasi Anggaran pada Layanan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	29.979.400	7.919.400	26,42%
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	19.980.120	15.808.787	79,12%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.996.330	4.996.000	99,99%
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.980.000	4.980.000	100,00%
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	103.739.165	95.220.000	91,79%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15.981.100	14.581.100	91,24%
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	49.994.336	59.424.000	118,86%
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	99.995.808	84.865.808	84,87%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2024, diolah

Semua alokasi anggaran diatas dikhususkan pada penyelesaian program dan kegiatan utama BPBD yang berdampak langsung pada penanggulangan kebencanaan, dan hanya berdampak tidak langsung terhadap peningkatan SPM BPBD.



2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Tabel IV. 31
Alokasi Anggaran pada Layanan
Informasi Rawan Bencana

Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	9.988.440	9.988.440	100,00%
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	18.697.110	18.643.500	99,71%
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	21.600.000	16.500.000	76,39%
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	18.990.000	10.000.000	52,66%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	6.000.000	6.200.000	103,33%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024, diolah

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Tabel IV. 32
Alokasi Anggaran pada Layanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	18.990.000	10.000.000	52,66%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	6.000.000	6.200.000	103,33%

Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024, diolah

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel IV. 33
Alokasi Anggaran pada Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3.000.000	3.000.000	100,00%
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12.804.801	12.802.722	99,98%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024, diolah

Pada pengalokasian anggran pada SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang capaiannya 100 persen, semua yang masyarakat yang membutuhkan pelayanan telah terlayani sepenuhnya, meskipun anggaran tidak terserap sepenuhnya dan bahkan ada yang tidak diserap sama sekali, mengingat anggaran dikeluarkan apabila kegiatan dilaksanakan atau dapat dikatakan pada sub kegiatan ini terjadi efesiensi anggaran.

5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Tabel IV. 34
Alokasi Anggaran pada Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.980.000	21.960.000	43,94%
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,	14.945.514	17.027.501	113,93%

Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
	Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2024, diolah

Pengalokasian anggaran sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, khususnya untuk SPM Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota karena pada saat dilakukan evakuasi ada beberapa yang melakukan evakuasi dengan inisiatif sendiri tanpa menunggu evakuasi pada BPBD yang menyebabkan efisensi anggaran dan SPM tidak mencapai 100 persen.

4.5.5 Dukungan Personil

Untuk mencapai hasil yang diinginkan khususnya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan sumber daya manusia atau personil yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel IV. 35
Dukungan Personil Urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Bgn / Bdg	Jlh ASN	Jlh Non ASN	L	P	Tingkat Pendidikan					
						SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	SEKRETARIAT	6	0	2	4	0	0	0	0	6	2
2	Bidang Pemadam Kebakaran	9	0	2	6	0	0	1	1	6	0
3	Bidang Tramibum	8	0	5	3	0	0	1	0	6	2
4	Bidang Perundang-undangan	0	2	1	1	0	2	4	0	9	1
5	Kelompok Jabatan Fungsional	15	0	2	1	0	0	4	0	9	0
	TOTAL	25	19	13	26	1	4	6	1	29	5

Sumber: Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum, 2024

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi pada Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:

Tabel IV. 36
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumpulan Data	Tim Penerapan SPM Daerah Kota Tarakan belum mengoordinasikan rencana aksi Penerpaan SPM dalam bentuk Peraturan Walikota, mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik, mengoordinasikan pemantuan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/ kota dan melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat.	1. Tim Penerapan SPM Daerah Kota Tarakan agar menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimtek Penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2.	Perhitungan Kebutuhan		
3.	Perencanaan dan Penganggaran		
4.	Pelaksanaan		

Sumber : Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 2024, diolah

4.6 Urusan Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial pada tahun 2023 di Kota Tarakan dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Tingkat Provinsi terdiri atas :

- Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar

Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;

- d. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
- e. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi;
- f. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota;

Sedangkan untuk Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.

Tabel IV. 37
Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM
(1)	(2)	(3)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantirehabilitasi sosial
2	Rehabilitasi Sosial Anak terlantar di luar Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantsosial diluar panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM
(1)	(2)	(3)
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan Paska Bencana bagi Korban	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran

Sumber : Dinas Sosial 2024, diolah

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target yang ditentukan terhadap Standar Pelayanan Minimal oleh Kota Tarkan terhadap dinas sosial adalah 100 persen.

4.6.3 Realisasi

Realisasi SPM tercapai sesuai target yang ditentukan yaitu pada pelayanan dasar kegiatan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dengan indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota. Realisasi capaian sebesar 100.

Tabel IV. 38
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capain (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis diluar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	66	66	100,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capain (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	543	543	100,00
Rata-Rata Capain Urusan Sosial					

Sumber : Dinas Sosial 2024, diolah, diolah

Tercapainya SPM dinas sosial dengan capain 100 persen lebih dikarenakan semua SPM didukung dengan alokasi anggaran dinas sosial sehingga kegiatan benar-benar difokuskan pada pemenuhan pelayanan SPM, disamping itu kecukupan tenaga personil juga mendukung tercapainya SPM ini.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada layanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis diluar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

Tabel IV. 39
Alokasi Anggaran pada Bidang Sosial

	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
1	Penyediaan Permakanan	29.370.000	12.270.000	41,78%
2	Penyediaan Sandang	11.000.000	10.994.000	99,95%
3	Penyediaan Alat Bantu	49.803.900	36.600.000	73,49%
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	29.979.360	6.781.400	22,62%
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.984.220	7.500.000	75,12%
6	Pemberian Layanan Kedaruratan	14.048.392	12.388.500	88,18%
7	Pemberian Layanan Rujukan	5.333.000	3.729.000	69,92%

Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	39.549.364	34.162.000	86,38%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	49.999.795	49.383.230	98,77%
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	15.499.680	11.700.000	75,49%
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	19.987.625	19.040.000	95,26%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
1	Penyediaan Makanan	50.000.000	42.669.000	85,34%

4.6.5 Dukungan Personil

Untuk mencapai hasil yang diinginkan khususnya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan sumber daya manusia atau personil yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel IV. 40
Dukungan Personil Bidang Sosial

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Pegawai :	28	36	64
	a.PNS	10	13	23
	b.Honor Kontrak	18	23	41
2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :	10	13	23
	a. Golongan IV	3	2	5
	b. Golongan III	7	10	17
	c. Golongan II	-	1	1
	d. Golongan I	-	-	-
3.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :	7	4	11
	a. Kepala Dinas	1	-	1
	b. Sekretaris	-	1	1
	c. Kepala Bidang	1	1	2
	d. Kepala Sub Bagian	2	-	2

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	e. Kepala Seksi	3	2	5
	f. Kepala UPT	-	-	-
4	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :	10	13	23
	a. S2	3	1	4
	b. SI	5	9	13
	c. D3	-	2	2
	d. SLTA	2	1	3
	e. SLTP	-	-	-
5	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan	5	4	9
	a. Diklat Pim II	1	-	1
	b. Spama/Diklat Pim III	1	2	3
	c. Adum/Adumla/Diklat PIM IV	3	2	5

Sumber: Dinas Sosial, 2024

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 41
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Sosial

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumpulan Data	Angka target jumlah yang harus dilayani merupakan angka hasil pendataan sementara dan diperlukan tindak lanjut untuk kemudian dilakukan pemutakhiran atau penetapan penerima	Tim Penerapan SPM Daerah Kota Tarakan agar menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimtek Penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2.	Perhitungan Kebutuhan	Kebutuhan untuk pelayanan dasar urusan sosial dapat dihitung dengan cukup baik karena didasarkan pada realisasi/capaian n-1 yang dijadikan proyeksi tahun berikutnya	
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Dalam penentuan target	
4.	Pelaksanaan	pelaksanaan bimbingan sosial kepada masyarakat masih minim terkendala SDM	

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Lain-lain	item pada tiap output dan outcome tidak disertai dengan definisi operasional sehingga penuangan data yang SKPD miliki dengan yang harus diisikan pada laporan seringkali menemui ketidaksesuaian	

Sumber: Dinas Sosial, 2024

4.7 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 42
Program Dan Kegiatan Bidang Urusan Masing-masing SPM

No	Bidang Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah
					Pengadaan Perlengkapan Siswa
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

No	Bidang Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
					Pembangunan Laboratorium
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Pengadaan Mebel Sekolah
					Pengadaan Perlengkapan Siswa
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama



No	Bidang Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
					Pengelolaan Dana BOP PAUD
2	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Ibu	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir



No	Bidang Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pelayanan Kesehatan Balita		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
			Pelayanan Kesehatan Orang		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis



No	Bidang Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>Terduga Tuberkolusis</p> <p>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)</p>		<p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</p>
3	Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<p>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</p> <p>Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan</p> <p>Jaringan Distribusi Air Minum</p> <p>Pemindahan IPA 60 l/det Persemaian ke Embung Bengawan dan Jaringan Distribusi (MY)</p> <p>Pemindahan IPA 30 l/det Persemaian ke Embung Indulung dan Jaringan Distribusi (MY)</p>



No	Bidang Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (Kelurahan Pantai Amal)(Dana Dak)
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (Kelurahan Mamburungan)(Dana Dak)
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
					Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
4	Perumahan Dan Permukiman Rakyat	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
				Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun



No	Bidang Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas umum (PSU)	Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten /kota	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
5	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia



No	Bidang Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
					Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota



No	Bidang Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
					Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
					Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
					Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
					Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran



No	Bidang Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
					Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
6	Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti 2. Rehabilitasi Sosial Anak terlantar di luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan Penyediaan Alat Bantu Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial



No	Bidang Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengemis di luar Panti	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		Program penanganan Bencana	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan

Sumber: Bagian Tapem, Setda 2024



BAB V **PENUTUP**

V. BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Substansi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tarakan mencakup data profil daerah, perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sumber data dan informasi utama dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah yang hasilnya disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai umpan balik dalam meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah.

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tarakan Tahun 2023 mencapai kinerja baik. Namun demikian perlu disadari pula bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal.

Diharapkan Pemerintah mempertimbangkan dan menguji kembali Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan disusun pada tahun selanjutnya sehingga tidak ada lagi Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tidak didapatkan informasi. Kekurangan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga tidak terlepas dari berbagai keterbatasan Pemerintah Daerah, baik dalam aspek sumber

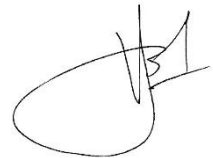
daya manusia, sarana prasarana, regulasi maupun anggaran.

Meskipun demikian, dengan segala kekurangan dan hambatan tersebut Pemerintah Kota Tarakan mampu menunjukkan hasil kinerjanya yaitu dengan memperoleh capaian penyelenggaraan pemerintahan dengan predikat baik pada tahun sebelumnya. Perolehan tersebut tidak lepas dari hasil kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan support dan partisipasi konstruktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Tarakan.

Adapun efisiensi penyelenggaraan pemerintahan terhadap pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan diraihnya predikat WTP atas LKPD Tahun 2023.

Demikian Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya serta Laporan ini dapat menjadi referensi sekaligus bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Tarakan kedepannya yang lebih baik.

Tarakan, Maret 2024



**Wali Kota Tarakan
dr. H. Khairul M. Kes**